

BUKU 1



BUPATI BIREUEN

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN**



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 93);
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2013 Nomor 36, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 79);
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67 Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 659);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Rencana Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bireuen untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bireuen untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renja-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) RKPK Bireuen Tahun 2024 yaitu Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPK Bireuen Tahun 2023-2026 yang disusun berdasarkan usulan-usulan program dan kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023.
- (2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

- (1) Sistematika Penyusunan RKPK Bireuen Tahun 2024 sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bireuen
 - BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Kabupaten Bireuen
 - BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen
 - BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Kabupaten Bireuen
 - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Bireuen
 - BAB VII : Penutup
- (2) RKPK Kabupaten Bireuen Tahun 2024 memuat Matrik Rencana Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif pendanaan dan Perangkat Daerah pelaksana menurut bidang urusan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2024.

Pasal 4

Uraian secara rinci RKPK sebagaimana dimaksud pada pasal (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 10 Juli 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

BRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 731

DAFTAR ISI

2.1.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah	II-48
2.1.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup	II-48
2.1.2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-49
2.1.2.2.5. Angka Melek Huruf	II-52
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-52
2.1.2.3.1 Seni Budaya	II-52
2.1.2.3.2 Olahraga	II-53
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-54
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-54
2.1.3.1.1. Layanan Urusan Wajib Dasar	II-54
A. Pendidikan.....	II-54
B. Kesehatan.....	II-60
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-71
D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-78
E. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-80
F. Urusan Sosial.	II-82
2.1.3.1.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-84
A. Tenaga Kerja	II-84
B. Pangan	II-85
C. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-88
D. Pertanahan	II-94
E. Lingkungan Hidup	II-95
F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-102
G. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	II-102
H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-105
I. Perhubungan	II-106
J. Komunikasi, Statistik dan Informatika	II-107
K. Persandian	II-109
L. Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Kecil Menengah.....	II-110
M. Penanaman Modal	II-112
N. Kepemudaan dan Olahraga	II-114
O. Kebudayaan.....	II-115
P. Perpustakaan	II-116

Q. Kearsipan.....	II-118
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-118
2.1.3.2.1. Kelautan dan Perikanan.....	II-118
2.1.3.2.2. Pariwisata.....	II-122
2.1.3.2.3. Pertanian.....	II-123
2.1.3.2.4. Perdagangan.....	II-131
2.1.3.2.5. Perindustrian.....	II-134
2.1.3.2.6. Transmigrasi.....	II-135
2.1.3.3. Penunjang Urusan.....	II-136
2.1.3.3.1. Perencanaan.....	II-136
2.1.3.3.2. Keuangan.....	II-138
2.1.3.3.4. Kepegawaian.....	II-139
2.3.1.3.5. Kelitbangan.....	II-140
2.3.1.3.6. Pengawasan.....	II-140
2.3.1.3.7. Sekretariat Daerah.....	II-141
2.3.1.3.8. Sekretariat Dewan.....	II-142
2.3.1.3.9. Kecamatan.....	II-143
2.3.1.3.10. Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II-143
2.1.3.4. Fokus Layanan Keistimewaan Aceh.....	II-144
2.1.3.4.1. Pelaksanaan Syariat Islam.....	II-144
2.1.3.4.2. Pendidikan Dayah.....	II-145
2.1.3.4.3. Peningkatan Peran Ulama.....	II-146
2.1.3.4.4. Pendidikan Aceh.....	II-147
2.1.3.4.5. Baitul Mal.....	II-148
2.1.3.4.6. Pelestarian Adat Aceh.....	II-149
2.1.2 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-150
2.1.4.1. Indeks Daya Saing Daerah.....	II-150
2.1.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-151
2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-153
2.1.4.3.1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.....	II-153
2.1.4.3.2. Ketersediaan Air Bersih.....	II-154
2.1.4.3.3. Ketersediaan Listrik.....	II-155
2.1.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-156
2.1.4.4.1. Perizinan.....	II-156
2.1.4.3.2. Keamanan dan Ketertiban.....	II-158
2.1.4.6. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-158
2.1.4.6.1. Tingkat Ketergantungan.....	II-159
2.1.4.6.2. Ketenagakerjaan.....	II-159

2.2	Evaluasi Pelaksanaan Indikator Program dan Kegiatan RKPK Tahun 2022 pada RPJMK periode sebelumnya	II-160
2.2.1	Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2022	II-160
2.2.2	Evaluasi Terhadap Pendapatan Daerah.....	II-179
2.2.3	Evaluasi Pelaksanaan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022.....	II-180
2.2.4	Evaluasi Hasil Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	II-189
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-195
2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.....	II-196
2.3.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi.....	II-196
2.3.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-196
2.3.1.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-197
2.3.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-205
2.3.2	Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	II-205
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KABUPATEN BIREUEN		III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi	III-1
3.1.1	Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional	III-1
3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Aceh.....	III-3
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bireuen	III-5
3.1.3.1	Pertumbuhan Ekonomi	III-5
3.1.3.2	Inflasi	III-9
3.1.3.3	Persentase Kemiskinan dan kemiskinan Ekstrim	III-10
3.1.3.4	Indeks Gini.....	III-12
3.1.3.5	Tingkat Pengangguran	III-13
3.1.4	Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Bireuen.....	III-15
3.1.4.1	Tantangan Perekonomian Kabupaten Bireuen	III-15
3.1.4.2	Prospek Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2024.....	III-21
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Bireuen	III-23
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Kabupaten Bireuen	III-26
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Kabupaten Bireuen.....	III-30
3.2.3	Arah Kebijakan Kebijakan Pembiayaan Kabupaten Bireuen.....	III-35
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN		IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-1

4.1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh.....	IV-5
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bireuen	IV-8
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-12
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional.....	IV-12
4.2.2	Prioritas Pembangunan Aceh.....	IV-19
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen	IV-30
4.2.4	Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional, Perioritas Pembangunan Aceh dan Prioritas Kabupaten Bireuen	IV-47
4.3	Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-48
4.4	Pemenuhan SPM	IV-52
4.5	Pembangunan Rendah Karbon.....	IV-55
4.6	Inovasi kabupaten Bireuen.....	IV-56
4.6.1	Pelaksanaan Inovasi.....	IV-56
BAB V	RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN	V-1
5.1	Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Prioritas Nasional	V-1
5.2	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024.....	V-23
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kelerengan di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Wilayah Kecamatan.....	II-3
Tabel 2.2	Kondisi Ketinggian di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Wilayah Kecamatan.....	II-4
Tabel 2.3	Sebaran Jenis Batuan Berdasarkan Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bireuen.....	II-7
Tabel 2.4	Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen.....	II-9
Tabel 2.5	Kondisi Hidrologi Kabupaten Bireuen.....	II-12
Tabel 2.6	Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen.....	II-15
Tabel 2.7	Perbandingan Data ATR/BPN Sebelum dengan Sesudah Dilakukan Inventarisasi dan Identifikasi Tahun 2019.....	II-17
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-24
Tabel 2.9	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-25
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022 Kabupaten Bireuen	II-25
Tabel 2.11	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Bireuen.....	II-27
Tabel 2.12	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022 Atas Dasar Harga Berlaku (milyar rupiah) Kabupaten Bireuen.....	II-29
Tabel 2.13	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Bireuen.....	II-31
Tabel 2.14	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Bireuen	II-32
Tabel 2.15	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-34
Tabel 2.16	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Tahun 2018 s.d. 2022 Kabupaten Bireuen	II-35
Tabel 2.17	Indeks Gini Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional.....	II-36
Tabel 2.18	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional.....	II-37
Tabel 2.19	Statistik Penduduk Miskin Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen....	II-39
Tabel 2.20	Perbandingan Statistik Penduduk Miskin Tahun 2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional	II-39

Tabel 2.21	Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional	II-40
Tabel 2.22	Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional	II-41
Tabel 2.23	Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2021 s.d 2022 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh.....	II-42
Tabel 2.24	Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2021 s.d 2022 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (ribuan jiwa).....	II-43
Tabel 2.25	Jumlah Penduduk Berumur 15 Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 Kabupaten Bireuen	II-45
Tabel 2.26	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2022 Kabupaten Bireuen	II-45
Tabel 2.27	Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen....	II-46
Tabel 2.28	Perkembangan Persentase TPT Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional.....	II-46
Tabel 2.29	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional	II-47
Tabel 2.30	Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional	II-48
Tabel 2.31	Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2018-2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional.....	II-49
Tabel 2.32	Indeks Pembangunan Manusia di Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional.....	II-50
Tabel 2.33	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh	II-51
Tabel 2.34	Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-53
Tabel 2.35	Perkembangan Olahraga Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-54
Tabel 2.36	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2018 s.d. 2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional	II-55
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional.....	II-56
Tabel 2.38	Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional.....	II-57
Tabel 2.39	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-58
Tabel 2.40	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan Tahun 2022 Kabupaten Bireuen	II-59

Tabel 2.41	Jumlah Guru Bersertifikasi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen..	II-60
Tabel 2.42	Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-61
Tabel 2.43	Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-62
Tabel 2.44	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR),BBLR Dirujuk, Dan Bergizi Buruk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-64
Tabel 2.45	Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen	II-67
Tabel 2.46	Skor IKM RSUD Dr. Fauziah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-68
Tabel 2.47	Status Akreditasi Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.....	II-68
Tabel 2.48	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-69
Tabel 2.49	Sarana Sediaan Farmasi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-70
Tabel 2.50	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-71
Tabel 2.51	Proporsi Panjang dalam Kondisi Mantap Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional	II-72
Tabel 2.52	Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kabupaten Bireuen Tahun 2021..	II-73
Tabel 2.53	Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Bireuen Tahun 2021.....	II-74
Tabel 2.54	Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021.....	II-79
Tabel 2.55	Rasio Jumlah Satpol PP dan WH Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-81
Tabel 2.56	Cakupan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-82
Tabel 2.57	Cakupan Pelayanan Bidang Sosial Tahun 2018 s.d 2022n Kabupaten Bireuen	II-83
Tabel 2.58	Jumlah Total Sarana Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2018 s.d 2022.....	II-84
Tabel 2.59	Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen ...	II-84
Tabel 2.60	Data Desa Rawan Pangan Tahun 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-85
Tabel 2.61	Jumlah KWT Aktif Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-86
Tabel 2.62	Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.	II-88
Tabel 2.63	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2018 s.d 2022.....	II-89
Tabel 2.64	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-91

Tabel 2.65	Kasus KDRT Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-92
Tabel 2.66	Data Kabupaten layak anak dan Gampong Layak anak Tahun 2020 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-93
Tabel 2.67	Cakupan Pelayanan Bidang Pertanahan Tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen	II-94
Tabel 2.68	Sarana dan Prasarana Persampahan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-97
Tabel 2.69	Luas RTH Tahun 2017 s.d 2021 di Kabupaten Bireuen	II-98
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-98
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-99
Tabel 2.72	Jumlah Kampung Iklim Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-100
Tabel 2.73	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-100
Tabel 2.74	Kejadian Bencana dan Penanganan Tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen	II-101
Tabel 2.75	Jumlah KTP dan Akte yang di Terbitkan Tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen	II-102
Tabel 2.76	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-103
Tabel 2.77	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-103
Tabel 2.78	Persentase Posyandu Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-104
Tabel 2.79	Status Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-105
Tabel 2.80	Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Tahun 2018-2022 Kabupaten Bireuen	II-106
Tabel 2.81	Arus Penumpang Angkutan Umum dan Prasarana Transportasi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-106
Tabel 2.82	Hasil Penilaian Indeks SPBE Provinsi Aceh Tahun 2021 s.d 2022.....	II-109
Tabel 2.83	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen...	II-110
Tabel 2.84	Capaian Pembinaan Koperasi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-111
Tabel 2.85	Capaian Pembinaan UMKM Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.	II-111
Tabel 2.86	Jumlah Perusahaan yang Mendaftar Menurut Bentuk Badan Hukum Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-113

Tabel 2.87	Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen	II-114
Tabel 2.88	Sarana Olahraga Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-114
Tabel 2.89	Capaian Prestasi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-115
Tabel 2.90	Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-116
Tabel 2.91	Capaian Kinerja Perpustakaan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-117
Tabel 2.92	Capaian Pembangunan Bidang Arsip Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-118
Tabel 2.93	Produksi Perikanan Budidaya dan Sarana Pendukung Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-119
Tabel 2.94	Data Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Kawasan Minapolitan Tahun 2018-2022 di Kabupaten Bireuen	II-120
Tabel 2.95	Jumlah Nelayan, Perahu, PPI dan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-120
Tabel 2.96	Konsumsi Ikan Perkapita Tahun 2018 s.d. 2022 Kabupaten Bireuen...	II-121
Tabel 2.97	Produksi Padi dan Bahan Pangan Utama lainnya Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-123
Tabel 2.98	Produksi padi dan bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.....	II-124
Tabel 2.99	Produksi Tanaman Perkebunan Utama Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-125
Tabel 2.100	Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-125
Tabel 2.101	Sarana Prasarana Pendukung Usaha Peternakan Tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen.....	II-126
Tabel 2.102	Penanganan Penyakit Hewan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-127
Tabel 2.103	Populasi Ternak Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-127
Tabel 2.104	Produksi Hasil Perternakan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen..	II-128
Tabel 2.105	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-130
Tabel 2.106	Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-130
Tabel 2.107	Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-132
Tabel 2.108	Perkembangan Potensi dan Jumlah UTTP yang ditera Ulang Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-133
Tabel 2.109	Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-134

Tabel 2.110	Perkembangan PDRB Sektor Sektor Industri Pengolahan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-135
Tabel 2.111	Capaian Indikator Transmigrasi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-136
Tabel 2.112	Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen....	II-138
Tabel 2.113	Kondisi Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-139
Tabel 2.114	Kinerja Pengawasan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-141
Tabel 2.115	Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen....	II-141
Tabel 2.116	Jumlah Qanun yang disahkan Tahun 2018-2022 Kabupaten Bireuen....	II-142
Tabel 2.117	Kinerja Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-143
Tabel 2.118	Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-145
Tabel 2.119	Jumlah Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-146
Tabel 2.120	Capaian Peningkatan Peran Ulama Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-147
Tabel 2.121	Capaian Pendidikan Aceh Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen ...	II-148
Tabel 2.122	Rekapitulasi Penerimaan dan Realisasi Zakat dan Infaq Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-149
Tabel 2.123	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan Tahun 2017-2021 Kabupaten Bireuen	II-152
Tabel 2.124	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-153
Tabel 2.125	Pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-154
Tabel 2.126	Pengguna Listrik di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021.....	II-155
Tabel 2.127	Jenis-Jenis Perizinan dan Lama Proses Pembuatan Tahun 2018-2022 Kabupaten Bireuen.....	II-156
Tabel 2.128	Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenis Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-158
Tabel 2.129	Jumlah Penduduk Dengan Pendidikan Tertinggi Tahun 2021 di Kabupaten Bireuen.....	II-160
Tabel 2.130	Kriteria Kinerja.....	II-160
Tabel 2.131	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada SKPK Semester II Tahun 2022.....	II-161

Tabel 2.132	Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen Tahun 2022.....	II-164
Tabel 2.133	Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kab. Bireuen Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMK Bireuen 2017-2022	II-165
Tabel 2.134	Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kab. Bireuen Terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJM K Bireuen 2017-2022	II-169
Tabel 2.135	Capaian Kinerja dan Keuangan Semester II Tahun 2022.....	II-179
Tabel 2.136	Evaluasi RKPK Triwulan IV Tahun 2022	II-180
Tabel 2.137	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	II-181
Tabel 2.138	Capaian SPM Dinas Kesehatan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-182
Tabel 2.139	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2028 s.d 2022 Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	II-185
Tabel 2.140	Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-186
Tabel 2.141	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 S.D 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-186
Tabel 2.142	Capaian SPM bidang Urusan Sosial Tahun 2022 Kabupaten Bireuen...	II-188
Tabel 2.143	Keterkaitan Prioritas, Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan...	II-215
Tabel 3.1	Capaian dan Proyeksi Laju Inflasi Tahun 2018 s.d 2023 Kabupaten Bireuen.....	III-10
Tabel 3.2	Capaian dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Tahun 2018 s.d 2023 Kabupaten Bireuen	III-11
Tabel 3.3	Capaian dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 s.d 2024 Kabupaten Bireuen.....	III-13
Tabel 3.4	Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.	III-15
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Indikator Pembangunan Ekonomi Tahun 2022 s.d 2024 Kabupaten Bireuen.....	III-20
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2020 s.d Tahun 2024 Kabupaten Bireuen	III-28
Tabel 3.7	Realisasi TJSLP Tahun 2021 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen.....	III-29
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Bireuen	III-31
Tabel 3.9	Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s.d 2024 Kabupaten Bireuen.....	III-36
Tabel 3.10	Ringkasan Akun Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024.....	III-37

Tabel 4.1	Matriks Konsistensi Hubungan Tujuan dan Sasaran.....	IV-9
Tabel 4.2	Program prioritas Nasional (Major Project) Tahun 2024.....	IV-13
Tabel 4.3	Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bireuen dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024	IV-15
Tabel 4.4	Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bireuen dengan Sasaran Aceh dalam RKPA 2024.....	IV-21
Tabel 4.5	Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024.....	IV-34
Tabel 4.6	Pokok-Pokok Pikiran DRPD Kabupaten Bireuen Tahun 2024.....	IV-49
Tabel 4.7	Target Capaian SPM Tahun 2024.....	IV-52
Tabel 4.8	Daftar SKPK yang Menginput Lomba Inovasi Daerah Tahun 2022...	IV-58
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bireuen Tahun 2024.....	VI-1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bireuen Tahun 2023.....	VI-2
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023.....	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Tiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan.....	I-6
Gambar 2.1	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen	II-2
Gambar 2.2	Peta Ketinggian di Kabupaten Bireuen.....	II-4
Gambar 2.3	Peta Geologi di Kabupaten Bireuen.....	II-6
Gambar 2.4	Peta Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen.....	II-9
Gambar 2.5	Peta Hidrologi di Kabupaten Bireuen.....	II-12
Gambar 2.6	Peta Curah Hujan di Kabupaten Bireuen.....	II-13
Gambar 2.7	Jumlah Intensitas Curah Hujan Berdasarkan Bulan di Kabupaten Bireuen	II-13
Gambar 2.8	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen.....	II-14
Gambar 2.9	PDRB ADHK dan ADHB Kabupatiyaen Bireuen Tahun 2018-2022	II-30
Gambar 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 s.d 2022.....	II-31
Gambar 2.11	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-38
Gambar 2.12	Angka Melek Huruf Tahun 2018-2022 Kabupaten Bireuen.....	II-52
Gambar 2.13	Perkembangan Prevalensi Stunting Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-65
Gambar 2.14	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2018 s.d. 2022 Kabupaten Bireuen.....	II-75
Gambar 2.15	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Bireuen Tahun 2018 s.d 2022.....	II-76
Gambar 2.16	Jumlah Rumah Sehat dan Rumah Layak Huni Kabupaten Bireuen Tahun 2018 s.d 2022.....	II-78
Gambar 2.17	Volume Sampah Tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen.....	II-96
Gambar 2.18	Tempat Pembuangan Akhir Blang Beururu.....	II-96
Gambar 2.19	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.....	II-108
Gambar 2.20	Realisasi Investasi Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2022	II-113
Gambar 2.21	Jumlah Destinasi Wisata Tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen.....	II-122
Gambar 2.22	Kondisi Pasar Tahun 2022 di Kabupaten Bireuen.....	II-131
Gambar 2.23	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Tahun 2017 s.d 2021 di Kabupaten Bireuen.....	II-132
Gambar 2.24	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam tahun 2017 s.d 2021 Kabupaten Bireuen	II-145

Gambar 2.25	Perbandingan Skor Penilaian Pilar IDSD Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen Tahun 2022.....	II-150
Gambar 2.26	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Bireuen (juta rupiah) Tahun 2018 s.d 2022.....	II-152
Gambar 2.27	Rasio Ketergantungan Tahun 2018 s. d 2022 Kabupaten Bireuen ...	II-159
Gambar 3.1	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran Aceh Triwulan I Tahun 2023.....	III-4
Gambar 3.2	Capaian dan Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 s.d 2024 Kabupaten Bireuen.....	III-5
Gambar 3.3	Struktur Ekonomi Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen	III-6
Gambar 3.4	Capaian dan Target Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB Tahun 2018 s.d 2024 Kabupaten Bireuen.....	III-7
Gambar 3.5	Capaian dan Proyeksi Nilai PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2018 s.d 2024 Kabupaten Bireuen	III-9
Gambar 3.6	Capaian dan Proyeksi Indeks Gini Tahun 2018 s.d 2024 Kabupaten Bireuen.....	III-13
Gambar 3.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	III-14
Gambar 3.8	TPT Laki-laki dan Perempuan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen.....	III-17
Gambar 4.1	Indikator dan Target Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024...	IV-5
Gambar 4.2	Target Indikator Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2024.....	IV-7
Gambar 4.3	Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.....	IV-12
Gambar 4.4	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	IV-13
Gambar 4.5	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen.....	IV-47

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melaksanakan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023-2026 sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Penyusunan RKPK menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RKPK dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRK. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari gampong, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPK Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023-2026 serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional tahun 2024 yang ditetapkan oleh pemerintah serta RKPA Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan

pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Bireuen, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebagian menunjukkan perbaikan. IPM Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebesar 73,16 lebih tinggi dari IPM Aceh sebesar 72,8 dan IPM Nasional sebesar 72,91. Ketimpangan pendapatan yang tergambar dari Indeks Gini Kabupaten Bireuen mencapai 0,275 lebih baik dari Indeks Gini Aceh sebesar 0,311 dan Indeks Gini Nasional sebesar 0,384. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bireuen mencapai 4,2 lebih baik dari TPT Aceh sebesar 6,17 persen dan TPT Nasional sebesar 5,86 persen. Angka kemiskinan Kabupaten Bireuen sebesar 12,51 lebih baik dari angka kemiskinan Aceh sebesar 14,64 persen namun masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,54 persen. Upaya penurunan angka kemiskinan perlu menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah agar selanjutnya bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen 4,31 persen lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Aceh (4,21 persen) namun masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional (5,31 persen).

Tahapan penyusunan RKPK Bireuen Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan RKPK Tahun 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Surat Keputusan Bupati Bireuen tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 651 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022.
2. Selanjutnya pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Gampong bulan Desember pada tahun 2022.
3. Penyusunan Rancangan Awal RKPK/Renja 1 Desember 2022-31 Januari 2023.
4. Penginputan hasil musrenbang desa di SIPD-RI pada tanggal 6 Februari 2023 s.d 2 Maret 2023.
5. Musrenbang Kecamatan pada tanggal 13-27 Februari 2022 di 17 kecamatan.
6. Penginputan Pokir/reses DPRK di SIPD-RI mulai tanggal 6 s.d 28 Februari 2023.
7. Konsultasi publik Rancangan Awal RKPK dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023 di Aula Bappeda Kabupaten Bireuen.

8. Surat Edaran Bupati tentang Penyempurnaan Rancangan Awal RKPK/Renja Nomor 000.7.2.4/187/2023 tanggal 20 Februari 2023.
9. Penyusunan Rancangan RKPK/Renja 8 Maret-24 Mei 2023.
10. Forum Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pada tanggal 6 s.d 8 Maret 2023.
11. Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023 di Aula Hotel Fajar Kabupaten Bireuen yang melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten, Bappeda Aceh, instansi vertikal, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat dan tokoh agama.
12. Reviu APIP terhadap rancangan RKPK Bireuen Tahun 2024 selesai tanggal 17 Mei s.d 08 Juni 2023.
13. Perbaikan hasil reviu APIP dilaksanakan pada tanggal awal Juni 2023.
14. Fasilitasi RKPK dengan Bappeda Provinsi tanggal 23 Juni 2023.
15. Penyempurnaan RKPK hasil fasilitasi 23 s.d 9 Juli 2023.
16. Penetapan RKPK tanggal 10 Juli 2023.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat, maka perlu dukungan melalui proporsi pendanaan yang signifikan dengan tetap mempertimbangkan permasalahan utama pembangunan Kabupaten Bireuen. Dengan demikian, proporsi belanja daerah tidak hanya dititikberatkan pada program-program terkait dengan pendidikan formal, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesehatan, kualitas tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan dan kualitas infrastruktur guna menunjang perekonomian, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan usaha produktif berbasis gampong. Terkait dengan hal tersebut, RKPK Bireuen Tahun 2024 merupakan upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran RPK Bireuen 2023-2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

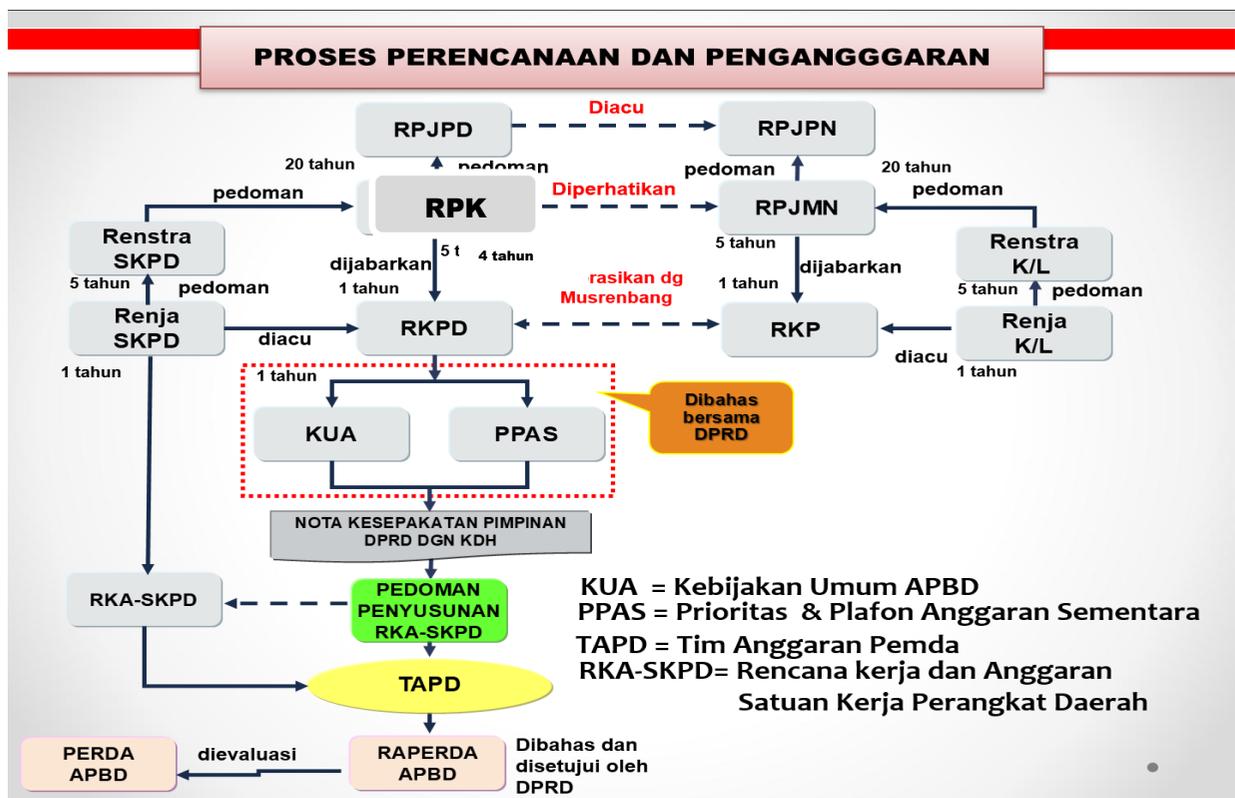
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
24. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012 - 2032;
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024;
27. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2032;
28. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025;
29. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
30. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan hierarki perencanaan pembangunan daerah dengan kewenangannya. Sehingga dapat dilihat keterkaitan antar dokumen sebagai berikut:



Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Tiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan

a. Hubungan RPKPD dengan RKP dan RKA

RPKPD Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan RKP dan RKA Tahun 2024 yang meliputi: sasaran, indikator, arah kebijakan, prioritas, program prioritas pembangunan dan target indikator kinerja urusan.

b. Hubungan RPKPD dengan RPK

RPKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPK Tahun 2023-2026 yang meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja dan target kinerja.

c. Hubungan RPKPD dengan Renja SKPK

RPKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi SKPK dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPK Tahun 2024. Keselarasan dan konsistensi antara kedua dokumen ini meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif Tahun 2024.

d. Hubungan RPKPD dengan KUA PPAS dan R-APBK

RPKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Tahun 2024. Keterkaitan antar dokumen ini mencakup penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam rancangan KUA PPAS dan R-APBK Tahun 2024 dengan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang terdapat dalam RPKPD Tahun 2024.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPK Bireuen Tahun 2024 adalah

1. Untuk mengetahui rencana kerja pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen tahun 2024.
2. Agar dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan serta memberikan arah dan sekaligus tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RKPK Bireuen Tahun 2024 adalah:

1. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun 2024;
3. Menjadi acuan bagi seluruh Badan/Dinas/Kantor/Bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Bireuen dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2024;
4. Untuk mengetahui prakiraan rencana kebutuhan alokasi sumber daya dan sumber dana yang diperlukan dalam penganggaran pembangunan daerah tahun 2024;
5. Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBK pada tahun 2024 mendatang;
6. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPK

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2024, disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPK, dasar hukum penyusunan RKPK, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPK, maksud dan tujuan penyusunan RKPK.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN BIREUEN

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan realisasi serta permasalahan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah menguraikan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi dasar-dasar analisis. Menguraikan tentang hasil evaluasi RKPK tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-2026 dan dokumen RKPK tahun berjalan sebagai bahan acuan serta memuat permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KABUPATEN BIREUEN

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, serta target tahun rencana yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2024.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPK tahun lalu dan target yang direncanakan dalam RPK untuk tahun 2024, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak di tingkat daerah dan nasional, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPK. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui indikasi program prioritas dan kegiatan SKPK berdasarkan prioritas.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN BIREUEN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPK tahun 2024 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPK. Rencana program dan kegiatan prioritas ini harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pada bab ini juga diuraikan tentang matriks renja dari program dan kegiatan SKPK tahun 2024 yang memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi

Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menjelaskan secara singkat mengenai kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir renja SKPK, serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBK tahun yang direncanakan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI
KABUPATEN BIREUEN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN BIREUEN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bireuen

Gambaran umum kondisi Kabupaten Bireuen memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Bireuen secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2024 melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Geografis

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 23 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara melalui Undang-Undang No.48 tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999. Secara astronomis, Kabupaten Bireuen terletak pada antara 04⁰54'-05⁰21' Lintang Utara dan 96⁰20'-97⁰21' Bujur Timur. Sementara jika berdasarkan geografis, Kabupaten Bireuen memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Malaka.
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Utara.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Pidie.
- Sebelah Barat : Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie.

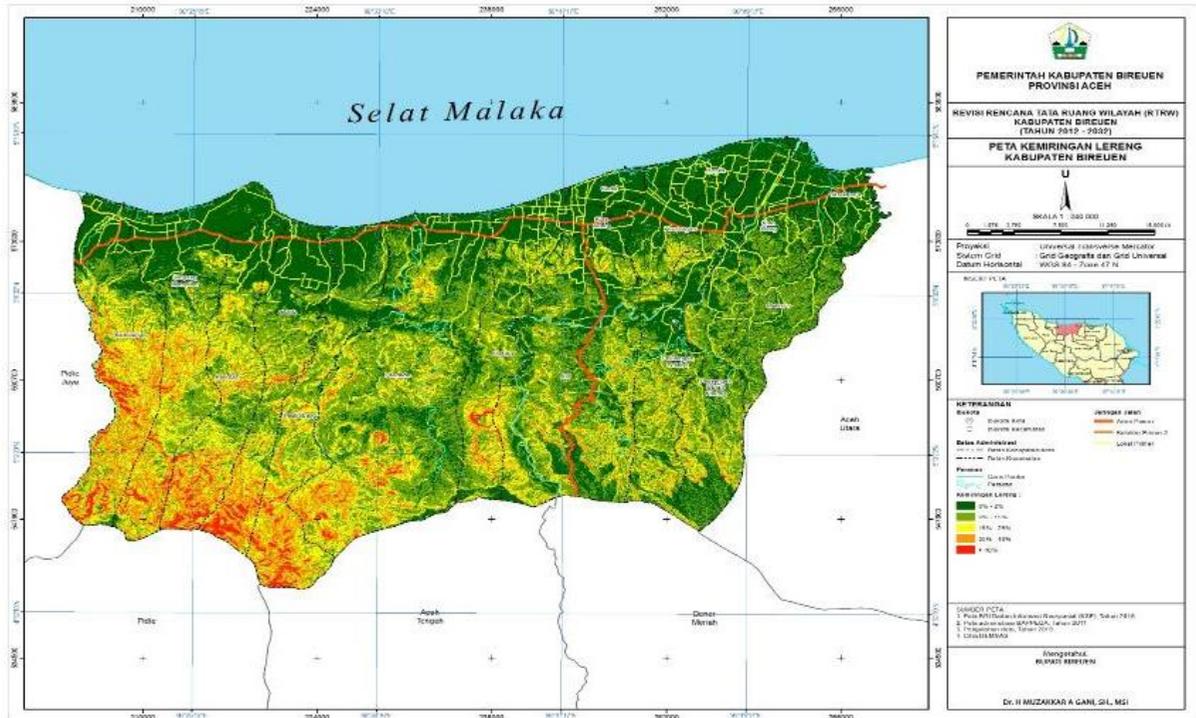
Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 179.844,80 hektar atau 3,40 persen dari luas wilayah Provinsi Aceh. Secara administrasi Kabupaten Bireuen terdiri atas 17 Kecamatan, dan 609 Gampong (desa).

2.1.1.2. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Bireuen memiliki pantai dengan dataran rendah berada di sebelah utara dan daerah pegunungan berada di sebelah selatan. Adapun kemiringan lahan di Kabupaten Bireuen berkisar antara 0-2 persen sampai dengan >40 persen, yang dikelompokkan atas 5 kelas kemiringan lahan yaitu 0-2 persen (datar), 2-15 persen (landai), 15-25 persen (agak curam), 25-40 persen (curam) dan >40 persen (sangat curam).

Kecamatan Peudada menjadi wilayah dengan kemiringan datar (0-2) persen terluas yaitu sebesar 9.019,55 hektar. Sementara Kecamatan Samalanga menjadi wilayah dengan kemiringan sangat curam (>40) persen terluas yaitu mencapai 892,19 hektar. Adapun persentase kelas lereng terluas yaitu kelas landai (2-15) persen sebesar 38,85 persen dengan wilayah terluasnya berada di Kecamatan Peudada sebesar 13.450,68 hektar. Sedangkan persentase kelas lereng terendah yaitu kelas lereng datar (0-2) persen sebesar 2,05 persen dengan wilayah terluasnya berada di Kecamatan Peudada sebesar 9.019,55 hektar. Untuk

lebih jelasnya mengenai kemiringan beserta luas wilayah di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1.



Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

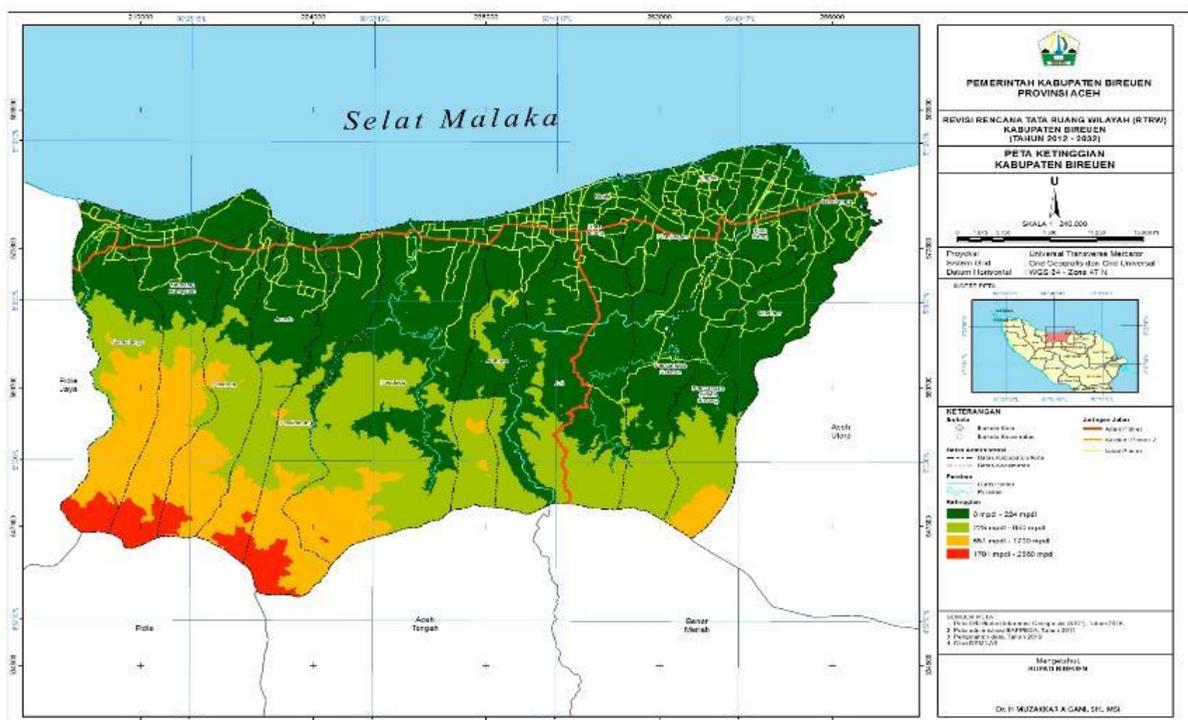
Gambar 2.1. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen

Tabel 2.1
Kondisi Kelerengan di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No.	Kecamatan	Kelas Lereng (Ha)					Total Luas (Ha)
		Datar (0-2 %)	Landai (2-15 %)	Agak Curam (15-25 %)	Curam (25 – 40 %)	Sangat Curam (>40 %)	
1	Samalanga	3.426,31	2.892,27	3.647,51	3.280,81	892,19	15.768,66
2	Simpang Mamplam	6.566,18	3.691,75	3.007,01	2.175,66	328,07	15.772,04
3	Pandrah	2.434,44	3.319,29	2.965,06	2.088,96	593,21	11.400,97
4	Jeunieb	4.034,11	3.292,25	1.847,91	1.482,03	598,27	11.254,58
5	Peulimbang	3.295,96	3.641,61	2.965,08	2.238,70	645,80	12.787,15
6	Peudada	9.019,55	13.450,68	5.918,46	2.534,78	357,98	31.281,46
7	Juli	7.744,93	10.095,16	4.006,60	1.178,34	93,32	23.118,35
8	Jeumpa	4.266,08	4.325,91	1.630,17	560,37	131,24	10.913,76
9	Kota Juang	1.619,93	69,09	1,83	0,02	0,00	1.690,87
10	Kuala	1.670,24	39,24	1,09	0,00	0,00	1.710,56
11	Jangka	3.645,17	107,54	5,20	0,12	0,00	3.758,03
12	Peusangan	4.451,50	1.098,87	308,29	48,78	0,19	5.907,63
13	Peusangan Selatan	3.509,09	3.762,85	1.692,41	430,67	19,68	9.414,70
14	Peusangan Siblah Krueng	4.104,15	5.147,98	1.485,33	439,53	28,36	11.205,35
15	Makmur	2.999,67	3.563,43	277,89	15,01	1,35	6.857,36
16	Gandapura	4.243,62	499,45	19,76	3,32	0,00	4.766,15
17	Kuta Blang	2.842,87	958,82	63,64	4,62	0,18	3.870,13
	Total Luas (Ha)	3.689,85	69.873,78	29.843,25	59.956,19	16.481,73	179.844,80
	Persentase (%)	2,05	38,85	16,59	33,33	9,16	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Ketinggian lahan di Kabupaten Bireuen berkisar antara 0-224 mdpl sampai dengan 1.701-2.860 mdpl yang dikelompokkan atas 4 kelas ketinggian lahan yaitu 0-224 mdpl (rendah), 225-650 mdpl (sedang), 651-1.700 mdpl (tinggi), dan 1.701-2.860 mdpl (sangat tinggi). Kecamatan Juli menjadi wilayah dengan ketinggian sedang (0-224 mdpl) terluas yaitu sebesar 16.165,86 ha. Sementara Kecamatan Peulimbang menjadi wilayah dengan ketinggian sangat tinggi (1.701-2.860 mdpl) terluas yaitu mencapai 1.444,59 hektar. Adapun persentase kelas ketinggian terluas yaitu ketinggian sedang (0-224 mdpl) sebesar 59,60 persen dengan wilayah terluasnya berada di Kecamatan Juli sebesar 16.165,86 hektar. Sedangkan persentase kelas ketinggian terendah yaitu kelas ketinggian sangat tinggi (1.701-2.860 mdpl) sebesar 2,85 persen dengan wilayah terluasnya berada di Kecamatan Peudada sebesar 20,71 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.2.



Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Gambar 2.2. Peta Ketinggian di Kabupaten Bireuen

Tabel 2.2

Kondisi Ketinggian di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	Ketinggian (MDPL)				Total Luas (Ha)
		0 – 224	225 - 650	651–1700	> 1700	
1	Samalanga	4.747,86	2.769,15	5.439,11	1.182,96	14.139,09
2	Simpang Mamplam	8.158,30	1.575,68	4.719,31	1.315,38	15.768,66
3	Pandrah	3.215,10	3.940,70	3.698,77	546,41	11.400,97
4	Jeunieb	6.067,21	2.803,53	1.759,41	624,42	11.254,58
5	Peulimbang	5.139,33	3.029,18	3.174,05	1.444,59	12.787,15
6	Peudada	15.161,99	11.707,91	4.390,85	20,71	31.281,46

No	Kecamatan	Ketinggian (MDPL)				Total Luas (Ha)
		0 – 224	225 - 650	651–1700	> 1700	
7	Juli	16.165,86	6.952,49	0	0	23.118,35
8	Jeumpa	6.841,13	3.822,96	249,67	0	10.913,76
9	Kota Juang	1.690,87	0	0	0	1.690,87
10	Kuala	1.710,56	0	0	0	1.710,56
11	Jangka	3.758,03	0	0	0	3.758,03
12	Peusangan	5.907,63	0	0	0	5.907,63
13	Peusangan Selatan	6.823,36	2.590,79	0,54	0	9.414,70
14	Peusangan Siblah Krueng	6.325,96	3.604,33	1.275,06	0	11.205,35
15	Makmur	6.829,14	28,21	0	0	6.857,36
16	Gandapura	4.766,15	0	0	0	4.766,15
17	Kuta Blang	3.870,13	0	0	0	3.870,13
Total Luas (Ha)		107.178,62	42.824,94	24.706,77	5.134,47	179.844,80
Persentase (%)		59,60	23,81	13,74	2,85	100,00

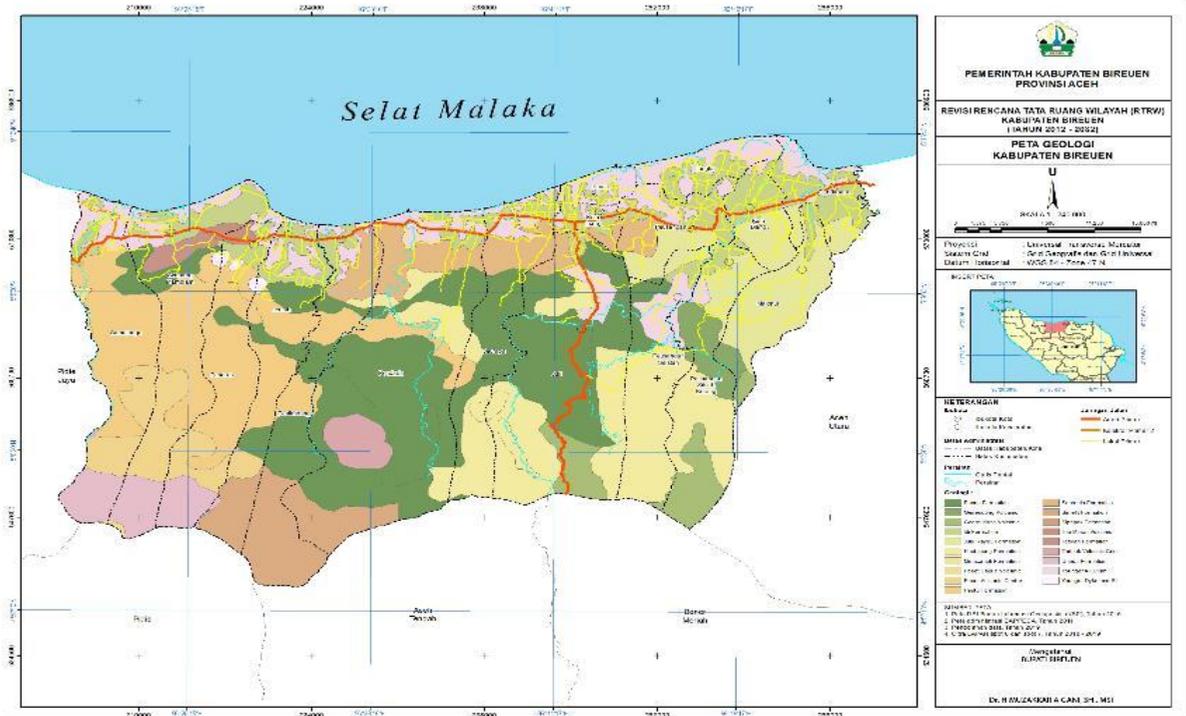
Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

2.1.1.3. Geologi

Geologi wilayah Kabupaten Bireuen terbagi menjadi beberapa jenis bebatuan yang menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan lahan. Penampang geologi permukaan merupakan sebaran bebatuan lateral, vertikal sampai pada kedalaman batuan dasar. Sebaran geologi meliputi Aluvium, Batuan Sedimen, Batuan Gunung Api, dan Batuan Sedimen-meta Sedimen. Sebaran geologi wilayah Kabupaten Bireuen terdiri atas Baong Formation, Geireudong Volcanic, Georeudong Volcanic, Idi Formation, Julu Rayeu Formation, Keutapang Formation, Keuteupang Formation, Meucampli Formation, Peuet Sague Volcanic, Peuet Volcanic Centre, Peutu Formation, Seureula Formation, Simelit Formati on, Sipopok Formation, Teu Minas Volcanic, Totolan Formation, Tudeuk Volcanic Cent, Uneun Formation, Younger Alluvium, dan Younger Dyke and Sil.

Geologi suatu wilayah perlu diketahui secara mendetail dalam melakukan perencanaan agar upaya memanfaatkan sumber daya alam dan energi dapat dilakukan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan perikehidupan manusia pada masa kini dan masa mendatang dengan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkannya semaksimal mungkin. Geologi wilayah Kabupaten Bireuen dapat dibagi atas beberapa jenis bebatuan yang menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan kedalaman batuan dasar. Sebaran jenis geologi dengan luas terbesar adalah Baong Formation yaitu 16.620,91 hektar yang berada di Kecamatan Peudada. Sedangkan jenis geologi dengan luas wilayah terbanyak kedua adalah Peutu Formation sebesar 6.607,29 hektar yang berada di Kecamatan Samalanga. Jenis sebaran geologi dengan luas wilayah terendah adalah Seureula Formation sebesar 0,03

hektar dengan wilayah terluas berada di Kecamatan Jeunieb dapat dilihat Gambar 2.3 dan Tabel 2.3.



Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Gambar 2.3. Peta Geologi di Kabupaten Bireuen

Tabel 2.3
Sebaran Jenis Batuan Berdasarkan Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bireuen

No	Jenis Batuan	Samalanga	Simpang Mamplam	Pandrah	Jeunieb	Peulimbang	Peudada	Juli	Jeumpa	Kota Juang	Kuala	Jangka	Peusangan	Peusangan Selatan	Peusangan Siblah Krueng	Makmur	Gandapura	Kuta Blang
1	Baong Formation	667,14	1.205,54	351,26	2.242,04	3.298,13	16.620,91	10.423,39	3.935,58	39,57	0	0	91,83	1.003,77	0	0	0	0
2	Geireudong Volcanic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,13	2.086,74	526,78	0	0
3	Georeudong Volcanic	0	0	0	0	0	0	1.987,22	0	0	0	0	0	108,13	2.529,74	359,78	0	0
4	Idi Formation	697,23	2.312,90	771,88	1.736,49	781,18	876,69	366,34	886,74	931,38	467,08	1.534,21	1.952,79	385,00	550,14	456,81	2.412,30	1.917,30
5	Julu Rayeu Formation	0	0	0	0	0	0	3,68	0	0	0	0	1.728,77	515,66	1.737,80	5.480,29	1.101,78	1.830,40
6	Keutapang Formation	0	0	0	0	0	0	841,62	223,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Keuteupang Formation	0	0	0	0	162,98	2.749,01	7.782,36	2.665,49	0	0	0	0	5.763,15	3.769,37	29,24	0	0
8	Meucamplic Formation	192,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Peuet Sague Volcanic	20,27	85,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Peuet Volcanic Centre	2.565,24	2.515,97	1.597,10	607,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Peutu Formation	6.607,29	4.859,99	6.096,51	3.512,10	1.903,79	1.746,08	0	289,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Seureula Formation	0	0	0	0,03	1.642,80	2.960,13	712,88	1.957,79	437,01	0	0	1.073,66	0	0	0	0	0
13	Simelit Formation	0	0	0,29	2.023,91	4.361,62	2.751,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sipopok	0	1,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

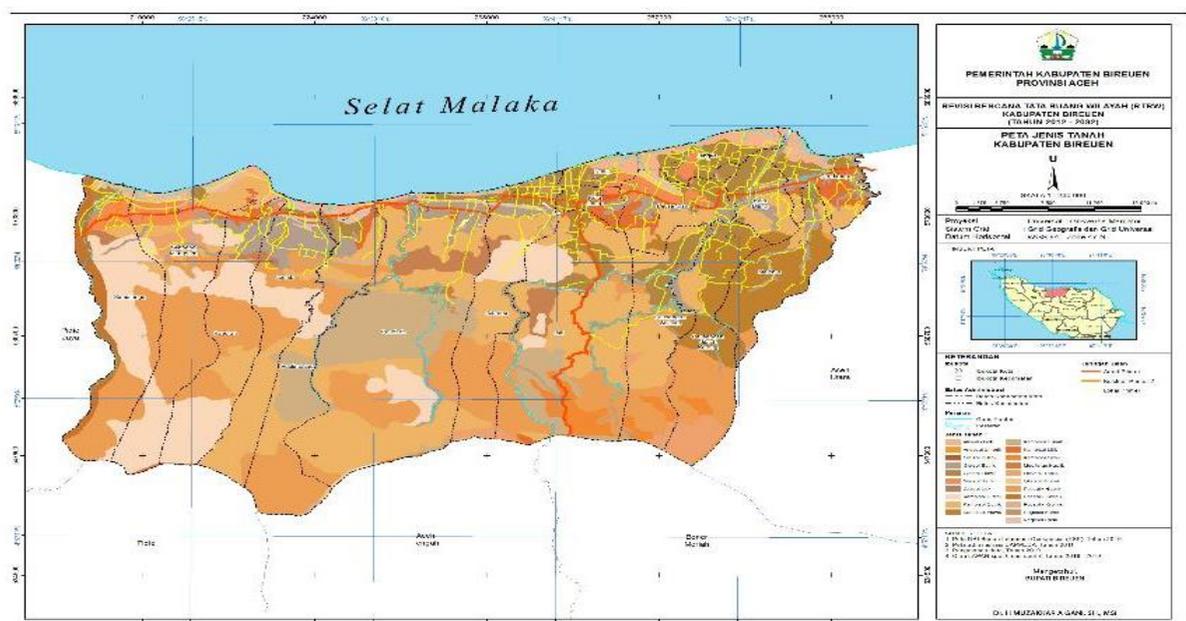
No	Jenis Batuan	Samalanga	Simpang Mamplam	Pandrah	Jeunieb	Peulimbang	Peudada	Juli	Jeumpa	Kota Juang	Kuala	Jangka	Peusangan	Peusangan Selatan	Peusangan Siblah Krueng	Makmur	Gandapura	Kuta Blang
	Formation																	
15	Teu Minas Volcanic	0	287,58	362,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Totolan Formation	0	1.038,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Tudeuk Volcanic Cent	0	0	0	0	0	2.160,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Uneun Formation	1.907,71	1.804,80	1.720,79	92,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Younger Alluvium	1.481,78	1.566,04	245,31	930,81	636,64	1.416,39	1.000,87	955,40	282,91	1.243,48	2.223,82	1.060,59	1.544,85	531,56	4,47	1.252,06	122,43
20	Younger Dyke and Sil	0	90,35	255,42	108,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Luas (Ha)		14.139,09	15.768,66	11.400,97	11.254,58	12.787,15	31.281,46	23.118,35	10.913,76	1.690,87	1.710,56	3.758,03	5.907,63	9.414,70	11.205,35	6.857,36	4.766,15	3.870,13
Persentase (%)		7,86	8,76	6,33	6,25	7,11	17,39	12,85	6,06	0,94	0,95	2,09	3,28	5,23	6,23	3,81	2,65	2,15

Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

2.1.1.4. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Bireuen terdiri dari tanah Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik Merah Kuning, Latosol, Komplek PMK Latosol dan Litosol serta Komplek Renzina dan Litosol. Di bagian utara wilayah ini didominasi oleh jenis tanah Aluvial dan Hidromorf Kelabu, sedangkan pada bagian selatan wilayah ini di dominasi oleh jenis tanah Latosol, Komplek PMK Latosol dan Litosol serta Komplek Renzina dan Litosol. Jenis tanah ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kesesuaian tanaman yang dapat dikembangkan.

Jenis tanah Aluvial dan Latosol umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian, jenis tanah Podsolik Merah Kuning sesuai untuk tanaman perkebunan atau tahunan. Sedangkan jenis tanah Litosol mempunyai sifat yang mudah tererosi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga mempunyai resiko erosi yang tinggi. Untuk lebih jelasnya terkait jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.4 dan Tabel 2.4.



Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen

**Tabel 2.4
Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen**

No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	Samalanga	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Gleisol Litik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Podsolik Kandik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
2	Simpang Mamplam	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.

No	Kecamatan	Jenis Tanah
3	Pandrah	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Gleisol Litik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
4	Jeunieb	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
5	Peulimbang	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Kambisol Oksik, Oksisol Kromik, Podsolik Haplik, Podsolik Kromik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
6	Peudada	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Humik, Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Oksisol Haplik, Oksisol Kromik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
7	Juli	Andosol Umbrik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Humik, Kambisol Litik, Kambisol Oksik, Mediteran Haplik, Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, dan Tubuh Air.
8	Jeumpa	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
9	Kota Juang	Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Regosol Eutrik, dan Tubuh Air.
10	Kuala	Aluvial Gleik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Regosol Eutrik, dan Tubuh Air.
11	Jangka	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
12	Peusangan	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik, Kambisol Litik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
13	Peusangan Selatan	Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik, Kambisol Humik, Kambisol Oksik, Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Tubuh Air.
14	Peusangan Siblah Krueng	Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik, Kambisol Humik, Kambisol Oksik, Oksisol Haplik, Oksisol Kromik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Tubuh Air.
15	Makmur	Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik, Kambisol Litik, Oksisol Haplik, Oksisol Kromik, Regosol Eutrik, Tubuh Air.
16	Kuta Blang	Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik, Kambisol Litik, Regosol Eutrik, Tubuh Air.
17	Gandapura	Aluvial Gleik, Gleisol Distrik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, Tubuh Air.

Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

2.1.1.5. Geomorfologi

Geomorfologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya. Geomorfologi daerah di Kabupaten Bireuen dapat dibagi tiga, yaitu sebagai berikut:

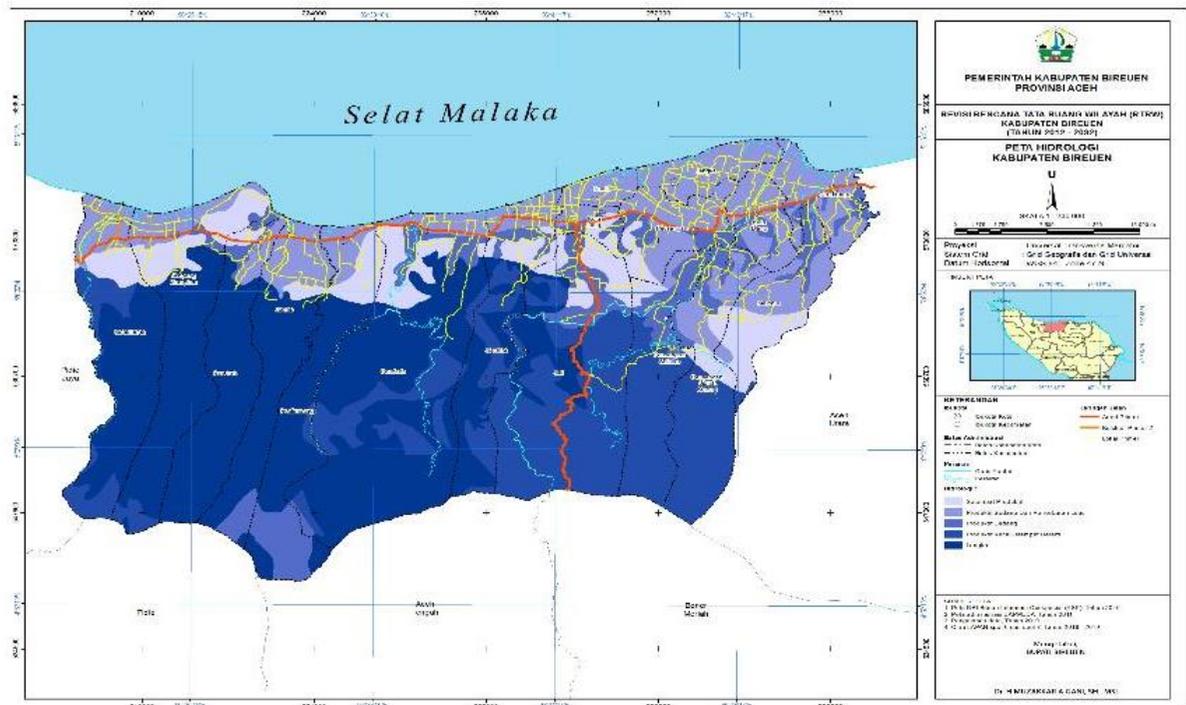
- 1) Daerah Pesisir (Utara) dengan struktur tanah berupa pasir, banyak di tumbuh pohon kelapa, tambak–tambak rakyat, pemukiman penduduk desa pantai, desa tambak, tempat pembenihan, daerah muara (umumnya dipakai tempat TPI dan PPI) dan beberapa kota–kota kecamatan berada di wilayah ini.
- 2) Daerah tengah didominasi persawahan, kebun-kebun penduduk, pemukiman penduduk dan ibu kota kabupaten.
- 3) Daerah Selatan adalah daerah berbukit atau dataran tinggi yang umumnya merupakan kawasan hutan, meliputi hutan lindung, dan kawasan budidaya.

2.1.1.6. Hidrologi

Kabupaten Bireuen juga dilalui oleh 17 sungai, yaitu Krueng Samalanga, Krueng Inong, Krueng Agam, Krueng Pandrah, Krueng Jeunieb, Krueng Suyoh, Krueng Nalan, Krueng Peudada, Krueng Uneun, Krueng Wie, Krueng Bugeng, Krueng Simpo, Krueng Meuh, Krueng Kunci, Krueng Pineueng, Krueng Mane, Krueng Peusangan yang seluruhnya bermuara ke Selat Malaka.

Sebaran daerah air tanah langka di Kabupaten Bireuen tersebar di Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Peudada, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam, dan Kecamatan Jangka, dengan total luas sebaran daerah air tanah mencapai 493,17 Km². Sementara untuk air tanah setempat akuifer produktif tersebar di semua kecamatan dengan total luas sebaran mencapai 419,08 Km².

Kondisi hidrologi di Kabupaten Bireuen meliputi kondisi yang langka, produktif kecil setempat berarti, produktif sedang, produktif sedang dengan penyebaran luas, dan setempat produktif. Kondisi hidrologi dengan luas terbanyak adalah kondisi langka sebesar 20.799,28 hektar yang berada di Kecamatan Peudada. Sedangkan kondisi hidrologi dengan luas wilayah terbanyak kedua adalah produktif kecil setempat berarti sebesar 15.333,48 hektar yang berada di Kecamatan Juli, kondisi hidrologi dengan luas terendah adalah produktif kecil setempat berarti sebesar 309,21 hektar yang berada di Kecamatan Peulimbang. Untuk lebih jelasnya terkait kondisi hidrologi di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.5.



Gambar 2.5. Peta Hidrologi di Kabupaten Bireuen

Tabel 2.5

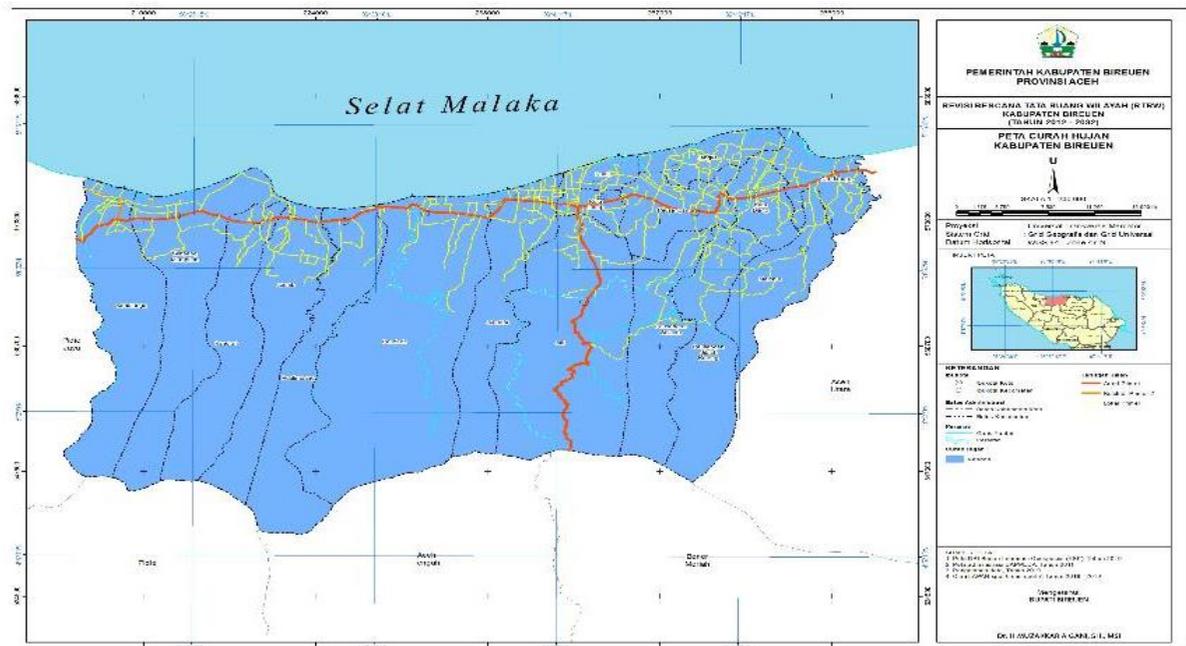
Kondisi Hidrologi Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Langka	Produktif Kecil Setempat Berarti	Produktif Sedang	Produktif Sedang dengan Penyebaran Luas	Setempat Produktif	Total Luas (Ha)
1	Samalanga	7.965,94	2.755,98	0	2.108,26	1.308,91	14.139,09
2	Simpang Mamplam	9.315,67	671,37	548,11	2.200,40	3.033,12	15.768,66
3	Pandrah	9.597,38	16,72	514,06	899,29	373,52	11.400,97
4	Jeunieb	7.258,71	0	819,08	2.786,04	390,75	11.254,58
5	Peulimbang	6.828,05	309,21	2.507,01	1.483,05	1.659,84	12.787,15
6	Peudada	20.799,28	4.909,08	1.656,51	1.421,93	2.494,65	31.281,46
7	Juli	3.287,10	15.333,48	2.277,03	0	2.220,75	23.118,35
8	Jeumpa	4.301,45	3.204,58	733,59	1.592,62	1.081,53	10.913,76
9	Kota Juang	0	0	486,44	595,57	608,87	1.690,87
10	Kuala	0	0	0	1.710,56	0	1.710,56
11	Jangka	0	0	0	3.758,03	0	3.758,03
12	Peusangan	0	0	1.268,27	3.881,08	758,29	5.907,63
13	Peusangan Selatan	0	6.215,21	2.291,11	385,11	523,27	9.414,70
14	Peusangan Siblah Krueng	0	6.482,82	1.422,65	2.215,06	1.084,81	11.205,35
15	Makmur	0	159,36	1.021,22	3.064,44	2.612,33	6.857,36
16	Gandapura	0	0	862,00	3.904,15	0	4.766,15
17	Kuta Blang	0	0	779,09	3.091,05	0	3.870,13
Total Luas (Ha)		69.353,58	40.057,80	17.186,17	35.096,63	18.150,62	179.844,80

Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

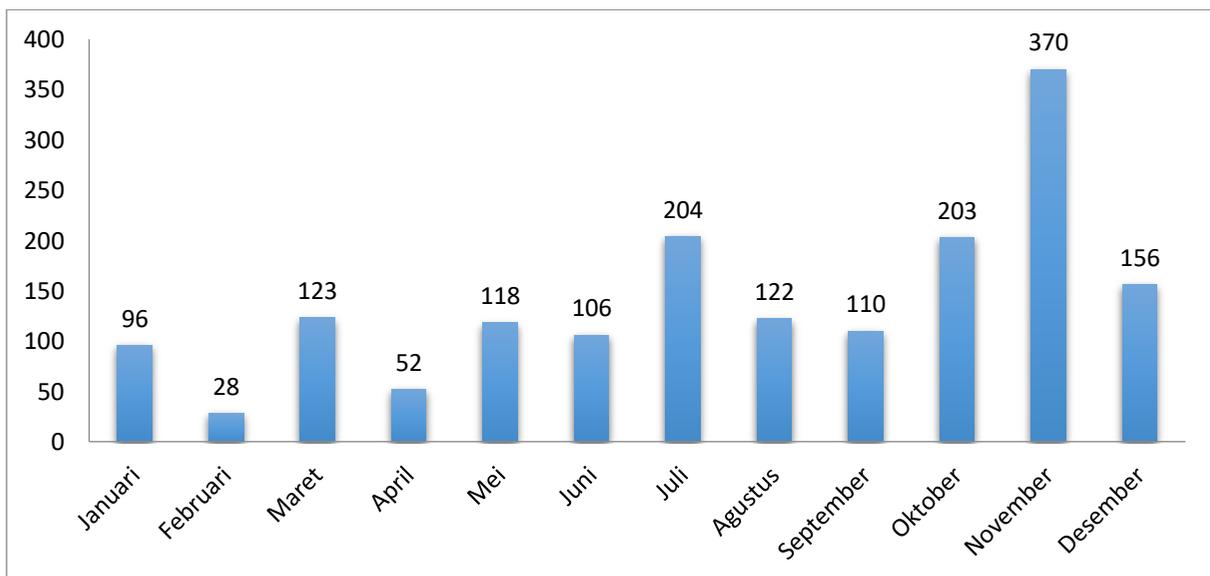
2.1.1.7. Klimatologi

Intensitas Curah hujan di Kabupaten Bireun sepanjang tahun 2021 memiliki rata-rata intensitas curah hujan mencapai 140,66 mm/bulan. Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kabupaten Bireuen selama tahun 2021 terjadi pada Bulan November, yaitu sebanyak 370 mm. Untuk lebih jelasnya terkait curah hujan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7.



Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Gambar 2.6. Peta Curah Hujan di Kabupaten Bireuen



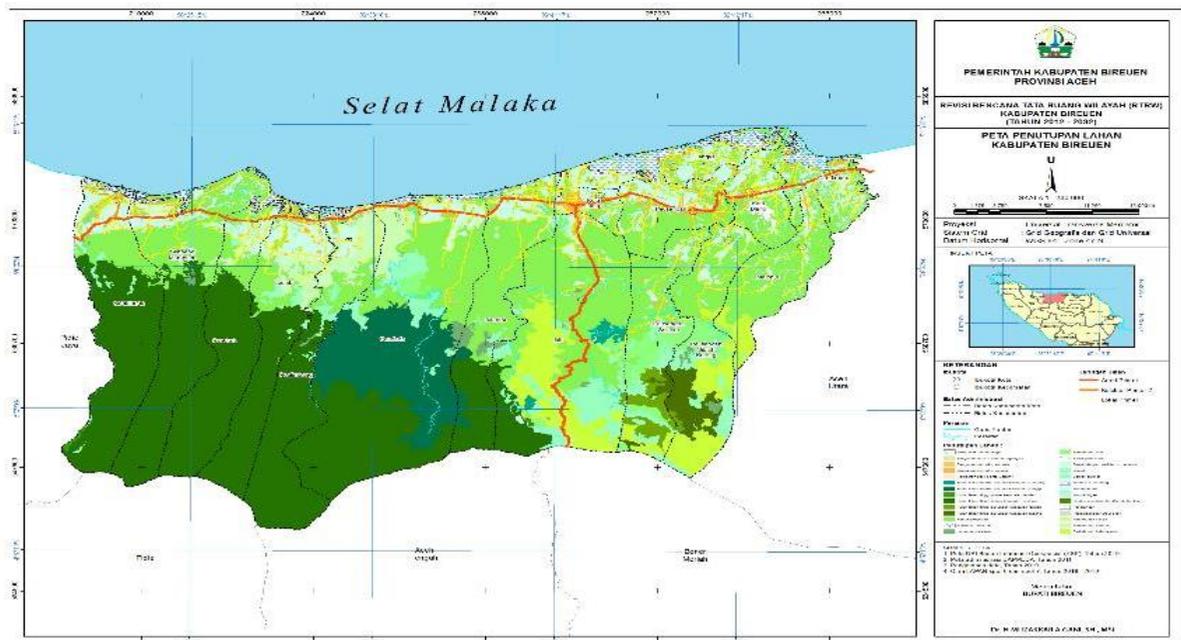
Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Gambar 2.7. Jumlah Intensitas Curah Hujan Berdasarkan Bulan di Kabupaten Bireuen

2.1.1.8. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen seluas 179.872,00 hektar, penggunaan lahan Kabupaten Bireuen terbagi menjadi dua yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung Kabupaten Bireuen seluas 33.707,94 hektar atau 10,34 per sen, sebagian besar meliputi kawasan hutan lindung seluas 31.263,04 hektar atau 9,59 persen. Sedangkan kawasan budidaya seluas 146.164 hektar atau 44,83 persen dipergunakan antara lain untuk kawasan perkebunan seluas 65.864,75 hektar atau 20,20 persen, kawasan hutan produksi tetap seluas 32.497,9 hektar (9,97 persen), kawasan tanaman pangan seluas 15.656,36 hektar (4,80 persen), serta kawasan permukiman perdesaan seluas 12.115,47 hektar (3,72 persen). Untuk lebih jelasnya terkait penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.8 dan Tabel 2.6.



Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

Gambar 2.8. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen

Tabel 2.6
Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
	Kawasan Terbangun	10.762,17	5,98
1	Area parkir dan lapangan	0,82	0,0005
2	Bangunan dan perdagangan	26,49	0,01
3	Bangunan permukiman desa	67,61	0,04
4	Bangunan permukiman kota	6.290,61	3,50
5	Kolam air tawar lain	8,04	0,00
6	Pekarangan	9,56	0,01
7	Penambangan terbuka lain	4,69	0,00
8	Tambak ikan/udang	4.180,62	2,32
9	Tubuh air lain	169,09	0,09
10	Waduk irigasi	4,64	0,00
	Kawasan Tidak Terbangun	169.082,63	94,02
1	Hampan pasir pantai vulkanik	200,87	0,11
2	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	559,76	0,31
3	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan tinggi	10.868,53	6,04
4	Hutan lahan tinggi primer kerapatan rendah	109,19	0,06
5	Hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang	54.052,41	30,06
6	Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan rendah	1.513,61	0,84
7	Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan sedang	2.118,19	1,18
8	Kebun campuran	52.706,46	29,31
9	Lahan terbuka lain	1.131,25	0,63
10	Liputan vegetasi alami/semi-alami lain	32,08	0,02
11	Perkebunan kakao	51,37	0,03
12	Perkebunan kelapa	5.168,86	2,87
13	Perkebunan kelapa sawit	9.274,58	5,16
14	Perkebunan lain	3.912,39	2,18
15	Rawa pedalaman	274,74	0,15
16	Sawah dengan padi terus menerus	16.999,10	9,45
17	Semak	815,75	0,45
18	Semak belukar	8.159,97	4,54
19	Sungai	1.133,54	0,63
	Jumlah	179.844,80	100,00

Sumber: Interpretasi Citra (Spot 6) Tahun 2021

Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen dikelompokkan dalam beberapa kawasan sebagai berikut:

A. Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman berdasarkan penggunaan lahan termasuk ke dalam lahan terbangun yang meliputi bangunan permukiman kota, bangunan permukiman desa, area parkir dan lapangan, bangunan industri dan perdagangan (ruko, kios, dan warung), dan pekarangan.

Selain itu juga, di dalamnya terdiri dari fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang menunjang kegiatan didalamnya. Luas kawasan permukiman yaitu 6.395,09 ha atau 3,56 persen dari luas penggunaan lahan. Jika diklasifikasikan berdasarkan bangunan permukiman terbagi menjadi kota dan desa. Bangunan permukiman kota memiliki luas yang mendominasi permukiman di Kabupaten Bireuen yaitu 6.290,61 ha atau 98,37 persen dari luas permukiman.

Bangunan permukiman kota tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bireuen dengan Kecamatan Peusangan sebagai luasan tertinggi yaitu mencapai 957,63 ha. Untuk bangunan permukiman perdesaan hanya tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Juli, Kecamatan Peudada, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Samalanga, dan Kecamatan Simpang Mamplam. Memiliki luas 67,61 ha atau 1,06 persen dari luas permukiman, dengan Kecamatan Peudada sebagai Kecamatan dengan luas tertinggi yaitu 24,67 ha. Secara umum bangunan permukiman baik kota maupun desa mengikuti pola jaringan jalan yang ada. Wilayah yang berkembang sebagai permukiman terletak pada bagian tengah Perkotaan Bireuen.

Sementara itu, bangunan dan perdagangan memiliki luas 26,49 ha berada di Kecamatan Gandapura, Kecamatan Jangka, Kecamatan Juli, Kecamatan Kuta Blang, dan Kecamatan Peusangan. Kecamatan yang memiliki luasan tertinggi yaitu Kecamatan Gandapura dengan luas 10,66 ha dan terendah yaitu Kecamatan Jangka dengan luas 0,99 ha. Industri tersebut meliputi pabrik, pergudangan dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

B. Kawasan Hutan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 yang termasuk lahan tidak terbangun sebagian besar adalah kawasan hutan dengan luas 69.221,68 ha atau 38,49 persen dari luas penggunaan lahan. Kawasan hutan terbagi atas hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang, hutan lahan rendah sekunder kerapatan tinggi, hutan lahan tinggi primer kerapatan rendah, hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang, hutan lahan tinggi sekunder kerapatan rendah dan hutan lahan tinggi sekunder kerapatan sedang. Sebagian besar kawasan hutan berlokasi tersebar di bagian Selatan Kabupaten Bireuen karena merupakan dataran yang cukup tinggi dengan kontur berbukitan.

Penggunaan lahan hutan yang paling luas yaitu hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang seluas 54.052,406 ha atau 30,06 persen. Berada dilokasi sebelah Barat bawah yang memiliki dataran yang curam meliputi Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Juli, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Peudada, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Samalangan dan Kecamatan Simpang Mamplam. Sementara itu, yang memiliki luasan paling rendah yaitu hutan lahan tinggi primer kerapatan rendah seluas 109,185 ha atau 0,06 persen, yang berada di Kecamatan Samalanga.

C. Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian Kawasan pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan Kabupaten Bireuen. Hal ini didukung dengan kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah agraris. Penggunaan lahan tidak terbangun di Kabupaten Bireuen yang memiliki luasan yang cukup luas yaitu sawah dengan padi terus menerus seluas 16.999,096 ha atau 9,45 persen. Komoditas pangan unggulan Kabupaten Bireuen adalah padi yang merupakan pangan utama yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Penggunaan lahan padi sebagai pertanian lahan basah dibandingkan antara sebelum dengan sesudah inventarisasi dan identifikasi. Pada tahun 2019 penurunan luas dengan selisih 91,73 ha meliputi sawah dengan selisih 20,29 ha. Lokasi yang memiliki penurunan luas tertinggi yaitu Kecamatan Juli mencapai 46,25 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7

Perbandingan Data ATR/BPN Sebelum dengan Sesudah Dilakukan Inventarisasi dan Identifikasi Tahun 2019

No.	Kecamatan	Sebelum Inven & Iden (Ha)	Setelah Inven & Iden (Ha)	Selisih (Ha)
1	Gandapura	1.135,85	1.161,92	26,07
2	Jangka	878,34	879,54	1,2
3	Jeumpa	1.014,20	1.015,43	1,23
4	Jeunieb	1.311,03	1.328,18	17,15
5	Juli	503,06	456,81	-46,25
6	Kota Juang	473,46	470,3	-3,16
7	Kuala	680,83	670,3	-10,53
8	Kuta Blang	960,85	967,02	6,17
9	Makmur	737,99	729,43	-8,56
10	Pandrah	511,32	521,66	10,34
11	Peudada	948,31	938,92	-9,39
12	Peulimbang	633,76	652,21	18,45
13	Peusangan	1.564,58	1.565,54	0,96
14	Peusangan Selatan	419,93	397,21	-22,72
15	Peusangan Siblah Krueng	658,71	655,89	-2,82
16	Samalanga	1.230,55	1.214,57	-15,98
17	Simpang Mamplan	1.270,60	1.288,13	17,53
Jumlah		14.933,36	14.913,08	-20,29

Sumber: ATR/BPN Tahun 2019

D. Kawasan Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Bireuen berdasarkan penggunaan lahan Kabupaten Bireuen yaitu termasuk lahan tidak terbangun meliputi perkebunan kakao, perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan lain. Penggunaan lahan perkebunan yang memiliki luasan yang paling luas yaitu perkebunan kelapa sawit seluas 9.274,581 ha atau 5,16 persen, dan yang paling luas kedua yaitu perkebunan kelapa seluas 5.168,861 ha atau 2,8 persen, sedangkan yang paling rendah yaitu perkebunan kakao seluas 51,368 ha atau 0,03 persen. Komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Bireuen yaitu Kakao, Karet, dan pinang. Disisi lain harga komoditas perkebunan tanaman keras dipengaruhi harga di pasaran dunia yang fluktuatif, sehingga mempengaruhi budidaya perkebunan tanaman keras di tingkat domestik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih menanam tanaman semusim seperti pepaya, tebu, dan pisang yang lebih prospektif dan lebih elastis di pasaran domestik.

E. Kawasan Pengairan lainnya

Kawasan Perairan dan lainnya di Kabupaten Bireuen berdasarkan penggunaan lahan Kabupaten Bireuen yaitu termasuk lahan tidak terbangun meliputi sungai, kolam air tawar lain, tambak ikan/udang, tubuh air lain dan waduk irigasi dengan luas 5.495,83 ha. Penggunaan lahan perairan yang memiliki luasan yang paling luas yaitu tambak ikan/udang seluas 4.180,616 ha atau 2,32 persen, berada di setiap kecamatan di Kabupaten Bireuen kecuali Kecamatan Juli, Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Makmur, Kecamatan Peusangan Selatan dan Kecamatan Peusangan Siblih Krueng. Untuk perairan sungai mencakup seluruh Kabupaten Bireuen kecuali Kecamatan Kota Juang. Sementara itu, perairan dengan luasan yang paling rendah yaitu waduk irigasi seluas 4,638 ha. Potensi sumber daya perikanan budidaya di Kabupaten Bireuen terdiri dari budidaya air payau, budidaya air tawar dan budidaya di laut. Untuk Budidaya Air Payau Kabupaten Bireuen memiliki tambak yang dimanfaatkan untuk usaha budidaya udang, bandeng, kerapu, nila dan komoditas lainnya. Komoditas unggulan perikanan budidaya Kabupaten Bireuen adalah Ikan Kerapu, Udang Windu dan Bandeng. Selain itu terdapat potensi budidaya ikan air tawar berupa kolam ikan, sawah (mina padi) danau, sungai dan rawa.

F. Kondisi Kawasan Pesisir dan Kelautan

Kabupaten Bireuen merupakan bagian dari Provinsi Aceh dengan garis pantai 95,181 km. Dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen, 11 di antaranya Kecamatan yang secara administrasi berbatasan langsung dengan wilayah laut. Kecamatan tersebut, meliputi:

- Kecamatan Samalanga, meliputi Meunasah Lancok, Angking Barat, Tanjong Baro, Matang Teungoh, Pineung Siribee, Kampong Baro, Pante Rheng, Sangso, dan Meuliek
- Kecamatan Samalanga, meliputi Gampong Meunasah Lancok, Angking Barat, Tanjong Baro, Matang Teungoh, Pineung Siribee, Kampong Baro, Pante Rheng, Sangso, dan Meuliek.

- Kecamatan Simpang Mamplam, meliputi Gampong Arongan, Rheum Barat, Rheum Baroh, Rheum Timu, Blang Kuta Coh, Blang Kuta Dua Meunasah, Lancang, Blang. Teumulek, Blang Tambue, Keude Tambue, Meunasah Asan, Cureh Tunong, Cureh Baron, Peuneulek Baroh, Peuneulek Tunong, Ule kareung, Blang. Panyang, Calok dan Alue Luhop.
- Kecamatan Pandrah, meliputi: Gampong Alue Igeueh, Uteuen Kruet, Nase Mee dan Lancok Ulim.
- Kecamatan Jeunieb, meliputi Gampong Blang Mee Barat, Matang Nibong, Matang Teungoh, Matang Bangka, Blang Lancang, Lancang, Blang Mee Timu dan Teupin Kupula.
- Kecamatan Peulimbang, meliputi Gampong Krueng Baro, Seuneubok Peulimbang, Keude Peulimbang, Rambong Payong, Seuneubok Seumawe, Kuta Tring dan Padang kasab.
- Kecamatan Peudada, meliputi Gampong Sawang, Blang Kubu, Meunasah Pulo, Matang Pasie, Matang Reulet, Calok, Kukue, Meunasah Blang, Kampong Baro, Paya dan Seuneubok Paya.
- Kecamatan Jeumpa, meliputi: Gampong Teupok Tunong, Teupok Baroh, Cot Bada, Kuala Jeumpa, Blang Dalam, Lhak Mana, Mon Jambee, Batee Timoh, Lipah Rayek, Cot Geurundong, Lipah Cut dan Beurawang.
- Kecamatan Kuala, meliputi Gampong Krueng Juli Barat, Krueng Juli Timu, Ujong Blang Weu Jangka, Ujong Blang Mesjid, Kuala Raja, Cot U Sibak, Lancok dan Kareueng.
- Kecamatan Jangka, meliputi Gampong Alue Buya Pasi, Alue Buya, Pulo Iboih, Linggong, Tanoh Anoe, Tanjongan, Jangka Alue Bie, Jangka Alue Bie Pusong, Jangka Mesjid. Jangka Keutapang, Jangka Alue U, Paya Bieng, Pante Ranub, Pante Paku, Pante Sukon, Meunasah Oua, Bugak Mesjid, Pujot, Bugeng, Ulee Ceu, Alue Baye Utang, AlueKuta dan Kuala Ceurape
- Kecamatan Peusangan, meliputi Gampong Pulo Naleung, Mata Mamplam, Alue Geulumpang, Cot Rabo Tunong, Cot Pu'uk dan Cot Rabo Baroh.
- Kecamatan Kuta Blang, berada di Gampong Jambo Kajeung, dan Kecamatan Gandapura, meliputi: Gampong Mon Keulayu, Mon Jambee, Samuti Aman, Samuti Makmur, Cot Mane, Samuti Krueng, Lhok Mambang, Blang Keude, Lapangan Barat, Lingka Kuta, Alue Mangki, Teupin Siron dan Ie Rhob.

Material penyusun pantai di Kabupaten Bireuen, termasuk ke dalam klasifikasi pantai bervegetasi dengan hamparan mangrove. Hutan mangrove adalah suatu ekosistem habitat daerah pantai yang harus dipertahankan keberadaannya sebagai penyedia sumber daya alam dan sebagai penyangga kehidupan. Hutan mangrove adalah hutan yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga lantai hutannya selalu tergenang air. Berdasarkan data di tahun 2016 Kabupaten Bireuen memiliki pesisir pantai yang ditumbuhi vegetasi mangrove dengan luasan 357,88 ha dengan persentase terhadap luas 1,66

persen dan kerapatan yang cukup jarang yaitu 900 pohon/ha. Pantai di lokasi ini juga memiliki terumbu karang dengan luas 2 ha. Meski hanya memiliki luasan dibawah 5 persen akan tetapi terumbu karang ini bermanfaat sebagai penahan abrasi pantai yang sering terjadi. Kabupaten Bireuen garis pantai yang cukup, memiliki potensi pariwisata yang termasuk kedalam Sub Zona Wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil seperti berjemur, olahraga pantai, dan lain sebagainya. Dengan adanya pariwisata tentunya akan memberikan dampak positif terhadap penduduk setempat dengan meningkatnya pendapatan, dan munculnya mata pencaharian baru. Akan tetapi, selain sebagai sebuah potensi pariwisata juga memiliki permasalahan, salah satunya menghasilkan limbah yang mengganggu ekosistem alam. Limbah cair yang dihasilkan oleh hotel, wisma, losmen, pemandian, dan tempat-tempat wisata di sekitar pantai menghasilkan limbah padat dan limbah cair 187,25 m³/hari. Hal ini akan berdampak terhadap lingkungan, terutama lingkungan pesisir dan laut. Kandungan zat pencemar di dalam laut dapat menurunkan kualitas air laut yang pada akhirnya akan berdampak terhadap produksi ikan. Selain itu pencemaran air dapat mengakibatkan sedimentasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi biota di perairan. Oleh sebab itu, untuk zona pariwisata, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan dari kegiatan tersebut. Selain itu, sebagai lokasi yang berada dekat dengan laut, menjadikan banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Menurut hasil survey Statistik Perikanan Aceh tahun 2016 diketahui Kabupaten Bireuen memiliki jumlah nelayan 4.931 orang, atau 1,37 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bireuen. Memiliki armada penangkapan ikan berjumlah 1.567 unit, sehingga dapat menghasilkan produksi 25.634 ton/tahun dengan produksi nelayan 14.243 kg/orang/hari. Selain itu, Kabupaten Bireuen dikatakan melampaui kebutuhan konsumsi harian, dengan kata lain, mengalami surplus produksi. Kabupaten yang mengalami surplus produksi mensubstitusi kabupaten yang mengalami produksi. Zona perikanan tangkap di Kabupaten ini yaitu Subzona Perikanan Pelagis, dan Demersal.

2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah

Sumber daya alam yang ada di suatu wilayah, mampu memberikan dampak positif bagi penduduk di sekitarnya, salah satunya dalam bidang perekonomian. Industri ekstraktif merupakan industri yang bahan baku diambil langsung dari alam. Kabupaten Bireuen memiliki potensi perekonomian sekitar meliputi sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.

A. Pertanian

Kabupaten Bireuen memiliki kawasan pertanian yang sangat luas, meliputi hampir setiap kecamatan di Kabupaten Bireuen. Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Pengumpulan data luas panen dilakukan setiap bulan

dengan pendekatan area kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui pengukuran langsung pada plot ubinan berukuran 2,5 m x 2,5 m. Pengumpulan data produktivitas dilakukan setiap *subround* (empat bulanan) pada waktu panen petani. Pada tahun 2022, produksi padi tercatat sebesar 152.079 ton atau mengalami penurunan sebesar 7,78 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan produktivitasnya meningkat sebesar 1,78 persen dari tahun sebelumnya menjadi 65,5 kuintal per hektar.

B. Perkebunan

Potensi perkebunan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bireuen, berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen, secara keseluruhan luas areal tanaman kelapa mencapai 16.416,5 hektar pada tahun 2022. Dengan luas areal yang meningkat dari tahun lalu, nilai produksi tahun 2022 juga mengalami sedikit peningkatan. Produksi terbesar selanjutnya adalah pinang dan kelapa sawit, yang hampir sama dengan produksi dari tahun lalu, masing-masing sebesar 9.502,79 ton dan 5.858,7 ton. Perkebunan kelapa tersebar di Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Peudada, Kecamatan Peulimbang, dan Kecamatan Simpang Mamplam.

C. Perikanan

Dalam sektor perikanan, Kabupaten Bireuen juga memiliki kawasan komoditi unggulan perikanan budidaya yaitu budidaya udang windu, budidaya udang vannamei, budidaya ikan bandeng, budidaya ikan kerapu, budidaya ikan nila, serta pengembangan garam. Lokasi budidaya ini tersebar di seluruh pesisir pantai di Kabupaten Bireuen, berupa tambak dan kolam yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Bireuen meliputi Kecamatan Gandapura, Kecamatan Jangka, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Kuala, Kecamatan Kuta Blang, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Peudada, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Peusangan, Kecamatan Samalanga, dan Kecamatan Simpang Mamplam.

D. Kehutanan

Sebaran dan luasan hutan di Kabupaten Bireuen umumnya berada di daerah bagian selatan dengan ketinggian 500 meter hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah hutan yang termasuk ke dalam kawasan budidaya di daerah ini dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

- 1) Hutan Produksi, tersebar dibagian di wilayah selatan, yaitu di Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Peudada, Kecamatan Juli, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Peusangan Sibliah Krueng dan Kecamatan Makmur, dengan luas area hutan produksi 32.497,90 hektar.
- 2) Hutan Produksi Terbatas, tersebar dibagian di wilayah selatan, yaitu di Kecamatan Peulimbang dan Kecamatan Peudada, luas area hutan produksi terbatas 4.009,64 hektar.

- 3) Hutan Adat, tersebar dibagian di wilayah selatan, yaitu di Kecamatan Samalanga, Kecamatan Simpang Mamplam, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Jeunieb dan Kecamatan Peudada, dengan luas area hutan kawasan budidaya 28,89 hektar.

2.1.1.10. Wilayah Rawan Bencana

A. Kawasan Rawan Gerakan Tanah/Longsor

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Kabupaten Bireuen merupakan daerah rawan kerentanan gerakan tanah. Rencana pengamanan/proteksi kawasan rawan bencana gerakan tanah seluas 9.426,89 hektar yang umumnya berada di wilayah selatan, yaitu:

- a. Kecamatan Samalanga seluas 48,57 hektar.
- b. Kecamatan Peulimbang seluas 1.047,75 hektar.
- c. Kecamatan Juli seluas 8.330,66 hektar.

Pada daerah yang mempunyai kemiringan 25 – 40 persen dan > 40 persen, diperlukan penyelidikan kemantapan lereng secara rinci dan membangun bangunan pencegah gerakan tanah.

B. Kawasan Rawan Gempa

Potensi gempa yang ada di Kabupaten Bireuen mencakup seluruh kabupaten. Terbagi atas klasifikasi kawasan rawan bencana gempa tinggi dan kawasan rawan bencana menengah.

Daerah yang dikategorikan rawan bencana gempa bumi tinggi adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Gandapura seluas 4.766,14 hektar
2. Kecamatan Jangka seluas 3.758,02 hektar
3. Kecamatan Jeumpa seluas 10.913,76 hektar
4. Kecamatan Jeunieb seluas 11.254,58 hektar
5. Kecamatan Juli seluas 23.062,57 hektar
6. Kecamatan Kota Juang seluas 1.690,87 hektar
7. Kecamatan Kuala seluas 1.710,56 hktar
8. Kecamatan Kuta Blang seluas 3.870,13 hektar
9. Kecamatan Makmur seluas 6.857,36 hektar.
10. Kecamatan Pandrah seluas 11.400,97 hektar
11. Kecamatan Peudada seluas 31.281,45 hektar
12. Kecamatan Peulimbang seluas 12.787,15 hektar
13. Kecamatan Peusangan seluas 5.907,63 hektar
14. Kecamatan Peusangan Selatan seluas 7.841,53 hektar.
15. Kecamatan Peusangan Siblih Krueng seluas 8.459,20 hektar.
16. Kecamatan Samalanga seluas 14.139,09 hektar.
17. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 15.768,66 hektar.

Daerah yang dikategorikan rawan bencana gempa bumi menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Juli seluas 55,78 hektar.
- 2) Kecamatan Peusangan Selatan seluas 1.573,17 hektar.
- 3) Kecamatan Peusangan Siblih Krueng seluas 2.746,14 hektar.

C. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir, khususnya banjir musiman terjadi di saat musim penghujan tiba terjadi pada daerah wilayah pesisir hilir sungai, sehingga terjadi genangan pada kondisi musim tertentu seluas 35.267,56 hektar antara lain:

1. Kecamatan Gandapura seluas 4.731,37 hektar.
2. Kecamatan Jangka seluas 2.941,80 hektar.
3. Kecamatan Jeumpa seluas 6.920,57 hektar.
4. Kecamatan Jeunieb seluas 7.590,1 hektar.
5. Kecamatan Juli seluas 2.294,29 hektar.
6. Kecamatan Kota Juang seluas 653,25 hektar.
7. Kecamatan Kuala seluas 1.595,47 hektar.
8. Kecamatan Kuta Blang seluas 3.520,95 hektar.
9. Kecamatan Makmur seluas 1.382,31 hektar.
10. Kecamatan Pandrah seluas 926,45 hektar.
11. Kecamatan Peudada seluas 3.335,47 hektar.
12. Kecamatan Peulimbang seluas 4.293,60 hektar.
13. Kecamatan Peusangan seluas 3.178,33 hektar.
14. Kecamatan Peusangan Selatan seluas 713,96 hektar.
15. Kecamatan Peusangan Siblih Krueng seluas 172,14 hektar.
16. Kecamatan Samalanga seluas 8.430,92 hektar.
17. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 1.215,47 hektar.

2.1.1.11. Demografi

A. Distribusi Penduduk

Kabupaten Bireuen memiliki jumlah penduduk 443.874 jiwa yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan. Secara berturut-turut penduduk terbanyak berada di Kecamatan Peusangan dengan jumlah 53.453 jiwa atau 12,04 persen, Kecamatan Kota Juang dengan jumlah 47.983 jiwa atau 10,81 persen, Kecamatan Jeumpa dengan jumlah 37.686 jiwa atau 8,49 persen, dan Kecamatan Jangka dengan jumlah 29.120 jiwa atau 6,56 persen. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi tersebut, berada pada lokasi yang berdekatan yaitu pada sebelah timur atas Kabupaten Bireuen.

Sementara untuk kecamatan dengan jumlah penduduk terendah, secara berukuran dari terkecil meliputi Kecamatan Pandrah dengan jumlah 8.988 jiwa atau 2,02 persen, Kecamatan

Peusangan Siblah Krueng berjumlah 12.195 jiwa atau 2,75 persen, dan Kecamatan Peulimbang berjumlah 12.399 jiwa atau 2,79 persen. Untuk lebih jelas terkait sebaran dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022
Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	
		Jiwa	Persen
1	Samalanga	28.311	6,38
2	Sp Mamplam	27.632	6,23
3	Pandrah	8.988	2,02
4	Jeunieb	25.692	5,79
5	Peulimbang	12.399	2,79
6	Peudada	28.471	6,41
7	Juli	34.574	7,79
8	Jeumpa	37.686	8,49
9	Kota Juang	47.983	10,81
10	Kuala	19.150	4,31
11	Jangka	29.120	6,56
12	Peusangan	53.453	12,04
13	Peusangan Selatan	15.171	3,42
14	Peusangan Siblah Krueng	12.195	2,75
15	Makmur	15.923	3,59
16	Gandapura	24.174	5,45
17	Kuta Blang	22.952	5,17
Jumlah		443.874	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

B. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Bireuen memiliki luas wilayah 179.844,80 hektar, dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 mencapai 443.874 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk rata-rata 2 jiwa/hektar. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733 Tahun 2004 wilayah yang memiliki kepadatan < 150 jiwa/hektar termasuk ke dalam kepadatan rendah. Sehingga dapat diketahui bahwa Kabupaten Bireuen secara keseluruhan termasuk ke dalam klasifikasi kepadatan penduduk rendah.

Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Kota Juang dengan jumlah 28 jiwa/hektar. Hal ini dipengaruhi peran Kecamatan Kota Juang yang menjadi ibu kota kecamatan di Kabupaten Bireuen. Untuk kecamatan dengan kepadatan terendah memiliki jumlah 1 jiwa/hektar meliputi beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Pandrah, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Peudada, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

Untuk lebih jelasnya terkait jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2022
Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas	Kepadatan (Jiwa/Ha)	Klasifikasi
1	Samalanga	28.311	14.087,19	2	Rendah
2	Simpang Mamplam	27.632	15.772,05	2	Rendah
3	Pandrah	8.988	11.396,78	1	Rendah
4	Jeunieb	25.692	11.237,49	2	Rendah
5	Peulimbang	12.399	12.774,66	1	Rendah
6	Peudada	28.471	31.283,90	1	Rendah
7	Juli	34.574	23.118,35	1	Rendah
8	Jeumpa	37.686	10.886,02	3	Rendah
9	Kota Juang	47.983	1.690,87	28	Rendah
10	Kuala	19.150	1.724,56	11	Rendah
11	Jangka	29.120	3.748,92	8	Rendah
12	Peusangan	53.453	5.907,63	9	Rendah
13	Peusangan Selatan	15.171	9.414,70	2	Rendah
14	Peusangan Siblah Krueng	12.195	11.205,35	1	Rendah
15	Makmur	15.923	6.857,36	2	Rendah
16	Gandapura	24.174	4.655,82	5	Rendah
17	Kuta Blang	22.952	3.870,13	6	Rendah
	Bireuen	443.874	179.631,78	2	Rendah

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

C. Komposisi Penduduk

Struktur atau komposisi penduduk yang diuraikan pada pembahasan ini adalah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Komposisi umur menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan pada tahun 2022, hampir seluruhnya memiliki jumlah lebih besar yaitu dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Penduduk perempuan memiliki jumlah 224.835 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 219.039 jiwa, sehingga rasio penduduk yang dihasilkan adalah 97, untuk lebih jelas dapat dilihat Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022
Kabupaten Bireuen

Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio
	Laki-laki	Perempuan		
0-4	21.951	20.798	42.749	106
5-9	19.657	18.789	38.446	105

Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio
	Laki-laki	Perempuan		
10-14	19.599	18.223	37.822	108
15-19	19.791	18.799	38.590	105
20-24	19.427	18.671	38.098	104
25-29	19.177	18.558	37.735	103
30-34	18.223	17.597	35.820	104
35-39	16.262	16.236	32.498	100
40-44	14.264	15.443	29.707	92
45-49	13.079	14.286	27.365	92
50-54	11.364	12.289	23.653	92
55-59	8.734	10.224	18.958	85
60-64	6.725	8.292	15.017	81
65-69	5.004	6.744	11.748	74
70-74	3.241	4.695	7.936	69
75+	2.541	5.191	7.732	49
Jumlah	219.039	224.835	443.874	97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Kabupaten Bireuen memiliki struktur usia penduduk terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu usia anak yaitu 0 – 14 tahun, usia produktif yaitu 15 – 64 tahun dan usia tidak produktif yaitu diatas 65 tahun. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Bireuen termasuk ke dalam penduduk produktif yaitu 15 – 64 tahun mencapai 67,01 persen dari jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, memberikan dampak positif karena termasuk angkatan kerja. Dengan tingginya jumlah angka produktif memberikan kesempatan Kabupaten Bireuen dalam inovasi dan mengembangkan potensi-potensi secara optimal..

D. Kondisi Sosial Penduduk

Menurut indentitas keanggotaan masyarakat struktur sosial masyarakat Bireuen adalah heterogen, masyarakat Bireuen terdiri dari berbagai etnis yang menetap di wilayah Bireuen. Secara budaya masyarakat Bireuen adalah homogen, masyarakat Bireuen memiliki budaya yang sama baik dalam pernikahan, kehidupan sosial dan adat istiadat dan lain sebagainya. Mayoritas penduduk Bireuen adalah pemeluk agama Islam dengan jumlah sebanyak 441.988 jiwa pada tahun 2022. Selain itu, terdapat juga pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 146 jiwa, pemeluk agama Kristen Katolik sebanyak 22 jiwa, pemeluk agama Hindu sebanyak 14 jiwa dan pemeluk agama Budha sebanyak 306 jiwa.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Bireuen, ditinjau dari 3 fokus yakni kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, inflasi, PDRB per kapita, persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, pada umumnya dihitung dalam periode satu tahun. Berdasarkan nilai PDRB ini dapat diketahui keadaan atau kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen, serta bagaimana kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang ada terhadap pembangunan ekonomi.

Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen yang dihitung atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir (2018-2022) mengalami perkembangan yang fluktuatif, seperti disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Bireuen

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		(Rp)	%								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.917,98	30,44	3.043,43	30,24	3.161,08	31,73	3.140,37	30,27	3.246,43	30,00
2	Pertambangan dan penggalian	217,44	2,27	220,44	2,19	226,98	2,28	243,01	2,34	247,17	2,28
3	Industri pengolahan	150,48	1,57	153,68	1,53	149,18	1,50	150,24	1,45	155,80	1,44
4	Pengadaan listrik dan gas	8,69	0,09	9,56	0,09	10,29	0,10	10,66	0,10	11,28	0,10
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,34	0,05	5,23	0,05	5,27	0,05	5,39	0,05	5,90	0,05
6	Konstruksi	851,45	8,88	907,23	9,01	964,51	9,68	974,26	9,39	981,35	9,07
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2.486,09	25,93	2.620,66	26,04	2.490,31	25,00	2.603,71	25,10	2.749,92	25,41

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
8	Transportasi dan pergudangan	907,90	9,47	940,25	9,34	740,85	7,44	927,50	8,94	976,97	9,03
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	103,45	1,08	111,07	1,10	107,05	1,07	107,25	1,03	140,06	1,29
10	Informasi dan komunikasi	261,01	2,72	270,88	2,69	303,00	3,04	327,95	3,16	361,78	3,34
11	Jasa keuangan dan asuransi	98,31	1,03	106,76	1,06	109,72	1,10	108,32	1,04	106,54	0,98
12	Real estate	295,57	3,08	315,48	3,13	313,74	3,15	323,47	3,12	334,75	3,09
13	Jasa perusahaan	27,67	0,29	29,09	0,29	30,02	0,30	30,59	0,29	33,96	0,31
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	752,90	7,85	791,11	7,86	790,06	7,93	831,15	8,01	830,47	7,67
15	Jasa pendidikan	166,32	1,74	178,59	1,77	183,00	1,84	185,85	1,79	191,90	1,77
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	217,33	2,27	232,85	2,31	246,85	2,48	271,12	2,61	297,82	2,75
17	Jasa Lainnya	119,21	1,24	129,11	1,28	130,70	1,31	133,66	1,29	149,02	1,38
	PDRB ADHK	9.586,14	100,00	10.065,42	100,00	9.962,61	100,00	10.374,50	100,00	10.821,12	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pada tahun 2018 nilai PDRB ADHK sebesar 9,59 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2019 nilai PDRB ADHK menjadi 10,06 triliun rupiah. Tahun 2021 PDRB ADHK meningkat menjadi 10,37 triliun. Pada tahun 2022, nilai PDRB ADHK sudah mencapai 10,82 triliun rupiah. Selama lima tahun Bireuen telah mengalami kemajuan perekonomian dengan kenaikan PDRB ADHK sebesar 1,23 triliun rupiah. Kenaikan ini lebih kecil dibandingkan kenaikan nilai PDRB ADHB, hal ini dikarenakan kenaikan harga lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan jumlah produksi.

Dari sisi kontribusi, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih merupakan penyumbang utama walaupun turun dari 30,4 persen pada tahun 2018 menjadi 30 persen pada tahun 2022, kemudian lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan penyumbang kedua juga mengalami penurunan dari 25,93 persen pada tahun 2018 menjadi 25,41 persen pada tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan kontribusi lapangan usaha lain yaitu informasi dan komunikasi meningkat 2,72 persen menjadi 3,34 persen serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang meningkat dari 2,27 persen pada tahun 2018 menjadi 2,75 persen pada tahun 2022.

Sedangkan perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Bireuen selama tahun 2018-2021 mengalami tren yang naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 sebesar 12,09 triliun rupiah dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 15,41 triliun rupiah. Selama kurun waktu lima tahun kenaikan nilai PDRB ADHB Bireuen mencapai 3,32 triliun rupiah. Perkembangan PDRB ADHB menurut lapangan usaha selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.12.

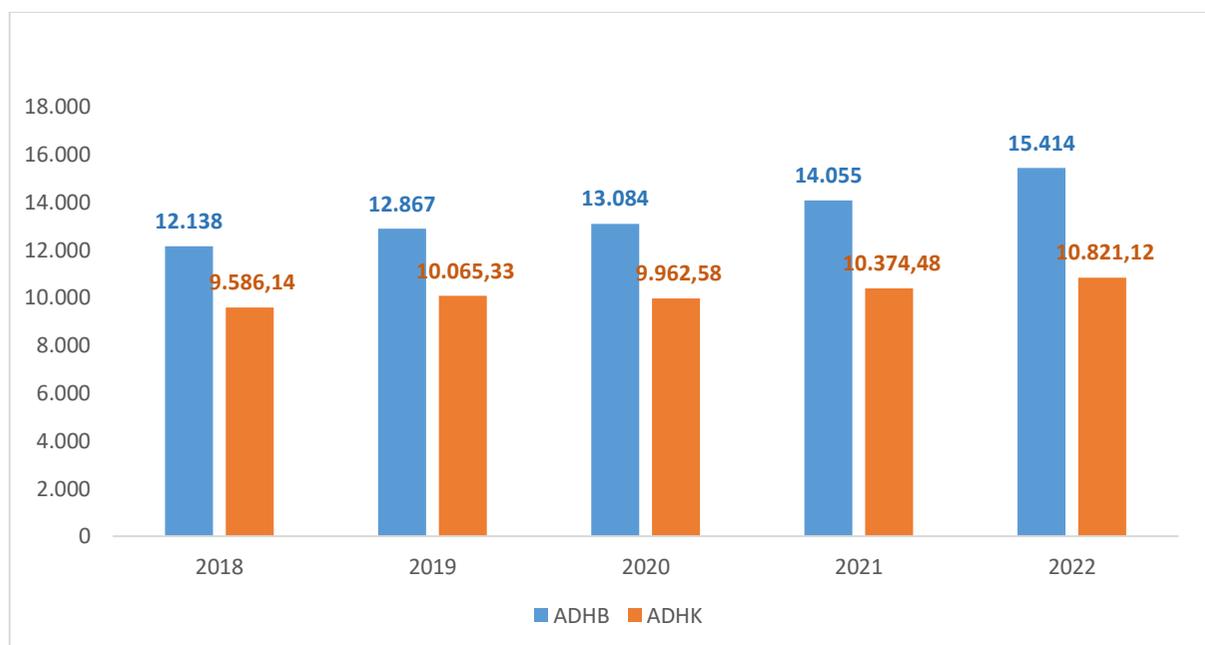
Tabel 2.12
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022
Atas Dasar Harga Berlaku (milyar rupiah)
Kabupaten Bireuen

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.015,05	33,20	4.267,36	33,11	4.525,25	34,59	4.725,31	33,62	5219,5	33,86
2	Pertambangan dan penggalian	255,12	2,11	265,02	2,06	282,96	2,16	316,56	2,25	350,93	2,28
3	Industri pengolahan	200,30	1,66	201,45	1,56	198,07	1,51	212,60	1,50	235,35	1,53
4	Pengadaan listrik dan gas	8,66	0,07	9,60	0,07	10,19	0,08	10,07	0,07	10,93	0,07
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6,98	0,06	8,67	0,07	8,90	0,07	9,00	0,06	9,87	0,06
6	Konstruksi	1.102,27	9,12	1.210,23	9,39	1.295,50	9,90	1.343,46	9,56	1454,52	9,44
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2.743,19	22,69	2.892,96	22,45	2.770,85	21,18	3.030,37	21,56	3327,14	21,58
8	Transportasi dan pergudangan	987,77	8,17	1.004,72	7,80	811,83	6,20	1.042,16	7,42	1213,65	7,87
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	143,21	1,18	160,51	1,25	160,33	1,23	149,26	1,06	207,86	1,35
10	Informasi dan komunikasi	272,33	2,25	285,85	2,22	315,86	2,41	333,96	2,38	374,78	2,43
11	Jasa keuangan dan asuransi	146,18	1,21	161,10	1,25	165,46	1,26	164,63	1,17	172,97	1,12
12	Real estate	385,17	3,19	420,64	3,26	430,72	3,29	439,22	3,13	462,52	3,00
13	Jasa perusahaan	39,25	0,32	42,80	0,33	45,22	0,35	47,08	0,33	56,79	0,37

No	Lapangan Usaha	2018		2019		2020		2021		2022	
		(Rp)	%								
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.086,68	8,99	1.171,23	9,09	1.215,38	9,29	1.309,58	9,32	1295,38	8,40
15	Jasa pendidikan	217,42	1,80	250,30	1,94	265,70	2,03	278,98	1,98	290,56	1,88
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	310,89	2,57	345,46	2,68	385,19	2,94	440,54	3,13	504,34	3,27
17	Jasa Lainnya	172,05	1,42	188,96	1,47	196,95	1,51	203,77	1,45	227,38	1,48
	PDRB ADHK	12.092,52	100,00	12.886,86	100,00	13.084,36	100,00	14.054,55	100,00	15.414,47	100,00

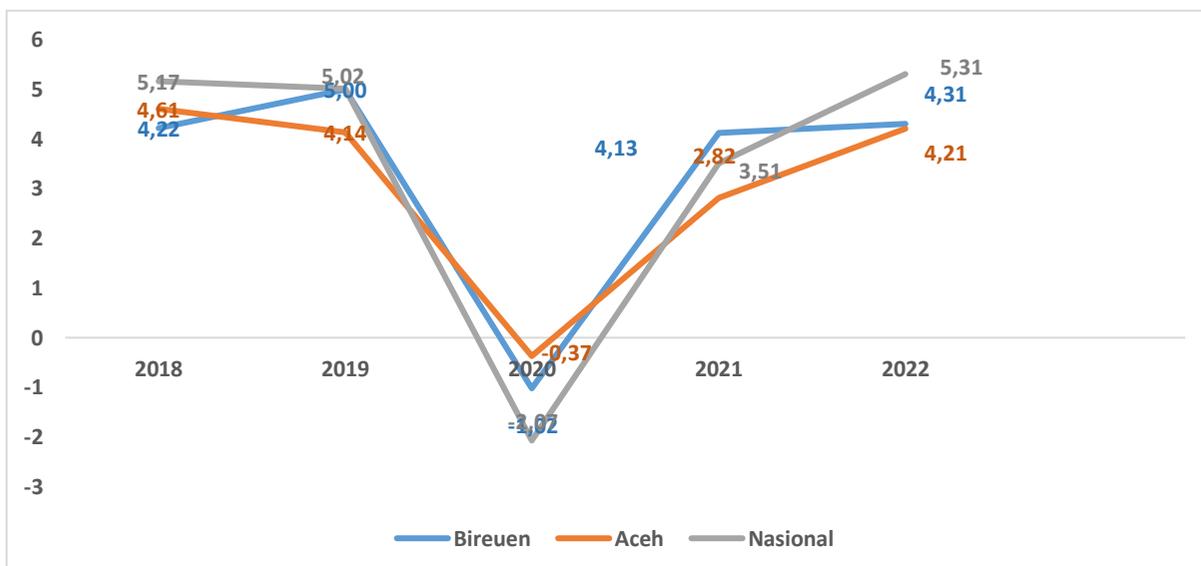
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Sedangkan perkembangan PDRB ADHB dan ADHK selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9. PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK yang disajikan secara berkala setiap tahun. Laju pertumbuhan PDRB ADHK tidak dipengaruhi oleh unsur harga. Harga pada PDRB ADHK bersifat tetap dan harga yang digunakan pada publikasi ini adalah tahun 2010 sebagai tahun dasar baru. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2018-2022 mengalami perkembangan dan sempat terkoreksi pada tahun 2020 karena covid 19. Pertumbuhan ekonomi Bireuen di tahun 2018 sebesar 4,23 persen meningkat menjadi 4,31 persen pada tahun 2022, meskipun meningkat laju pertumbuhan ekonomi Bireuen pada tahun 2022 masih dibawah capaian tahun 2019 (5 persen). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 s.d 2022

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 disebabkan pulihnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang berkontribusi 33,86 persen terhadap PDRB dan sektor transportasi dan pergudangan yang memberikan kontribusi 21,58 persen. Untuk melihat stuktur perekonomian Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada PDRB ADHB, pada tahun 2022 perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Tabel 2.13
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Bireuen

No	Sektor	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	33,2	2,72	33,11	4,3	34,59	3,87	33,62	-0,66	33,86	3,38
2	Pertambangan dan penggalian	2,11	-6,13	2,06	1,38	2,16	2,96	2,25	7,06	2,28	1,71
3	Industri pengolahan	1,66	4,08	1,56	2,13	1,51	-2,93	1,5	0,71	1,53	3,71
4	Pengadaan listrik dan gas	0,07	9,53	0,07	9,95	0,08	7,66	0,07	3,64	0,07	5,83
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,06	7,82	0,07	20,59	0,07	0,74	0,06	2,3	0,06	9,47
6	Konstruksi	9,12	6,43	9,39	6,55	9,9	6,31	9,56	1,01	9,44	0,73
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	22,69	6,65	22,45	5,41	21,18	-4,97	21,56	4,55	21,58	5,62
8	Transportasi dan pergudangan	8,17	0,92	7,8	3,56	6,2	-21,21	7,42	25,19	7,87	5,33
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,18	6,35	1,25	7,36	1,23	-3,62	1,06	0,19	1,35	30,59
10	Informasi dan komunikasi	2,25	1,73	2,22	3,78	2,41	11,86	2,38	8,23	2,43	10,32
11	Jasa keuangan dan asuransi	1,21	1,1	1,25	8,6	1,26	2,77	1,17	-1,28	1,12	-1,64
12	Real estate	3,19	5,43	3,26	6,74	3,29	-0,55	3,13	3,1	3,00	3,49
13	Jasa perusahaan	0,32	5,24	0,33	5,11	0,35	3,2	0,33	1,93	0,37	10,99
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	8,99	6,74	9,09	5,08	9,29	-0,13	9,32	5,2	8,40	-0,08
15	Jasa Pendidikan	1,8	6,16	1,94	7,38	2,03	2,47	1,99	1,56	1,88	3,26

No	Sektor	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	2,57	6,91	2,68	7,14	2,94	6,01	3,13	9,83	3,27	9,85
17	Jasa lainnya	1,42	3,47	1,47	8,3	1,51	1,23	1,45	2,27	1,48	11,49
	PDRB ADHB	100	4,22	100	5	100	-1,02	100	4,13	100	4,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Tren peningkatan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK hingga tahun 2022 harus diakui sebagai bagian dari upaya kerja keras pemerintah daerah melalui implementasi berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini, serta upaya dan peran serta masyarakat dan pelaku dunia usaha/swasta dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14

**Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022
Kabupaten Bireuen**

No	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb	Hk
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	10,46	3,38
2	Pertambangan dan penggalian	10,86	1,71
3	Industri pengolahan	11,75	3,71
4	Pengadaan listrik dan gas	8,54	5,83
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	9,67	9,47
6	Konstruksi	8,27	0,73
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	9,79	5,62
8	Transportasi dan pergudangan	16,46	5,33
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	39,26	30,59
10	Informasi dan komunikasi	12,22	10,32
11	Jasa keuangan dan asuransi	5,07	-1,64
12	Real estate	5,30	3,49
13	Jasa perusahaan	20,62	10,99
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-1,08	-0,08
15	Jasa Pendidikan	4,15	3,26
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	14,48	9,85
17	Jasa lainnya	11,59	11,49
	PDRB	9,68	4,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Jika ditinjau lebih jauh berdasarkan peran sektoral dalam pembentukan nilai PDRB ADHK, terlihat bahwa sektor pertanian selama ini masih terus memiliki peran yang paling dominan diantara sektor-sektor lain dalam struktur perekonomian daerah Kabupaten Bireuen,

bahkan saat efek dari Covid-19 sektor pertanian tetap tumbuh positif. Tahun 2021 PDRB sektor pertanian tumbuh negatif, sebagai akibat dari berkurangnya produksi komoditas pertanian dan meningkatnya PDRB sektor transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Secara absolut nilai tambah produksi sektor pertanian dalam PDRB ADHK meningkat selama kurun waktu tahun 2021-2022. Pada tahun 2021 nilai PDRB ADHK sektor pertanian telah tercatat sebesar 3,246 triliun. Hal ini mengidentifikasi bahwa kurun waktu antara tahun 2021–2022, besaran kontribusi sektor pertanian dalam PDRB ADHK Kabupaten Bireuen mengalami penurunan rata-rata 0,89 persen.

2.1.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Bireuen dapat dicermati dari angka inflasi di Kota Lhokseumawe. Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe menunjukkan, tingkat inflasi di daerah Lhokseumawe berada di atas rata-rata nasional, dan bahkan berada di atas Kota Banda Aceh (pada tahun tertentu).

Data inflasi tahun 2022 Kabupaten Bireuen mengacu pada Kota Lhokseumawe yang mengalami inflasi sebesar 5,37 persen, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021 (1,97 persen). Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,13 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 5,12 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,84; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,52 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,33 persen; kelompok transportasi sebesar 20,65 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,59 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 7,49 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,13 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,76 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,47 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2022, antara lain: bensin, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, beras, bahan bakar rumah tangga, udang basah, rokok kretek filter, telur ayam ras, ketupat/lontong sayur, bawang merah dan angkutan antar kota.

Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2022 untuk Kota Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 1,51 persen, Kota Meulaboh mengalami deflasi sebesar 0,98 persen. Kota Banda Aceh mengalami inflasi sebesar 0,64 persen. Untuk provinsi Aceh inflasi sebesar 0,93 persen dan Nasional inflasi sebesar 0,66 persen.

Tahun kalender November 2022 (Januari-Desember) 2022 untuk Kota Lhokseumawe sebesar 5,37 persen, Kota Meulaboh sebesar 6,56 persen, Kota Banda Aceh sebesar 6,00 persen. Untuk Provinsi Aceh sebesar 5,89 persen dan Nasional sebesar 5,51 persen

Tabel 2.15
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Inflasi Nasional	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51	0,60
2	Inflasi Aceh	1,84	1,69	3,54	0,71	5,89	1,01
3	Inflasi Lhokseumawe	2,05	1,2	3,55	1,97	5,37	0,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Inflasi di Kabupaten Bireuen merujuk pada Kota Lhokseumawe sebesar 5,37 pada tahun 2022, meningkat dibandingkan tahun 2018 (2,05) dengan rata-rata pertumbuhan 0,83 persen per tahun. Angka ini lebih baik dari inflasi Aceh sebesar 5,89 persen pada tahun 2022 dan inflasi nasional sebesar 5,51.

Langkah strategis yang ditujukan untuk menjaga inflasi perlu dipikirkan oleh pemerintah. Ada beberapa langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi yaitu pertama, menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (*volatile food*) dalam kisaran 3,0 - 5,0 persen dengan strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Kedua, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi. Ketiga, memperkuat sinergi antar Kementerian/ Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional antara lain melalui program *food estate* serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam. Keempat, menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kelima, pemerintah daerah juga harus mampu menyepakati sasaran inflasi 3 (tiga) tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124/010/2017 tentang Sasaran Inflasi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Sasaran inflasi tersebut diharapkan bisa menjangkau pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat ke depan, terutama dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan bisa mendukung pemulihan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan.

2.1.2.1.3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu wilayah. Semakin besar pendapatan perkapitanya, maka semakin besar

juga kemungkinan wilayah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB perkapita Bireuen menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bireuen rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar 25,17 juta rupiah di tahun 2017, kemudian meningkat terus hingga menjadi 31,95 juta rupiah di tahun 2021. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi pada tahun 2021. Sedangkan secara riil dapat dilihat melalui nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang sudah menghilangkan pengaruh inflasi. Secara umum laju pertumbuhan PDRB perkapita pada periode 2018-2022 mengalami peningkatan dengan nilai yang cukup berfluktuatif. Namun laju pertumbuhan PDRB Per kapita riil di 2021 sebesar 3,34 persen

Tabel 2.16

**Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Tahun 2018 s.d. 2022
Kabupaten Bireuen**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB (milyar rupiah)					
	ADHB	12.092,52	12.886,85	13.084,37	14.054,53	15.414,47
	ADHK	9.586,14	10.065,43	9.962,58	10.374,48	10.821,12
2	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah}					
	ADHB	26.190	27.324	29.981	31.958	34.727
	ADHK	20.762	21.342	22.828	23.590	24.379
	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (Persen)	2,31	2,79	-2,73	13,64	3,34
	Jumlah Penduduk (orang)	461.726	471.635	436.418	439.788	443.874
	Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1,88	2,15	-0,07	0,80	0,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

2.1.2.1.4. Indeks Gini

Indeks gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat, sehingga daerah dapat mempergunakan indeks gini untuk

mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi. Nilai Indeks gini berkisar antara 0 dan 1, koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna. Data selama 5 (lima) tahun indeks gini Kabupaten Bireuen dapat dilihat di Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Indeks Gini Tahun 2018 – 2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Bireuen	0,305	0,295	0,304	0,296	0,275	-2,49
2	Aceh	0,325	0,319	0,319	0,323	0,311	-1,08
3	Nasional	0,384	0,382	0,385	0,381	0,384	0,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Indeks gini Kabupaten Bireuen masuk kategori ketimpangan rendah karena sudah lebih kecil dari 0,3. Pada tahun 2018 sebesar 0,305 dan menurun menjadi sebesar 0,295 di tahun 2019. Pada tahun 2020, indeks gini menjadi 0,304, meningkat 0,09 poin dari tahun sebelumnya. Namun indeks gini 2021 dan 2022 kembali turun menjadi 0,296 dan 0,275 dan diharapkan dapat terus menurun di tahun berikutnya. Dengan semakin menurunnya indeks gini ratio ini dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Bireuen semakin merata.

Indeks gini ratio Kabupaten Bireuen sudah lebih baik dengan selisih 0,109 poin dari indeks gini ratio nasional memiliki angka yang lebih tinggi yaitu 0,384. Sementara dibandingkan dengan Provinsi Aceh, indeks gini Kabupaten Bireuen juga lebih baik dengan selisih 0,036.

Rata-rata pertumbuhan indeks gini Kabupaten Bireuen selama lima tahun terakhir (2018 s.d 2022) sebesar minus 2,49, artinya setiap tahun penurunan indeks gini rata-rata mencapai 2,49 persen. Angka rata-rata pertumbuhan ini lebih baik dari Aceh yang turun sebesar minus 1,08 setiap tahun dan nasional yang stagnan selama lima tahun terakhir. Kedepan diharapkan agar ketimpangan pendapatan semakin rendah.

2.1.2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang,

termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Penambahan jumlah penduduk miskin ini tidak terlepas dari peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan dimana komoditi ini jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sementara jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sedangkan komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi. Selain itu efek dari pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap penambahan jumlah penduduk miskin, terutama di sektor-sektor yang menurun pertumbuhan ekonomi, seperti angkutan dan perdagangan.

1) Persentase Penduduk Miskin

Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disuatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Badan pusat statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan Kabupaten Bireuen hingga tahun 2022 mencapai 60,29 ribu orang (12,51 persen). Angka ini turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 63,02 orang (13,25 persen).

Tabel 2.18
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Bireuen	14,31	13,56	13,06	13,25	12,51	-0,45
2	Aceh	15,68	15,01	15,43	15,53	14,64	-0,26
3	Nasional	9,66	9,22	10,19	9,71	9,54	-0,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

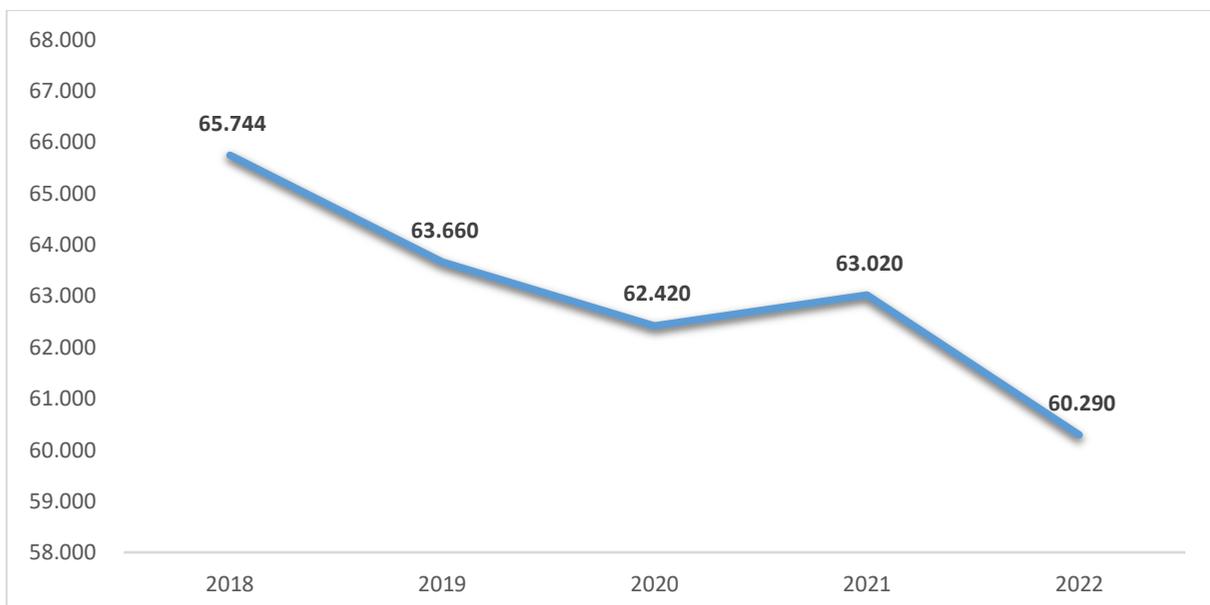
Tabel 2.18 menginformasikan capaian perkembangan persentase penduduk miskin 2018 s.d 2022 menunjukkan penurunan. Persentase penduduk miskin sempat naik pada tahun 2021. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 12,51 persen, lebih

baik dari Aceh yang mencapai angka 14,64. Namun masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional (9,54 persen).

Rata-rata Pertumbuhan penduduk miskin Kabupaten Bireuen selama periode 2018 s.d 2022 menunjukkan penurunan sebesar -0,45 persen. Rata-rata pertumbuhan ini lebih baik dari Aceh yang turun 0,26 per tahun dan nasional yang turun 0,03 persen per tahun.

2) Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen

Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disuatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bireuen tahun 2018 s.d 2022.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Gambar 2.11. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bireuen hingga tahun 2022 mencapai 60.290 orang. Angka ini turun dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 (65.744 orang). Akan tetapi jumlah penduduk miskin Kabupaten Bireuen masih dalam katagori tinggi, hal ini semakin menegaskan bahwa tugas pemerintah semakin berat dan mengharuskan untuk mempunyai kebijakan yang tepat sasaran sehingga persentase kemiskinan dapat semakin rendah dan diikuti dengan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah.

Persentase angka kemiskinan dan perhitungan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bireuen mengalami penurunan, namun tetap diperlukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di masa mendatang sehingga target Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen dapat tercapai.

3) Garis Kemiskinan

Kemiskinan diukur dengan membandingkan nilai konsumsi kebutuhan makanan dan non makanan per kapita dengan garis kemiskinan. Jika konsumsi per kapita suatu rumah tangga lebih rendah dari garis kemiskinan, maka rumah tangga tersebut masuk kategori miskin. Terkait angka kemiskinan dan garis kemiskinan Kabupaten Bireuen beserta angka perbandingannya, dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Statistik Penduduk Miskin Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)	358.399	393.198	410.203	422.685	451.163	5,95
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	14,31	13,56	13,06	13,25	12,51	-0,45
3	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	65.744	63.600	62.420	63.020	60.290	-2,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan sebagai dasar penentuan garis kemiskinan yang menjadi indikator kesejahteraan penduduk. Tren capaian perkembangan garis kemiskinan (persen) Kabupaten Bireuen tahun 2018 hingga 2022 semakin membaik dengan rata-rata pertumbuhan 5,95 persen. Begitu juga persentase penduduk miskin di Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 12,51 persen dengan rata-rata penurunan 0,45 persen. Artinya, sebanyak 12 dari 100 penduduk Kabupaten Bireuen merupakan penduduk miskin. Hal ini juga berbanding lurus dengan penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bireuen dari 65,74 ribu orang pada tahun 2018 menjadi 60,29 ribu orang pada tahun 2022.

Tabel 2.20
Perbandingan Statistik Penduduk Miskin Tahun 2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional

No	Uraian	Bireuen	Aceh	Nasional
1	Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)	451.163	579.227	513.170
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	12,51	14,64	9,54
3	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	60,29 ribu	806,82 ribu	26,161 juta

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Mengingat persoalan kemiskinan yang bersifat kompleks dan multidimensi, upaya penanggulangan kemiskinan kiranya perlu terus diupayakan pelaksanaannya secara terpadu dan bersifat lintas sektoral, dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dengan hal tersebut.

4) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Indeks kedalaman kemiskinan berfungsi sebagai nilai agregat dari *poverty gap index* yang menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Tabel 2.21
Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Bireuen	2,31	1,77	1,95	2,07	2,08	-0,02
2	Aceh	2,8	2,58	2,85	2,95	2,49	-0,02
3	Nasional	1,63	1,5	1,75	1,67	1,59	0,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dari Tabel 2.21 diatas indeks kedalaman kemiskinan penduduk Kabupaten Bireuen setiap tahunnya lebih rendah dari dari Provinsi Aceh namun masih di atas kedalaman kemiskinan nasional. Pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan Bireuen mencapai angka 2,08, lebih baik dari capaian indeks kedalaman kemiskinan Aceh (2,49) namun masih belum mencapai angka indeks kedalaman kemiskinan nasional (1,59).

Rata-rata pertumbuhan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bireuen turun sebesar 0,2 persen per tahun, sama dengan rata-rata pertumbuhan Aceh dan lebih baik dari rata-rata pertumbuhan nasional yang tumbuh 0,0 persen. Indeks kedalaman kemiskinan Bireuen meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis kemiskinan.

Kebijakan dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menurunkan indeks kedalaman kemiskinan, dimana penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin, sehingga semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.22
Indeks Keparahhan (P2) Kemiskinan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Bireuen	0,53	0,40	0,45	0,40	0,53	0,02
2	Aceh	0,72	0,67	0,83	0,81	0,61	-0,03
3	Nasional	0,41	0,36	0,47	0,42	0,39	0,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Tren indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bireuen berfluktuatif, setelah sempat turun pada tahun 2019, indeks keparahan kemiskinan Bireuen kembali meningkat pada tahun 2020 (0,45). Untuk pencapaian posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebesar 0,53 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 2021 (0,4). Capaian P2 Kabupaten Bireuen sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Capaian P2 Provinsi Aceh yang berada di angka 0,61 persen namun lebih tinggi dibandingkan P2 nasional sebesar 0,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu berusaha lebih keras untuk melakukan upaya perbaikan dan melakukan pengurangan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bireuen.

5) Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan eskترم – setara dengan *USD 1.9 PPP*. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dalam laporan *Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific* (2019) bahwa pada tahun 2017 nilai *US \$ 1,9 PPP* \approx Rp10.195,6 per kapita per hari, untuk tahun selanjutnya digerakkan dengan perubahan IHK periode tahun yang bersesuaian.

Menindaklanjuti arahan Presiden terkait kemiskinan ekstrem rapat terbatas strategi penanggulangan kemiskinan kronis diharapkan pemerintah daerah untuk menangani kemiskinan ekstrem dan upaya ini tidak boleh berhenti agar target penurunan kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai nol persen.

Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi. Diharapkan pemerintah daerah dapat memastikan intervensi di berbagai sektor terus dilaksanakan terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan air bersih dapat terus diperkuat dengan mempertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan, serta upaya untuk melibatkan sektor swasta untuk berperan sebagai *off taker* produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Hal yang sama juga dikemukakan melalui arahan Wakil Presiden terkait kemiskinan ekstrem pada rapat pleno TNP2K koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan pada tanggal 25 agustus 2021 dimana kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus merumuskan manajemen pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem, termasuk memastikan konvergensi dan ketepatan sarannya, mengoordinasikan percepatan sinkronisasi kebijakan perlindungan sosial dan pemutakhiran DTKS yang terpadu, serta memastikan konvergensi program dan anggaran bantuan sosial dengan mempertajam program pemberdayaan, dengan tidak menyampingkan program infrastruktur penunjang, air bersih, sanitasi, dan perumahan.

Pemerintah kabupaten juga diharapkan dapat menindaklanjuti pembangunan *social registry* dan mampu segera menuntaskan pemutakhiran DTKS dengan menggunakan metodologi terbaik untuk menjamin akurasi dan kekinian data. Pemerintah pusat akan berupaya mengonsolidasikan program dan anggaran kementerian lembaga dan pemerintah daerah guna menghindari tumpang tindih dan duplikasi agar memastikan semua program dan kegiatan yang dikelola dapat diprioritaskan pada 212 kabupaten/kota di tahun 2022.

Tabel 2.23
Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2021 s.d 2022
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh

No	Uraian	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Simeulue	1,76	3,8	2,04
2	Aceh Singkil	5,80	3,52	-2,28
3	Aceh Selatan	2,02	0,94	-1,08
4	Aceh Tenggara	4,22	1,98	-2,24
5	Aceh Timur	3,43	2,86	-0,57
6	Aceh Tengah	5,01	4,69	-0,32
7	Aceh Barat	6,05	2,12	-3,93
8	Aceh Besar	2,75	2,75	0,00
9	Pidie	4,36	4,85	0,49
10	Bireuen	1,72	2,47	0,75
11	Aceh Utara	2,65	2,94	0,29
12	Aceh Barat Daya	3,96	1,24	-2,72
13	Gayo Lues	1,63	4,18	2,55
14	Aceh Tamiang	1,74	2,05	0,31

No	Uraian	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
15	Nagan Raya	5,39	3,63	-1,76
16	Aceh Jaya	2,75	1,41	-1,34
17	Bener Meriah	10,16	6,96	-3,20
18	Pidie Jaya	7,26	4,37	-2,89
19	Kata Banda Aceh	1,71	2,14	0,43
20	Kata Sabang	5,42	5,97	0,55
21	Kata Langsa	1,89	3,46	1,57
22	Kota Lhokseumawe	3,23	1,06	-2,17
23	Kota Subulussalam	2,90	2,03	-0,87

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 (diolah)

Tabel 2.24
Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2021 s.d 2022
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (ribuan jiwa)

No	Uraian	2021	2022	Pertumbuhan
1	Simeulue	1,69	3,7	118,93
2	Aceh Singkil	7,26	4,46	-38,57
3	Aceh Selatan	4,93	2,33	-52,74
4	Aceh Tenggara	9,23	4,39	-52,44
5	Aceh Timur	15,11	12,76	-15,55
6	Aceh Tengah	10,74	10,2	-5,03
7	Aceh Barat	12,81	4,54	-64,56
8	Aceh Besar	11,79	11,95	1,36
9	Pidie	19,71	22,15	12,38
10	Bireuen	8,2	11,89	45,00
11	Aceh Utara	16,62	18,65	12,21
12	Aceh Barat Daya	6,08	1,92	-68,42
13	Gayo Lues	1,55	4,01	158,71
14	Aceh Tamiang	5,23	6,23	19,12
15	Nagan Raya	9,07	6,19	-31,75
16	Aceh Jaya	2,62	1,37	-47,71
17	Bener Meriah	15,22	10,57	-30,55
18	Pidie Jaya	11,8	7,21	-38,90
19	Kata Banda Aceh	4,72	5,98	26,69
20	Kata Sabang	1,88	2,09	11,17
21	Kata Langsa	3,4	6,32	85,88
22	Kota Lhokseumawe	2,38	1,68	-29,41
23	Kota Subulussalam	6,76	2,25	-66,72

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 (diolah)

Dari Tabel 2.23 dan Tabel 2.24 estimasi persentase penduduk miskin ekstrem tahun 2022 di Kabupaten Bireuen mencapai 2,47 persen, meningkat dibandingkan tahun 2021 (1,72 persen). Pertumbuhan persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Bireuen mencapai 0,75 persen. Sedangkan estimasi jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebesar 11,89 ribu jiwa meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 8,2 ribu jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk ekstrem di Kabupaten Bireuen sebesar 45 persen. Target kemiskinan ekstrem tahun 2024 sebesar 0 persen.

Ada berbagai upaya pendekatan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem

1. Menjangkau rumah tangga miskin ekstrem yang belum menerima program
 - a. Memastikan rumah tangga miskin ekstrem masuk dalam DTKS
 - b. Menjadi prioritas penerima manfaat program
2. Mengusulkan program khusus dan tambahan bagi rumah tangga miskin ekstrem
 - a. Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia terutama pada kelompok miskin ekstrem
 - b. Aset transfer sebagai modal sosial dan ekonomi bagi kelompok miskin ekstrem
 - c. Penanganan kemiskinan wilayah untuk meminimalkan kantong kemiskinan

2.1.2.1.6. Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah salah satu bagian dari gambaran kesejahteraan sosial masyarakat di suatu daerah, yang ditentukan oleh jumlah angkatan kerja yang terdapat di suatu daerah dengan kemampuan daya serap tenaga kerja di daerah tersebut pada berbagai sektor. Kesempatan kerja juga sekaligus dapat menggambarkan peluang ketersediaan lapangan kerja bagi mereka yang mau dan mampu untuk dapat memperoleh pekerjaan, dimana semakin luas kesempatan kerja yang ada di suatu daerah, tentu akan semakin luas pula kesempatan bagi masyarakat di daerah tersebut untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakat yang dimiliki.

Sementara angkatan kerja (*labour force*) adalah keseluruhan jumlah penduduk yang sudah bekerja dan penduduk yang masih mencari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang sudah bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Peningkatan jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebanyak 232.157 orang, yang terdiri dari angkatan kerja laki-laki 138.317 orang dan angkatan kerja perempuan 93.840 orang. Penduduk angkatan kerja dibagi menjadi 222.404 orang bekerja dan 9.753 orang menganggur. Sedangkan yang bukan angkatan kerja meliputi, dengan masing-masing jumlah penduduk sebesar 30.983 orang bersekolah, 69.427 orang mengurus rumah tangga dan 27.983 orang melakukan kegiatan lainnya. Gambaran kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bireuen di bidang ketenagakerjaan tersebut dalam hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Jumlah Penduduk Berumur 15 Keatas Menurut Jenis Kegiatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2022
Kabupaten Bireuen

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Angkatan Kerja	138.317	93.840	232.157
	Bekerja	133.630	88.774	222.404
	Pengangguran Terbuka	4.687	5.066	9.753
2	Bukan Angkatan Kerja	35.403	92.990	128.393
	Sekolah	15.738	15.245	30.983
	Mengurus Rumah Tangga	2.010	67.417	69.427
	Lainnya	17.655	10.328	27.983
	Total	173.720	186.830	360.550

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Sedangkan untuk angkatan kerja paling banyak berada pada kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 29.194 orang. Sedangkan untuk angkatan kerja paling sedikit berada pada kelompok umur 9-15 tahun sebanyak 9.164 orang.

Tabel 2.26
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Tahun 2022
Kabupaten Bireuen

No	Kelompok Umur	Angkatan kerja
1	15-19	9.164
2	20-24	25.862
3	25-29	26.191
4	30-34	27.951
5	35-39	29.194
6	40-44	27.917
7	45-49	25.248
8	50-54	20.395
9	55-59	16.799
10	60+	23.436
	Jumlah	232.157

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Jumlah pengangguran di Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebanyak 9.753 orang terdiri dari TPT laki-laki sebanyak 4.687 orang dan TPT perempuan 5.066 orang. TPT Kabupaten Bireuen sebesar 4,2 persen yang berarti dari 100 angkatan kerja, terdapat 4 orang angkatan kerja yang sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja

Tabel 2.27
Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	213.661	226.030	233.033	233.321	232.157	0,021
2	Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	206.136	206.136	223.443	223.242	222.404	0,020
3	Jumlah Penduduk Tidak Bekerja	Orang	7.525	7.525	9.590	10.079	9.753	0,073
4	Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	96,48	96,12	95,88	95,68	95,80	-0,170
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	64,96	67,1	67,06	65,91	64,39	-0,142
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,52	3,88	4,12	4,32	4,2	0,170

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bireuen sebagian besar tergolong ke dalam angkatan kerja, yaitu sekitar 232.157 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sekitar 95,80 persen merupakan tergolong ke dalam penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) tahun 2022 sebesar 64,39 persen lebih rendah dari tahun 2018 yaitu sebesar 64,96 persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,2 persen. Walaupun TPT tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 namun rata-rata pertumbuhan TPT dari tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,046 persen, hal ini dipengaruhi oleh rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk tidak bekerja yang meningkat 0,073 persen per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah angkatan kerja. Perbandingan TPT Bireuen, Aceh dan nasional dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Perkembangan Persentase TPT Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	TPT Bireuen	3,52	3,88	4,12	4,32	4,2	0,17
2	TPT Aceh	6,36	6,2	6,59	6,3	6,17	-0,05
3	TPT Nasional	5,3	5,23	7,07	6,49	5,86	0,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.28, TPT Kabupaten Bireuen masih lebih baik jika dibandingkan dengan TPT Aceh dan Nasional. Namun rata-rata pertumbuhan TPT Bireuen dari tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,17 persen masih lebih tinggi dibandingkan Aceh (-0,05) dan nasional (0,14).

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, usia harapan hidup dan indeks pembangunan manusia.

2.1.2.2.1 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *Mean Years School (MYS)* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung untuk usia 25 tahun kebawah dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun keatas. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi sekolah masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 2.29
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	RLS Bireuen	9,17	9,27	9,28	9,29	9,31	0,38
2	RLS Aceh	9,09	9,18	9,33	9,37	9,44	0,95
3	RLS Nasional	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	1,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Dari Tabel 2.29 dapat dilihat bahwa angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebesar 9,31 tahun, namun capaian ini lebih rendah dari rata-rata lama sekolah Aceh sebesar 9,44 tahun dan lebih tinggi dari nasional sebesar 8,69 tahun. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan, namun rata-rata pertumbuhan masih rendah sebesar 0,38 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah Aceh (0,95 persen) dan nasional (1,56 persen).

Dengan capaian rata-rata lama sekolah sebesar 9,31 artinya penduduk Bireuen telah mampu menyelesaikan sekolah hingga tamat SMP, Hal ini bisa disebabkan karena keadaan ekonomi dan kesadaran masyarakat atau fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Bireuen yang semakin meningkat.

2.1.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka harapan lama sekolah Bireuen dibandingkan dengan Aceh dan nasional tahun 2018 hingga 2022 seperti pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	HLS Bireuen	14,81	14,82	14,83	14,84	14,86	0,084
2	HLS Aceh	14,27	14,3	14,31	14,36	14,37	0,175
3	HLS Nasional	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10	0,366

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bireuen tahun 2022 (14,86 tahun) sudah lebih baik dari HLS Aceh (14,36 tahun) dan nasional (13,10 tahun). Namun HLS Bireuen masih dibawah HLS kabupaten terdekat, yaitu Lhokseumawe (15,27 tahun) dan Pidie Jaya (14,98 tahun).

Angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan. Di tahun 2018 angka harapan lama sekolah sebesar 14,81 tahun ini terus meningkat di tahun 2022 menjadi 14,86. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Rata-rata pertumbuhan angka Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,084 persen per tahun. Walaupun menunjukkan angka positif, namun capaian ini masih lebih rendah dibandingkan Aceh yang tumbuh sebesar 0,175 persen per tahun dan nasional yang tumbuh 0,366 persen per tahun.

2.1.2.2.3 Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup adalah kemungkinan lamanya seseorang menjalani hidup sejak lahir sampai meninggal. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk program pengentasan kemiskinan.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat juga akan

meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan karena mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.31
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2018-2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Bireuen	70,92	71,16	71,22	71,26	71,48	0,140
2	Aceh	69,64	69,87	69,93	69,96	70,18	0,135
3	Nasional	71,2	71,34	71,47	71,57	71,85	0,162

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Angka Usia harapan hidup merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum dibanding dengan Provinsi Aceh, usia harapan hidup di Kabupaten Bireuen sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2022 angka harapan hidup di Kabupaten Bireuen sebesar 71,48, lebih tinggi dari angka harapan hidup Provinsi Aceh di tahun yang sama sebesar 70,18 tahun dan lebih rendah dari nasional sebesar 71,85. Peningkatan angka harapan hidup ini didorong oleh akses layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat yang semakin baik. Disamping itu keberhasilan Kabupaten Bireuen dalam menanggulangi penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal, dan penyakit-penyakit terkait gizi juga menjadi faktor pendukung dalam peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bireuen. Rata-rata pertumbuhan angka usia harapan hidup Bireuen sebesar 0,140 persen per tahun, lebih tinggi dari capaian Aceh namun lebih rendah dari capaian nasional.

2.1.2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang bisa digunakan sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Indikator ini penting karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan. Pembangunan manusia adalah suatu proses manusia agar mampu memiliki lebih banyak pilihan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan fisik). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun

melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyiratkan kondisi kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang terdiri dari komponen angka harapan Hidup (*Life Expectancy at Age*), Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*), dan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (*Purchasing Power Parity/PPP*). IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia dapat menjadi isyarat seberapa besarnya pembangunan yang telah dijalankan mampu memberi peluang penduduk untuk hidup secara layak, melalui hidup sehat, dan panjang untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih baik serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup layak.

Tabel 2.32
Indeks Pembangunan Manusia di Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	IPM Bireuen	71,37	72,27	72,28	72,33	73,16	0,447
2	IPM Aceh	71,19	71,90	71,99	72,18	72,80	0,403
3	IPM Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	0,380

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

IPM Bireuen tahun 2022 sebesar 73,16 lebih baik dari IPM aceh (72,8) dan IPM nasional (72,91). Rata-rata pertumbuhan IPM Bireuen sebesar 0,477 persen per tahun, namun diharapkan terus meningkat pada tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan IPM Aceh (0,403 persen) dan IPM nasional yang tumbuh 0,380 persen per tahun.

Jika dilihat dari proyeksi dalam RPJMK 2018-2022 untuk tahun 2022 ditargetkan berada pada indeks 72,3 artinya IPM Kabupaten Bireuen telah mampu melakukan pencapaian melebihi dengan target yang ditetapkan. Pencapaian IPM ini didapat dari akselerasi peningkatan dari ketiga unsur IPM yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga tujuan akhirnya

adalah peningkatan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi sebagai bentuk pencapaian keberhasilan pembangunan. Perbandingan IPM Bireuen dengan IPM kabupaten/kota lain di Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022
Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh

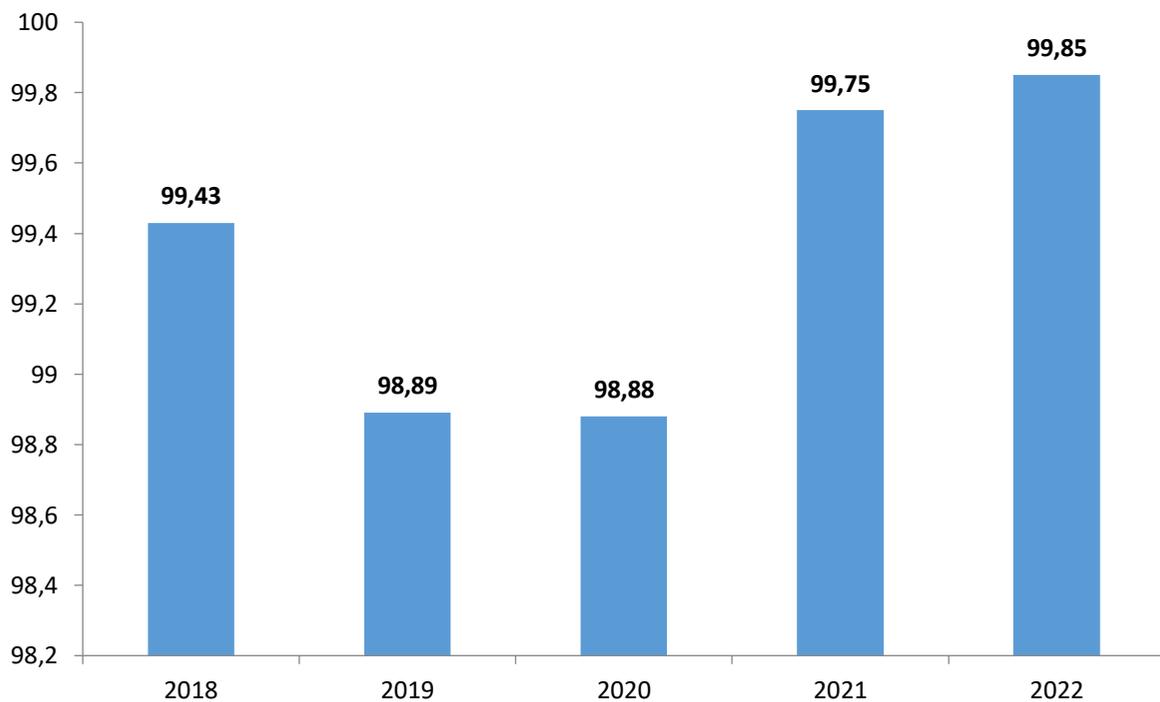
No	Uraian	RLS	UHH	HLS	Peng Perkapita	IPM
1	Banda Aceh	13,03	71,79	17,81	17.228	86,28
2	Lhokseumawe	11,12	71,87	15,27	11.701	78,04
3	Langsa	11,14	69,63	15,64	12.353	77,82
4	Sabang	11,19	70,79	14,4	11.780	76,85
5	Pidie Jaya	9,53	70,41	14,98	10.701	74,34
6	Aceh Besar	10,35	69,99	14,75	9.894	74,00
7	Aceh Tengah	9,87	69,05	14,61	10.957	73,95
8	Bener Meriah	10,01	69,48	13,71	11.421	73,90
9	Bireuen	9,31	71,48	14,86	9.438	73,16
10	Aceh Barat	9,87	68,19	14,63	9.775	72,34
11	Pidie	9,02	67,15	14,49	10.211	71,20
12	Aceh Tamiang	9,04	69,87	13,96	8.759	70,43
13	Aceh Jaya	8,72	67,4	14,01	10.041	70,36
14	Aceh Tenggara	9,92	68,48	14,26	8.222	70,32
15	Aceh Utara	8,73	69,01	14,73	8.620	70,22
16	Nagan Raya	8,95	69,45	14,16	8.581	70,10
17	Aceh Singkil	8,69	67,65	14,34	8.994	69,62
18	Aceh Timur	8,32	68,94	13,06	9.127	68,72
19	Gayo Lues	8,41	65,77	14,08	9.094	68,25
20	Aceh Selatan	8,89	64,64	14,69	8.353	67,87
21	Aceh Barat Daya	8,68	65,3	13,66	8.651	67,41
22	Simeulue	9,73	65,48	14,08	7.371	67,27
23	Subulussalam	8,22	64,3	14,81	7.689	66,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Meskipun IPM Bireuen terus meningkat, namun tahun 2022 IPM Kabupaten Bireuen berada pada posisi sembilan dibandingkan kabupaten lain di Aceh. IPM Kabupaten Bireuen masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pidie Jaya yang dengan nilai 74,34 dan Kota Lhokseumawe dengan IPM sebesar 78,04.

2.1.2.2.5 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini dianggap merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf suatu daerah, maka semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Kondisi angka melek huruf di Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar 2.12 .



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

**Gambar 2.12. Angka Melek Huruf Tahun 2018-2022
Kabupaten Bireuen**

Pada tahun 2018, angka melek huruf di Kabupaten Bireuen mencapai 99,43 persen. Pada tahun 2019 dan 2020, angka melek huruf turun menjadi 98,89 persen dan 98,88 persen. Pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 99,75 persen dan 99,85 persen pada tahun 2022.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1. Seni Budaya

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya serta potensi alam yang subur dan indah. Penduduknya yang relatif heterogen telah melahirkan budaya yang beraneka ragam. Penguatan budaya daerah yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam perlu terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen. Untuk kedepannya masih diperlukan upaya untuk menggali dan melestarikan serta mengembangkan adat, budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan syariat Islam.

Tabel 2.34
Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Grup Kesenian	122	142	142	152	152	5,86
2	Jumlah Gedung Kesenian	-	-	-	-	-	0,00
3	Jumlah karya budaya yang diinventarisasi	10	10	13	13	13	7,50
4	Jumlah sanggar yang dibina	15	20	25	40	40	29,58
5	Jumlah sanggar dibawah naungan DKA	38	44	50	50	50	7,36
6	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	5	1	3	1	19,58
7	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	64	64	65	78	65	1,22

Sumber : Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Ketersediaan grup kesenian dari tahun 2018 sampai tahun 2022 terus mengalami peningkatan dari 122 grup kesenian meningkat menjadi 152 grup di tahun 2022. Kabupaten Bireuen membutuhkan gedung kesenian yang dapat menampung apresiasi dan kreatifitas anak-anak muda dalam bidang seni dan budaya. Gedung kesenian merupakan sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk mawadahi aktifitas seni yang memiliki fasilitas seperti auditorium untuk melakukan pertunjukan dan galeri untuk melakukan sebuah pameran. Akan tetapi untuk mendukung pengembangan kesenian, hingga tahun 2022 belum tersedia gedung kesenian di Kabupaten Bireuen.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sedikit meningkat menjadi 65 unit pada tahun 2022, dibandingkan tahun 2018 (64 unit). Jumlah karya budaya yang direvitalisasi masih sangat minim, masih sebesar 61,54 persen dari jumlah karya budaya di Kabupaten Bireuen dan diharapkan mencapai 100 persen pada tahun 2026 dan even seni daerah yang dilaksanakan masih rendah. Jumlah sanggar yang dibina meningkat dari 15 sanggar pada tahun 2018 menjadi 40 sanggar pada tahun 2022, namun masih terdapat 10 sanggar dibawah naungan Dewan Kesenian Aceh yang belum dibina.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Bireuen juga masih sangat rendah, pada tahun 2022 hanya terdapat satu kali even seni dan budaya, turun dibandingkan tahun 2018 (4 kali).

2.1.2.3.2. Olahraga

Pembangunan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama

diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi.

Di bidang olahraga Kabupaten Bireuen mengalami cukup banyak kemajuan, terutama di cabang sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat daerah ini sehari-hari. Beberapa permasalahan yang penting dan perlu diatasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga di masa mendatang adalah masih terbatasnya keberadaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, upaya pembinaan dan penjarangan bibit atlet cabang olahraga prestasi yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, serta masih rendahnya bentuk pengakuan dan penghargaan bagi atlet berprestasi. Pembinaan terhadap olahraga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi.

Tabel 2.35
Perkembangan Olahraga Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Cabang Olahraga	32	35	35	37	35	2,42
2	Jumlah Gedung Olahraga	1	1	1	4	4	75,00

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Gedung olahraga di Kabupaten Bireuen juga perlu penambahan untuk menyalurkan bakat olahraga pemuda/pemudi disegala cabang olahraga. Sebagai pendukung upaya pemerintah dalam pelayanan dan peningkatan bidang olahraga, ketersediaan fasilitas sarana prasarana olahraga di Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 terdiri dari 290 lapangan bola kaki, 232 lapangan volley, 102 lapangan bulu tangkis, 4 lapangan basket, 10 lapangan futsal dan 5 lapangan tenis.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Fokus layanan urusan wajib meliputi bidang urusan, antara lain:

2.1.3.1.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

A.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan perbandingan dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2018 s.d. 2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Kelompok Usia 7-12 tahun						
	Bireuen	100	100	99,63	99,80	99,25	-0,188
	Aceh	99,86	99,75	99,84	99,67	99,44	-0,105
	Nasional	99,22	99,24	99,26	99,19	99,10	-0,030
2	Kelompok Usia 13-15 tahun						
	Bireuen	99,45	99	99,05	98,49	96,71	-0,685
	Aceh	96,49	98,52	98,49	98,42	97,96	0,368
	Nasional	95,36	95,51	95,74	95,99	95,92	0,140

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

APS merupakan tolak ukur daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Dari Tabel 2.36 terlihat bahwa APS Kabupaten Bireuen terus berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi APS jenjang pendidikan 7-12 tahun pada tahun 2022 sebesar 99,25 lebih rendah dari APS Aceh sebesar 99,25 dan lebih tinggi dari APS nasional sebesar 99,10. APS untuk jenjang pendidikan 13-15 tahun sebesar 96,71 lebih rendah dari APS Aceh di tahun yang sama 97,96 dan lebih tinggi dari APS nasional 95,92. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 100 anak yang berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun terdapat 1 anak yang tidak bersekolah.

Rata-rata pertumbuhan APS Kabupaten Bireuen kelompok usia 7-12 tahun dari tahun 2018 hingga 2022 turun 0,188 persen per tahun. Angka ini lebih rendah dari Aceh yang tumbuh negatif sebesar 0,105 persen per tahun dan nasional yang rata-rata turun 0,030 persen per tahun. Begitu juga rata-rata pertumbuhan APS Kabupaten Bireuen kelompok usia 13-15

tahun dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami penurunan hingga 0,685 persen per tahun. Pada rentang waktu yang sama APS Aceh tumbuh positif 0,368 persen per tahun dan APS nasional tumbuh 0,140 persen pertahun.

A.2 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan jumlah penduduk suatu daerah yang berusia antara 7 hingga 18 tahun yang saat ini terdaftar sekolah pada setiap tingkat pendidikan (SD/SLTP/SLTA) dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk berusia 7 hingga 18 tahun yang ada di daerah tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu. APM juga berguna untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37

**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	SD/MI						
	Bireuen	96,27	97,4	97,41	96,77	98,63	0,590
	Aceh	99,1	99,12	99,03	98,95	99,07	-0,008
	Nasional	97,48	97,58	97,65	97,72	97,88	0,100
2	SMP/MTs						
	Bireuen	83,37	82,92	84,15	83,48	83,78	0,102
	Aceh	86,38	86,48	86,87	86,95	88,21	0,458
	Nasional	78,75	79,35	80,02	80,47	80,89	0,535

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Pada Tabel 2.37 dapat dilihat APM SD/MI Kabupaten Bireuen Tahun 2022 sebesar 98,63 lebih rendah dari APM Aceh yang bernilai 99,07 namun lebih tinggi dibandingkan APM nasional (97,88). Begitu juga dengan kondisi APM SMP/MTs Kabupaten Bireuen, capaian tahun 2022 sebesar 83,78 lebih rendah dari APM Aceh (88,21) dan lebih tinggi dibandingkan APM nasional.

Rata-rata pertumbuhan APM tingkat SD/MI tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan sebesar 0,590 persen per tahun, angka ini lebih baik dari rata-rata pertumbuhan APM Aceh (minus 0,008 persen per tahun) dan APM nasional (minus 0,100 persen per tahun). Sedangkan rata-rata pertumbuhan APM SMP/MTS tahun 2018 s.d 2022 sedikit meningkat (0,102 persen per tahun), angka ini dibawah rata-rata pertumbuhan APM Aceh (0,458 persen per tahun) dan APM nasional (0,535 persen per tahun).

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bireuen sudah dapat merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan baik. Kondisi ini dapat memberikan gambaran bahwa meskipun terkadang mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif, tetapi dapat dikatakan terdapat peningkatan minat maupun kesadaran di kalangan masyarakat daerah ini akan arti penting pendidikan bagi diri pribadi maupun seluruh anggota keluarganya di tingkat SD/MI dan SMP/MTs.

A.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK juga mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Angka APK ini bisa lebih besar dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.38
Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	SD/MI						
	Bireuen	116,01	109,18	107,33	105,79	106,33	-2,420
	Aceh	113,85	109,93	108,7	108,1	108,34	-1,378
	Nasional	108,61	107,46	106,32	106,2	106,27	-0,585
2	SMP/MTs						
	Bireuen	96,81	91,29	93	91,98	89,64	-1,793
	Aceh	99,3	97,42	97,79	97,74	95,02	-1,070
	Nasional	91,52	90,57	92,06	92,8	92,11	0,148

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

APK tingkat SD/MI Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebesar 106,33 persen lebih rendah dibandingkan APK Aceh (108,34 persen) namun sedikit lebih tinggi dibandingkan APK nasional (106,27 persen). Sedangkan APK tingkat SMP/Mts Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 89,64 lebih rendah dibandingkan APK Aceh (95,02 persen) dan APK nasional (92,11 persen).

Rata-rata pertumbuhan APK tingkat SD/MI Kabupaten Bireuen tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren negatif sebesar 2,420 persen per tahun. Penurunan APK ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan APK SD/MI Aceh yang tumbuh negatif sebesar

1,378 persen dan nasional yang turun 0,585 persen per tahun. Hal serupa juga terjadi pada rata-rata pertumbuhan APK tingkat SMP/MTs tahun 2018 hingga 2022, dimana APK Bireuen tumbuh negatif 1,379 persen per tahun. Penurunan ini lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan APK Aceh (1,070 persen per tahun) dan nasional yang tumbuh positif sebesar 0,148 persen per tahun.

Hal ini disebabkan karena banyak usia sekolah tingkat SMP/MTs yang melanjutkan ke pendidikan pesantren/dayah. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya menambah fasilitas pendidikan juga meningkatkan kemampuan pendidik.

A.4 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Disamping itu juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Bireuen tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	SD/MI						
	Jumlah gedung sekolah (unit)	291	292	289	286	291	0,01
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (orang)	54.703	55.803	50.494	51.025	45.434	-4,35
	Rasio (per 10.000 penduduk)	53,20	52,33	57,23	56,05	64,05	4,99
2	SMP/MTs						
	Jumlah gedung sekolah (unit)	119	121	126	128	134	3,02
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (orang)	25.566	26.017	23.631	26.036	22.869	-2,35
	Rasio (per 10.000 penduduk)	46,55	46,51	53,32	49,16	58,59	6,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pada tahun 2022 rasio ketersediaan sekolah tingkat SD/MI mencapai rasio 64,05 per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun (SD/MI) sebanyak 45.434 orang tertampung di 291 gedung sekolah tingkat SD/MI. Gedung sekolah tingkat pertama atau SMP/MTS sebanyak 134 gedung. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) sebanyak 22.869 orang, tahun 2022 rasio untuk penduduk usia 13-15 tahun dan ketersediaan gedung sekolah per 10.000 penduduk adalah 58,59 persen.

A.5 Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio guru dan murid di Kabupaten Bireuen per jenjang pendidikan tahun 2022.

Tabel 2.40
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan Tahun 2022
Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Samalanga	316	3.160	1:10	277	4.205	1:15,1
2	Simpang Mamplam	353	3.077	1:8,7	150	1.753	1:11,6
3	Pandrah	96	931	1:9,6	69	377	1:5,4
4	Jeunieb	275	3.359	1:12,2	155	1.777	1:11,4
5	Peulimbang	115	1341	1:11,6	74	777	1:10,5
6	Peudada	368	3.175	1:8,6	153	1.158	1:7,5
7	Juli	373	3.923	1:10,	243	1.656	1:6,8
8	Jeumpa	284	3.635	1:12,7	171	1.301	1:7,6
9	Kota Juang	518	6.611	1:12,7	449	4.130	1:9,1
10	Kuala	161	2099	1:13,0	38	234	1:6,1
11	Jangka	395	2.970	1:7,5	144	976	1:6,7
12	Peusangan	767	6.328	1:8,2	454	4.335	1:9,5
13	Peusangan Selatan	193	1511	1:7,8	88	451	1:5,1
14	Peusangan Sibbleh Krueng	192	1252	1:6,5	114	382	1:3,3
15	Makmur	254	1.733	1:6,8	138	739	1:5,3
16	Gandapura	335	2.847	1:8,4	206	1.607	1:7,8
17	Kuta Blang	278	2.287	1:8,2	184	874	1:4,7
	Jumlah	5.273	50.239	1:9,5	3.107	26.732	1:8,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023 (diolah)

Dari Tabel 2.40, dapat dilihat pada tahun 2022 bahwa rasio guru-murid di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar 1 : 9,5 ini berarti satu orang guru melayani 9 sampai 10 murid, sedangkan untuk SMP/MTs sebesar 1 : 8,6 yang berarti rata-rata satu orang guru melayani sekitar 8 sampai 9 orang murid. Dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 1 : 16 untuk SD/MI dan 1 : 14 untuk SMP/MTs. Hal ini menunjukkan bahwa rasio guru-murid pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen lebih baik dibandingkan dengan nasional. Rasio guru yang tinggi tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen.

A.6 Kompetensi Tenaga Pendidik

Dalam pemenuhan pelayanan bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Bireuen terus berupaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan. Kualitas tenaga kependidikan merupakan kemampuan tenaga kependidikan untuk mengoptimalkan kinerjanya agar menghasilkan layanan yang optimal pada pelaksanaan pendidikan. Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.

Tabel 2.41
Jumlah Guru Bersertifikasi Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah guru PNS, PAUD, SD dan SMP (orang)	3.420	3.186	3.170	3.091	2.426	-7,84
2	Jumlah guru yang telah sertifikasi (orang)	1.821	1.023	1.865	1.673	1.615	6,18
3	Jumlah guru lulus sertifikasi (orang)	275	230	225	231	262	-0,61
4	Persentase guru sertifikasi tiap tahun (persen)	53,25	32,11	58,83	54,12	66,57	14,63
5	Persentase guru lulus sertifikasi /lulus PPG (orang)	15,10	22,48	12,06	13,81	32,30	37,73

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 (diolah)

Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi ditandai dengan persentase guru yang lulus sertifikasi. Pada tahun 2022 jumlah guru lulus sertifikasi sebanyak 262 orang, lebih rendah dari tahun 2018 (275 orang) dengan rata-rata pertumbuhan turun 0,61 persen. Persentase guru sertifikasi pada tahun 2022 sebanyak 66,57 persen lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 53,25 persen) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,63 persen.

B. Kesehatan

Kualitas kesehatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah, bahkan kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta tercapainya kesejahteraan rakyat. Pembangunan kualitas kesehatan antara lain bertujuan mengurangi jumlah penderita penyakit dan menekan timbulnya wabah penyakit, perbaikan gizi dan imunisasi balita, tersedianya sarana dan tenaga

pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, tersedianya sarana sanitasi serta berkembangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang cukup memadai akan sangat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat dicapai melalui upaya peningkatan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Dua faktor penting yang dapat mendukung perbaikan kondisi kesehatan adalah perbaikan kondisi sosial ekonomi penduduk dan peningkatan taraf pendidikan. Selain itu cara yang paling penting dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah penambahan dan perbaikan sarana kesehatan.

B.1 Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas, angka kematian ibu ini dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Tabel 2.42
Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Kasus Kematian Ibu (orang)	13	16	12	11	11	-2,56
2	Angka Kematian (per 100.000 KH)	152	187	142	129	135	-1,44

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 (diolah)

Angka kematian ibu per 100.000 KH pada tahun 2022 sebanyak 135 orang, angka ini turun dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 152 orang per 100.000 KH. Namun jika dibandingkan tahun 2021 terjadi peningkatan dari jumlah 129 orang. Perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu lima tahun ini masih bersifat fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata turun 2,56 persen per tahun.

Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga. Terdapat dua penyebab ibu meninggal saat meninggal yakni infeksi dan

perdarahan. Untuk yang penyebabnya infeksi sudah dapat ditekan karena sebagian besar kelahiran dilakukan di pusat layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan sebagainya.

Upaya percepatan penurunan angka kematian ibu telah banyak dilakukan, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui paket penempatan tenaga bidan dan polindes di berbagai pelosok pedesaan serta tenaga dokter di daerah tertinggal atau sangat tertinggal. Sedangkan dari aspek kualitas pelayanan, dilakukan pelayanan melalui upaya peningkatan kemampuan/kompetensi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan (PONED), serta berbagai program intervensi lain, namun upaya tersebut belum mampu menurunkan kasus kematian dan menekan angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Bireuen.

B.2 Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rote*)

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian bayi ini dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun.

Kegunaan dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Sedangkan Angka Kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka ini dihitung dari nilai 1 dikurangi dengan AKB, di mana angka 1 mewakili per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.43
Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Kasus Kematian bayi (orang)	107	123	99	110	110	1,64
2	Angka Kematian (per 1.000 KH)	12	14	12	13	13	3,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023 (diolah)

Selama ini telah dilakukan beberapa upaya untuk dapat menekan angka kematian bayi dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan dan hasilnya menunjukkan perbaikan yang sangat berarti. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bireuen dari tahun 2018 sampai tahun 2022 bersifat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 3,59 persen per

tahun, dimana pada tahun 2018 terdapat 107 kasus bayi yang meninggal, dengan angka kematian bayi 12 per 1.000 KH. Pada tahun 2022 angka kematian bayi kembali meningkat, dimana terdapat 110 kasus kematian bayi dengan angka kematian bayi 13 per 1.000 KH, artinya bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Bireuen terdapat 13 kematian bayi umur satu tahun untuk setiap 1.000 kelahiran, dengan jumlah kasus kematian sebanyak 110 kasus.

Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar dari segi preventif yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi. Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selain itu perbaikan gizi merupakan syarat utama dalam perbaikan kesehatan ibu hamil, menurunkan angka kematian bayi dan balita. Di samping itu untuk dapat menurunkan angka kematian bayi akan lebih mudah tercapai apabila ditunjang dengan sumber daya kesehatan yang berkualitas dan ketersediaan standar, pedoman, sistem pencatatan pelaporan serta logistik yang memadai dan bermutu.

Indikator untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *UCI (Universal Child Immunization)*. Desa *UCI* adalah gambaran suatu desa dimana harus diatas 80 persen dari jumlah bayi berusia 0 – 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap. Berbagai faktor yang menyebabkan makin turunnya angka cakupan imunisasi tersebut dan menjadi tantangan bagi program imunisasi di Kabupaten Bireuen adalah adanya penolakan dari masyarakat terhadap upaya imunisasi terhadap anak. Baik yang disebabkan karena ketakutan akan efek demam yang timbul pasca imunisasi ataupun efek lain yang dikhawatirkan terjadi. Para orang tua yang tidak membawa anaknya imunisasi karena sedang sakit di saat jadwal imunisasinya tiba, kemudian terlupa sehingga akhirnya tanpa imunisasi sama sekali. Demikian pula berbagai info yang tidak bertanggung jawab sudah banyak menyebar ke masyarakat baik itu melalui media social ataupun selebaran atau bahkan berupa buku dan tabloid sehingga menyebabkan gerakan anti vaksin semakin menunjukkan eksistensi nya di Kabupaten Bireuen.

B.3 Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah balita di wilayah tersebut pada waktu yang sama. Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan individu tersebut. Maka dari hal tersebut penanggulangan gizi buruk bukan saja tugas Dinas Kesehatan, namun sangat dibutuhkan juga peran serta masyarakat termasuk kepala keluarga untuk segera melaporkan jika bayi bermasalah dengan gizi. Peran posyandu diperlukan untuk memberikan pengetahuan mengenai sadar gizi untuk balita. Peningkatan angka kecukupan gizi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program prioritas yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus

menyeluruh dari penurunan angka kematian bayi, peningkatan gizi masyarakat, jaminan kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.

Tabel 2.44
Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR),
BBLR Dirujuk, Dan Bergizi Buruk Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Bayi Lahir (orang)	8.579	8.627	8.854	8.530	8.165	-1,19
2	BBLR (Orang)	232	262	267	291	317	8,19
3	Gizi Buruk (Orang)	17	5	13	6	10	25,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023 (diolah)

Dari tabel 2.44 Perkembangan upaya penanganan gizi buruk di Kabupaten Bireuen berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai angka 25,56 persen per tahun, begitu juga dengan BBLR meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 8,19 persen per tahun. Pada tahun 2018 jumlah BBLR 232 orang meningkat pada tahun 2022 menjadi 317 orang. Bayi dengan gizi buruk pada tahun 2018 sebanyak 17 orang turun menjadi 10 orang pada tahun 2022.

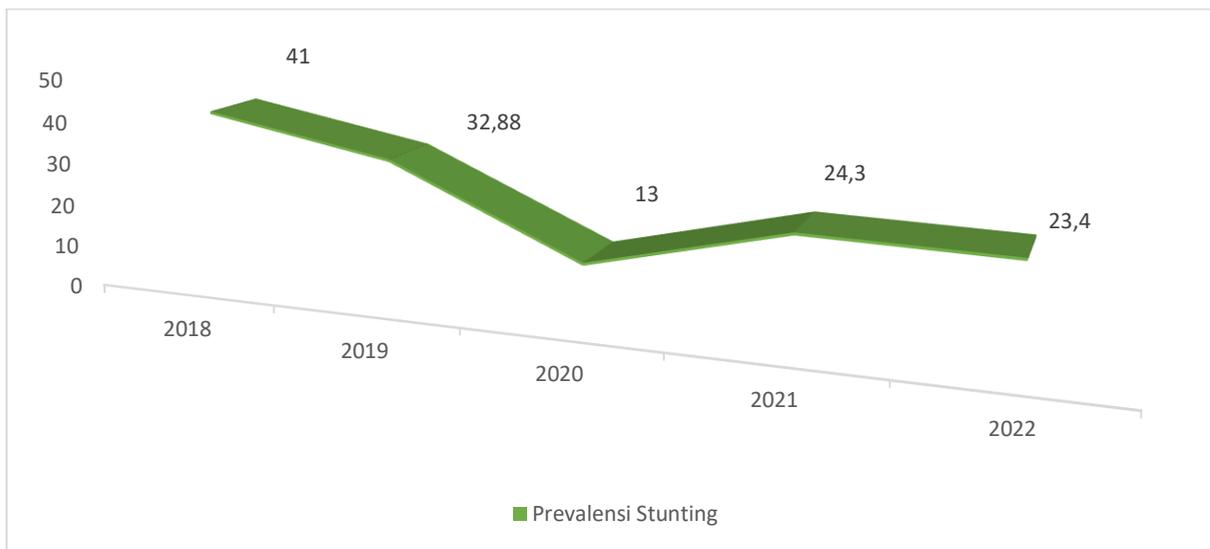
B.4 Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Penurunan *Stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive, dimana penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitive ini secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan *stunting*. Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi percepatan pencegahan *stunting* dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal ini didasari oleh angka prevalensi *stunting* Kabupaten Bireuen masih sangat tinggi.

Sebagai bentuk komitmen tinggi pemerintah pusat, penurunan *stunting* penting dilaksanakan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penurunan *stunting* telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan konvergensi penurunan *stunting* di kabupaten/kota, maka disusunlah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan konvergensi/integrasi intervensi gizi dalam penurunan

stunting. Terdapat delapan aksi konvergensi/integrasi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan intervensi Layanan untuk mencegah/mengatasi faktor-faktor penyebab *stunting*.



Sumber : Riset Kesehatan Dasar, SGGI Tahun 2023

**Gambar 2.13. Perkembangan Prevalensi Stunting Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen**

Prevalensi *stunting* Kabupaten Bireuen sempat menurun pada tahun 2020 menjadi 13, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 24,3. Tahun 2022, prevalensi *stunting* turun menjadi 23,4, lebih baik dari prevalensi *stunting* Aceh (31,2) dan lebih tinggi dari nasional (21,6). Angka belum mencapai target nasional yang menargetkan prevalensi *stunting* di tahun 2024 sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Upaya pencegahan *stunting* membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK). Untuk mencapai keterpaduan/integrasi tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Untuk memberikan panduan bagi proses integrasi intervensi di tingkat Kabupaten/Kota, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota, dimana sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan *stunting* yang merupakan salah satu prioritas nasional.

Kabupaten Bireuen sebagai salah satu 160 Kabupaten/kota lokasi fokus tambahan intervensi *stunting* terintegrasi tahun 2021 mempunyai peran yang sangat berat dimasa yang akan datang, dimana peran kabupaten adalah :

1. Menetapkan target penurunan *stunting* di kabupaten.
2. Mengembangkan kebijakan yang mendukung strategi nasional percepatan penurunan *stunting*.
3. Menetapkan program dan kegiatan sesuai konteks lokal.

4. Mengadakan rapat koordinasi.
5. Mengintegrasikan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* ke dalam Rencana Aksi Daerah Pangan (RAD- PG).
6. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi.
7. Melakukan pembinaan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan gampong.
8. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa untuk penurunan *stunting*.
9. Menyusun kebijakan kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi.
11. Melibatkan institusi non pemerintah.

Berbagai program penurunan *stunting* telah diselenggarakan namun belum efektif dan belum berada dalam skala yang memadai. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Bireuen, berupa :

- intervensi belum terintegrasi dengan baik sehingga belum sepenuhnya efektif untuk percepatan penurunan *stunting*
- kebijakan dan program penurunan *stunting* belum diterjemahkan dengan baik ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah
- kapasitas pelaksana program di daerah rendah
- kelembagaan dan koordinasi di pusat dan daerah masih belum optimal
- perilaku masyarakat belum sejalan dengan upaya percepatan penurunan *stunting* dan social masih rendah

Untuk menangani berbagai tantangan tersebut perlu dilakukan beberapa hal untuk seperti:

- Menetapkan target penurunan *stunting* dan menjadikan penurunan *stunting* menjadi prioritas dalam RPJMD, RKPD dan Renja OPD
- Mengembangkan kebijakan menjamin kesinambungan strategi nasional dan strategi daerah
- Menetapkan program dan kegiatan sesuai konteks lokal sebagai bentuk konvergensi lintas OPD, internalisasi dalam perencanaan dan penganggaran, inovasi program.
- Integrasi strategi nasional dan strategi daerah percepatan penurunan *stunting* ke dalam RAD sebagai payung besar perbaikan gizi dengan fokus penurunan *stunting*
- Memberikan dukungan teknis penguatan untuk mendorong komitmen kabupaten dan pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kabupaten
- Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengembangkan system monitoring evaluasi dan manajemen data dan penilaian kinerja kabupaten
- Mengoordinasikan pelibatan institusi non pemerintah (Dunia usaha, mitra pembangunan, perguruan tinggi)

B.5 Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Pemerintah Kabupaten Bireuen harus melakukan perhitungan rasio penduduk terhadap sarana pelayanan kesehatan yang ada, dimana rasio ini menggambarkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan ialah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu. Rasio ini berupa perbandingan antara jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di wilayah tersebut.

Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dapat diketahui banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh sebuah sarana pelayanan kesehatan. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Indikator tersebut harus disertai dengan kriteria standar dan target yang diinginkan. Kriteria standar untuk kecukupan tidak sama pada setiap wilayah, tergantung dari kebutuhan masyarakat dan jenis pelayanan. Karena itu sebaiknya kriteria standat ditentukan oleh masing-masing daerah. Perhitungan rasio ini pada berbagai wilayah akan menghasilkan distribusi sarana kesehatan yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menyusun rancangan pemerataan sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.45

Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Sakit	6	6	6	6	6
	Rasio per satuan penduduk	1:76.954	1:78.606	1:72.736	1:73.298	1:73.979
2	Jumlah Puskesmas	19	20	20	20	20
	Rasio per satuan penduduk	1:24301	1:23582	1:21821	1:21.989	1:22.194
3	Jumlah Pustu	50	55	51	48	48
	Rasio per satuan penduduk	1:9.234	1:8.575	1:8.557	1:9.162	1:9.247
4	Jumlah Penduduk	461.726	471.635	436.418	439.788	443.874

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 (diolah)

Pada tahun 2018 s.d 2022, jumlah rumah sakit sebanyak enam unit, terdiri dari satu rumah sakit daerah dan lima rumah sakit swasta, demikian juga dengan jumlah puskesmas sebanyak 20 unit, sedangkan puskesmas pembantu turun dari 50 unit menjadi 48 unit. Angka rasio rumah sakit pada tahun 2022 adalah 1:73.979, artinya satu rumah sakit melayani 73.298 jiwa, rasio puskesmas pada tahun 2022 adalah 1:22.194 dan rasio pustu adalah 1: 9.247.

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan perawatan yang berkesinambungan. Rumah sakit memiliki peran penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya.

Rumah sakit juga diharapkan memberikan pelayanan yang baik terhadap pengunjung. Pengukuran pelayanan yang diberikan diukur dengan indeks kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat untuk RSUD dr. Fauziah tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.46

Tabel 2.46
Skor IKM RSUD Dr. Fauziah Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	IKM (Persen)	84,85	-	-	80,93	94,4
2	Kategori	Baik	-	-	Baik	Baik

Sumber : RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Skor IKM RSUD dr Fauziah meningkat pada tahun 2022 (94,4 persen) dibandingkan dengan tahun 2018 (84,85 persen). Tahun 2019 dan 2020 tidak dilakukan survei karena Covid-19. Untuk kedepan capaian IKM diharapkan tetap mencapai 100 persen.

Disamping itu, Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di puskesmas, diperlukan adanya penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh komisi akreditasi dan/atau perwakilan di provinsi terhadap puskesmas untuk menilai apakah sistem manajemen mutu dan system penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Tentu saja akreditasi ini bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.

Tabel 2.47
Status Akreditasi Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Bireuen

No	Puskesmas	Status Akreditasi
1	Puskesmas Samalanga	Madya
2	Puskesmas Simpang Mamplam	Madya
3	Puskesmas Pandrah	Dasar
4	Puskesmas Jeunieb	Madya

No	Puskesmas	Status Akreditasi
5	Puskesmas Peulimbang	Madya
6	Puskesmas Peudada	Madya
7	Puskesmas Jeumpa	Madya
8	Puskesmas Kota Juang	Madya
9	Puskesmas Juli	Madya
10	Puskesmas Juli-2	Utama
11	Puskesmas Kuala	Madya
12	Puskesmas Peusangan	Madya
13	Puskesmas Peusangan Selatan	Utama
14	Puskesmas Peusangan Siblah Krueng	Dasar
15	Puskesmas Jangka	Madya
16	Puskesmas Kuta Blang	Madya
17	Puskesmas Makmur	Madya
18	Puskesmas Gandapura	Madya
19	Puskesmas Cot Ijue	Madya
20	Puskesmas Mon Kelayu	Madya

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

B.6 Rasio Dokter Per satuan Penduduk

Rasio dokter umum pada tahun 2022 adalah 1: 10.826 jiwa, ini menunjukkan satu orang dokter umum melayani 10.826 penduduk. Angka rasio dokter di Kabupaten Bireuen belum mencapai tahap ideal dimana idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokter Umum	250	34	30	28	41
2	Rasio per satuan penduduk	1:1.846	1: 12.872	1:16.011	1:15.706	1:10.826
3	Jumlah Dokter Spesialis	42	54	55	55	66
4	Rasio per satuan penduduk	1:10.993	1:8734	1:7934	1:7.996	1:6.725
5	Jumlah Dokter Gigi	30	5	4	4	4
6	Rasio per satuan penduduk	1:15.390	1:94.327	1:109104	1:109.947	1:110.969
7	Jumlah Penduduk	461.728	471.635	436.418	439.788	443.874

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023 (diolah)

Rasio dokter umum per satuan penduduk pada tahun 2022 sebesar 1:10.826 meningkat dari pada tahun 2018 (1:1.846). Sedangkan rasio dokter spesialis semakin baik dari 1;10.933

pada tahun 2018 menjadi 1:6.725 pada tahun 2022. Sedangkan rasio dokter gigi menjadi 1:110.969 pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 (1:15.390). Jumlah dokter spesialis di Kabupaten Bireuen masih sangat kurang, ini terlihat dari jumlah dokter spesialis yang ada hanya mencapai 66 orang dengan rasio 1 : 6.725 dengan artian satu orang dokter spesialis melayani 6.725 penduduk. Salah satu kendalanya ialah tidak semua Fakultas Kedokteran (FK) dapat membuka pendidikan spesialis. Hanya FK yang akreditasinya sudah A, yang diperbolehkan membuka pendidikan spesialis.

Menurut WHO rasio ideal jumlah dokter gigi dengan penduduk yaitu 1:2.000. Sementara keberadaan dokter gigi di Kabupaten Bireuen dibandingkan dengan jumlah penduduk masih di bawah rasio ideal yakni 1:109.947 dalam artian bahwa satu orang dokter gigi melayani 109.947 penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya menghasilkan lulusan dokter gigi adalah adanya keterlambatan dalam pendidikan profesi. Normalnya pendidikan profesi ditempuh dalam waktu 1,5-2 tahun. Namun kenyataannya hampir 50 persen mahasiswa menempuh pendidikan profesi lebih karena berbagai faktor. di antaranya mahasiswa ko-ass kesulitan mendapatkan profil pasien yang tepat sesuai kebutuhan atau persyaratan, di samping itu juga persoalan jadwal turut berkontribusi dalam memperlambat pendidikan profesi ini. Kesulitan yang umum dialami adalah jadwal ko-ass yang tidak tepat dengan pemeriksaan pasien karena kegiatan pasien, sementara ko-ass dibatasi waktu.

B.7 Fasilitas Kesehatan Lainnya

Untuk mendukung pembangunan kesehatan, fasilitas kesehatan selain rumah sakit dan puskesmas juga memegang peranan penting. Sarana sediaan farmasi pendukung tersebut antara lain apotik dan toko obat berizin. Perkembangan jumlah sarana sediaan farmasi di Kabupaten Bireuen Tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49
Sarana Sediaan Farmasi Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Toko Obat Berizin	27	27	26	27	28	0,96
2	Apotik	34	36	36	40	49	9,87

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 (diolah)

Dari Tabel 2.49, jumlah toko obat berizin dan apotik terus meningkat. Toko obat berizin pada tahun 2022 mencapai angka 28 unit meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 27 unit dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 0,96 persen per tahun, sedangkan apotik meningkat dari 34 unit menjadi 49 unit pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan 9,87 persen per tahun.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1 Prasarana Transportasi Jalan

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan. Dengan pemerataan pembangunan jalan diharapkan akan tercapainya keseimbangan pembangunan antar daerah dan mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sehingga perekonomian nasional dapat berjalan stabil sepanjang waktu.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini diantaranya adalah dengan terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana transportasi sebagai urat nadi roda perekonomian yang menunjang aktifitas sektor lainnya. Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Status/Kelas Jaringan Jalan							
	Jalan Nasional	Km	105,30	105,30	105,30	105,30	105,30	0,00
	Jalan Provinsi	Km	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	0,00
	Jalan Kabupaten	Km	1.207,67	1.207,67	1207,67	1207,67	1207,67	0,00
2	Jenis Permukaan Jalan Kabupaten							
	Aspal	Km	651,72	682,32	668,56	707,26	732,61	3,79
	Kerikil/Pengerasan	Km	440,85	410,25	400,79	365,56	359,13	-4,95
	Tanah	Km	102,84	102,84	118,71	112,66	94,58	-1,43
	Lainnya	Km		12,26	19,61	22,19	21,24	22,94
3	Kondisi Jalan Kabupaten							
	Mantap	%	41,1	46,19	52,43	57,54	58,37	4,32
	Baik	Km	440,81	503,64	590,53	618,25	656,89	10,61
	Sedang	Km	55,53	54,23	44,7	76,69	48,02	3,57
	Rusak Ringan	Km	109,8	93,48	306,5	231,83	32,26	25,64
	Rusak Berat	Km	601,53	556,33	269,95	280,9	470,5	3,14
4	Kondisi Jalan Provinsi							
	Baik	Km	2,74	1,99	4,24	4,24	4,79	24,67
	Sedang	Km	0,55	0,77	1,05	1,05	0,3	1,23
	Rusak	Km	1	2,6	0	0	0,2	
	Belum Tembus	Km	1	NA	0	0	NA	
5	Kondisi Jalan Nasional							
	Baik	Km	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Sedang	Km	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Rusak Ringan	Km	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Rusak Berat	Km	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pada Tabel 2.50 diatas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan penambahan dengan ruas jalan beraspal mencapai 755,06 km pada tahun 2022, dimana terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 (651,72 km). Rata-rata pertumbuhan jalan aspal mencapai 2,99 persen per tahun. Hal ini tentu memberikan dampak terhadap pengurangan kondisi permukaan jalan tanah yang terdapat di Kabupaten Bireuen. Selain peningkatan jalan beraspal, pemerintah kabupaten juga mengupayakan perbaikan jalan melalui pembangunan jalan kerikil/perkerasan. Namun karena keterbatasan anggaran, perbaikan jalan ini masih belum bisa dilaksanakan secara optimal.

Kondisi jalan kewenangan provinsi Aceh di Kabupaten Bireuen dalam kondisi baik selama lima tahun terakhir meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 10,61 persen. Pada tahun 2022 jalan kewenangan provinsi dalam kondisi baik mencapai 4,79 km dibandingkan tahun 2017 sepanjang 2,74 km.

Tabel 2.51
Proporsi Panjang dalam Kondisi Mantap Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Bireuen	41,1	46,19	52,43	57,54	58,37	4,32
2	Aceh	67,07	76,86	79,36	76,65	84,41	4,33
3	Nasional	91,9	92,81	91,27	91,81	92,2	0,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Selama lima tahun terakhir jalan kabupaten semakin baik dengan rata-rata pertumbuhan jalan kondisi mantap mencapai 4,32 persen per tahun. Jalan kondisi mantap pada tahun 2022 mencapai 58,37 persen meningkat dari kondisi tahun 2018 (41,1 persen), namun angka ini masih rendah dibandingkan kondisi jalan mantap Aceh yang mencapai 84,41 persen dan Nasional 92,2 persen pada tahun 2022.

Perlunya perhatian pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di daerah ini diharapkan mampu menumbuh kembangkan peran dan fungsi prasarana transportasi tersebut dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya, terutama dalam mendorong perekonomian masyarakat yang nantinya turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

C.2 Irigasi

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Sesuai Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 686/2019 pada 17 Desember 2019. Luas baku lahan sawah di Kabupaten Bireuen sejumlah 14.944 Ha yang tersebar di 17 kecamatan. Kecamatan Peusangan memiliki lahan budidaya terluas 1.668 hektar, Kecamatan Jeunieb 1.348 hektar dan Kecamatan Simpang Mamplam seluas 1.272 hektar.

Jaringan irigasi di Kabupaten Bireuen tersebar diseluruh kecamatan, Kecamatan Juli dan Gandapura menjadi kecamatan yang memiliki jaringan irigasi yang lebih panjang dibandingkan kecamatan lainnya dengan panjang mencapai 157,835 dan 126,420. Kecamatan Peusangan dan Peulimbang merupakan kecamatan dengan panjang irigasi paling rendah dibandingkan dengan lainnya yakni sebesar 18,801 meter dan 22,005 meter. Berikut ini adalah jaringan irigasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bireuen

Tabel 2.52
Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi (Meter)			Total Panjang Jaringan Irigasi (Meter)	Luas Baku Sawah (Ha)
		Primer	Sekunder	Tersier		
1	Samalanga	7.260	20,608	41,852	69,720	1.220
2	Simpang Mamplam	11,025	33,300	33,297	77,622	1.272
3	Pandrah	5,946	30,970	34,910	71,826	494
4	Jeunieb	6,525	28,385	37,355	72,265	1.384
5	Peulimbang	2,675	8,510	10,820	22,005	649
6	Peudada	7,686	29,350	48,750	85,786	946
7	Jeumpa	3.030	17,931	16,250	37,211	995
8	Juli	9,233	97,652	50,950	157,835	420
9	Peusangan	5.090	7,411	6,300	18,801	1668
10	Peusangan Selatan	3,465	14,439	15,175	33,079	408
11	Peusangan Siblah Krueng	10,785	29,712	43,460	83,957	642
12	Makmur	11,425	21,220	21,935	54,580	844
13	Gandapura	15,416	63,814	47,190	126,420	1.159

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya. Panjang jaringan irigasi tersier di Kabupaten Bireuen mencapai 403.302 meter dengan jaringan terpanjang di Kecamatan Juli sepanjang 50.950 meter, Kecamatan Peudada sepanjang 48.750 meter, dan Gandapura 47.190 meter. Kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten Tahun 2022 seperti terdapat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten
di Kabupaten Bireuen Tahun 2022

No	Kecamatan/Desa	Luas (Ha)	Kondisi (%)			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Samalanga	275	18,00	35,00	28,00	19,00
2	Simpang Mamplam	1.438	32,22	11,11	25,00	31,67
3	Pandrah	325	20,25	3,75	23,75	52,25
4	Jeunieb	579	15,40	14,00	20,80	49,80
5	Peulimbang	310	15,00	20,00	20,00	45,00
6	Peudada	1.535	35,00	16,00	18,00	31,00
7	Jeumpa	369	37,50	9,50	21,50	31,50
8	Juli	300	25,00	5,00	10,00	60,00
9	Peusangan	304	31,67	7,33	5,33	55,67
10	Peusangan Selatan	625	24,00	7,67	19,33	49,00
11	Peusangan Siblah Krueng	1.714	25,25	10,25	20,50	44,00
12	Makmur	1.464	29,83	8,83	23,00	38,33
13	Gandapura	2.787	16,12	11,65	17,00	55,24
Jumlah/Rata-rata		12.025	25,02	12,31	19,40	43,27

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Kondisi irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten sebagian besar dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Pada tahun 2022, dari total 12.025 hektar jaringan irigasi kewenangan kabupaten, sebanyak 25,02 persen dalam kondisi baik dan 12,31 persen dalam kondisi sedang. Sedangkan 19,40 persen dalam kondisi rusak ringan dan 42,27 dalam kondisi rusak berat.

C.3 Cakupan Layanan Sanitasi Layak

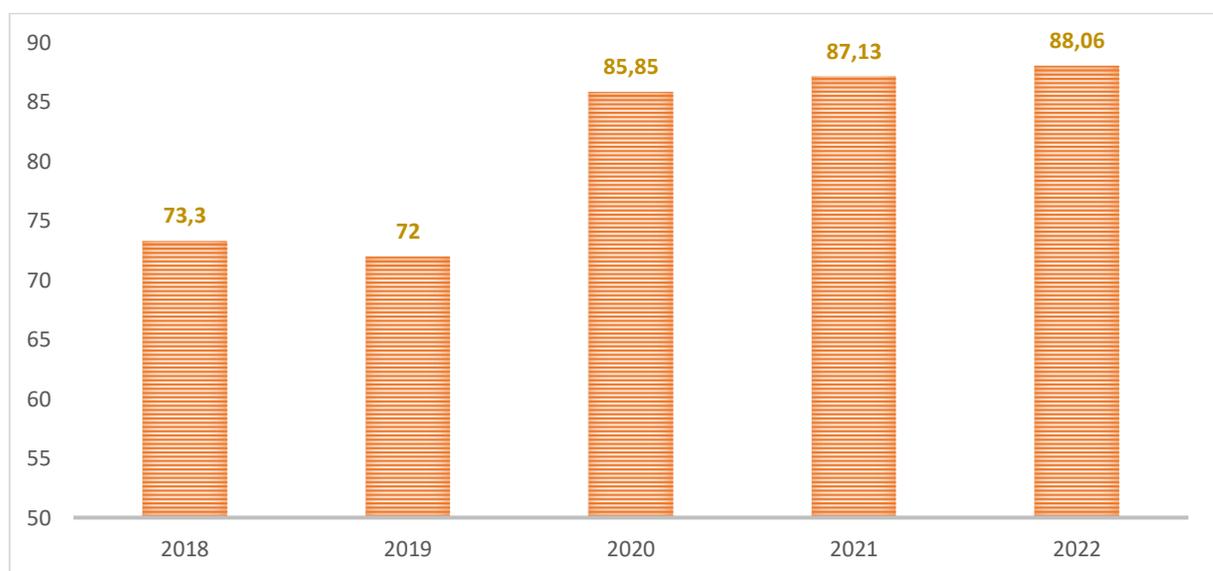
Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih dan teratur, sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai, salah satunya adalah fasilitas sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Salah satu indikator dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang air besar dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.

Urgensi penyediaan akses sanitasi yang layak khususnya bagi masyarakat perdesaan baik di Indonesia maupun di negara lainnya kian mendesak. Hal inilah yang memicu PBB menetapkan sanitasi sebagai hak asasi manusia pada tahun 2010 silam. Betapa pentingnya akses sanitasi sehingga tinjauan kesehatan membuktikan bahwa sanitasi yang tidak layak

menjadi faktor penyebab penularan berbagai penyakit seperti diare, kolera, disentri, hepatitis A, tifus, polio dan terhambatnya pertumbuhan pada balita.

Sanitasi yang layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan dan memiliki tempat penampungannya. Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga

Mayoritas rumah tangga di Kabupaten Bireuen menggunakan jamban/*Water Closet* (WC) dengan kepemilikan *sharing*/komunal, Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) dan Jamban Sehat Permanen (JSP). Secara keseluruhan, persentase masyarakat yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak di Kabupaten Bireuen tahun 2021 mencapai 87,13 persen. Akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.14.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Gambar 2.14. Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Tahun 2018 s.d. 2022 Kabupaten Bireuen

Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Bireuen terus meningkat dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 sebesar 73,3 persen, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 88,06 persen. Angka ini belum mencapai target SDGs ke 6 yaitu : mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi” yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

C.4 Drainase

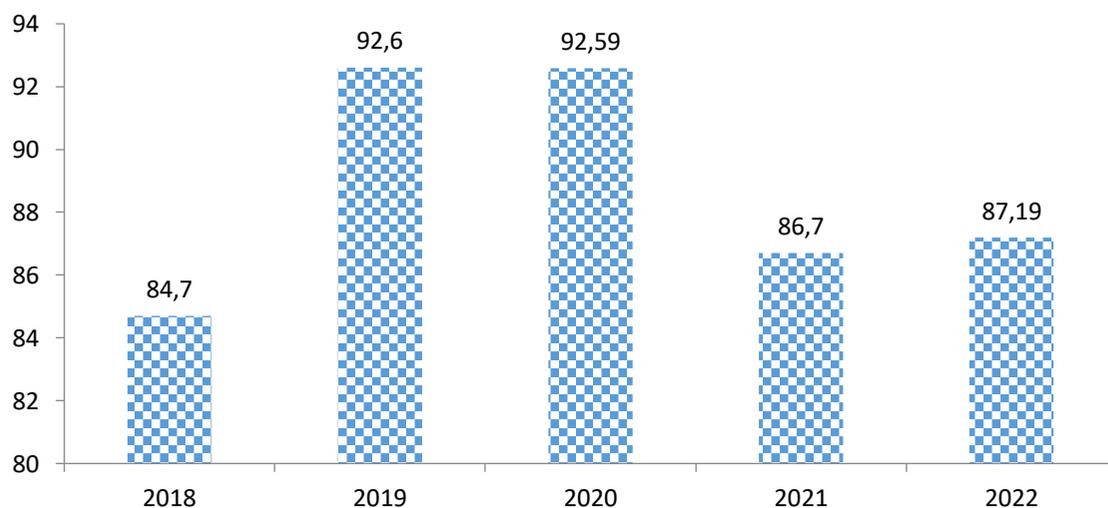
Saluran drainase merupakan salah satu persyaratan teknis prasarana jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Pada umumnya saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan

lebih mudah mengalir secara gravitasi. Kondisi genangan di kawasan perkotaan pada tahun 2022 seluas 691.790 m².

Saluran drainase di perkotaan pada tahun 2022 sepanjang 65.732 meter saluran, sebanyak 28,24 persen (18.564 meter) dalam kondisi rusak. Sedangkan saluran dalam kondisi baik meningkat dari 71,30 persen pada tahun 2021 menjadi 71,76 persen pada tahun 2022.

C.5 Air Minum

Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk hidup, kebutuhan akan ketersediaan air tentunya harus dipenuhi dengan memperbaiki sarana prasarana penunjang penyediaannya mulai dari pengolahan sampai pendistribusian air bersih kepada penduduk. Sumber air yang digunakan oleh warga Kabupaten Bireuen masih bervariasi, yaitu bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), air sumur dan air sungai. Sebagai salah satu upaya peningkatan air bersih yaitu melalui pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) melalui program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan sumber air terdekat, serta peningkatan pelayanan PDAM Tirta Krueng Peusangan.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Gambar 2.15. Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Sumber Air Minum Layak Tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen

Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Bireuen terus meningkat. Pada tahun 2018 hanya sebesar 84,7 persen meningkat menjadi 87,19 persen pada tahun 2022. Angka ini belum mencapai target SDGs ke 6 yaitu : mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi” yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030

C.6 Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang di Indonesia memiliki tiga tingkatan rencana tata ruang yaitu nasional, provinsi dan kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten merupakan penjabaran RTRW nasional dan provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah secara keseluruhan, dimana strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub blok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen dilakukan pada Tahun 2019 setelah sebelumnya telah dilaksanakan Peninjauan Kembali (PK) yang menjadi persyaratan dalam melakukan kegiatan revisi. Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 143 Tahun 2019 dan memberikan rekomendasi REVISI terhadap RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032. Kegiatan PK RTRW Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada Tahun 2018 menghasilkan beberapa poin, diantaranya :

- 1) Tingkat kualitas RTRW yang kurang baik
- 2) Tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai; dan
- 3) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.

Tahapan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Bireuen dimulai pada tahun 2108 dengan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Bireuen, kemudian pada tahun 2019 dimulai penyusunan RTRW Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2020 rekomendasi peta dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Tahun 2021 dilanjutkan dengan rapat konsultasi, Pembahasan Substansi Rancangan Qanun Revisi RTRW, konsultasi substansi dengan Forum Penataan Ruang, pembahasan substansi dengan DPRK Bireuen. Tahun 2022 dilanjutkan dengan pembahasan substansi dengan DPRK Bireuen dan pepaduserasian dengan RTRW kabupaten sekitar, validasi KLHS RTRW Kabupaten Bireuen, pembahasan provinsi dan pada tahun 2023 pembahasan harmonisasi dengan Kemenkumham Aceh. Tahapan selanjutnya adalah Pembahasan Lintas Sektor (Linsek) di Kementerian ATR/Kepala BPN, penerbitan Persetujuan Substansi (Persub) oleh Menteri ATR Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK, evaluasi Rancangan Qanun RTRW oleh Gubernur dan Penetapan Qanun RTRW oleh Bupati.

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun diantaranya RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen, RDTR Kawasan Perkotaan Jeunieb, RDTR Kawasan Perkotaan Kuta Blang, RDTR Kawasan Perkotaan Samalanga dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan Matangglumpang Dua. Hingga saat ini, dokumen

tersebut masih belum dapat diaplikasikan menjadi sebuah peraturan daerah (qanun) dikarenakan proses asistensi yang belum selesai dilakukan. Proses asistensi untuk data spasial dilakukan di Badan Informasi Geospasial (BIG), sedangkan substansi dokumen perencanaan di Kementerian Agraria Tata Ruang / Kepala BPN.

Pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya persentase ketaatan terhadap tata ruang. Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW. Kesesuaian usulan dan rekomendasi untuk pembangunan yang dikeluarkan semakin meningkat. Pada tahun 2019 hanya sebesar 37,5 persen kemudian meningkat pada tahun 2022 mencapai 97,2 persen, diharapkan kesesuaian usulan dan rekomendasi tetap 100 persen.

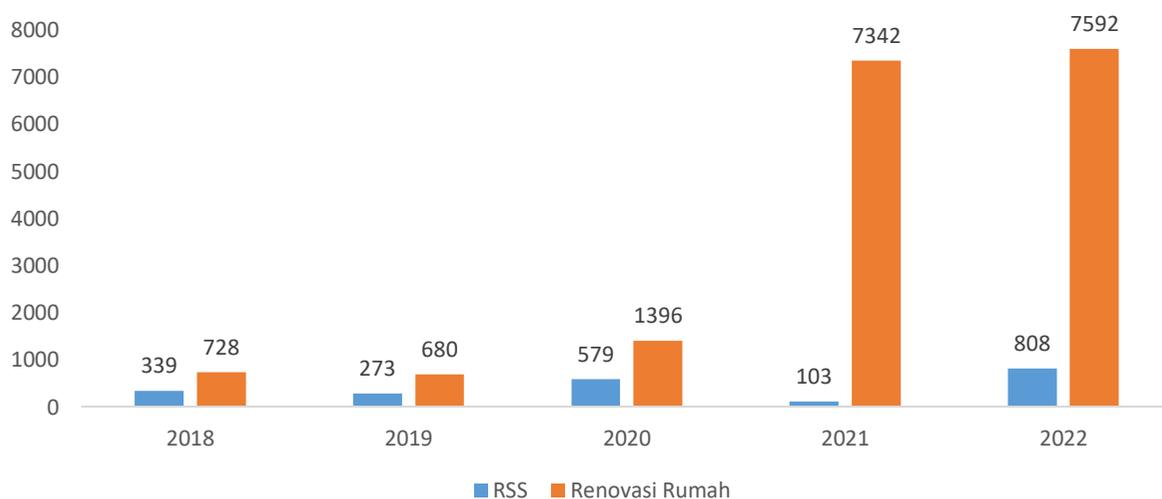
C.7 Jasa Konstruksi

Pembangunan di bidang jasa konstruksi bertujuan memimpin, membina, mengkoordinasikan melaksanakan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis manajemen kebinamargaan, irigasi, pengairan dan pembinaan jasa konstruksi menyelenggarakan dan mengelola penyuluhan dan bimbingan teknik, terutama dengan mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi. Pada tahun 2022 tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi masih sangat rendah, sebanyak 226 orang (2,51 persen) dari 9.000 orang jumlah kebutuhan tenaga operator, teknisi/ analisis di wilayah Kabupaten Bireuen.

D. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

D.1 Rumah Layak Huni dan Korban Bencana

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Gambar 2.16. Jumlah Rumah Sehat dan Rumah Layak Huni Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen

Pada Gambar 2.16. dapat dilihat jumlah rumah sehat dan rumah layak huni Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2022. Penanganan perumahan dilaksanakan berupa pembangunan dan renovasi.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen. Pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) yang tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai 808 unit meningkat dari kondisi tahun 2018 yang mencapai 339 unit. Pembangunan RSS di Kabupaten Bireuen merupakan akumulasi dari penganggaran yang didapatkan melalui APBK dan APBA. Renovasi rumah bagi kaum dhuafa menjadi salah satu dari beberapa alternatif program pengadaan rumah selain pembangunan rumah sehat sederhana. Jumlah renovasi rumah pada tahun 2022 mencapai 7.592 unit meningkat dari kondisi tahun 2018 (728 unit).

Pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman terdiri juga terdiri dari penyelesaian rumah korban bencana. Jumlah rumah korban bencana yang masih perlu ditangani di Kabupaten Bireuen Tahun 2022 mencapai 48 unit.

D.2 Penanganan Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh melalui pengurangan kawasan kumuh. Kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten adalah permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dilaksanakan dengan cara pembangunan kawasan perumahan dengan kondisi PSU yang layak. Pada tahun 2022, jumlah kawasan perumahan dengan kondisi PSU yang difasilitasi mencapai 2 kawasan dari 6 kawasan perumahan.

Tabel 2.54
Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021

Kabupaten/Kota	SK Bupati/Walikota 2013		SK Bupati/Walikota 2018 (Revisi)		SK Bupati/Walikota 2020/2021 (Revisi)	
	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
Banda Aceh	21	797.56	22	462.73	20	451,4
Aceh Barat	15	175.49	12	152.29	12	152,29
Sabang	6	28.26	3	48.73	4	123,713
Aceh Besar	21	226.48	7	190.50	7	185,37
Langsa	14	90.14	9	87.66	18	359,398
Simeulue	5	97.92	3	97.92	1	29,55
Aceh Tamiang	6	61.83	3	61.66	41	348,12
Aceh Timur	10	567.90	10	567.90	20	538,85
Bireuen	29	1,031.72	29	1,031.72	38	588,9
Aceh Tenggara	52	563.89	52	563.89	52	563,89
Bener Meriah	10	337.25	10	337.25	10	337,25

Kabupaten/Kota	SK Bupati/Walikota 2013		SK Bupati/Walikota 2018 (Revisi)		SK Bupati/Walikota 2020/2021 (Revisi)	
	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)	Kawasan	Luas (Ha)
Aceh Utara	7	62.97	7	62.97	7	62,97
Aceh Singkil	9	108.86	9	108.86	9	108,86
Aceh Barat Daya	41	561.44	41	561.44	33	832,51
Nagan Raya	4	108.33	4	108.33	43	108,33
Gayo Lues	30	69.34	30	69.34	30	69,34
Pidie Jaya	12	206.10	12	206.10	12	206,1
Lhokseumawe	19	208.50	5	81.30	17	120,87
Subulussalam	5	61.77	5	61.77	12	320,17
Aceh Tengah	23	189.59	23	189.59	14	187,37
Pidie	10	67.04	10	67.04	66	294,3
Aceh Selatan	5	55.40	5	55.40	8	120,1
Aceh Jaya	8	136.29	8	136.29	8	136,29
Aceh	362	5.814,07	319	5.310,68	484	6.245,94

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2023

Kawasan kumuh Kabupaten Bireuen sesuai dengan SK Bupati Bireuen Nomor 756 Tahun 2021 sebanyak 38 kawasan dengan luas 588,9 hektar. Jumlah kawasan meningkat dari 29 kawasan menjadi 38 kawasan.

E. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

E.1 Penegakan Perda

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam di daerah.

Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Upaya menciptakan ketenteraman, ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak akan mudah dilaksanakan. Untuk itu, perlu adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang kuat dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tabel 2.55
Rasio Jumlah Satpol PP dan WH Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Polisi Pamong Praja (orang)	182	182	182	131	139	-5,48
2	Jumlah Wilayatul Hisbah (orang)	89	89	89	45	53	-7,92
3	Jumlah Penduduk (orang)	461.726	471.635	436.418	439.788	443.874	-0,90
4	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	3,9	3,8	4,17	2,98	3,13	-4,08
5	Rasio Wilayatul Hisbah per 10.000 penduduk	1,9	1,88	2,04	1,02	1,19	-6,47

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.55 dapat dilihat bahwa Rasio satpol PP per 10.000 penduduk Kabupaten Bireuen semakin menurun, pada tahun 2018 jumlah personil Satpol PP sebanyak 182 orang (3,9 per 10.000 penduduk), terus berkurang menjadi 139 orang (3,13 orang personil per 10.000 penduduk). Hal serupa juga terjadi pada jumlah personil wilayatul hisbah. Pada tahun 2018 jumlah personil wilayatul hisbah sebanyak 89 orang (rasio 1,9 per 10.000 penduduk) menjadi 53 orang (rasio 1,19 per 10.000 penduduk).

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

E.2 Pelayanan keamanan dan ketertiban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai peyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah atau Qanun. Satuan Polisi Pamong Praja pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum diukur dengan jumlah kasus yang muncul dan yang diselesaikan setiap tahunnya. Jumlah kasus keamanan dan ketertiban tahun 2018-2022 dapat dilihat secara detil pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Cakupan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Tramtibum	36	25	25	21	16	-17,59
2	Penegakan Perda	57	41	56	42	23	-15,43
3	Penegakan Perda Syariah	298	148	57	263	238	60,02
4	Penyelesaian Konflik	30	24	15	10	8	-27,71

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Cakupan pelayanan keamanan di Kabupaten Bireuen dari tahun 2018 s.d 2022 semakin baik, dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan yang negative, kecuali penegakan perda syariah. Kasus pelanggaran syariat islam cenderung turun dari tahun 2018 sebanyak 298 kasus menjadi 238 kasus pada tahun 2022. Namun rata-rata pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 60,02 persen per tahun.

E.3 Pemilu

Pilkada tahun 2017 dilaksanakan di Kabupaten Bireuen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Tingkat partisipasi pemilu pada tahun 2017 mencapai 73,25 persen. Angka ini lebih rendah dari tingkat partisipasi pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2012 yang mencapai 80 persen.

F. Urusan Sosial

F.1 Persentase PMKS yang tertangani

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial, meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan

lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar sehingga perlu memperoleh bantuan sosial. Untuk kedepan Kabupaten Bireuen perlu menyediakan data base untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga pemberian bantuan akan lebih tepat sasaran. Cakupan Pelayanan Bidang Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57
Cakupan Pelayanan Bidang Sosial Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah desa siaga bencana	23	23	23	23	23	0,00
2	Jumlah korban bencana yang ditangani	323	393	1029	3.607	12.212	168,15
3	Jumlah Korban bencana	323	393	1029	3.607	12.212	168,15
4	Jumlah PSKS yang difasilitasi	6	6	6	6	6	0,00
5	Jumlah PSKS	7	7	7	7	7	0,00
6	Jumlah Warga Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	97	97	-	-	-	0,00
7	Jumlah Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	97	97	-	-	-	0,00
8	Jumlah Penyandang rehabilitasi sosial yang ditangani	100	260	230	80	233	68,62
9	Jumlah Penyandang rehabilitasi sosial	NA	NA	4.578	4.578	7.198	28,62
10	Jumlah masyarakat yang diberikan jaminan sosial	NA	NA	50.460	84.253	67.829	23,74
11	Jumlah masyarakat yang terdata dalam DTKS	NA	NA	71.126	99.527	104.239	22,33

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.57, jumlah desa siaga bencana masih belum bertambah, pada tahun 2018 s.d. 2022 sebanyak 23 desa. Jumlah korban bencana yang ditangani mencapai 100 persen setiap tahunnya, begitu juga dengan warga migran korban tindak kekerasan yang ditangani.

Jumlah PSKS yang difasilitasi dari tahun 2018 s.d 2022 tidak berubah sebanyak 6 dari 7 PSKS di Kabupaten Bireuen. Capaian terendah pada Penyandang rehabilitasi sosial yang ditangani hanya 233 orang dari 7.198 orang penyandang rehabilitasi sosial di Kabupaten Bireuen.

F.2 Sarana Sosial

Sarana sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengidentifikasi adanya pusat perkembangan kegiatan sosial. Sarana sosial yang dimaksud seperti panti

asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah aman. Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Fasilitas sosial yang diberikan oleh pemerintah merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk memelihara masyarakat yang kurang beruntung. Berikut merupakan data sarana sosial yang tersedia di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.58
Jumlah Total Sarana Sosial di Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Panti Asuhan	17	17	17	17	17	0,00
2	Panti Jompo	1	1	1	1	1	0,00
3	Rumah Aman	1	1	1	1	1	0,00
4	Rumah tunggu kelahiran	1	1	1	1	1	0,00

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari tahun 2018 sampai dengan 2022 jumlah sarana sosial masih tetap sama yaitu 20 unit. Terdiri dari panti asuhan 17 unit, rumah jompo 1 unit, rumah aman 1 unit dan rumah tunggu kelahiran 1 unit.

2.1.3.1.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen usia 15 tahun ke atas sebagian besar tergolong ke dalam angkatan kerja, yaitu sekitar 232.157 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sekitar 95,80 persen tergolong ke dalam penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 106 pekerja, terdiri dari 65 orang pekerja laki-laki dan 41 pekerja perempuan. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpendidikan terakhir yaitu SMA/ sederajat sebanyak 57 pekerja.

Tabel 2.59
Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Penempatan Tenaga Kerja	80	315	59	58	106	73,39
2	Jumlah Tenaga Kerja Belum Ditempatkan	4.964	4.684	4.963	4.934	4.502	-2,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023 (diolah)

Dari Tabel 2.59, capaian dari tahun 2018 s.d 2022, jumlah penempatan tenaga kerja meningkat. Pada tahun 2018 penempatan tenaga kerja oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga

Kerja sebanyak 80 orang. Kemudian meningkat pada tahun 2022 menempatkan 106 tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja belum ditempatkan semakin menurun, tahun 2018 sebanyak 4.964 orang, pada tahun 2022 turun menjadi 4.502 orang. Setiap tahun jumlah tenaga kerja belum ditempatkan menurun sebanyak 2,26 persen.

B. Pangan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebut bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian hak asasi manusia yang di jamin dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu dicari konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

Tabel 2.60
Data Desa Rawan Pangan Tahun 2022
Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Sangat Rentan Pangan	Rentan Pangan	Kurang Rentan Pangan	Kurang Tahan Pangan	Tahan Pangan	Sangat Tahan Pangan	Jumlah Desa
1	Samalanga	-	-	1	25	19	1	46
2	Sp.Mamplam	-	1	7	25	8	-	41
3	Pandrah	-	2	3	13	1	-	19
4	Jeunieb	2	-	4	29	5	3	43

No	Kecamatan	Sangat Rentan Pangan	Rentan Pangan	Kurang Rentan Pangan	Kurang Tahan Pangan	Tahan Pangan	Sangat Tahan Pangan	Jumlah Desa
5	Peulimbang	-	1	7	12	1	1	22
6	Peudada	-	8	9	25	9	1	52
7	Juli	-	3	7	23	3	-	36
8	Jeumpa	-	2	4	33	3	-	42
9	Kota Juang	-	1	2	11	9	-	23
10	Kuala	-	-	4	11	5	-	20
11	Jangka	-	-	1	33	12	-	46
12	Peusangan	-	-	3	41	23	2	69
13	Peusangan Selatan	1	3	6	9	2	-	21
14	Peusangan Siblah Krueng	1	2	7	8	3	-	21
15	Makmur	-	3	11	13	-	-	27
16	Gandapura	-	2	2	16	19	1	40
17	Kuta Blang	-	-	8	23	10	-	41
Jumlah/Total		4	28	86	350	132	9	609
2021		8	48	102	343	103	5	609

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Jumlah desa rentan pangan tahun 2022 terdapat sejumlah 32 desa rentan pangan dengan rincian empat desa sangat rentan pangan dan 28 desa rentan pangan. Jumlah ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2021 dimana terdapat 56 desa rentan dan sangat rentan pangan, dengan rincian 8 desa sangat rentan pangan dan 48 desa.

Salah satu penanganan untuk daerah rawan pangan adalah dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/ informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Terobosan untuk penanggulangan kerawanan pangan dan diversifikasi pangan adalah dengan pembinaan Kelompok Wanita Tani. Pemberdayaan dilakukan dengan pengembangan sayur-sayuran, perikanan dan ternak. Jumlah KWT di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61
Jumlah KWT Aktif Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	KWT Aktif (klp)	27	35	48	79	22	0,148
2	KWT (klp)	58	66	79	110	128	0,223
3	Persentase KWT Aktif (%)	46,55	53,03	60,76	71,82	17,19	-0,073

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pada tahun 2022 jumlah KWT sebanyak 128 KWT, namun jumlah KWT aktif hanya 17,19 persen (22 Kelompok). Rata-rata pertumbuhan jumlah KWT adalah 0,223 kelompok per tahun namun pertumbuhan KWT aktif hanya 0,148 persen per tahun. Persentase KWT aktif turun dari 46,55 persen pada tahun 2018 menjadi 17,19 persen pada tahun 2022.

Untuk peningkatan ketersediaan pangan juga dilakukan dengan penganekaragaman konsumsi pangan. Keragaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menunjukkan skor mutu konsumsi pangan penduduk. Pada tahun 2022 skor PPH sebesar 79,4 meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 72,8. Angka ini masih lebih rendah dari skor PPH nasional sebesar 92,9.

Ketahanan pangan adalah kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Ketahanan Pangan rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor agroekosistem dan iklim, perubahan orientasi dan manajemen usaha tani. Ketahanan pangan merupakan isu yang penting dan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pangan utama adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Pilar ketahanan pangan pada prinsipnya adalah menjaga produktifitas pangan, mempertahankan stabilitas harga pangan dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pangan, serta melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Rata-rata tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia, terlebih Aceh tergolong tinggi, bahkan menduduki peringkat atas dunia. Situasi ketersediaan pangan di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan sudah tergolong cukup untuk semua komoditas pangan.

Tabel 2.62
Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Produksi Gabah (Ton)	261.812,00	252.927,00	188.285,87	176.135,00	170.725,00	-0,096
2	Ketersediaan Beras (Ton)	151.382,84	146.245,43	112.416,18	104.865,82	98.600,47	-0,098
3	Jumlah Penduduk (Jiwa)	461.726,00	471.635,00	436.554,00	436.418,00	439.788,00	-0,011
4	Total Konsumsi Beras (ton/Tahun)	52.636.764,00	53.766.390,00	101.367.838,80	101.336.259,60	98.600.469,60	0,220
5	Surplus/ Cadangan Pangan (Ton)	94.872,02	88.731,50	8.065,61	735,64	335,65	-0,607

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.62 dapat dilihat bahwa ketersediaan beras di Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 98 ribu ton per tahun. Rata-rata pertumbuhan ketersediaan beras turun sebesar 0,098 persen per tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan total konsumsi beras sebesar yang tumbuh positif sebesar 0,22 persen.

Cadangan pangan tahun 2022 sebesar 335,65 ton, turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan cadangan pangan Kabupaten Bireuen mengalami penurunan sebesar 0,607 persen per tahun.

C. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah usaha pelibatan perempuan dalam pembangunan yang dilihat dari semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan; kerja produktif, reproduktif, privat dan publik. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Isu dan permasalahan perempuan dan anak bersifat kompleks dan lintas sektoral. Dikatakan kompleks karena banyaknya faktor yang saling terkait sebagai penyebab rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak. Sementara disebut isu lintas sektoral karena permasalahannya terdapat di hampir semua sektor, dan karenanya, penanganan permasalahan tersebut harus melibatkan seluruh sektor pembangunan.

Pengarustamaan Gender terus diupayakan oleh pemerintah dari berbagai sektor pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, maksud tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya perencanaan yang responsif gender, anggaran responsif gender sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Kabupaten Bireuen.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki laki:

- Memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan,
- Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan,
- Mempunyai kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan,
- Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan

Pengarustamaan Gender dapat terlaksana tidak terlepas dari adanya anggaran yang responsif gender pada setiap SKPK teknis. Untuk memastikan anggaran yang responsif gender akan diukur dengan menggunakan *Gender Analisis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) pada setiap dinas teknis. Penyediaan data terpilah gender dan anak salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tersedianya data dapat memudahkan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan.

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan (ketimpangan) gender yang berimplikasi munculnya diskriminasi terhadap salah satu pihak yang dapat menimpa perempuan atau laki-laki. Isu gender terdapat di berbagai sektor pembangunan daerah. Peningkatan kesetaraan gender di tandai dengan meningkatnya kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya politik.

C.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPD)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial terutama persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen.

Tabel 2.63
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	Bireuen	94,91	94,93	94,91	94,93	95,01	0,03
	Aceh	91,67	91,84	92,07	92,23	92,24	0,14
	Indonesia	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63	0,16
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
	Bireuen	53,07	57,90	57,98	58,17	58,16	1,27
	Aceh	66,60	63,31	63,47	63,24	63,92	-0,67
	Indonesia	72,10	75,24	75,57	76,26	76,59	1,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

IPG Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 95,01 lebih tinggi dibandingkan IPG Aceh (92,24) dan nasional (91,63). Sedangkan Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Bireuen terus meningkat dari tahun 2018 s.d 2022. Pada tahun 2022 IDG Kabupaten Bireuen sebesar 58,16 meningkat dari capaian tahun 2018 (53,07) dengan rata-rata peningkatan 1,27 persen per tahun. Angka IDG Bireuen lebih rendah dari capaian Aceh dan nasional. Capaian IPG dan IDG diharapkan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya meningkatkan mutu hidup perempuan dan anak, dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi serta fokus kepada beberapa kebijakan dan program prioritas terutama untuk menguatkan mutu keluarga dan perannya dalam pencegahan kekerasan (termasuk perkawinan anak dan pekerja anak), menguatkan penerapan strategi pengarusutamaan gender dan peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah juga memprioritaskan penguatan sinergi dan jejaring antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga masyarakat, dunia usaha, serta media.

C.2 Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah jumlah perempuan yang bekerja dilembaga pemerintahan. Hingga saat ini, peran perempuan dan representasi politiknya di parlemen serta pada pemerintahan, baik secara global maupun nasional masih sangat rendah. Begitu juga di Kabupaten Bireuen partisipasi perempuan masih kurang dimana saat ini terdapat tiga orang anggota legislatif perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tidak ada pendidikan politik, tidak adanya pelatihan dan penguatan ketrampilan politik perempuan untuk memperkuat ketrampilan politiknya, kurang adanya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik terutama untuk berpartisipasi dalam institusi politik formal seperti lembaga legislatif dan partai politik, dan masih adanya sistem perundang-undangan politik yang membatasi aksesibilitas dan partisipasi perempuan dalam pemilu, parlemen dan dalam pemerintahan.

Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dampak Covid 19 sangat besar terhadap perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini disebabkan banyaknya jumlah tenaga kerja perempuan di bidang kesehatan baik sebagai perawat, bidan, dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang menjadi garda terdepan dalam penanganan masalah Covid 19 yang dapat berdampak terhadap kesehatan dan berpengaruh pada keluarga. Pemerintah daerah

diharapkan dapat lebih memperhatikan kebijakan yang dapat menciptakan kesetaraan dan keadilan dari berbagai aspek terhadap pembangunan.

Tabel 2.64
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Pekerja Perempuan	5.458	5.453	5.466	5.173	5.054	-1,88
2	Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	83,11	NA	NA	66	66	NA
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK	2,05	2,05	7,89	7,89	10	77,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023 (diolah)

Terkait jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bireuen, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 5.458 orang, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 5.054 orang. Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah turun dari 83,11 persen pada tahun 2018 menjadi 66 persen pada tahun 2022. Sedangkan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK meningkat dari 2,05 persen pada tahun 2018 menjadi 10 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan kesetaraan gender dalam Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Diharapkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan bekerja semakin kecil.

C.3 Kasus KDRT di Kabupaten Bireuen

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan telah melanggar UU No 39 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai aturan hukum yang sudah ada dan ditujukan bagi perempuan dan anak belum memadai. Berbagai kendala yang harus dihadapi sangat kompleks terutama ketika korban harus berhadapan di muka hukum. Bahkan ada kecenderungan tidak berpihak pada perempuan maupun anak sebagai korban.

Untuk mengantisipasi dan melindungi bagi korban KDRT, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menyediakan rumah aman sebagai penitipan sementara selama proses penyelesaian masalah dan hukum.

Tabel 2.65
Kasus KDRT Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Kasus KDRT (kasus)	72	89	62	77	36	-8,94
2	Jumlah Rumah Tangga	106.606	108.833	108.833	108.833	123.956	4,00
3	Rasio KDRT (persen)	0,07	0,08	0,06	0,07	0,03	-11,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.65 dapat dilihat bahwa Rasio KDRT yang membandingkan jumlah kasus KDRT dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 0,03 persen, turun dari kondisi tahun 2018 sebanyak 0,07 persen. Hal ini sejalan dengan kasus KDRT pada tahun 2022 sebanyak 36 kasus, turun dibandingkan kondisi tahun 2018 (72 kasus) dengan rata-rata penurunan sebesar 8,94 persen. Untuk menghindari agar kasus tersebut tidak terus meningkat, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang harus menjadi perhatian utama di berbagai bidang pada lintas sektor.

C.4 Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak, maka pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Bireuen telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak untuk menjadi sebagai pedoman dan acuan bagi SKPK teknis dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Bireuen.

Tujuan utama dari Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten Bireuen adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Kabupaten Bireuen dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

- b. Mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- c. Memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana bidang PPPA dalam mendorong pencapaian konsep Ramah Anak, pada level dinas

1. Penguatan Lembaga KLA
2. Inisiatif pembentukan gugus tugas KLA dengan diawali rapat lintas sektoral
3. Penglibatan Tim Penggerak PKK dan berbagai kalangan ibu-ibu untuk kelompok pendukung
4. Sinergi dan sinkronisasi program / kegiatan dengan dinas-dinas teknis terkait yang memberikan pelayanan pada anak-anak
5. Mendorong implementasi pelaksanaan pilot dengan akses dana sekolah dan menyamakan persepsi dengan komite sekolah dan orang tua murid
6. Fungsi advokasi lanjutan dan komitmen Perbup KLA
7. Memperluas KIE sehingga masyarakat merasa ini adalah kebutuhan bersama yang strategis.
8. Menyiapkan regulasi terkait penggunaan dana gampong untuk program RBRA ditingkat gampong.

Forum Anak merupakan organisasi anak yang dibina oleh pemerintah baik ditingkat kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. melalui PPPA untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak atau dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal.

Kabupaten Bireuen memiliki nama organisasi anak dengan nama Forum Anak Kota Juang. Harapannya dengan adanya forum anak ini dapat membangun aspirasi anak sehingga kebutuhan anak dapat dipenuhi disetiap sektor pembangunan di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.66

Data Kabupaten layak anak dan Gampong Layak anak Tahun 2020 s.d 2022

Kabupaten Bireuen

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022
1	Gampong Layak Anak	Gampong	189	191	300
2	Jumlah Gampong	Gampong	609	609	609
3	Persentase Gampong Layak Anak	Persen	31,03	31,36	49,6
4	Kabupaten Layak Anak	Peringkat	Pratama	Pratama	Pratama

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Klasifikasi Kabupaten Layak anak :

- Pratama : Nilai 500-600
- Madya : Nilai 601-700
- Nindya : Nilai 701-800
- Utama : Nilai 801-900
- KLA : Nilai 1.000

KLA ini merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Pada tahun 2022, Kabupaten Bireuen masih termasuk klasifikasi peringkat pratama dengan skor 560.

D. Pertanahan

Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak yaitu berupa tanah. Luas tanah secara keseluruhan dalam Kabupaten Bireuen 179.632 Ha dengan persil 204.776 bidang. Untuk saat sekarang telah dilakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah pemkab. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan sertifikasi terhadap tanah pemkab secara bertahap. Upaya tersebut memiliki berbagai kendala diantaranya sulitnya memperoleh dokumen untuk pengurusan sertifikat dan banyaknya tanah aset pemkab yang telah dikuasai oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kabupaten Bireuen mengupayakan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Salah satu urusan yang merupakan kewenangan kabupaten di Aceh adalah urusan pertanahan. Permasalahan di bidang pertanahan mempunyai arti yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat.

Beberapa kewenangan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan.

Tabel 2.67
Cakupan Pelayanan Bidang Pertanahan Tahun 2018 s.d 2022
di Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang bersertifikat (bidang)	1	32	104	196	248	71,42
2	Jumlah Tanah Pemda (Bidang)	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	-25,00
3	Persentase Bidang Tanah Pemkab yang bersertifikat (%)	0,07	2,28	5,37	9,04	9,19	2,28

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
4	Redistribusi tanah terlantar (Ha)	0	16,05	172,98	201,66	403,77	271,23
5	Luas tanah terlantar (Ha)	1.096	1.080	907	705	302	-51,51
6	Persentase Redistribusi tanah terlantar (%)	0	1,46	15,78	18,40	36,84	9,21

Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.67 capaian dari tahun 2018-2022, jumlah tanah pemda yang bersertifikat hingga tahun 2022 mencapai 248 bidang (9,19 persen). Selain itu, terdapat tanah Pemkab yang sudah bersertifikat dari bidang Aset. Sehingga total bidang tanah milik Pemkab yang sudah bersertifikat sebanyak 385 bidang (28,30 persen). Masih terdapat sekitar 975 bidang tanah milik pemkab yang belum bersertifikat.

Redistribusi tanah terlantar dimulai pada tahun 2019, dari 1.096 hektar tanah terlantar, sebanyak 403,77 hektar didistribusi pada tahun 2022, angka ini meningkat dari capaian tahun 2018 sebesar 0 hektar. Sisa tanah terlantar yang belum didistribusi sebanyak 302 hektar (27,51 persen).

E. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana.

E.1 Penanganan Sampah

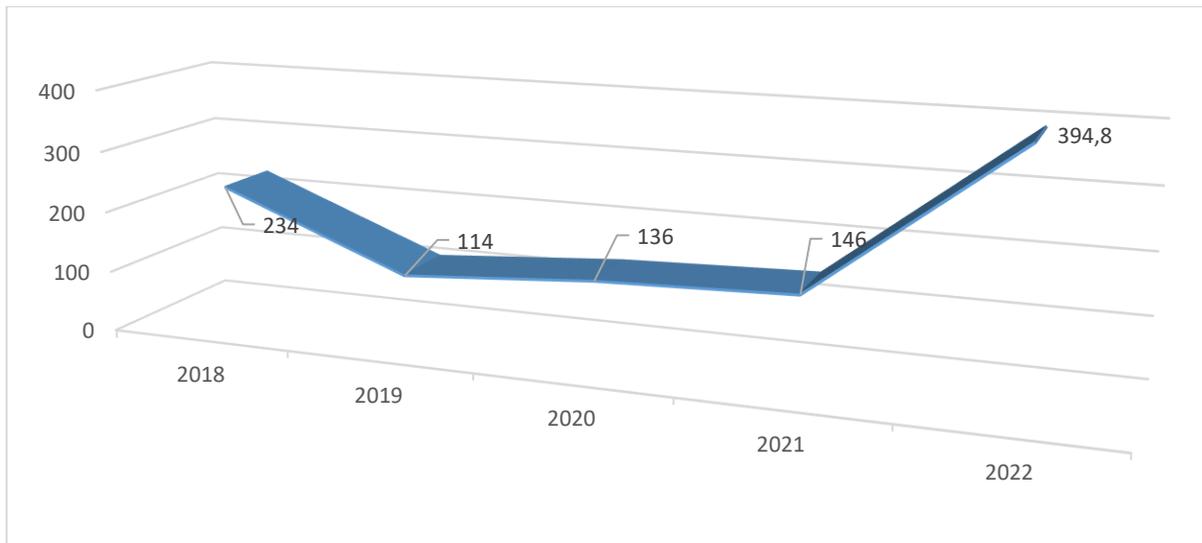
Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya, tak terkecuali penambahan sampah medis yang diakibatkan selama masa pandemi ini. Peningkatan daur ulang sampah melalui Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRANAS) menjadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengurangi permasalahan sampah di Indonesia.

Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh timbunan sampah diantaranya ialah pencemaran udara yang mengeluarkan gas metan dan air lindi yang belum diproses sehingga masuk ke dalam tanah (banyak terjadi di *open dumping site*). Selain itu, semakin masifnya pencemaran danau, waduk, sungai dan lautan oleh limbah plastik dan mikroplastik. Rendahnya kepedulian dan empati masyarakat terhadap keberadaan sampah di sekitar lingkungannya menjadi dampak sosial yang ditimbulkan.

Kondisi persampahan di Kabupaten Bireuen tak pelak berbanding lurus dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sejak awal berdiri pada tahun 1999, Kabupaten Bireuen telah berkembang pesat dan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan permukiman baru khususnya di Ibu Kota Kabupaten (IKK). Dibutuhkan perencanaan yang cukup akurat dalam

menangani persampahan secara menyeluruh hingga ke kecamatan. Secara umum penanganan sampah cukup baik, hanya saja masih terkendala sarana dan prasarana yang minim sehingga mengganggu operasional rutin. Keadaan ini menyebabkan hambatan mobilisasi pengangkutan sampah secara berkala.

Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang bersama pengadaan air memberikan porsi sebesar 0,05 persen terhadap sektor pendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2022. Angka ini dapat menjadi pendukung dalam pemenuhan prasarana dan sarana persampahan yang semakin dibutuhkan.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Gambar 2.17. Volume Sampah Tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen

Jumlah sampah yang dihasilkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Volume sampah yang paling banyak dihasilkan terjadi pada tahun 2018 sebanyak 234 m³ meningkat menjadi 394,8 m³ pada tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan volume sampah sebanyak 36,45 persen per tahun.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Gambar 2.18. Tempat Pembuangan Akhir Blang Beururu

Penanganan terhadap kondisi persampahan di Kabupaten Bireuen masih memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah kabupaten. Belum adanya prasarana yang memadai mengakibatkan penumpukan sampah di kawasan TPA. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kerusakan lingkungan baik di TPA maupun kawasan sekitarnya. Letak TPA Blang Beururu yang berada di kawasan dengan topografi curam memerlukan prasarana jalan sehingga dapat memudahkan mobilisasi mobil pengangkut sampah. Penambahan akan prasarana dan sarana menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan pelayanan persampahan. Sarana dan Prasarana Persampahan Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen

Tabel 2.68
Sarana dan Prasarana Persampahan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah mobil pengangkut sampah (unit)	18	20	20	22	23	6,41
2	Jumlah gerobak sampah (unit)	24	0	0	4	25	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Jumlah mobil pengangkut sampah yang dimiliki oleh Kabupaten Bireuen hingga tahun 2022 sebanyak 23 unit meningkat dibanding jumlah mobil pengangkut sampah pada tahun 2018 (18 unit). Jumlah ini belum mampu memberikan dampak yang efektif terhadap permasalahan persampahan secara menyeluruh di Kabupaten Bireuen.

E.2 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dengan tujuan menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik

di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Tabel 2.69
Luas RTH Tahun 2018 s.d 2022
di Kabupaten Bireuen

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas RTH (ha)	204,94	204,94	204,94	204,94	204,94
2	Luas Wilayah Kota (ha)	1.690,87	1.690,87	1.690,87	1.690,87	1.690,87
3	Persentase (%)	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Luas RTH Kabupaten Bireuen tidak berubah pada tahun 2018 hingga tahun 2022 sejumlah 204,9 hektar Namun angka ini masih dibawah target 30 persen dari luas kota. RTH publik di Kabupaten Bireuen masih sangat minim bisa dikatakan hampir tidak ada, hanya tersedia di median jalan, perkantoran dan beberapa tempat lainnya dengan skala kecil sedangkan taman bermain dan alun-alun kota belum tersedia. Untuk RTH privat sudah memenuhi syarat 10 persen atau lebih dikarenakan kebun dan pekarangan rumah penduduk kota masih luas.

E.3 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isu lingkungan memang sangat sensitif karena berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Dalam hal ini, rusaknya lingkungan mempengaruhi taraf hidup manusia. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan, pemerintah membuat upaya yang disebut PPLH. Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	10	6	8	14	14	99,23

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten pada tahun 2022 sebanyak 14 unit lebih tinggi dari capaian tahun 2018 sebanyak 10 Unit.

E.4 Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, kewenangan Kabupaten/Kota dalam hal penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota dan kewenangan dalam hal peningkatan kapasitas MHA.

Tabel 2.71

Capaian Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah MHA yang dibina	-	-	4	4	4	0,00
2	Jumlah MHA	75	75	75	75	75	0,00
4	Jumlah Kampung Iklim	-	-	2	2	2	0,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah MHA yang dibina. Pada tahun 2022 telah dibina sebanyak 4 MHA dari 75 MHA yang ada di Kabupaten Bireuen meningkat dibandingkan kondisi tahun 2018. Namun masih terdapat 71 MHA yang belum dibina.

E.5 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup

Untuk mendukung program pemerintah di bidang lingkungan hidup adalah dengan membentuk kampung iklim. Kampung iklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

Pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, dimana di dalamnya terkandung komponen utama, syarat pengusulan, penilaian dan kategori ProKlim. Dalam peraturan menteri tersebut juga disinggung bahwa ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa. Jumlah kampung iklim di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Jumlah Kampung Iklim Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Kampung Iklim	-	-	2	2	2	0,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Jumlah kampung iklim selama lima tahun terakhir meningkat menjadi dua kampung, Jumlah kampung iklim yang telah terbentuk di Kabupaten Bireuen masih stagnan sebanyak dua desa..

E.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Mulai tahun 2021 provinsi, kabupaten dan kota diminta menetapkan target IKLH dan memasukan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan pedoman mengenai target dari masing-masing daerah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	IKA	70,00	84,96	80,3	62,00	60,00	-2,50
2	IKU	87,5	87,99	85,05	83,22	86,27	-0,31
3	IKTL	55,32	63,6	65	53,34	56,34	0,26
4	IKLH	69,38	77,33	75,61	71,27	69,84	0,12

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Hasil pengukuran tahun 2022 IKLH Kabupaten Bireuen sedikit meningkat menjadi 69,84 persen dibandingkan kondisi tahun 2018 (69,38 persen), namun angka IKLH Kabupaten Bireuen terus menurun sejak tahun 2019. Jika dilihat dari unsur pembentuk IKLH, nilai IKA turun dari 70,00 (2018) menjadi 60,00 (2022), nilai IKU dari 87,5 (2018) menjadi 86,27 (2022) dan IKTL meningkat dari 55,32 persen (2018) menjadi 56,34 (2022). Nilai IKLH Kabupaten Bireuen tahun 2022 masuk dalam kategori **sedang**, turun dibandingkan tahun sebelumnya dengan kategori **baik**.

E.5 Penanganan Bencana

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut.

Beberapa tahun terakhir Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti kebakaran, banjir dan longsor, angin kencang dan orang hilang. Kejadian bencana dan penanganan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen tahun 2018-2022 seperti pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74
Kejadian Bencana dan Penanganan Tahun 2018 s.d 2022
di Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Kebakaran	101	29	112	106	116	54,75
2	Banjir dan Longsor	11	4	20	10	8	66,59
3	Angin Kencang	4	15	5	15	6	87,08
4	Pencarian Orang Hilang	-	3	2	5	4	32,22
5	Jumlah kejadian bencana	15	22	27	30	53	39,29
6	Jumlah kejadian bencana Tertangani	15	22	27	30	53	39,29

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.74 diatas, jumlah kejadian bencana terus meningkat, kasus kebakaran mengalami peningkatan dari 101 kejadian bencana menjadi 116 kejadian kebakaran pada tahun 2022, dengan rata-rata setiap tahun meningkat 54,75 persen. Bencana banjir dan longsor juga meningkat dengan rata-rata 66,59 persen per tahun, bencana angin kencang meningkat dengan rata-rata 87,08 persen per tahun.

Jumlah kejadian bencana yang ditangani mencapai 100 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2022 dari 53 kejadian bencana dapat ditangani semua. Menurut data BNPB tahun 2022,

Kabupaten Bireuen termasuk daerah dengan tingkat kapasitas penanganan bencana masih rendah dengan trend Indeks Resiko Bencana (IRB) sebesar 165,83 dibawah indeks resiko bencana Aceh yang memiliki kapasitas IRB tinggi dengan nilai 149,99.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mencapai sasaran dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Bireuen fokus pada beberapa hal antara lain kepemilikan Kartu Keluarga (KK), penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektrik (KTP-el), penduduk yang memiliki Akta Kelahiran.

Ada beberapa hal yang dilakukan untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran antara lain, sosialisasi ke seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen, kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama untuk membuat akte siswa juga menyampaikan informasi tentang pentingnya memiliki akte kelahiran dan kematian di kecamatan maupun desa.

Tabel 2.75
Jumlah KTP dan Akte yang di Terbitkan Tahun 2018 s.d 2022
di Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Kartu Tanda Penduduk	300.163	301.828	315.997	293.521	299.122	0,01
2	Akte Kelahiran	18.614	129.067	186.617	202.209	213.033	162,92
3	Akte Kematian	5.866	2.755	16.501	3.224	23.172	246,05
4	Jumlah Penduduk	461.726	471.635	442.953	439.788	443.874	-0,39

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bireuen Tahun 2023

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

G.1 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan yang ada dimasyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya, rata-rata Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif di Kabupaten Bireuen terdapat pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
yang aktif Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.76 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018-2022 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif yang aktif di Kabupaten Bireuen sebanyak lima lembaga adat, terdiri dari lembaga mukim, tuha peut dan tuha lapan, lembaga pemuda gampong (karang taruna), PKK dan lembaga adat gampong.

G.2 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

PKK merupakan organisasi yang memberdayakan perempuan dalam program kegiatannya dimana dibentuknya kelompok binaan pada gampong yang terdapat ditiap kecamatannya yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar lebih terampil lagi. Berikut rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.77
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kelompok PKK	609	609	609	609	609
2	Jumlah desa	609	609	609	609	609
3	Persentase Jumlah Kelompok Binaan PKK	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.77 dapat digambarkan bahwa tahun 2018 – 2022 jumlah kelompok binaan PKK 609 kelompok dari 609 desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Bireuen atau sudah mencapai 100 persen yang telah dilakukan Pembinaan terhadap kelompok PKK yang ada diseluruh desa. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Tim PKK Kecamatan dan Tim PKK Kabupaten bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dan SKPK terkait lainnya.

G.3 Persentase Posyandu Aktif

Jenis Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang paling memasyarakat adalah posyandu dengan kegiatan program prioritasnya yaitu perbaikan gizi, imunisasi, penanganan diare, dan KB. Di Kabupaten Bireuen, semua desa mempunyai posyandu yaitu sebanyak 609

posyandu dan proposional dengan jumlah desa di Kabupaten Bireuen. Persentase jumlah posyandu aktif dalam Kabupaten Bireuen dapat di lihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78
Persentase Posyandu Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Posyandu	623	626	626	633	630	0,28
2	Jumlah desa	609	609	609	609	609	0,00
3	Persentase Posyandu	102,3	102,7	102,7	103,9	103,4	0,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.78 dapat digambarkan bahwa di Kabupaten Bireuen sudah terbentuk mencapai 630 unit Posyandu aktif (103,4 persen) pada tahun 2022 yang tersebar di 17 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen. Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana dan pihak kecamatan serta instansi terkait terus melakukan pembinaan agar pemanfaatan posyandu oleh masyarakat lebih ditingkatkan kembali.

Sesuai dengan peraturan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan gampong, yang di dalamnya tercantum bahwa dana gampong dapat dipergunakan untuk kegiatan pelayanan di posyandu baik biaya operasional, insentif kader, maupun kebutuhan lainnya untuk meningkatkan kegiatan pelayanan posyandu ditingkat gampong.

G.4 Indeks Desa Membangun

Salah satu tolak ukur menghitung keberhasilan pembangunan gampong adalah dengan nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Klasifikasi penilaian IDM adalah sebagai berikut :

- Desa Mandiri/Swasembada : IDM > 0,8155
- Desa Maju/Prasembada : 0,8155 ≥ IDM > 0,7072
- Desa Berkembang/Madya : 0,7072 ≥ IDM > 0,5989
- Desa Tertinggal/Pra Madya : 0,5989 ≥ IDM > 0,4907
- Desa Sangat Tertinggal/Pratama : 0,4907 ≥ IDM

Tabel 2.79

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2018 s.d 2022

Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Status IDM Bireuen	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	
2	IDM Bireuen	0,557	0,5605	0,5774	0,5813	0,6237	0,029
3	IDM Aceh	0,574	0,6002	0,6129	0,6199	0,6483	0,031

Sumber : Kementerian Desa Tahun 2023

Dari Tabel 2.79, IDM Kabupaten Bireuen tahun 2022 termasuk dalam kategori berkembang dengan nilai IDM 0,6237. Nilai IDM ini masih lebih rendah dibandingkan nilai IDM Aceh (0,6483). Rata-rata pertumbuhan IDM Bireuen tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,029 per tahun, lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan IDM Aceh (0,031 persen per tahun).

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sasaran utama dari pelayanan keluarga berencana adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Pemberi layanan KB antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa.

Salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Pemerintah Kabupaten Bireuen terus memberikan dukungan dan kebijakan untuk menekan lajunya pertumbuhan penduduk di kabupaten dengan mengeluarkan regulasi tentang penggunaan dana gampong untuk pelayanan KB di tingkat gampong.

Tabel 2.80
Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Tahun 2018-2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah PUS	83.348	78.803	56.406	59.315	28.178	-20,30
2	Jumlah Peserta KB Aktif (Akseptor)	70.981	61.867	34.884	36.563	27.961	-18,79
3	Rasio Akseptor terhadap PUS	85,16	78,58	61,84	61,64	99,23	3,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pada tahun 2022 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bireuen tercatat sebanyak 28.178 orang dan yang menjadi peserta aktif KB sebanyak 27.961 orang (99,23 persen dari jumlah PUS). Dari data tersebut menggambarkan bahwa terjadi peningkatan rasio akseptor KB terhadap PUS dari 85,16 persen pada tahun 2018 menjadi 99,23 persen pada tahun 2022. Namun jumlah peserta KB aktif turun dari 70.981 akseptor pada tahun 2018 menjadi 27.961 akseptor pada tahun 2022.

I. Perhubungan

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi dinilai cukup penting dalam menunjang berbagai aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Gambaran kondisi dan keadaan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81
Arus Penumpang Angkutan Umum dan Prasarana Transportasi
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Penumpang Angkutan Darat (orang)	29.670	30.820	31.000	36.500	32.120	2,55
2	Jumlah Angkutan Darat (unit)	1.302	1.340	1.340	1.345	2.161	15,99
3	Rasio	1 : 23	1 : 23	1 : 23	1 : 27	1 : 15	
4	Jumlah Terminal Bis (unit)	5	4	4	4	4	-0,25
5	Jumlah Pelabuhan Laut (unit)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pada tahun 2022 rasio jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang semakin baik, dari 1 : 23 pada tahun 2018 menjadi 1: 15 pada tahun 2022. Perbaikan ini didukung oleh peningkatan jumlah angkutan darat dari 1.302 unit pada tahun 2018 menjadi 2.161 unit pada tahun 2022. Jumlah penumpang angkutan darat juga meningkat dari 29.670 orang menjadi 31.120 orang pada tahun 2022.

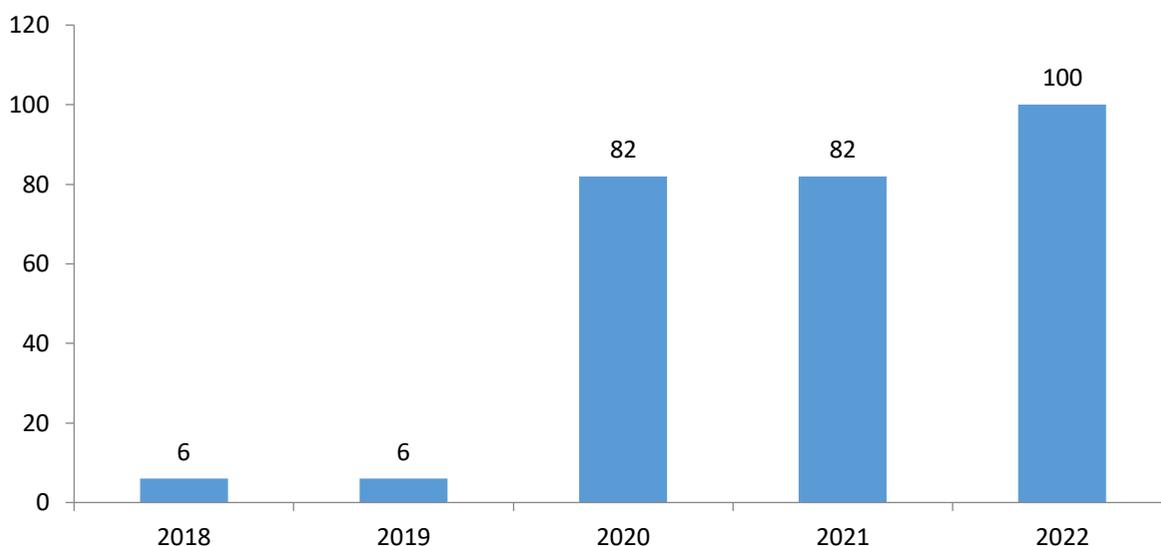
Terminal bis yang tersedia di seluruh penjuru Kabupaten Bireuen hanya berjumlah 4 unit hingga tahun 2022 lebih rendah dari kondisi tahun 2018 (5 unit), dimana terdapat terminal Tipe B dengan kewenangan provinsi yang masih belum dialihkan kepada pemerintah kabupaten sehingga belum dapat difungsikan secara optimal.

Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen selama ini dinilai sudah cukup memadai. Keberadaan fasilitas transportasi angkutan umum tersebut tentunya bersinergi serta saling mendukung dengan posisi dan letak geografis wilayah Kabupaten Bireuen yang berada di jalur perlintasan jalan negara lintas Sumatera, dimana terdapat sejumlah angkutan penumpang umum, yang meskipun bukan tercatat sebagai armada/kendaraan yang berbasis di daerah ini, namun lintasan trayek yang mereka lalui melewati wilayah Kabupaten Bireuen, sehingga tentu dapat senantiasa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi. Indeks kelancaran lalu lintas Kabupaten Bireuen mencapai angka 0,49 pada tahun 2022, angka ini turun dari capaian tahun 2021 dengan indeks 0,59.

J. Komunikasi, Statistika dan Informatika

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/per/m.kominfo/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota, pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka memberikan penguatan terhadap kelembagan, SDM, dan aktivitas KIM sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya secara mandiri dan kreatif dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan nilai tambah. Target pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada dalam Kabupaten/Kota.

Perkembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau disebut dengan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kabupaten Bireuen mulai pada tahun 2017 yaitu pada tahun pertama terbentuknya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 2.19.



Sumber : Dinas Komunikas, Informasi dan Statistika Tahun 2023

Gambar 2.19. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIG di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bireuen sampai sekarang sekitar meningkat dari 6 persen pada tahun 2018 menjadi 100 persen pada tahun 2022.

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Bireuen untuk wilayah permukiman masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan sudah seluruhnya terlayani. Sedangkan di beberapa wilayah perkebunan, pegunungan/dataran tinggi dan hutan yang berada jauh dari permukiman, jangkauan layanan masih minim, mengingat tidak banyak penggunaan layanan telekomunikasi di tempat-tempat tersebut. Jumlah tower komunikasi sebanyak 166 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Pimpinan dan seluruh penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hasil penilaian SPBE tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82
Hasil Penilaian Indeks SPBE Provinsi Aceh Tahun 2021 s.d 2022

No	Nama Instansi	2021	2022	Pertumbuhan (%)	Predikat
1	Pemerintah Aceh	2,62	3,15	20,23	Baik
2	Pemerintah Kota Banda Aceh	3,19	2,76	-13,48	Baik
3	Pemerintah Kab. Aceh Barat	2,1	2,63	25,24	Baik
4	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	2,62	2,62	0,00	Baik
5	Pemerintah Kab. Bener Meriah	2,2	2,6	18,18	Baik
6	Pemerintah Kab. Aceh Timur	2,25	2,29	1,78	Cukup
7	Pemerintah Kab. Nagan Raya	1,76	2,2	25,00	Cukup
8	Pemerintah Kab. Bireuen	2,06	2,1	1,94	Cukup
9	Pemerintah Kota Langsa	1,98	1,82	-8,08	Cukup
10	Pemerintah Kota Subulussalam	1	1,76	76,00	Kurang
11	Pemerintah Kota Sabang	1,53	1,59	3,92	Kurang

Sumber : Keputusan Menpan RB Tahun 2022 dan 2023

Dari Tabel 2.82, sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023, indeks SPBE Kabupaten Bireuen mendapatkan predikat cukup dengan nilai 2,1 meningkat dibandingkan tahun 2021 (1,76). Angka ini masih lebih rendah dibandingkan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan nilai 3,19 (baik). Kabupaten/kota dengan indeks SPBE baik adalah Aceh Tamiang dan Banda Aceh. Dibandingkan dengan kabupaten lain dan Pemerintah Aceh, Kabupaten Bireuen berada di peringkat kedelapan, turun satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019, untuk bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bireuen sampai saat ini masih belum menggunakan aplikasi terintegrasi untuk pengumpulan data statistik sektoral, namun untuk ketersediaan data statistik sektoral pada tahun 2022 mencapai angka 100 persen.

K. Persandian

Persandian merupakan bidang urusan pengamanan informasi rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Di pemerintahan Kabupaten

Bireuen, persandian berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, pada tahun 2021 persandian kabupaten Bireuen sudah mulai aktif dan terdapat dua perangkat daerah yang telah menggunakan sandai dalam komunikasi perangkat daerah. Hingga tahun 2022 sudah tercatat 2 perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah di Kabupaten Bireuen.

L. Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Koperasi sebagai pendukung pembangunan sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dengan berbagai upaya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran juga pemberdayaan usaha ekonomi mikro yang digerakkan melalui pembangunan ekonomi koperasi.

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Persentase koperasi aktif tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 2.83.

Tabel 2.83
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah koperasi aktif (unit)	206	169	173	186	191	-1,35
2	Jumlah koperasi tidak aktif (unit)	31	69	69	71	189	72,92
3	Jumlah koperasi (unit)	237	238	242	255	260	2,36
4	Persentase koperasi aktif (%)	87,61	70,42	71,49	72,16	73,46	-3,54

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.83 dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif pada tahun 2022 turun menjadi 73,46 persen dibandingkan kondisi tahun 2018 (87,61 persen). Jumlah koperasi aktif turun menjadi 191 koperasi pada tahun 2022 dibandingkan jumlah koperasi aktif pada tahun 2018 (206 koperasi) dengan rata-rata penurunan 1,35 persen per tahun. Penurunan terbanyak pada tahun 2019, disebabkan terjadi pembubaran koperasi sebanyak 80 koperasi. Pembubaran tersebut di sebabkan kantor dan kepengurusan koperasi tersebut tidak ada lagi juga tidak pernah melaksanakan RAT lebih dari 2 (dua) tahun. Jumlah koperasi yang tidak aktif meningkat dari 31 unit pada tahun 2018 menjadi 191 unit pada tahun 2022.

Untuk jumlah koperasi aktif terdiri dari 11 unit koperasi unit desa, 25 unit koperasi pegawai, 5 unit koperasi pasar, 3 unit koperasi karyawan dan 147 unit unit koperasi lainnya.

Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2018, namun dari tahun 2019 hingga tahun 2022 koperasi aktif menunjukkan peningkatan. Peningkatan jumlah koperasi aktif dapat mendorong peningkatan aktivitas koperasi sehingga volume usaha koperasi dan sisa hasil usaha dapat mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif juga dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi tersebut dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen. Pemerintah Kabupaten Bireuen terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan koperasi aktif diantaranya melakukan sosialisasi bagi para pengurus koperasi agar koperasi dapat berjalan baik, juga melakukan pendampingan untuk pengelolaan koperasi. Capaian pembinaan koperasi tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 2.84.

Tabel 2.84
Capaian Pembinaan Koperasi Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Koperasi Simpan Pinjam (unit)	58	173	106	106	107	0,94
2	Jumlah Koperasi Pola Syariah (unit)	2	4	5	6	7	40,42
3	Jumlah koperasi yang diawasi (unit)	5	5	10	8	8	20,00
4	Jumlah Koperasi yang Dinilai (unit)	25	25	25	20	20	-5,00
5	Jumlah koperasi aktif (unit)	206	169	173	184	191	-1,36

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pada tahun 2022 beberapa indikator pembinaan koperasi di Kabupaten Bireuen menunjukkan peningkatan. Jumlah koperasi yang pola syariah meningkat dari 2 unit pada tahun 2018 menjadi 7 unit (2022). Jumlah koperasi yang diawasi meningkat dengan jumlah 5 unit pada tahun 2018 menjadi 8 unit tahun 2022. Jumlah koperasi yang dinilai sedikit turun dari 25 unit pada tahun 2018 menjadi 20 unit pada tahun 2022. Selain koperasi, UMKM juga memegang peranan penting dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Bireuen. Capaian Pembinaan UMKM di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85
Capaian Pembinaan UMKM Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah UMKM yang diberdayakan (unit)	100	246	50	2	105	1.280,08
2	Jumlah UMKM Naik Kelas (unit)	NA	NA	NA	3	0	NA
3	Jumlah UMKM (unit)	7.301	7.139	16.508	16.633	18.688	35,53

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.85, UMKM yang diberdayakan pada tahun 2018 sebanyak 100 unit meningkat dibandingkan tahun 2022 menjadi 105 unit. Pada tahun 2022 tidak terdapat UMKM naik kelas, capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya (3 unit). Hal serupa juga terjadi pada jumlah UMKM yang meningkat dari 7.301 pada tahun 2018 menjadi 18.688 unit pada tahun 2022 dengan rata-rata tumbuh 35,53 persen per tahun.

M. Penanaman Modal

Upaya pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan kapitalisasi modal cukup besar agar dapat menghasilkan kondisi yang baik untuk tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penanaman modal dalam bentuk investasi sangat diperlukan dalam rangka pendayagunaan potensi sumber daya yang ada, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja di daerah ini. Untuk meningkatkan peluang-peluang investasi diperlukan hal-hal sebagai berikut seperti terjaminnya iklim usaha yang kondusif, kebijakan penanaman modal, tersedianya infrastruktur, terutama sarana perhubungan baik darat, laut dan udara yang memadai maupun infrastruktur sistem penanaman modal dan juga adanya peran lembaga keuangan yang baik.

Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondusif tidaknya iklim penanaman modal. Iklim penanaman modal sangat ditentukan oleh kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Selain kebijakan, iklim penanaman modal juga dipengaruhi oleh sarana prasarana pendukung, kualitas aparat pelayanan.

Laporan kegiatan penanaman modal merupakan jenis laporan keuangan yang wajib dipersiapkan bagi seseorang yang tengah menjalankan kegiatan usaha. Melalui laporan kegiatan penanaman modal atau biasa disingkat dengan LKPM ini, dapat diketahui apakah badan usaha mengalami surplus atau defisit laporan keuangan. Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan LKPM sebanyak 60 perusahaan.

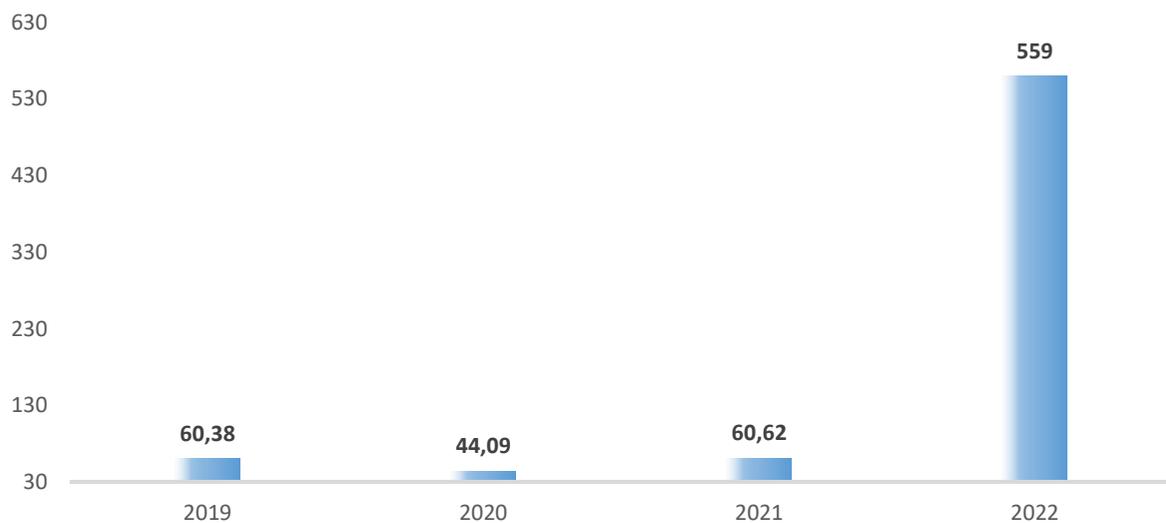
Izin Usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha. Izin usaha otomatis diterbitkan setelah pelaku usaha menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin bangunan, atau persyaratan izin usaha lainnya (jika dipersyaratkan). Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin pada tahun 2022 mencapai 2.867 pelaku usaha. Jumlah peningkatan usaha yang memiliki izin sejumlah 121 usaha. Perkembangan investasi di Kabupaten Bireuen masih belum menunjukkan kondisi yang baik, hal ini ditandai dengan masih banyak investor yang tidak aktif lagi.

Tabel 2.86
Jumlah Perusahaan yang Mendaftar Menurut Bentuk Badan Hukum
Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	PT	47	45	30	27	82	39,03
2	CV/Firma	112	118	111	55	95	5,43
3	Perseorangan	45	423	176	176	2.222	486,03
Total		204	586	317	258	2.399	238,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.86 jumlah perusahaan yang mendaftar menurut bentuk badan hukum terus menunjukkan tren peningkatan. Total perusahaan pada tahun 2018 sebanyak 204 unit meningkat menjadi 2.399 unit pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan 238,15 persen per tahun. Peningkatan paling besar terdapat pada jenis perusahaan perorangan yang berjumlah 45 unit pada tahun 2018 menjadi 2.222 unit pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan 486,03 unit per tahun, selanjutnya perusahaan berbentuk PT meningkat dari 47 unit pada tahun 2018 menjadi 82 unit pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan 39,03 persen per tahun, sedangkan perusahaan berbadan hukum CV turun dari 112 unit pada tahun 2018 menjadi 95 unit pada tahun 2022.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Gambar 2.20. Realisasi Investasi Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2022

Realisasi investasi berfluktuasi dari tahun 2019-2022 terus meningkat, pada tahun 2022 realisasi investasi mencapai 559 milyar rupiah meningkat drastis dari tahun 2019 (60,38 milyar). Terdiri dari investasi UMK 108 milyar rupiah dan non UMK sebesar 451 milyar rupiah. Hal ini dihasilkan dari salah satunya dari inovasi di DPMPTSP berupa Fasilitas pendaftaran aplikasi OSS berbasis risiko melalui inovasi "Bada Aploss Beko". Kedepannya diharapkan investasi di Kabupaten Bireuen terus meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.

N. Kepemudaan dan Olahraga

N.1 Kepemudaan

Pemuda adalah generasi penerus bangsa, dimana sosok pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang para pemuda dapat menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih maju. Jumlah organisasi pemuda meningkat dari 23 unit tahun 2018 meningkat menjadi 26 unit pada tahun 2022.

Tabel 2.87
Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2018 s.d 2022
di Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah organisasi pemuda	23	26	26	26	26	3,3
2	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	2	2	3	5	4	24,2
3	Jumlah Pemuda	160.205	162.400	165.865	165.865	165.865	0,9

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pada tahun 2022 dari 165.865 pemuda, sebanyak 470 orang atau sebesar 0,28 persen termasuk dalam pemuda berprestasi. Terdiri dari atlet, duta wisata, paskibra, peserta MTQ dan lain-lain. Hasil ini lebih rendah dari capaian provinsi Aceh sebesar 1,96 persen.

N.2 Olahraga

Di bidang olahraga Kabupaten Bireuen mengalami cukup banyak kemajuan, terutama di cabang sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat daerah ini sehari-hari. Beberapa permasalahan yang penting dan perlu diatasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga di masa mendatang rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, upaya pembinaan dan penjarangan bibit atlet cabang olahraga prestasi yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, serta masih rendahnya bentuk pengakuan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

Tabel 2.88
Sarana Olahraga Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Sarana Olahraga	624	625	625	634	643	0,75
2	Jumlah Penduduk	461.726	471.635	436.418	439.788	443.874	-0,90
3	Rasio Sarana Olahraga	1:740	1:754	1:698	1:694	1:690	-1,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.88 bisa kita lihat bahwa jumlah sarana olahraga di Kabupaten Bireuen semakin meningkat, pada tahun 2022 mencapai 643 unit sarana olahraga yang terdiri dari 290

lapangan bola kaki, 232 lapangan volley, 102 lapangan bulu tangkis, 4 lapangan basket, 10 lapangan futsal dan 5 lapangan tenis, meningkat dibandingkan tahun 2018 (624 unit) dengan rata-rata pertumbuhan 0,75 persen per tahun. Namun rasio sarana olahraga dibandingkan jumlah penduduk menurun dari 1:740 menjadi 1:690.

Tabel 2.89
Capaian Prestasi Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Cabang Olahraga	28	32	34	36	35	5,91
2	Jumlah Cabang Olahraga Memperoleh Medali	8	8	8	7	26	64,73
3	Jumlah Medali	29	29	29	130	113	83,80

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.89, prestasi olahraga Kabupaten Bireuen terus meningkat, pada tahun 2022 mendapat 113 medali dari 26 cabang olahraga pada PORA Provinsi di Kabupaten Pidie dan menempati urutan keenam dengan perolehan 31 medali emas, 38 medali perak dan 48 medali perunggu, capaian ini meningkat dari PORA tahun 2018 yang hanya mendapat 29 medali dari 8 cabang olahraga dan menempati peringkat 19.

Selain prestasi olahraga, salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan olahraga menggunakan Indeks Pembangunan Olahraga. Indeks pembangunan Olahraga adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu : (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, (2) Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga, (3) partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur dan (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat. Hasil pengukuran Indeks pembangunan olahraga dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Nilai 0 – 0,499 = kategori rendah
2. Nilai 0,500 – 0,799 = kategori menengah
3. Nilai 0,800 – 1 = kategori tinggi

Hasil perhitungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata , Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 0,261, termasuk kategori rendah. Diharapkan tahun 2026 nilai Indeks pembangunan olahraga lebih besar dari 0,501 (kategori sedang), sesuai dengan target RPK di akhir tahun.

O. Kebudayaan

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya serta potensi alam yang subur dan indah. Penduduknya yang relatif heterogen telah

melahirkan budaya yang beraneka ragam. Penguatan budaya daerah yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam perlu terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen. Untuk kedepannya masih diperlukan upaya untuk menggali dan melestarikan serta mengembangkan adat, budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan syariat Islam.

Tabel 2.90
Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Grup Kesenian	122	142	142	152	152	5,86
2	Jumlah Gedung Kesenian	-	-	-	-	-	0,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.90, jumlah grup kesenian di Kabupaten Bireuen meningkat dari 122 grup di tahun 2018 menjadi 152 grup kesenian pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 5,86 persen. Sedangkan gedung kesenian, hingga tahun 2022 di Kabupaten Bireuen belum tersedia.

P. Perpustakaan

Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2012 telah membentuk bagian perpustakaan sebagai wahana pelestarian kebudayaan, mendukung pelayanan pendidikan dan menyampaikan informasi melalui perpustakaan. Menyikapi perkembangan informasi dan budaya pelestarian budaya maka pemerintah Kabupaten Bireuen meningkatkan status bagian perpustakaan menjadi kantor pada tahun 2015 dan menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2017. Peningkatan status organisasi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya budaya baca dalam masyarakat dan kepentingan arsip daerah yang harus didokumentasikan.

Mengingat besarnya peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bireuen terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat. Yang menjadi persoalan saat ini sarana dan prasarana dibidang perpustakaan yang belum representatif untuk memfasilitasi pengunjung perpustakaan menurut katagori umur maupun sumber bacaan. Seperti ruang anak yang tidak mampu menampung jumlah kunjungan lebih dari 20 orang. Sementara minat dan jumlah kunjungan terbanyak berada di ruang anak. Buku-buku anak juga masih perlu penambahan mengingatnya besarnya minat anak untuk mendapatkan sesuatu yang baru terutama yang berkaitan dengan budaya. Begitu juga sarana dan prasarana ruang baca anak, ruang pengolahan yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan.

Pengunjung perpustakaan didominasi oleh pelajar, mahasiswa dan anak-anak yang berada di sekitar ibu Kota Kabupaten, dengan jumlah anggota perpustakaan 3.321 anggota. Minat baca masyarakat terlihat bertambah dari data kunjungan perpustakaan. Untuk

pengunjung anak-anak terkadang melebihi daya tampung ruangan sehingga untuk memfasilitasi kunjungan bidang perpustakaan terus mengelola kesiapan ruangan dan petugas pendamping. Adapun jumlah pengunjung yang meminjam dan membaca buku di perpustakaan kabupaten sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.91.

Tabel 2.91
Capaian Kinerja Perpustakaan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Pengunjung	7.067	5.022	3.431	4.908	3.470	-11,72
2	Jumlah Anggota	527	451	2.462	3.321	1.167	100,38
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	263	10.640	11.141	11.394	11.424	988,22
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	16	21	21	21	21	7,81

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebanyak 3.470 orang, turun dibandingkan jumlah pengunjung pada tahun 2018 (7.067 orang) dengan rata-rata penurunan 11,72 persen per tahun, sedangkan jumlah anggota perpustakaan pada tahun 2022 mencapai 1.167 orang, meningkat dibandingkan jumlah anggota perpustakaan pada tahun 2018 (527 orang) dengan rata-rata pertumbuhan 100,38 persen per tahun. Untuk memotivasi minat baca, penataan ruangan dan jumlah koleksi buku perlu terus ditingkatkan. Sehingga target kunjungan yang ingin dipacu pada usia anak-anak dan orang tua dapat tercapai.

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan meningkat dari 263 eksemplar pada tahun 2018 menjadi 11.424 eksemplar pada tahun 2022, begitu juga dengan Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat meningkat dari 16 orang pada tahun 2018 menjadi 21 orang pada tahun 2022.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perpustakaan di lokasi terpencil pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan layanan perpustakaan bergerak melalui motor dan mobil perpustakaan keliling. Mobil pustaka tersebut mengunjungi sekolah, dayah dan gampong-gampong yang untuk memacu minat baca masyarakat dengan beragam koleksi buku. Lokasi tersebut tersebar dalam 14 kecamatan, sedangkan 3 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Kuala dan Kecamatan Jeumpa dikunjungi oleh motor pintar. Dengan jumlah koleksi buku di mobil pustaka keliling terdiri dari 368 eksemplar dan motor pintar 346 Eksemplar.

Q. Kearsipan

Arsip pemerintah di Kabupaten Bireuen selama ini sudah mulai dikelola secara lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan dan arahan yang dilakukan oleh bagaian arsip yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Namun peningkatan masih sangat dibutuhkan dimana dinas yang telah mengelola arsip secara benar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal masih sangat minim, hanya sekitar 10 persen. Disamping itu petugas yang menguasai cara pengelolaan arsip sesuai standar juga masih sangat kurang dan perlu mendapat keahlian khusus tentang kearsipan. Berangkat dari persoalan yang ada saat ini, dibutuhkan perhatian dan pembinaan terhadap pengelolaan arsip di dinas-dinas serta peningkatan sarana dan prasaran kearsipan guna meningkatkan pelayanan terhadap kearsipan.

Tabel 2.92
Capaian Pembangunan Bidang Arsip Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	8	8	5	7	6	-2,9
2	Jumlah Perangkat Daerah	52	52	52	52	52	0,00

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pada tahun 2021, jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku turun dari capaian 8 perangkat daerah dari total 52 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen pada tahun 2018 menjadi 6 perangkat daerah pada tahun 2022, rata-rata setiap tahun turun 2,9 persen.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator:

2.1.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan memiliki sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian. Untuk mengukur capaian dari urusan kelautan dan perikanan tersebut digunakan beberapa indikator diantaranya: (1) produksi perikanan dan konsumsi ikan.

A. Produksi Perikanan.

Potensi sumber daya perikanan budidaya di Kabupaten Bireuen terdiri dari budidaya air payau, budidaya air tawar dan budidaya di laut. Untuk budidaya air payau Kabupaten Bireuen memiliki tambak 4.945,6 hektar yang dimanfaatkan untuk usaha budidaya udang, bandeng, kerapu, nila dan komoditas lainnya. Untuk pengairan tambak tersebut didukung dengan saluran tambak sepanjang 294 km yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tersier dan kuarter. Sedangkan untuk menunjang aktivitas masyarakat pembudidaya ikan tersedia akses

jalan produksi tambak sepanjang 324 km dan jembatan penghubung ratusan unit, sebagaimana diperlihatkan Tabel 2.93.

Tabel 2.93
Produksi Perikanan Budidaya dan Sarana Pendukung Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

Tahun	Luas Lahan Budidaya Perikanan (Ha)	Luas Tambak (Ha)	Jumlah Petani Tambak (Orang)	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	Luas Kolam (Ha)	Jumlah Petani Kolam (Orang)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Nilai Produksi (Juta)
2018	5.095	4.945	4.861	180	150	674	11.847,90	445.500,30
2019	5.095	4.945	4.863	195	150	678	12.386,20	481.217,20
2020	5.096	4.945,6	4.665	237	150	674	12.581,25	745.558,35
2021	5.096	4.945,6	4.861	238	150	674	13.074,00	671.256,00
2022	5.096	4.945,6	4.861	240	150	674	13.599,92	815.995,20
Rata-rata Pertumbuhan (%)	0,000	0,000	0,000	0,078	0,000	0,000	0,035	0,186

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Jumlah luas lahan budidaya perikanan dan luas tambak selama tahun 2018 hingga tahun 2022 tidak banyak berubah. Pada tahun 2022, luas lahan budidaya perikanan sebanyak 5.096 hektar dan luas tambak 4.945,6 hektar. Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 sebesar 13,59 ribu ton dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,035 persen per tahun. Begitu juga dengan nilai produksi meningkat sebesar 0,186 persen per tahun mencapai 815 milyar rupiah pada tahun 2022.

Komoditas unggulan perikanan budidaya Kabupaten Bireuen adalah ikan kerapu, udang windu dan bandeng dengan jumlah produksinya pada tahun 2021 sebanyak 13.074,00 ton. Selain itu terdapat potensi budidaya ikan air tawar seluas 2.500 ha berupa kolam ikan, sawah (mina padi), danau, sungai dan rawa. Sedangkan potensi budidaya ikan di laut seluas 1.400 ha belum dimanfaatkan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.35/KEPMEN-KP/2013 Tahun 2013 Kabupaten Bireuen ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dengan pusat (minapolis) nya adalah Kecamatan Jangka dan hinterlandnya Kecamatan; Gandapura, Peusangan, Kuala dan Jeumpa (dengan wilayah cakupan 5 kecamatan dan 59 desa). Hasil produksi komoditas unggulan kawasan minapolitan Kabupaten Bireuen juga sangat menjanjikan, dimana setiap tahunnya terus meningkat seperti yang terdapat pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94
Data Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Kawasan Minapolitan Tahun 2018-2022
di Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Bandeng	6.228	6.235	6.184	6.184	6.369,52	0,006
2	Udang	3.935	4.346	4.513	4.914,81	5.234,84	0,074
3	Lele	980	285,41	297,25	326,44	333,51	-0,137
	Total	11.143	10.866	10.994	11.425	11.938	0,018

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pelaksanaan minapolitan di Kabupaten Bireuen masih dihadapkan dengan masalah kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan sehingga menghambat upaya-upaya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas komoditas perikanan. Hal ini dapat dilihat dilapangan khususnya di kawasan minapolitan masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kondisi kuala yang tersumbat, kondisi PPI dan TPI yang kurang optimal, kondisi armada perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih tradisional, saluran tambak yang masih dangkal dan prasarana kelautan dan perikanan lainnya yang masih memerlukan pengembangan dan perbaikan. Hal tersebut mengakibatkan banyak tambak yang tidak mendapatkan pengairan yang baik sehingga produksi dan produktivitas tambak masih rendah. Begitu juga dengan kondisi jalan, jembatan dan prasarana lainnya masih memerlukan perbaikan dan penambahan.

Untuk potensi sumber daya perikanan tangkap Kabupaten Bireuen memiliki garis pantai sepanjang 69 km dengan luas laut 1.511 km². Potensi produksi lestari perikanan tangkap di Kabupaten Bireuen sebesar 32.000 ton/tahun. Sedangkan pemanfaatannya pada tahun 2021 baru mencapai 13.253 ton/tahun (41,41 persen). Usaha perikanan tangkap Kabupaten Bireuen hingga sekarang masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan armada perikanan tangkap berukuran kecil (dibawah 5 GT) dan menggunakan alat tangkap sederhana. Potensi perikanan juga menjadi andalan, karena didukung dengan letak Kabupaten Bireuen yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka disebelah utara. Kabupaten Bireuen juga memiliki 2 (dua) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat mendukung untuk perkembangan sub sektor perikanan ke depannya, namun sarana prasarananya masih jauh dari memadai.

Tabel 2.95
Jumlah Nelayan, Perahu, PPI dan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	11.063	12.809	13.160,14	12.982,68	13.253	4,81

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	Jumah PPI (Unit)	3	3	3	3	3	0,00
3	Jumlah Nelayan (Orang)	4.659	7.614	7.614	7.449	7.614	15,86
4	Jumlah Perahu (Unit)	2.351	1.728	1.728	1.453	1.554	-8,86

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.95 capaian dari tahun 2018-2022, jumlah produksi perikanan tangkap terus meningkat, volume produksi pada tahun mencapai 13.253 ton meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 11.063 ton dengan pertumbuhan rata-rata 4,81 persen per tahun. Peningkatan produksi berbanding lurus dengan peningkatan jumlah nelayan yang tumbuh rata-rata 15,86 persen per tahun. Akan tetapi terjadi penurunan jumlah perahu pada tahun 2018 sebanyak 2.351 unit menurun hingga 1.554 unit pada tahun 2022 dengan penurunan rata-rata 8,86 persen per tahun.

B. Konsumsi Ikan.

Untuk meningkatkan konsumsi ikan Kabupaten Bireuen telah ikut melaksanakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Program ini rutin digelar di setiap tahunnya yang dikomandoi oleh Ibu Bupati Bireuen. Gerakan ini sangat perlu disosialisasikan dan diaplikasikan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan nilai konsumsi protein.

Dampak dari bertambahnya produksi perikanan tidak terlepas dari pembinaan kelompok nelayan baik itu kelompok nelayan tangkap maupun budidaya. Kelompok yang dibina pada tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan sehingga menjadi kelompok yang lebih mandiri.

Tabel 2.96
Konsumsi Ikan Perkapita Tahun 2018 s.d. 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)	40,67	41,65	44,22	44,77	61,05	11,55
2	Target Nasional (Kg/kapita/tahun)	50,65	54	56,39	59,53	59,53	4,15
3	Persentase konsumsi ikan (%)	80,29	77,13	80,67	75,21	61	-26,33

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

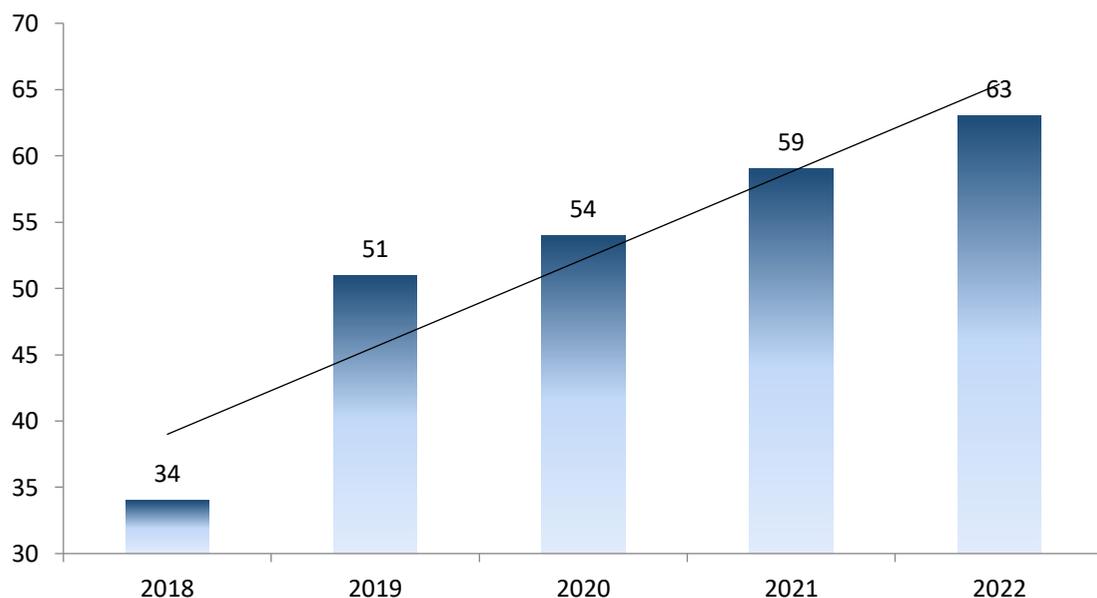
Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Target konsumsi ikan di Indonesia tahun 2018 mencapai 50,65 kilogram (kg) perkapita pertahun. Untuk tahun 2022 ditargetkan meningkat menjadi 59,53 kg/kapita/tahun demikian juga dengan konsumsi ikan Kabupaten Bireuen meningkat dari 40,67 kg/kapita/tahun pada tahun 2018 menjadi 61,55 kg/kapita/tahun pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,55 persen per tahun.

2.1.3.2.2. Pariwisata

Pariwisata Aceh semakin bergeliat setelah Aceh dideklarasikan sebagai daerah Wisata Halal Unggulan Oleh Menteri Pariwisata Pada Tanggal 19 September 2016. Pariwisata Aceh juga semakin dilirik oleh wisatawan baik lokal maupun manca negara. Dengan semakin besarnya peluang di dunia pariwisata, Bireuen sebagai salah satu kabupaten yang ada di Aceh mencoba mengemas pariwisata untuk daerah-daerah yang selama ini mulai di kenal dan ramai dikunjungi oleh masyarakat terutama wisata pantai.

Pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Perkembangan pariwisata suatu daerah dapat mendorong subsektor lain seperti akomodasi, restoran dan rumah makan, serta industri.

Perkembangan pariwisata tidak hanya didukung oleh alam dan budayanya, tetapi juga sarana akomodasi yang disediakan untuk wisatawan, baik berupa hotel maupun penginapan. Selain sarana akomodasi, terdapat juga fasilitas tambahan seperti restoran, rumah makan, fasilitas olahraga dan fasilitas lainnya yang dapat menarik minat wisatawan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Gambar 2.21. Jumlah Destinasi Wisata Tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen

Kabupaten Bireuen memiliki berbagai macam objek wisata, mulai dari pantai, sungai/krcong, air terjun, hingga wisata sejarah dan budaya seperti Makam Raja Jeumpa, Makam Tun Sri Lanang, dan Rumah Tgk Awe Geutah. Namun, wisata bahari masih menjadi wisata

utama di Kabupaten Bireuen mengingat kabupaten ini berada di daerah pesisir dengan garis pantai sepanjang 80 km.

Jumlah destinasi wisata di Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sejumlah 63 unit, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya 34 unit. Sebagian tempat wisata belum didukung oleh fasilitas penunjang seperti jalan, tempat ibadah, gazebo dan kios souvenir/jajanan. Jumlah destinasi wisata dengan kondisi baik sebanyak 6 destinasi (9,5 persen) dari 63 destinasi wisata di Kabupaten Bireuen.

Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Bireuen di harapkan akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat sekitar daerah wisata dan secara tidak langsung juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.3.2.3. Pertanian

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial di sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan maupun perkebunan.

A. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian secara umum merupakan penyumbang PDRB terbesar Kabupaten Bireuen. Sektor ini mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan di Kabupaten Bireuen adalah padi. Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Bireuen selama lima tahun terakhir terus berfluktuasi, sangat berpengaruh pada kondisi iklim dan tingkat berfungsinya infrastruktur pertanian. Tingkat produksi dan produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya digambarkan pada Tabel 2.97 dan Tabel 2.98

Tabel 2.97
Produksi Padi dan Bahan Pangan Utama lainnya Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Padi (ton)	261.812	252.927	184.944	164.924	152.079	-12,2
2	Jagung (ton)	698	136	82.393	36.179	41.005	15.090
3	Kedelai (ton)	12.125	14.716	17	358	43	459,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.97 dapat diketahui produksi padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Bireuen mengalami penurunan sebesar 12,2 persen per tahun. Pada tahun 2022 produksi padi mencapai 152.079 ton, lebih rendah dibandingkan produksi pada tahun 2018 yang mencapai 261.812. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah penyesuaian luas lahan sawah pada tahun 2019 dan kerusakan irigasi sehingga menyebabkan gagal tanam. Poduksi

tanaman jagung meningkat drastis dari hanya 698 ton pada tahun 2018 menjadi 41.005 ton pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 15.090 persen. Sedangkan tanaman kedelai yang pernah menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Bireuen jumlah produksinya terus menurun dari 12.125 hektar pada tahun 2018 menjadi hana 43 ton pada tahun 2022. Hal ini diantaranya disebabkan faktor ekonomis dari usaha tani kedelai.

Tabel 2.98
Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Utama lainnya Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Padi (kw/ha)	63,93	65,1	61,7	62,8	65,5	0,7
2	Jagung (kw/ha)	41,68	50,4	50,4	55	62,3	10,8
3	Kedelai (kw/ha)	15,58	8,5	11,2	13	13,4	1,4
4	Kacang Tanah (kw/ha)	15,81	16,8	17,1	17,4	17,9	3,2
5	Kacang Hijau (kw/ha)	15,53	16,6	17	18,2	18,7	4,8
6	Ubi Kayu (kw/ha)	199,68	252,2	253	260	265	7,8
7	Ubi Jalar (kw/ha)	158	190,5	195	75	85	-6,3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 2.98 dapat diketahui produktivitas tanaman pangan umumnya tumbuh positif, artinya petani pengetahuan dan ketrampilan petani semakin baik. Produksi tanaman padi meningkat pada tahun 2022 mencapai angka 65,5 kwintal per hektar lebih baik dari produksi pada tahun 2018 (63,93 kwintal per hektar) dengan rata-rata-pertumbuhan 0,7 persen. Produktivitas tanaman jagung juga meningkat dari 41,68 kwintal per hektar pada tahun 2018 menjadi 62,3 kwintal per hektar dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 10,8 persen per tahun. Salah satu faktor yang menyebabkan produksi pertanian sulit meningkat khususnya komoditas pangan adalah terjadinya alih fungsi lahan secara terus-menerus, baik ke penggunaan non-pertanian maupun ke komoditas perkebunan. Petani masih sering mengalami risiko gagal panen karena kekeringan, banjir dan serangan hama dan penyakit.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bireuen dari tahun 2018 - 2022 terus mengalami peningkatan sejalan dengan upaya pemerintah dan masyarakat terus bahu membahu membenahi pembangunan di kabupaten ini. Capaian PDRB sektor perkebunan dari tanaman perkebunan tahunan relatif kecil karena dari 4 komoditas utama, yaitu: kelapa, pinang, kakao dan karet, akan tetapi yang paling menonjol adalah kelapa dan pinang. Terdapat berbagai jenis tanaman yang diusahakan oleh perkebunan rakyat, baik tanaman perkebunan berumur pendek seperti nilam maupun perkebunan berumur panjang seperti karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan lainnya.

Disisi lain harga komoditas tanaman perkebunan tahunan dipengaruhi harga di pasaran yang fluktuatif, sehingga mempengaruhi minat petani dalam membudidayakan komoditi

perkebunan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih menanam tanaman hortikultura seperti pepaya, tebu, dan pisang yang lebih prospektif, lebih cepat menghasilkan dan lebih elastis di pasaran domestik. Kondisi tanaman perkebunan tahunan masih didominasi tanaman yang rusak/tua (TT/TR) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Upaya peremajaan sebagian telah dilakukan namun belum berproduksi optimal. Pengelolaan perkebunan yang dilakukan belum sepenuhnya intensif, masih bersifat usaha sampingan akibat dihadapkan pada keterbatasan modal dan peralatan usaha tani. Kesemua ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas yang dicapai pada saat panen.

Tabel 2.99
Produksi Tanaman Perkebunan Utama Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Kelapa (ton)	15.682,10	15.720,10	15.411,24	15.417,90	18.127,30	4,0
2	Kakao (ton)	2.715,20	2.677,20	2.689,47	2.684,38	3.236,30	4,9
3	Karet (ton)	1.204,00	1.203,00	1.178,36	1.358,10	2.433,90	23,1
4	Pinang (ton)	9.363,30	5.498,00	5.376,91	5.455,32	5.858,70	-8,7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.99 terlihat bahwa produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bireuen secara umum terus meningkat. Produksi tanaman kelapa dari tahun 2018 s.d 2022 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 4 persen per tahun. Pada tahun 2022 mencapai 18,13 ribu ton meningkat dibandingkan tahun 2018 (15,68 ribu ton). Produksi tanaman kakao meningkat dari 2,7 ribu ton pada tahun 2018 menjadi 3,2 ribu ton pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan 4,9 persen per tahun. Peningkatan produksi paling tinggi adalah tanaman karet, meningkat dari 1,2 ribu ton di tahun 2018 menjadi 2,4 ribu ton pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan 23,1 persen per tahun. Tanaman pinang mengalami penurunan produksi dari 9,3 ribu ton pada tahun 2018 menjadi 5,86 ribu ton pada tahun 2022 dengan rata-rata pertunurunan mencapai 8,7 persen per tahun. Selanjutnya untuk produktivitas tanaman perkebunan utama di Kabupaten Bireuen seperti pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100
Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Kelapa	1.132	1.132	1.110	1.110	1.104	-0,6
2	Kakao	641	630	630	625	622	-0,7
3	Karet	909	900	895	900	902	-0,2
4	Pinang	1.341	787	760	780	809	-9,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.100, produktivitas tanaman perkebunan umumnya mengalami penurunan. Penurunan tertinggi pada tanaman pinang yang mencapai angka 9,6 persen per tahun, selanjutnya produktivitas tanaman kakao juga turun sebesar 0,7 persen per tahun, produktivitas tanaman kelapa turun 0,6 persen per tahun dan produktivitas tanaman karet turun 0,2 persen per tahun.

Selain dua sub sektor di atas, subsektor peternakan juga memiliki andil dalam meningkatkan PDRB sektor pertanian Kabupaten Bireuen dengan rata-rata kontribusinya 12,30 persen atau sekitar 260 milyar rupiah yang diperoleh melalui usaha peternakan ternak besar, ternak kecil dan unggas, walau masih sebagai usaha sampingan. Potensi peternakan Kabupaten Bireuen sangat prospektif karena didukung oleh sumber daya alam, sumber daya lahan dan sumber daya manusia yang sangat menjanjikan. Perkembangannya sudah mulai maju, dalam peningkatan populasi telah menggunakan teknologi Inseminasi Buatan (IB), untuk intensifikasi telah dilaksanakan sistem integrasi ternak – tanaman, pemanfaatan biogas juga telah mulai dilaksanakan, industri pakan ternak skala kecil juga telah ada dan ber SNI, namun dalam meningkatkan produksinya sarana prasarannya masih jauh dari memadai, teknologi pasca panen untuk pengolahan hasil masih belum berjalan, sehingga nilai tambah petani masih sangat rendah.

Tabel 2.101
Sarana Prasarana Pendukung Usaha Peternakan Tahun 2018 s.d 2022
di Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Padang Penggembalaan						
	- Luas (Ha)	1.563,00	781,95	781,95	31.271,00	231,40	9,375
	- Produksi (Ton)	26.571,00	9.383,40	9.383,40	155.669,00	352,78	3,486
2	Jumlah Pos IB (Unit)	10	10	10	10	10	0,000
3	Jumlah PUSKESWAN (Unit)	8	8	7	8	8	0,004
4	Jumlah RPH (Unit)	2	2	2	2	2	0,000
5	Jumlah TPU (Unit)	3	3	2	58	50	6,882
6	Jumlah Pasar Ternak (Unit)						
	- Ternak Besar & Kecil	2	2	3	6	3	0,250
	- Unggas	8	8	3	2	2	-0,240
7	Jumlah Pasar Daging (Unit)						
	- Ternak Besar & Kecil	2	2	3	3	3	0,125
	- Unggas	10	10	4	3	5	-0,046

Sumber : Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Tahun 2023

Sarana dan prasarana pendukung pembangunan di bidang peternakan diantaranya padang penggembalaan sebagai salah satu penghasil hijauan pakan ternak. Luas padang

pengembalaan di Kabupaten Bireuen berfluktuasi. Pada tahun 2022 luas padang pengembalaan 231,4 hektar dengan produksi 352,78 ton.

Sarana lain adalah Pos Inseminasi Buatan yang berfungsi sebagai pusat penyediaan bibit untuk ternak. Inseminasi buatan dapat meningkatkan mutu genetika ternak. Jumlah Pos IB dari tahun 2018 hingga 2022 sebanyak 10 unit.

Pembangunan bidang peternakan juga didukung oleh Puskesmas yang berjumlah delapan unit. Puskesmas berperan menjadi pusat kegiatan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan gangguan reproduksi, inseminasi buatan, penyuluhan, pengaman produk ternak, dan pemberantasan penyakit hewan. Jumlah kasus penyakit ternak di Kabupaten Bireuen tahun 2018 – 2022 seperti pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102
Penanganan Penyakit Hewan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang tertangani	22.595	29.330	6.657	13.476	21.024	27,74
2	Jumlah kasus penyakit hewan	22.595	29.330	6.657	13.476	27.824	40,35
3	Persentase penanganan kasus penyakit hewan	100	100	100	100	75,56	6,11

Sumber : Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Tahun 2023

Jumlah kasus penyakit hewan meningkat tajam pada tahun 2022 mencapai 27.824 dan yang tertangani sebanyak 21.024 kasus dengan capaian penanganan 75,56 persen. Angka ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang penanganannya mencapai 100 persen. Rata-rata pertumbuhan kasus penyakit ternak mencapai 40,35 persen per tahun, diantaranya akibat dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak di Bireuen. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen, seperti sosialisasi dan vaksinasi.

Potensi subsektor peternakan yang lazim diusahakan masyarakat di daerah ini adalah sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, itik dan ayam ras pedaging, dengan populasinya sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.103.

Tabel 2.103
Populasi Ternak Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Ternak Besar (ekor)						
	Sapi	64.798	63.709	63.920	65.256	60.171	-0,018
	Kerbau	1.940	2.271	2.661	2.459	2.733	0,094

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
2	Ternak Kecil (ekor)						
	Kambing	36.537	78.242	70.976	73.525	75.897	0,279
	Domba	16.672	33.353	25.339	26.614	28.632	0,222
3	Unggas (ekor)						
	Ayam	779.105	483.994	536.087	928.619	918.596	0,113
	Itik	181.890	207.378	396.901	402.512	416.111	0,275

Sumber : Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Tahun 2023

Perkembangan populasi ternak besar terutama sapi mengalami penurunan disebabkan wabah PMK. Populasi sapi pada tahun 2022 mencapai 60.171 ekor. Rata-rata penurunan per tahun mencapai 0,018 persen, sedangkan populasi kerbau pada tahun 2022 mencapai 2.733 ekor dengan rata-rata pertumbuhan menunjukkan peningkatan mencapai 0,094 persen per tahun.

Populasi ternak kecil seperti kambing mencapai 75.897 ekor dan domba sebanyak 28.632 ekor. Populasi ternak kecil menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan populasi kambing sebesar 0,279 persen per tahun dan domba sebesar 0,222 persen per tahun. Begitu juga dengan populasi unggas yang dominan di masyarakat, yaitu ayam dan itik. Populasi ayam pada tahun 2022 mencapai 918.596 ekor dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,113 persen per tahun dan populasi itik sebanyak 416.111 ekor dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 0,275 persen per tahun. Selanjutnya untuk melihat produksi hasil peternakan seperti pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104
Produksi Hasil Peternakan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Produksi Daging (kg)	5.637.779	4.964.189	2.187.372	1.114.095	2.042.649	-0,084
2	Ayam Potong (kg)	4.363.834	4.805.719	4.512.200	1.905.769	1.714.680	-0,159
3	Telur (butir)	14.996.832	15.973.261	15.601.726	14.216.708	21.339.987	0,114

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Jumlah produksi daging pada tahun 2022 mencapai 2,04 ribu ton dengan rata-rata pertumbuhan turun mencapai 0,084 persen per tahun, produksi ayam potong mencapai 1,71 ribu ton dengan rata-rata pertumbuhan turun mencapai 0,159 persen per tahun, sedangkan produksi telur menunjukkan peningkatan mencapai 21,34 juta butir pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan meningkat mencapai 0,114 persen per tahun.

Sekalipun nilai kontribusi pertanian jauh lebih tinggi dari sektor lainnya namun pada kenyataannya cenderung monoton dan melambat akibat berkembangnya sektor non pertanian yang memanfaatkan lahan pertanian dan pergeseran tingkat strata sosial dengan pola pikir

anak petani jangan jadi petani lagi. Situasi ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang dominasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bireuen semakin berkurang dan akan bergeser ke sektor lain, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan, bangunan/perumahan, serta sektor jasa lainnya. Hal ini sebuah keniscayaan pola pertumbuhan ekonomi yang bersifat progresif yang tidak konservatif pada sektor pertanian agraris. Namun demikian sektor pertanian tetap harus dipacu pada aspek off farmnya dan mendorong berkembangnya industri hilir yang berbasis pertanian sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi petani agar nilai tukar petani bisa ditingkatkan, dengan harapan disparitas pendapatan di sektor pertanian tidak terpaut jauh dengan sektor non pertanian yang diprediksi pertumbuhannya akan lebih tinggi.

B. Cakupan Bina Kelompok Tani

Pembinaan kelembagaan petani dilakukan secara berkesinambungan, diarahkan pada perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dalam menjalankan sistem agribisnis, poktan dan gapoktan harus menjalankan fungsinya, serta peningkatan kapasitas melalui pengembangan kerjasama dalam bentuk jejaring dan kemitraan. Kondisi saat ini masih banyak poktan dan gapoktan yang belum memiliki kekuatan hukum sehingga posisi tawarnya rendah. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha tani. Gapoktan yang berhasil mengembangkan usahanya berpeluang untuk ditingkatkan kemampuannya membentuk kelembagaan ekonomi petani.

Pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian, dengan melaksanakan penilaian klasifikasi kemampuan poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya. Agar kelompok tani dapat menjadi kelembagaan petani yang memiliki kelayakan usaha yang memenuhi skala ekonomi dan efisiensi usaha, maka poktan didorong untuk menyatukan kelompoknya ke dalam gapoktan.

Gabungan kelompok tani berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai hilir secara komersial dan berorientasi pasar. Pada tahap pengembangannya gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi dan permodalan kepada anggota kelompoknya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain. Diharapkan penggabungan poktan dalam gapoktan akan menjadikan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

Pembinaan juga diarahkan pada peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

Tabel 2.105
Cakupan Pembinaan Kelompok Tani Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok)	1.700	1.800	1.820	1.829	2.202	6,97
2	Jumlah kelompok tani (kelompok)	2.395	2.224	2.053	2.178	2.202	-1,91
3	Persentase (%)	70,98	80,94	88,65	83,98	100	7,26

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.105 cakupan pembinaan kelompok tani yang dibina tahun 2018 s.d 2022 terus meningkat. Capaian pada tahun 2022 sebanyak 100 persen kelompok tani di Kabupaten Bireuen yang dibina, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 70,98 persen. Namun jumlah kelompok tani mengalami penurunan dari 2.395 kelompok pada tahun 2018 menjadi 2.202 pada tahun 2022. Kedepan diharapkan pembinaan kelompok tani tetap mencapai 100 persen untuk peningkatan perekonomian Kabupaten Bireuen. Namun pertumbuhan jumlah kelompok tani turun -1,91 persen per tahun.

C. Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Sektor usaha pertanian secara umum masih merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Bireuen. Peningkatan atau penurunan nilai PDRB sektor ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Bireuen. Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2018 s.d 2022.

Tabel 2.106
Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

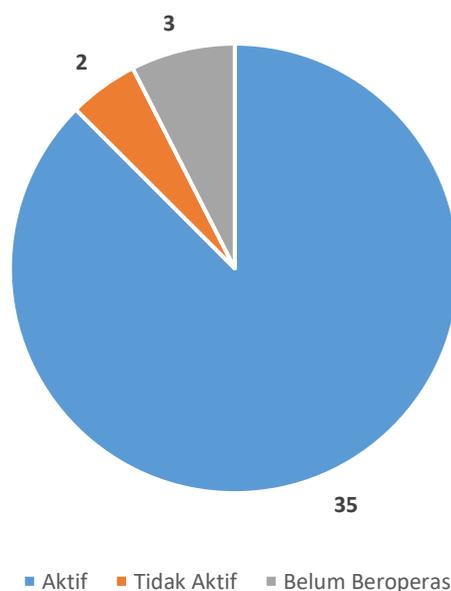
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Nilai PDRB ADHK (triliun rupiah)	2,92	3,04	3,16	3,14	3,24	2,65
2	Kontribusi sektor dalam PDRB ADHB (%)	33,2	33,08	34,59	33,62	33,86	0,16
3	Laju pertumbuhan sektor PDRB ADHK (%)	2,72	4,3	3,87	-0,66	3,38	0,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.106 terlihat bahwa nilai PDRB ADHK sektor pertanian terus meningkat. Pada tahun 2018 senilai 2,92 triliun rupiah menjadi 3,24 triliun rupiah pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan 2,65 persen per tahun. Dari sisi kontribusi terhadap PDRB ADHB, sektor pertanian masih merupakan penyumbang terbesar dengan nilai 33,86 persen pada tahun 2022, meningkat dari kondisi tahun 2018 (33,2 persen) dengan rata-rata pertumbuhan 0,16 persen. Meski meningkat, kontribusi sektor ini masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2020 yang memberikan kontribusi 34,59 persen. Laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor pertanian sedikit meningkat mencapai 3,38 persen pada tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2018 (2,72 persen). Namun masih lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan pada tahun 2019 (4,3 persen) dan 2020 (3,87 persen).

2.1.3.2.4. Perdagangan

Aktivitas perdagangan berperan penting dalam ekonomi suatu daerah, terutama sebagai pendistribusi atau pemasaran berbagai hasil produksi dan juga sebagai penyedia barang-barang kebutuhan masyarakat. Sektor perdagangan termasuk kedalam lima besar sektor utama pendukung perekonomian Kabupaten Bireuen.



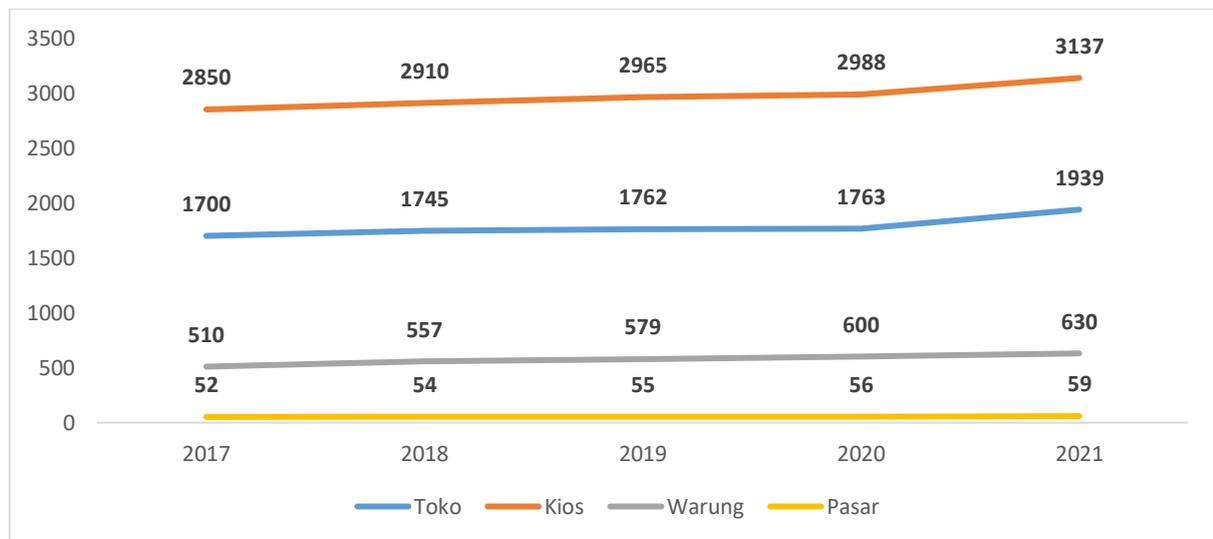
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Gambar 2.22. Kondisi Pasar Tahun 2022 di Kabupaten Bireuen

Dari Gambar 2.22 Jumlah pasar di Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebanyak 40 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 35 unit dalam kondisi aktif, sebanyak 3 unit tidak aktif dan 2 unit belum beroperasi.

Pada tahun 2021, pedagang kecil masih menjadi yang utama dalam sektor perdagangan di Kabupaten Bireuen. Jumlah sarana dan prasarana perdagangan selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 12,77 persen dari tahun 2017. Sarana perdagangan terbanyak berupa kios sebanyak 3.137 unit (54,4 persen), namun jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2017. Peningkatan terbesar pada jumlah warung meningkat menjadi 630 unit pada

tahun 2021 dibandingkan tahun 2017 (510 unit). Peranan sektor perdagangan di Kabupaten Bireuen perlu terus ditingkatkan demi memacu peningkatan pendapatan daerah.



Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Gambar 2.23. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Tahun 2017 s.d 2021 di Kabupaten Bireuen

Pembangunan di bidang perdagangan diantaranya adalah pelaksanaan perlindungan konsumen, pengendalian mutu barang, pengawasan barang beredar dan jasa serta mempersiapkan bahan bimbingan teknis pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa serta standardisasi dan pengendalian mutu barang.

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Perkembangan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.107.

**Tabel 2.107
Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Nilai PDRB ADHK (triliun rupiah)	2,49	2,62	2,49	2,6	2,7	2,13
2	Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB (%)	22,69	22,45	21,18	21,56	21,58	-0,28
3	Laju pertumbuhan Sektor dalam PDRB ADHK (%)	6,65	5,41	-4,97	4,55	5,62	-0,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.107, Nilai PDRB ADHK sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berada pada peringkat kedua yang memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2018 s.d 2022 nilai PDRB ADHK bidang ini terus meningkat dari 2,49 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 2,7 triliun rupiah pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan 213 persen per tahun.

Kontribusi sektor tersebut pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami penurunan dari 22,69 persen pada tahun 2018 menjadi 21,58 persen pada tahun 2022 dengan rata-rata penurunan 0,28 persen per tahun. Begitu juga dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK, turun dari 6,65 persen pada tahun 2018 menjadi 5,62 persen pada tahun 2022 dengan rata-rata penurunan 0,26 persen. Sektor ini sempat berkontraksi negatif pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Nilai PDRB ADHK sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor meningkat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021, nilai PDRB sektor ini sejumlah 3.030,37 milyar rupiah, meningkat dibandingkan angka tahun 2017 (2.531,05 milyar rupiah).

Implementasi dari perlindungan konsumen di Kabupaten Bireuen adalah pelaksanaan peraturan bupati atau surat edaran yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Peraturan tersebut dilaksanakan berupa tera dan tera ulang alat UTTP, pembinaan toko swalayan dan penyaluran LPG di wilayah Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2018-2022, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen mengimplementasikan satu produk hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan tahun 2021 sebanyak 3 produk hukum.

Pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dilakukan agar konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Kementerian Perdagangan melaksanakan pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa. Perkembangan Potensi dan Jumlah UTTP yang ditera Ulang Tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.108.

Tabel 2.108
Perkembangan Potensi dan Jumlah UTTP yang ditera Ulang Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Potensi UTTP	Na	Na	Na	433	222	-48,73
2	UTTP yang di Tera/Tera Ulang	Na	Na	Na	976	300	-69,26
3	Persentase	Na	Na	Na	44	74	29,64

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen
Tahun 2023

Pada tahun 2022 persentase UTTP yang ditera ulang meningkat dari 44 persen pada tahun 2021 menjadi 74 persen pada tahun 2022. Namun jumlah potensi UTTP turun dari 433 unit menjadi 222 unit.

2.1.3.2.5 Perindustrian

A. Peranan Industri Kabupaten Bireuen

Upaya pembangunan perindustrian di Kabupaten Bireuen terus ditingkatkan, terutama yang dapat menunjang sektor pertanian. Melalui upaya ini diharapkan kontribusi sektor industri terhadap penciptaan nilai tambah semakin meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 jumlah unit usaha formal terbesar terdapat di Kecamatan Kota Juang yang merupakan kecamatan dimana Ibu Kota Kabupaten Bireuen terletak, sementara itu untuk unit usaha non formal terbesar terletak di Kecamatan Jangka yang memiliki karakteristik usaha pertanian, perikanan dan dan industri.

Jenis Industri makanan, minuman dan tembakau memiliki persentase kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja dengan persentase sebesar 35,68 persen. Sebanyak 60,65 persen dari jumlah unit usaha di Kabupaten Bireuen bergerak pada jenis industri tersebut. Sedangkan Industri Kayu dan Hasil Hutan memiliki persentase kontribusi terbesar dalam perolehan omset industri dengan persentase sebesar 40,75 persen. Di daerah ini, juga terdapat beberapa jenis industri menengah, seperti usaha industri karoseri mobil. Usaha ini telah dikenal baik oleh konsumen luar daerah, terutama dalam hal kualitas, model dan daya saing di pasaran. Kendati demikian, upaya mengembangkan sektor industri yang berdaya saing di daerah ini masih dihadapkan pada minimnya prasarana dan sarana pendukung yang tersedia. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan berbagai kebutuhan pendukung ini. Perkembangan jumlah unit usaha industri kecil formal dan non formal tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.109.

Tabel 2.109
Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah IKM Formal	403	424	451	475	290	-5,51
2	Jumlah IKM Non Formal	3.055	3.111	3.125	3.052	2.785	-2,20
3	Jumlah IKM	3.458	3.535	3.576	3.527	3.075	-2,70

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Jumlah unit usaha IKM formal mengalami penurunan dari 403 unit pada tahun 2018 menjadi 290 unit pada tahun 2022 dengan rata-rata penurunan 5,51 persen per tahun. Hal serupa juga terjadi pada jumlah IKM dari 3.458 unit pada tahun 2018 yang turun menjadi 3.075 unit pada tahun 2022 dengan penurunan rata-rata 2,70 persen per tahun.

B. Industri Pengolahan

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.

Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Tabel 2.110
Perkembangan PDRB Sektor Sektor Industri Pengolahan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Nilai PDRB ADHK (milyar rupiah)	150,48	153,68	149,18	150,24	155,8	0,90
2	Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB (%)	1,66	1,56	1,51	1,5	1,53	-0,03
3	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (%)	4,08	2,13	-2,93	0,71	3,71	-0,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Sektor industri pengolahan selama ini belum memberikan kontribusi besar untuk pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen. Kontribusi sektor ini pada tahun 2022 mencapai 1,53 persen lebih rendah dari capaian tahun 2018 (1,68 persen) dengan penurunan rata-rata 0,03 persen per tahun. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan menurun pada tahun 2022 (3,71 persen) lebih rendah daripada tahun 2018 (4,08 persen) dengan rata-rata pertumbuhan turun 0,09 persen per tahun.

Nilai PDRB ADHK sektor industri pengolahan meningkat dari tahun 2018 s.d 2022. Pada tahun 2022, nilai PDRB sektor ini sejumlah 155,8 milyar rupiah, sedikit meningkat dibandingkan angka tahun 2018 (150,48 milyar rupiah) dengan rata-rata pertumbuhan 0,9 persen per tahun.

2.1.3.2.6 Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atas inisiatif pemerintah. Transmigrasi dipandang sebagai kerangka eksperimen dalam usaha pemanfaatan daerah di Indonesia. Dalam melakukan transmigrasi harus memiliki ketentuan-ketentuan dalam berlangsungnya transmigrasi tersebut sehingga perpindahan penduduk dapat dikatakan sebagai sebuah transmigrasi.

Transmigrasi memiliki jenis-jenis yang dibedakan dalam tujuan dan fungsinya masing-masing, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi swakarya, transmigrasi sektoral, transmigrasi keluarga, transmigrasi swakarsa/ spontan, transmigrasi bedol desa dan transmigrasi lokal.

Transmigrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen adalah transmigrasi lokal, yang dilaksanakan di daerah UPT Krueng Meuseugob/Lhok Tanoh Kecamatan Simpang Mamplam pada tahun 2013 dan UPT Cot Kruet/Alur Kuta Kecamatan Peudada pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Salah satu program untuk pengembangan kawasan transmigrasi adalah dengan pencadangan tanah yang berasal dari lahan baru atau lahan yang sudah ditinggalkan dalam kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan.

Tabel 2.111
Capaian Indikator Transmigrasi Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah SP yang aktif	3	3	3	3	3	0,00
2	Jumlah SP Binaan	7	7	7	7	7	0,00
3	Jumlah KK Mandiri	60	80	100	125	142	24,23
4	Jumlah KK tertampung dalam SP	335	335	335	335	335	0,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pada Tahun 2022 Jumlah Satuan Permukiman (SP) transmigrasi di Kabupaten Bireuen sebanyak 7 SP, dari jumlah tersebut sebanyak 3 SP dalam kondisi aktif. Jumlah KK yang tertampung dalam SP transmigrasi sebanyak 335 KK. Pembinaan dan pendampingan dilakukan agar KK mandiri meningkat. Capaian KK mandiri pada tahun 2022 sebesar 142 KK lebih tinggi dari capaian tahun 2018 (60 KK) dengan rata-rata pertumbuhan 24,23 persen per tahun. Namun masih terdapat 193 KK (57,6 persen) yang belum mandiri.

2.1.3.3 Penunjang Urusan

2.1.3.3.1 Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen nomor 3 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan merupakan bagian penting dan tidak boleh diabaikan dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta mengembangkan potensi yang ada di daerah.

A. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bireuen atau disingkat dengan RPJPD Kabupaten Bireuen 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005 – 2025 dengan Visi “*Terwujudnya Masyarakat Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat dan Islami*”. Sedangkan Misinya adalah:

1. Menerapkan nilai-nilai Islami dalam membangun sumber daya manusia dan seluruh aspek pembangunan lainnya;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya industri kreatif dan sumber daya lokal. Mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi pemuda, memperhatikan keberpihakan gender, dan disabilitas;
3. Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor pertanian secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas sehingga memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui peranan industri pengolahan yang berorientasi ekspor;
4. Mewujudkan Kabupaten Bireuen yang aman, damai dan berkeadilan sosial dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta menegakkan perlindungan hukum;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan kearifan lokal serta pembangunan yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan agar terwujudnya inovasi yang berkelanjutan dan memiliki keunggulan kompetitif dalam pembangunan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan.

B. Tersedianya dokumen perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ketersediaan dokumen RKPK memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap perangkat daerah dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian sasaran dan tujuan dengan terkoordinasi satu

sama lain. Berdasarkan dokumen RKPK ini satuan kerja perangkat daerah akan menjabarkan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing di dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBD setiap tahunnya.

2.1.3.3.2 Keuangan

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karenanya, dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna. Kabupaten Bireuen sebagai salah satu Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berikut adalah Tabel 2.112 tentang kondisi keuangan daerah Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.112
Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Persentase SILPA Terhadap APBD (%)	3,11	3,6	3,8	4	4,09	0,25
2	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	24,46	24,34	24,34	24	26	1,61
3	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	20,76	16,98	16,98	21,04	25,95	7,26
4	Persentase PAD terhadap pendapatan	11,25	7,9	8,85	8,51	8,81	-0,61
5	Penetapan APBD	Nomor 7	Nomor 5	Nomor 5	Nomor 5	Nomot 8	-
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
6	Tanggal	29-Des-17	21-Des-18	31-Des-19	30-Des-20	29-Des-21	-
7	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Tabel 2.112 menunjukkan persentase silpa terhadap APBD sedikit meningkat, dari 3,11 persen PAD atahun 2018 menjadi 4,09 pada tahun 2022. Persentase belanja pendidikan terhadap APBD meningkat dari 24,46 persen pada tahun 2018 menjadi 26 persen pada tahun 2022. Begitu juga dengan persentase belanja kesehatan meningkat dari 20,76 persen pada tahun 2018 menjadi 25,95 pada tahun 2022. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018-2022 sudah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga disertai penetapan APBD yang tepat waktu selama lima tahun.

Peningkatan PAD merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan daerah dari pemerintah pusat. Persentase PAD terhadap pendapatan menunjukkan angka yang menurun. Capaian pada tahun 2022 mencapai 8,81 persen lebih rendah dari capaian tahun 2018 (11,25 persen) dengan rata-rata penurunan 0,61 persen per tahun. Beberapa strategi peningkatan PAD sektor pajak dan retribusi daerah kabupaten bireuen antara lain :

- Monitoring pajak Online
- Kebijakan penghapusan denda administrative PBB sesuai dengan ketentuan dan kewenangan Pejabat berwenang
- pemberian insentif fiskal penghapusan denda akibat terlambat pembayar pokok pajak bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada tahun 2022
- Elektronifikasi Pembayaran Pajak dan Retribusi.

2.1.3.3.3 Kepegawaian

Sumber daya manusia dalam pemerintahan yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di jajaran pemerintah. Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas tiga macam, yaitu penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah, baik yang menduduki jabatan struktural/fungsional atau tidak dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2022 berjumlah 7.650 orang. Untuk unit kerja pegawai negeri sipil yang paling banyak adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mencapai 3.360 pegawai. Berikut adalah kondisi kepegawaian Kabupaten Bireuen dalam tinjauan pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.113
Kondisi Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ASN Kabupaten Bireuen (Orang)	8.306	8.208	8.221	7.752	7.395
2	Rata-rata Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (JP)	2,45	20,12	0,032	17,20	4,21
3	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan Formal (Persen)	4	4	0	3	1
4	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (Persen)	NA	NA	NA	NA	NA

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
5	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah (Jabatan)	26	28	35	35	35
6	Jumlah Pejabat Administrasi pada Instansi Pemerintah (Orang)	622	659	727	652	394
7	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah (Orang)	4.404	4.128	3.996	3.996	3.746

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pada Tabel 2.113 memperlihatkan bahwa jumlah Aparat Sipil Negara di Kabupaten Bireuen dari tahun 2018 sampai 2022 terjadi penurunan yaitu dari 8.306 orang menjadi 7.395 orang dengan rata-rata penurunan sebesar 2,8 persen. Hal ini disebabkan karena banyak pegawai sudah memasuki masa pensiun terutama yang berprofesi sebagai guru.

2.1.3.3.4 Kelitbangan

Penelitian dan pengembangan adalah unsur penunjang di dalam suatu daerah yang tugasnya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di seluruh bidang yang diperlukan. Penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kabupaten Bireuen melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berperan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengoordinasian setiap penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan. Yang selanjutnya merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah serta mempublikasikan hasil penelitian melalui website pemerintah. Untuk implementasi rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan mulai tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan melalui pelaksanaan kebijakan inovasi yang diharuskan pemerintah pusat. Dalam hal inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Bireuen mengikuti kompetisi SINOVIK yang diprakarsai KEMENPAN RB, demikian juga dengan kompetisi yang dipertandingkan KEMENDAGRI, Kabupaten Bireuen mengikuti kompetisi *New Normal Covid-19* dan *INNOVATION GOVERNMENT AWARD* dengan capaian peringkat 60 dari 415 Kabupaten se-Indonesia dengan skor indeks 2.906 dan termasuk kategori kabupaten sangat inovatif, untuk kompetisi KEMENRISTEK/BRIN Kabupaten Bireuen ikut Lomba Indeks Daya Saing Daerah dengan total indeks yang diperoleh 2,3092 kategori sedang.

2.1.3.3.5 Pengawasan

Rendahnya kualitas pembangunan secara menyeluruh disebabkan belum optimalnya fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan harus berada dalam sistem yang terpadu (terintegrasi) sejak dari awal hingga implementasi hingga monitoring dan evaluasi. Demikian juga dengan pengawasan belum memiliki sistem yang kuat, terintegrasi dengan sistem dan

siklus perencanaan serta penganggaran. Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.114.

Tabel 2.114
Kinerja Pengawasan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	0	2	2	2	2	0,00
2	Jumlah perangkat Daerah yang mendapatkan pendampingan	52	52	52	52	52	0,00
3	Kapabilitas APIP	-	-	-	2	3	50,00

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari tabel 2.114, level maturitas SPIP terintegrasi masih belum meningkat, mencapai level 2 pada tahun 2022 dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Namun disisi lain, jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan mencapai 100 persen (52 SKPK).

Dari sisi sumberdaya manusia, kapabilitas APIP Kabupaten Bireuen meningkat mencapai level 3 pada tahun 2022 dari capaian tahun 2021 pada level 2.

2.1.3.3.6 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Gambaran umum mengenai capaian di sekretariat daerah dilihat pada Tabel 2.115.

Tabel 2.115
Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	SAKIP	C	C	CC	CC	CC
2	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	C	CC	CC
3	Jumlah SKPK menerapkan RB	-	-	10	11	16
4	Nilai LPPD	27.617	28.073	NA	NA	NA
5	Kategori LPPD	Tinggi	Sedang	NA	NA	NA
6	Jumlah Produk Hukum	581	606	766	872	1237
7	TPID Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Perangkat Daerah yang terlibat kegiatan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 adalah Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Rumah Sakit dr. Fauziah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 30 tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menerapkan reformasi birokrasi mulai tahun 2019. Jumlah SKPK yang menerapkan reformasi birokrasi pada tahun 2022 sebanyak 16 SKPK, meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 11 SKPK. Indeks reformasi birokrasi mencapai kategori CC pada tahun 2022, meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan kategori C, sedangkan kategori SAKIP Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sudah mencapai kategori CC sama dengan tahun sebelumnya 51,34 . Nilai SAKIP Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas Kinerja Kabupaten Bireuen “cukup”, yaitu implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih banyak perlu perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.

2.1.3.3.7 Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPK) dan terintegrasi program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Hasil pelaksanaan fungsi DPRK diantaranya adalah jumlah qanun yang disahkan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.116.

Tabel 2.116

Jumlah Qanun yang disahkan Tahun 2018-2022 Kabupaten Bireuen

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Qanun yang disahkan	7	6	5	6	7
2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023

2.1.3.3.8 Kecamatan

Jumlah kecamatan di Kabupaten Bireuen sebanyak 17 kecamatan. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada camat diantaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, pelaksanaan Maulid, peringatan HUT RI, MoU Helsinki, musrenbang kecamatan dan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat. Kinerja kecamatan pada tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.117.

Tabel 2.117
Kinerja Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	urusan	4	4	4	4	4
2	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	78,24	80,29	82	83,26	77,33
3	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	100	100	100	100	100
4	Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pelaporan yang berbasis elektronik	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sebanyak 4 urusan yaitu : MTQ, Maulid, perizinan dan non perizinan. Sebanyak 17 kecamatan melaksanakan semua urusan tersebut pada tahun 2022.

Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di kecamatan dilaksanakan di semua kecamatan. Lembaga ekonomi yang diberdayakan adalah PKK dan BUMG. Pada tahun 2022 persentase lembaga ekonomi yang aktif sebanyak 77,33 persen, turun dari tahun 2018 (78,24 persen).

Penyelenggaraan pemerintah umum yang dilaksanakan di kecamatan adalah kegiatan HUT RI dan peringatan MoU Helsinki. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut mencapai 100 persen tiap tahunnya. Pemberdayaan desa di kecamatan juga diharapkan agar memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Hampir semua desa telah memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.

2.1.3.3.9 Kesatuan Bangsa dan Politik

Pilkada tahun 2017 dilaksanakan di Kabupaten Bireuen untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Tingkat partisipasi pemilu pada tahun 2017 mencapai 73,25 persen. Angka ini lebih rendah dari tingkat partisipasi pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen

tahun 2012 yang mencapai 80 persen. Pemilihan umum serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk pemilihan presiden, kepala daerah dan legislatif.

Selain untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024, urusan kesatuan bangsa dan politik diarahkan pada pemeliharaan ketertiban dan keamanan serta perlindungan masyarakat, capaian kinerja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Persentase Peningkatan Pemahaman Terhadap Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar 78,78 persen dibawah target tahun 2022 sebesar 92 persen
- Persentase Ormas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan sebesar 92 persen masih dibawah target 2024 sebesar 95 persen
- Persentase Ancamaan/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani mencapai 75 Persen dibawah target tahun 2024 sebesar 82 Persen
- Fasilitasi FKUB.

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

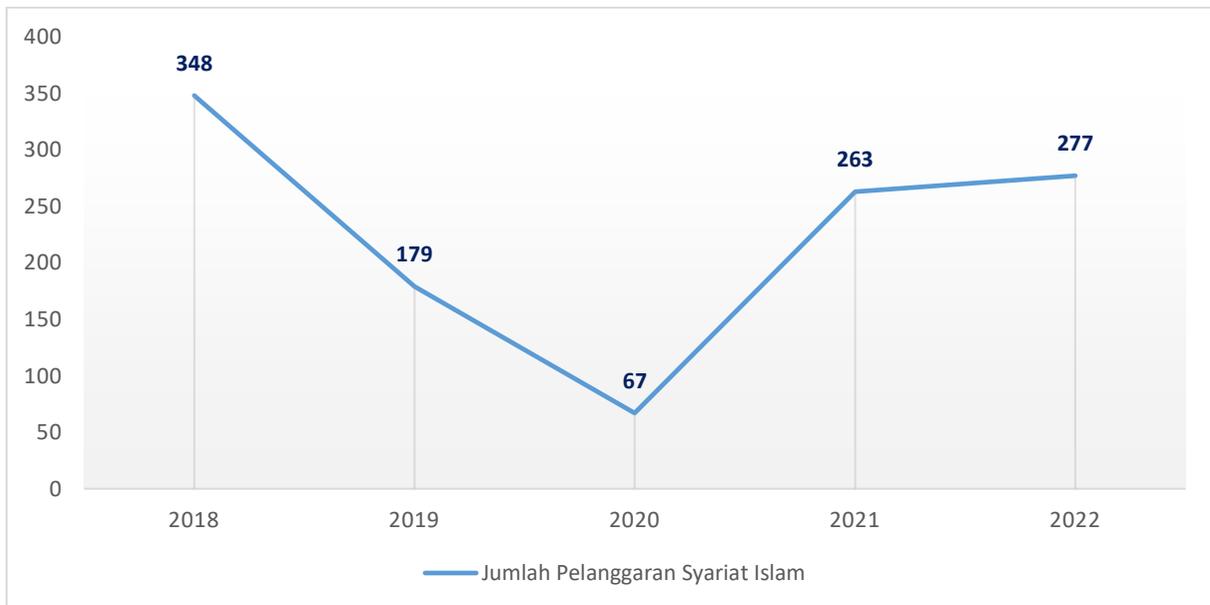
2.1.3.4.1. Pelaksanaan Syariat Islam

Syari'at Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam yang berlaku sepanjang masa dan dimanapun. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia.

Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Keputusan Bupati Bireuen no. 553 Tahun 2020 tentang Penetapan Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri melalui Dinas Syari'at Islam dengan tujuan sebagai :

1. Pusat Pendidikan Islam (*Education Islamic Central*);
2. Rule model Pendidikan Dayah di Aceh;
3. Pusat rujukan islam di Aceh;
4. Menjadikan masyarakat Bireuen sebagai masyarakat yang berakhlakul karimah, religius dan cinta ilmu pengetahuan;
5. Menjadikan Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya sebagai wilayah yang adil dan makmur, dan
6. Menyusun road map Bireuen sebagai Kota Santri di Aceh

Demikian juga dengan penerapan syariat islam terhadap pelanggaran Qanun. Beberapa kasus pelanggaran syariat islam telah ditindaklanjuti sesuai dengan Qanun tentang pelanggaran syari'at.



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun 2023

**Gambar 2.24. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen**

Dari Gambar 2.24 terlihat jumlah pelanggaran syariat Islam di Kabupaten Bireuen mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2018 sebanyak 348 pelanggaran dan pada tahun 2019 dan 2020 menurun menjadi 179 kasus dan 67 kasus. Akan tetapi pelanggaran pada tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat mencapai 263 kasus dan 277 kasus.

2.1.3.4.2. Pendidikan Dayah

Bireuen sebagai salah satu kabupaten yang telah lama dikenal sebagai daerah yang banyak memiliki dayah saat ini terus mencoba membenahi dayah-dayah yang ada agar proses belajar mengajar di dayah dapat berjalan dengan lancar. Pada akhirnya dayah tersebut dapat menghasilkan santri-santri yang memiliki kompetensi yang baik dan tidak kalah bersaing dengan anak-anak lulusan pendidikan umum. Salah satu dayah tertua dan terbesar yang ada di Kabupaten Bireuen adalah dayah Madrasah Ulum Diniyah Islamiyah Masjid Raya (MUDI MESRA) Samalanga yang merupakan institusi pendidikan yang mengambil peran penting dalam mencetak generasi umat dan kader dayah. Data jumlah dayah tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.118.

**Tabel 2.118
Jumlah Dayah, Guru dan Santri Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Dayah	126	145	155	176	200	12,29
2	Jumlah Guru dayah	3.519	4.845	5.445	7.071	6.516	18,02
3	Jumlah santri	23.403	38.062	38.631	43.341	42.181	18,41
4	Dayah Naik Kelas	0	117	117	45	45	-20,51

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Jumlah dayah selama tahun 2018 hingga tahun 2022 terus meningkat dari 126 dayah menjadi 200 dayah pada tahun 2022, dengan pertumbuhan 12,29 persen. Hal serupa juga terjadi pada jumlah guru dayah meningkat dari 3.519 pada tahun 2018 orang menjadi 6.516 orang pada tahun 2022. Jumlah santri juga meningkat dari 23.403 orang menjadi 42.181 orang. Jumlah dayah naik kelas meningkat dari nihil pada tahun 2018 menjadi 45 dayah pada tahun 2022, namun angka ini masih dibawah capaian pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah 117 dayah.

Untuk meningkatkan mutu lulusan dayah, kiranya perlu dilakukan peningkatan mutu terhadap tenaga pendidik dayah sehingga mutu lulusan dayah dapat bersaing dengan mutu lulusan sekolah-sekolah umum dan sekolah agama lainnya. Terhadap sarana dan prasarana dayah juga perlu mendapat perhatian dalam rangka kelancaran proses belajar dan mengajar serta keamanan dan kenyamanan siswa, dimana dari sejumlah dayah yang ada hanya 40 persen dayah yang sudah memiliki kamar, ruang masak dan sanitasi layak. Sedangkan dari tahun 2019, tidak lagi terdapat lagi dayah dengan kriteria Tipe D, karena sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, bahwa Pemerintah Aceh menyelenggarakan Pendidikan Dayah Tipe A (Plus), Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Non Tipe.

Tabel 2.119
Jumlah Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Tipe Dayah	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	A+	0	6	6	6	6	0,00
2	A	3	13	13	13	16	89,10
3	B	29	24	24	24	34	6,11
4	C	31	31	31	31	52	16,94
5	D/Non Tipe	4	43	43	43	51	248,40
Total Dayah Terakreditasi		67	117	117	117	159	27,63

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.119 Pada tahun 2022, jumlah dayah tipe A (Plus) di Kabupaten Bireuen sebanyak 6 dayah, tipe A sebanyak 16 dayah, tipe B sebanyak 34 dayah, tipe C sebanyak 52 dayah dan tipe D (non tipe) sebanyak 51 dayah. Jumlah dayah tipe D (non tipe) masih tinggi dibandingkan dengan klasifikasi lainnya, sebanyak 51 dayah. Perlu pembenahan dalam penyelenggaraan pendidikan dayah tersebut agar dapat naik ke tipe A. B atau C.

2.1.3.4.3. Peningkatan Peran Ulama

Peningkatan peran ulama di Kabupaten Bireuen diantaranya adalah Pendidikan Kader Ulama (PKU). PKU merupakan salah satu program utama MPU Aceh dan kabupaten/kota

serta merupakan amanat dari Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009 yang mengamanatkan MPU wajib mengadakan kegiatan kaderisasi ulama PKU yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan peran ulama dalam masyarakat dan bernegara.

Selain PKU, MPU juga diharapkan dapat memberikan masukan, rekomendasi dan fatwa terkait perbedaan pendapat dan masalah keagamaan dalam masyarakat serta saran, masukan dan pertimbangan terkait dengan kebijakan daerah.

Tabel 2.120
Capaian Peningkatan Peran Ulama Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah Sidang	23	15	18	20	10	-13,42
2	Sidang yang menghasilkan keputusan	6	3	11	8	6	41,10
3	Muzakarah	70	90	100	100	50	-2,58
4	Kader Ulama	0	10	10	34	44	89,80
5	Sosialisasi	34	80	100	25	25	21,32
6	Rekomendasi	3	12	2	35	8	447,38
8	Rapat Koordinasi MPU	42	45	35	45	110	39,48

Sumber : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.120 peningkatan peran ulama di Kabupaten Bireuen semakin baik. PKU yang mulai dilaksanakan pada tahun 2019 (10 orang) meningkat menjadi 44 orang pada tahun 2021. Akan tetapi jumlah sidang yang menghasilkan keputusan pada tahun 2022 sebanyak 6 dari 10 kali sidang lebih rendah dari capaian tahun 2021 sebanyak 8 sidang yang menghasilkan keputusan. Jumlah muzakarah ulama juga mengalami penurunan dari 70 kali pada tahun 2018 menjadi 50 kali pada tahun 2022.

2.1.3.4.4. Pendidikan Aceh

Pendidikan Aceh diharapkan dapat meningkatkan mutu dan menerapkan karakter islami dalam lingkungan pendidikan. Penerapan nilai-nilai islami untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju generasi selanjutnya yang islami. Berbagai bentuk penerapan pendidikan berkarakter islami diantaranya dengan pengajian di sekolah-sekolah. Capaian pelaksanaan pendidikan Aceh dapat dilihat pada tabel 2.121.

Tabel 2.121
Capaian Pendidikan Aceh Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah pemberdayaan pendidikan berkarakter	35	35	60	60	35	7,44
2	Jumlah Sekolah SD/MI (Unit)	290	291	292	289	291	0,09
3	Jumlah Sekolah SMP/MTs (Unit)	112	119	121	126	134	4,60
4	Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA (Unit)	64	68	69	70	70	2,29
5	Persentase (%)	7,51	7,32	12,45	12,37	12,56	1,26

Sumber : Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.121 capaian dari tahun 2018 s.d 2022, jumlah pemberdayaan pendidikan berkarakter sejumlah 225 sekolah/madrasah. Persentase sekolah yang dilaksanakan pembinaan penerapan pendidikan berkarakter pada tahun 2022 mencapai 12,56 persen meningkat dibandingkan pembinaan pada tahun 2018 (7,5 persen) dengan rata-rata peningkatan 1,26 persen per tahun. Pembinaan penerapan pendidikan berkarakter islami hingga tahun 2022 mencapai 265 sekolah, namun masih terdapat 46,47 persen sekolah/madrasah yang belum dilaksanakan pemberdayaan pendidikan berkarakter islami atau sebanyak 230 sekolah/madrasah.

2.1.3.4.5. Baitul Mal

Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan bahwa Pemerintah Aceh komitmen dalam merealisasikan syariat islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat di Aceh. Menindaklanjuti Qanun tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama Lainnya.

Saat ini, masyarakat Kabupaten Bireuen mulai mempercayakan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqahnya melalui Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Potensi infaq dan zakat di Kabupaten Bireuen dinilai cukup strategis sebagai salah satu sumber dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Karena melalui penyaluran zakat, para mustahik dapat mengurangi beban dalam kesulitan ekonominya.

Potensi zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di Kabupaten Bireuen sebagian besar besumber dari para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Untuk pegawai yang mempunyai penghasilan di atas 6,9 juta per bulan dikenakan zakat sebesar 2,5 persen per bulan. Sedangkan bagi pegawai yang berpenghasilan di bawah 6,9 juta per bulan dikenakan infak sebesar 1 persen per bulan. Namun penerimaan zakat tersebut masih perlu dioptimalkan mengingat zakat merupakan salah satu sumber dana yang dapat

digunakan untuk memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui pembagian zakat berupa uang tunai, beasiswa sekolah bagi anak kurang mampu maupun dalam bantuan pembangunan rumah dan rehab rumah kaum dhuafa. Berikut adalah gambaran potensi zakat dan infaq di Kabupaten Bireuen dari tahun 2018- 2022 pada Tabel 2.122.

Tabel 2.122
Rekapitulasi Penerimaan dan Realisasi Zakat dan Infaq Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Penerimaan Zakat	6,94	4,82	4,66	4,57	4,97	-6,76
2	Penerimaan Infaq	3,05	4,8	3,85	6,52	4,67	19,64
3	Realisasi Zakat	6,94	4,8	4,66	6,64	3,74	-8,73
4	Realisasi Infaq	3,05	4,82	3,49	0,27	1,79	125,28

Sumber :Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.122, penerimaan zakat di Kabupaten Bireuen berfluktuasi dari tahun 2018 s.d 2022, penerimaan zakat turun menjadi 4,97 milyar rupiah pada tahun 2022, lebih rendah dari penerimaan zakat tahun 2018 (6,94 milyar rupiah) dengan penurunan rata-rata 6,76 persen per tahun. Sedangkan penerimaan infaq meningkat dari 3,05 milyar rupiah pada tahun 2018 menjadi 4,67 milyar rupiah pada tahun 2022 dengan peningkatan rata-rata 19,64 persen per tahun.

Realisasi zakat juga menurun dari 6,94 milyar rupiah per tahun menjadi 3,74 milyar rupiah, sedangkan realisasi infaq 3,05 milyar rupiah pada tahun 2018 turun menjadi 1,79 milyar rupiah pada tahun 2022.

2.1.3.4.6. Pelestarian Adat Aceh

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampông atau mukim dan masih berjalannya adat di kalangan masyarakat. Hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat. Kabupaten Bireuen terus berupaya untuk melestarikan adat yang ada dengan penerapan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada tahun 2022 jumlah pelestarian adat dengan menerapkan adat dalam pembangunan sebanyak 5 adat. Diharapkan kedepannya pelestarian adat akan meningkat menjadi 7 adat yang dilestarikan.

Beberapa adat yang diharapkan untuk dilestarikan dan diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bireuen adalah rapat turun sawah (*peusijuek blang*) *panglima laot, bu gatheng tuha peut, tuha lapan, keurani gampoeng, panglima hutan (pawang uteun), hari pekan dan jaga pintoe ie.*

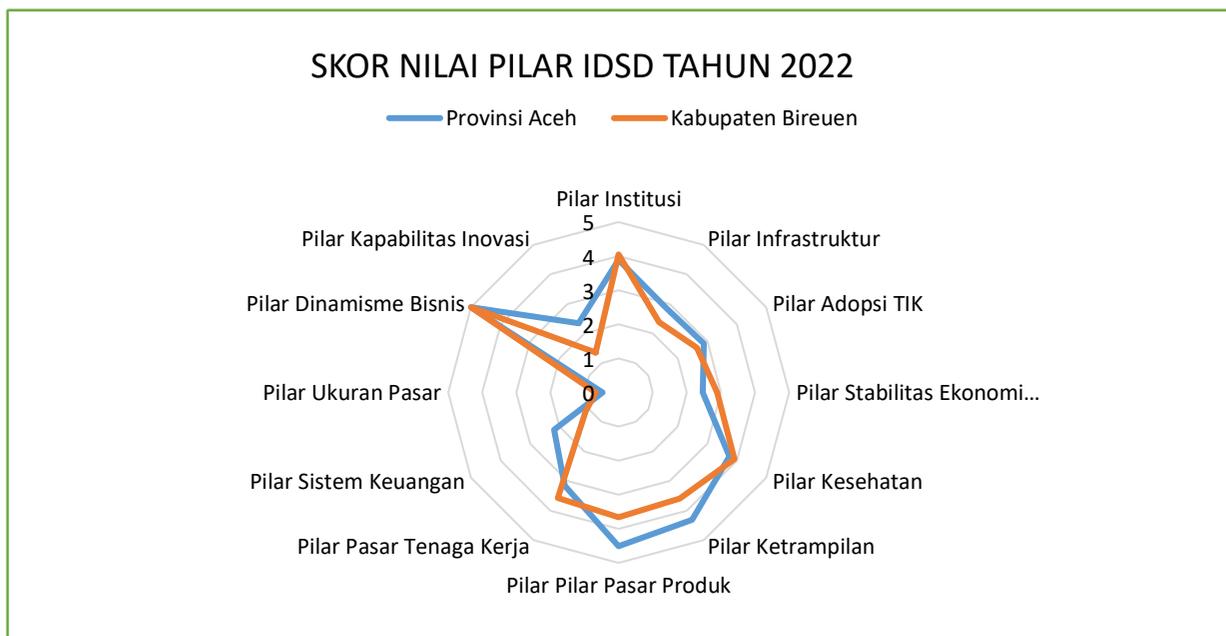
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Indeks Daya Saing Daerah

Pengukuran IDSD tahun 2022 terhadap 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia, ada 187 kabupaten/kota tidak dapat dihitung. Berdasarkan metode penghitungan, IDSD tahun 2022 hanya dapat menampilkan skor untuk daerah yang datanya lengkap pada seluruh indikator penilaian.

Setiap pilar daya saing diukur menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu, yang sifatnya hanya sebagai kerangka konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam perhitungan indeks. Dibandingkan dengan indeks nasional dan provinsi yang terdiri dari 62 indikator penilaian dan untuk kabupaten/kota sebanyak 48 indikator penilaian, maka ada ketimpangan skor antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Perbandingan skor nilai antara Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.25.



Sumber : Kemendagri BRIN 2023

Gambar 2.25. Perbandingan Skor Penilaian Pilar IDSD Tahun 2022 Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen

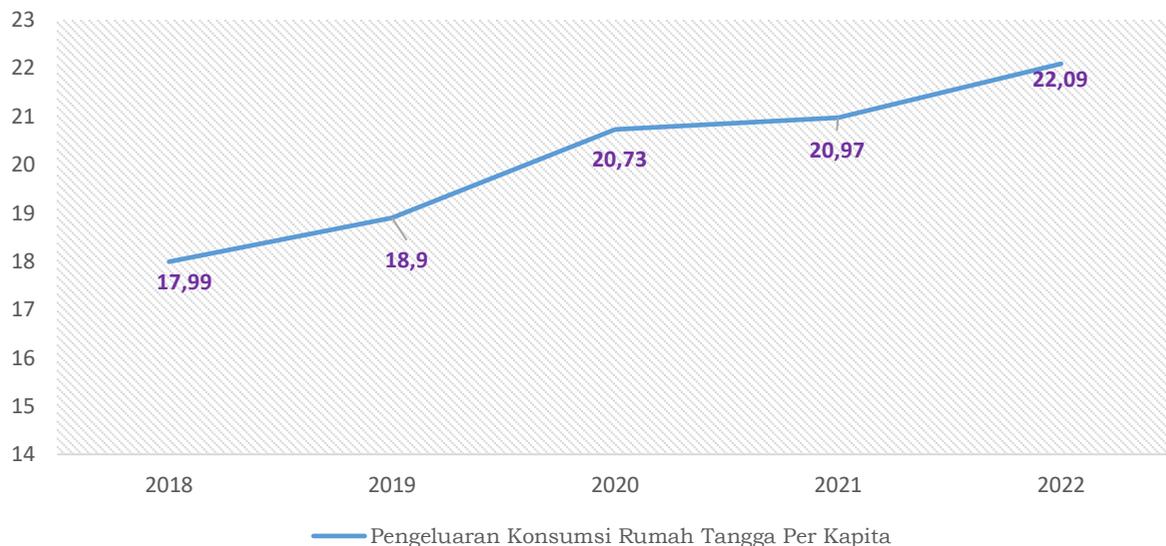
Kabupaten Bireuen memperoleh skor IDSD tahun 2022 sebesar 2,90 lebih rendah dari capaian IDSD Aceh sebesar 3,15, dimana ada beberapa pilar memperoleh nilai lebih baik dibandingkan nilai Provinsi Aceh, yaitu pada Pilar Institusi skor 4,05 yaitu pada pengukuran pada hal pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka

panjang. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro skor 2,88 yang menjadi penilaian adalah tentang kondisi ekonomi keuangan daerah dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro, Pilar Kesehatan yang dinilai berupa Angka Harapan Hidup melalui tahun hidup masyarakat dan memperoleh skor 3,92. Untuk Pilar Pasar Tenaga Kerja menjadi penilaian adalah fleksibilitas tenaga kerja dan besarnya upah kerja berada pada skor 3,57, dan Pilar Ukuran Pasar skor 0,68 yang mengukur produktivitas pasar yang memungkinkan perusahaan mengeksploitasi skala ekonomi.

Kelemahan pada Pilar Infrastruktur yang mengukur keberadaan dan kualitas sarana dan prasarana memperoleh skor 2,38, Pilar Adopsi TIK memperoleh skor 2,64 yang mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di daerah. Pilar Keterampilan dengan skor 3,59 yang mengukur tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja, pada Pilar Pasar Produk memperoleh skor 3,66 penilaian terhadap keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi produsen untuk memasarkan produknya. Kelemahan selanjutnya pada Pilar Sistem Keuangan yaitu pengukuran sistem keuangan yang terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, sejumlah prosedur dan peraturan yang menjamin terlaksananya simpan pinjam secara baik dengan perolehan skor 1,12. Berikutnya kelemahan pada Pilar Kapabilitas Inovasi hanya memperoleh skor 1,35 dimana yang dinilai adalah inovasi yang memberikan gambaran kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan formal.

2.1.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah mengukur pengeluaran rata-rata per kapita. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik tingkat kesejahteraannya. Nilai konsumsi rumah tangga perkapita di Bireuen dalam kurun waktu 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.26



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Gambar 2.26. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2018 s.d 2022 (juta rupiah) Kabupaten Bireuen

Pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bireuen semakin meningkat. Ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan rata-rata pendapatan. Jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita mencapai angka 22,09 juta rupiah meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 (17,99 juta rupaiah), sebagian termasuk kedalam kuintil ke-1 (Golongan 0-20 persen terkaya) itu sekitar 20,49 persen. Jika dilihat dari komposisinya, rata-rata pengeluaran makanan perkapita sebulan digunakan untuk makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 240.673,00 (21,45 persen), ikan/udang/cumi/kerang sebesar Rp. 104.716,00 (9,33 persen), dan rokok sebesar Rp. 81.418,00 (7,26 persen). Untuk pengeluaran non makanan, rata-rata sekitar Rp. 194.734,00 (17,35 persen) digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Tabel 2.123
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan Tahun 2017-2021 Kabupaten Bireuen

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan (Rp)	Persen	Non Makanan (Rp)	Persen	(Rp)	Persen
2018	506.678	56,62	388.142	43,78	894.820	100,00
2019	527.577	58,15	379.761	41,84	907.338	100,00
2020	530.591	57,05	399.495	42,95	930.086	100,00
2021	687.257	61,24	434.937	38,76	1.122.194	100,00
2020	785.515	59,72	527.174	40,28	1.308.689	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Berdasarkan 2.123 dapat kita lihat bahwa rata-rata persentase pengeluaran dari tahun 2018-2022 adalah pengeluaran untuk konsumsi makanan terus meningkat dibandingkan pengeluaran untuk konsumsi non makanan. Pada tahun 2022 konsumsi rumah tangga per

kapita untuk makanan sebesar 785.515 rupiah (59,72 persen) meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 506.678 rupiah (56,62 persen). Begitu juga konsumsi non pangan/non makanan yang meningkat pada tahun 2022 yang sebesar 527.174 rupiah (40,28 persen) dibandingkan tahun 2018 sebesar 388.142 rupiah (43,78 persen). Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan rumah tangga di Kabupaten Bireuen ini masih relatif kecil/terbatas dikarenakan pemenuhan kebutuhan makanan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan non makanan.

2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

2.1.4.3.1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Jalan merupakan sarana vital dalam mendukung perkembangan suatu wilayah. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan secara langsung akan memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian daerah. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Tabel 2.124
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	Tahun					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	Pertumbuhan
1	Jumlah Kendaraan	92.864	103.457	113.993	125.142	133.883	9,59
2	Panjang Jalan	1.316,27	1.316,27	1.316,27	1.316,27	1.316,27	0,00
3	Rasio	1:71	1:79	1:87	1:95	1:102	5,46

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.124 menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk 5 (lima) tahun terakhir tahun 2018 s.d 2022 di Kabupaten Bireuen cenderung meningkat dimana tahun 2018 sebesar 1:71 pada tahun 2022 menjadi 1:102, hal ini disebabkan peningkatan volume kendaraan.

2.1.4.3.2. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Ketersediaan air bersih masih menjadi permasalahan umum di dunia, tak terkecuali di Kabupaten Bireuen. Oleh sebab itu kedua permasalahan ini masuk dalam target pembangunan dunia yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ditetapkan sebagai pengganti *Millennium Development Goals (MDGs)* yang masih mengutamakan pentingnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap air bersih (prioritas 6) (United Nations, 2016). Berbeda dengan *MDGs* terkait peningkatan akses terhadap air bersih, *SDGs* menekankan pengelolaan sumber daya air yang harus mampu berkelanjutan. Setiap negara yang tergabung dalam *United Nations (UN)* diharuskan mengagendakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan *SDGs*, termasuk Indonesia.

Umumnya penduduk setempat memanfaatkan sumber daya air tanah untuk memenuhi keperluan sehari – hari melalui sumur gali / bor (dalam) dan sumur pante (dangkal). Kebutuhan akan air selama ini cukup memadai baik pada air tanah dangkal dan dalam. Potensi air tanah tinggi (Debit Pompa > 10 liter per detik), Sedang (5-10 liter per detik) dan Kecil (< 5 liter per detik). Potensi air sumur dangkal diperkirakan lebih besar dari air sumur dalam, umumnya air tanah dangkal bersifat tawar, dan di saat musim penghujan kedalaman air tanah mencapai 2 hingga 5 meter dari permukaan tanah. Prasarana air bersih di Kabupaten Bireuen dilayani oleh PDAM Tirta Krueng Peusangan.

Tabel 2.125 akan menggambarkan kondisi ketersediaan dan pemanfaatan sumber air bersih di kalangan rumah tangga penduduk Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.125
Pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Rumah Tangga Pelanggan PDAM	18.479	20.544	25.909	28.047	27.008	10,46
2	Jumlah Rumah Tangga	106.606	108.833	108.833	108.833	123.956	4,00
3	Persentase RT Pelanggan PDAM	17	19	24	23	22	1,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.125 diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, dari sebanyak 18.479 rumah tangga (RT) pelanggan di tahun 2018, hingga mencapai sebanyak 27.008 rumah tangga (RT) di tahun 2022, dengan peningkatan sebesar 10,46 persen. Namun jika dilihat dari besaran persentase RT pelanggan PDAM tersebut dibandingkan dengan total jumlah RT secara keseluruhan, hingga tahun 2022 tercatat mengalami mencapai 22 persen, meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 (17 persen). Pelayanan air bersih di Kabupaten Bireuen perlu terus ditingkatkan sehingga kebutuhan air bersih untuk masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

2.1.4.3.3. Ketersediaan Listrik

Sumber daya lain yang juga menjadi kebutuhan hidup masyarakat adalah ketersediaan sumber daya energi listrik. Dalam perencanaannya, prasarana jaringan listrik di Kabupaten Bireuen akan diperluas dan terdapat rencana relokasi jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) menjadi kabel tanah, di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh-Medan, yang melintasi Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura. Kebutuhan listrik dipergunakan untuk keperluan-keperluan seperti berikut:

- Kebutuhan rumah tangga : Perkotaan 1.300 VA dan pedesaan 950 VA
 - Kebutuhan fasilitas perdagangan: 40 persen dari kebutuhan perumahan
 - Kebutuhan fasilitas umum : 30 persen dari kebutuhan perumahan
 - Kebutuhan penerangan: 1 persen dari kebutuhan perumahan
- Pengguna listrik di Kabupaten Bireuen Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.126

Tabel 2.126
Pengguna Listrik di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Jumlah RT Pengguna Listrik	107.560	110.747	116.620	119.138	143.633	7,75
2	Jumlah RT	106.606	108.833	108.833	108.833	123.956	4,00
3	Persentase RT pengguna listrik	100	102	107	109	116	3,97

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Pada saat ini sistem prasarana jaringan listrik telah menjangkau seluruh desa yang ada di Kabupaten Bireuen dengan cakupan 116 persen terlayani dengan jumlah pelanggan sebanyak 143.633 pelanggan, meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan cakupan 100 persen. Peningkatan persentase RT pengguna listrik disebabkan peningkatan jumlah RT pengguna listrik yang meningkat 7,75 persen per tahun, lebih tinggi dari peningkatan jumlah RT.

2.1.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.4.1. Perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi proses prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. disamping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat atau mendorong investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda beda tergantung jenis izin. Adapun jenis izin di Kabupaten Bireuen sejumlah 31 jenis izin dan lamanya proses perizinan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bekisar antara 3 hari kerja sampai dengan 14 hari kerja. Jenis-jenis perizinan dan lama proses pembuatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2022 seperti pada Tabel 2.127.

Tabel 2.127
Jenis-Jenis Perizinan dan Lama Proses Pembuatan Tahun 2018-2022
Kabupaten Bireuen

No	Jenis Perizinan	Tahun (Hari Kerja)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	15	15	14	14	NA
2	Izin Gangguan (HO)	14	14	-	-	NA
3	Izin Tempat Usaha	3	3	-	-	NA
4	Izin Usaha Kontruksi (IUJK)	3	3	3	3	NA
5	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3	3	-	-	NA
6	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	-	-	7	7	NA
7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3	3	-	-	NA
8	Tanda Daftar Industri	3	3	-	-	NA
9	Izin Reklame	3	3	14	14	NA
10	Izin trayek	3	3	7	7	NA
11	Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor	3	3	-	-	NA
12	Izin Usaha Kepariwisataaan	3	3	7	7	NA
13	Izin Usaha peternakan	3	3	7	7	NA
14	Izin Usaha pertanian	3	3	7	7	NA
15	Izin Usaha Pertambangan Daerah	-	-	-	-	NA
16	Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral bukan Logam, Batuan dan Batu Bara	-	-	7	7	13
17	Izin Usaha Perbengkelan	3	3	7	7	NA
18	Izin Usaha Sarang burung Walet			7	7	NA

No	Jenis Perizinan	Tahun (Hari Kerja)				
		2018	2019	2020	2021	2022
19	Izin Pemindahan Limbah	3	3	-	-	NA
20	Izin Penangkapan Ikan	7	7	-	-	NA
21	Izin Usaha Perikanan	3	3	7	7	NA
22	Izin Pas Kapal Di Bawah 7 GT	3	3	-	-	NA
23	Izin Bidang Penanaman Modal	3	3	4	4	NA
24	Izin Bidang Kesehatan	-	-	3	3	NA
25	Izin Usaha Industri	3	3	7	7	NA
26	Izin Lokasi	3	3	14	14	NA
27	Izin Penimbunan	3	3	-	-	NA
28	Rekomendasi Izin Penimbunan BBM	-	-	13	13	13
29	Izin Usaha Perkebunan	-	-	7	7	NA
30	Izin Usaha Operasional Pengilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras	3	3	7	7	NA
31	Izin Kapal Pengangkut Ikan	3	3	-	-	NA
32	Izin Pengelolaan air	3	3	13	13	NA
33	Izin Operasi Usaha peyedian Tenaga Listrik Kepentingan Pribadi	3	3	-	-	NA
	Sesuai UU Cipta Kerja No. 11 Thn. 2020					
1	Sektor Kelautan dan Perikanan					17
2	Sektor Pertanian					17
3	Sektor Lingkungan Hidup dan Kebutuhan					17
4	Sektor Perindustrian					17
5	Sektor Perdagangan					17
6	Sektor Trasportasi					17
7	Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan					17
8	Sektor Pendidikan					17
9	Sektor Pariwisata					17
10	Sektor Ketenagakerjaan					17

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Dari Tabel 2.127 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 sampai 2021, lama waktu proses pembuatan izin Kabupaten Bireuen rata-rata membutuhkan waktu 3 (tiga) hari kerja. Dari keseluruhan izin yang dikeluarkan, izin mendirikan bangunan, izin reklame, izin usaha sarang burung walet, izin lokasi, izin Penimbunan BBM dan izin pengelolaan air merupakan jenis perizinan yang membutuhkan waktu paling lama yaitu 13 (empat belas) sampai 14 (lima belas) hari kerja. Sesuai dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, perngurusan perizinan di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan lain-lain membutuhkan waktu sebanyak 17 hari.

2.1.4.3.2. Keamanan dan Ketertiban

Jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Polres Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 tercatat sebanyak 6 kasus pencurian dengan pemberatan, 68 kasus pencurian kendaraan bermotor, kasus pencurian dengan kekerasan 7 kasus, kasus peganiayaan berat 0 kasus, pembunuhan 2 kasus, 7 kasus pemerkosaan, 2 kasus perjudian dan 7 kasus pemerasan/ancaman. Jumlah Kasus pidana di Kabupaten Bireuen mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021 artinya sudah ada kesadaran dari masyarakat akan perbuatan yang tidak baik. diharapkan kedepan tidak ada kasus tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat. Jumlah tindak pidana menonjol menurut jenis di Kabupaten Bireuen Tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.128.

Tabel 2.128
Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenis Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Pencurian dengan pemberatan	33	29	1	10	6	187,83
2	Pencurian kendaraan bermotor	84	45	20	85	68	50,75
3	Pencurian dengan kekerasan	0	17	1	7	7	168,63
4	Penganiayaan berat	56	1	1	1	-	-49,55
5	Kebakaran	-	-	-	-	-	-
6	Pembunuhan	1	1	1	2	2	25,00
7	Perkosaan	5	6	6	10	7	14,17
8	Kenakalan Remaja	-	-	-	-	-	-
9	Uang Palsu	-	-	1	-	-	-
10	Narkotika	74	-	1	-	-	-
11	Perjudian	1	-	2	2	2	0,00
12	Pemerasan/Ancaman	12	9	7	1	7	116,77

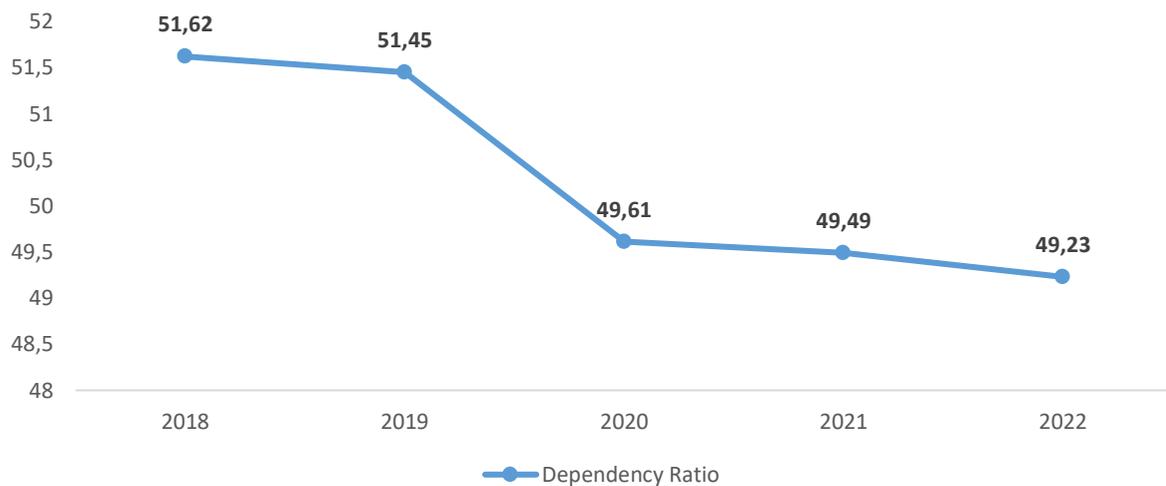
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

2.1.4.6. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

2.1.4.6.1. Tingkat Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Gambar 2.27. Rasio Ketergantungan Tahun 2018 s. d 2022 Kabupaten Bireuen

Dari data rasio ketergantungan pada Gambar 2.27, komposisi penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun sebesar 27,16 persen dan usia lebih dari 64 tahun sebesar 5,95 persen. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 67,01 persen. Sehingga rasio ketergantungan sebesar 49,23 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 49-50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif.

2.1.4.6.2. Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : kuantitas dan kualitas. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas sumber daya manusia adalah mutu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah penduduk dengan pendidikan tertinggi dapat dilihat pada Tabel 2.129.

Tabel 2.129
Jumlah Penduduk Dengan Pendidikan Tertinggi Tahun 2021
di Kabupaten Bireuen

No	Pendidikan Tertinggi	Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
1	Diploma I/II/III/Akademi	8 324	3,59
2	Universitas	28 166	12,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2023

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Program dan Kegiatan RKPK Tahun 2022 pada RPJMK periode sebelumnya

Untuk mengukur hasil pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2022 diukur dengan melihat capaian indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMK Bireuen 2017-2022. Indikator-indikator tersebut adalah indikator makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2022

Untuk mengukur capaian kinerja dan keuangan SKPK, maka ditetapkanlah kriteria penilaian kinerja. Adapun kriteria penilaian kinerja tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada Tabel 2.130

Tabel 2.130
Kriteria Kinerja

No.	Interval Nilai Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi	T
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang	S
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah	R
5.	≤50 %	Sangat Rendah	SR

Metode pelaksanaan Evaluasi RKPK Bireuen Tahun 2022 semester II dan tahun 2022 semester I tahapan sebagai berikut,

1. Mengirimkan permintaan data capaian kinerja baik *outcome* maupun *output* dan capaian penyerapan anggaran dari masing-masing SKPK.
2. Melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap data yang telah dikirimkan SKPK untuk memastikan data yang dikirim tepat dan akurat.
3. Menggunakan analisis GAP untuk membandingkan antara capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan sebagai indikator dalam RPJM Perubahan tahun 2021-2022 dan RKPK tahun 2022.
4. Melakukan penilaian kinerja berdasarkan kriteria kinerja yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 2.131
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada SKPK Semester II Tahun 2022

No	Urusan/Program	Anggaran RPKP	Anggaran APBK	Capaian			Peringkat Kinerja	Peringkat Keuangan
				Kinerja	Keuangan (APBK)			
					(%)	(Rp)		
1	Dinas Pendidikan Dayah	15.872.413.866	16.034.275.152,00	72,59	14.879.356.269,00	92,8	S	ST
2	Sekretariat Majelis Pendidikan Derah	1.158.996.550	1.044.266.137,00	155,6	936.905.640,00	89,72	ST	T
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	336,758,760,240	478.832.448.077,00	86,18	444.673.608.665,00,	92,87	T	ST
4	Dinas Kesehatan	136,541,940,582	210.993.241.473,00	85,36	163.745.215.945,00	77,61	T	T
5	Badan Layanan Umum RSUD Dr. FAUZIAH BIREUEN	131,193,939,7000	174.994.536.574,00	122,8	169.573.182.437,00	96,9	ST	ST
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	145,972,217,711	244.396.024.637,00	129	236.692.872.133,00	96,85	ST	ST
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	29,958,476,050	7.369.145.430,00	94,23	6.987.109.297,00	94,8	ST	ST
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.782.222.950	7.025.500.152,00	101,3	6.565.418.090,00	93,5	ST	ST
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	7.401.996.200	7.106.560.479,00	111	6.873.295.757,00	96,72	ST	ST
10	Dinas Sosial	8,288,594,750	7.108.275.400,00	93,15	5.018.754.408,00	70,6	ST	S
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5,000,451,700	4.374.574.527,00	75,38	4.105.942.504,00	93,9	S	ST
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10,918,529,100	15.917.526.723,00	102,3	14.279.854.559,00	89,71	ST	T
13	Dinas Pertanahan	2,569,966,550	2.813.855.828,00	101,8	2.660.544.343,00	94,5	ST	ST
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13,285,346,900	12.516.498.950,00	80,5	12.059.984.282,00	96,4	T	ST
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,520,545,100	6.136.857.000,00	97,2	5.935.932.938,00	96,7	ST	ST
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	11,384,957,350	19.085.408.270,00	94,5	16.075.387.262,00	84,2	ST	T

No	Urusan/Program	Anggaran RKPK	Anggaran APBK	Capaian			Peringkat Kinerja	Peringkat Keuangan
				Kinerja	Keuangan (APBK)			
					(%)	(Rp)		
17	Dinas Perhubungan	8,779,097,650	5.117.867.553,00	89	4.805.260.312,00	94	T	ST
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	3,087,730,750	3.715.561.433,00	82,64	3.558.574.605,00	95,8	T	ST
19	Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	818.723.000,00	3.950.559.128,00	130	3.274.153.576,00	83	ST	T
20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	15,874,602,350	10.218.450.206,00	99,3	8.671.303.156,00	85	ST	T
21	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1.474.896.100	1.430.988.559,00	106	1.228.417.653,00	86	ST	T
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.616.849.700	3.146.479.180,00	67	3.033.584.105,00	96	R	ST
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	39.438.541.650	41.881.547.452,00	101,89	37.370.918.803,00	89	ST	T
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.331.232.250	9.190.893.966,00	180	8.738.110.536,00	95	ST	ST
25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	21.111.184.150	13.062.121.581,00	116,8	12.346.073.587,00	95	ST	ST
26	Sekretariat Daerah	37.372.442.450	29.050.736.107	115	26.925.448.128	93	ST	ST
27	Sekretariat DPRK	46.374.629.000	37.933.376.335	75	35.835.136.404	94	S	ST
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.942.581.300	9.724.024.878,00	109,5	9.212.119.713,00	95	ST	ST
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	497.695.992.762	577.675.321.536,00	102,6	572.089.235.820,00	99	ST	ST
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	14.181.272.400	10.792.853.163,00	92,38	10.481.841.315,00	97	S	ST
31	Inspektorat Kabupaten	6.693.654.200	6.435.347.835,00	117	6.324.578.500,00	98	ST	ST
32	Kecamatan Samalanga	5,250,039,050	4.645.953.721,00	124	4.603.705.691,00	99	ST	ST
33	Kecamatan Simpang Mamplam	4,573,060,050	3.778.180.618,00	128	3.596.869.747,00	95	ST	ST
34	Kecamatan Pandrah	3,039,951,700	2.828.522.605,00	129	2.733.477.442,00	97	ST	ST

No	Urusan/Program	Anggaran RKPK	Anggaran APBK	Capaian			Peringkat Kinerja	Peringkat Keuangan
				Kinerja	Keuangan (APBK)			
					(%)	(Rp)		
35	Kecamatan Jeunieb	4.791.221.950	4.272.774.921,00	127	4.129.924.264,00	97	ST	ST
36	Kecamatan Peulimbang	2.839.182.450	2.761.762.512,00	129	2.595.567.004,00	94	ST	ST
37	Kecamatan Peudada	3.603.467.300	3.259.562.484,00	129	3.122.767.777,00	99	ST	ST
38	Kecamatan Jeumpa	4.031.919.650	3.640.336.950,00	154	3.561.961.973,00	99	ST	ST
39	Kecamatan Kota Juang	3.989.816.550	3.378.490.711,00	129	3.220.720.497,00	95	ST	ST
40	Kecamatan Kuala	2.839.478.100	2.542.517.000,00	118	2.373.639.423,00	98	ST	ST
41	Kecamatan Juli	3.209.599.100	2.845.573.035,00	129	2.648.009.520,00	98	ST	ST
42	Kecamatan Peusangan	14.835.754.350	6.062.929.080,00	129	5.856.572.693,00	99	ST	ST
43	Kecamatan Jangka	4.124.356.750	3.749.138.000,00	129	3.595.029.993,00	96	ST	ST
44	Kecamatan Peusangan Siblih Krueng	3.818.132.550	3.459.732.000,00	129	3.293.279.424,00	95	ST	ST
45	Kecamatan Peusangan Selatan	2.806.323.600	2.599.822.817,00	127	2.482.058.096,00	95	ST	ST
46	Kecamatan Kuta Blang	4.329.851.000	3.656.614.229,00	129	3.469.646.168,00	95	ST	ST
47	Kecamatan Makmur	2.885.235.150	2.577.197.912,00	118	2.442.977.393,00	95	ST	ST
48	Kecamatan Gandapura	3.647.568.150	3.617.720.237,00	128	3.481.273.731,00	96	ST	ST
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.609.299.176	2.461.198.559,00	98	2.283.497.409,00	93	ST	ST
50	Dinas Syariat Islam	10.636.915.200	9.787.975.026,00	106	9.580.869.926,00	96	ST	ST
51	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	3.612.487.250	2.503.316.216,00	111	2.387.501.374,00	95	ST	ST
52	Sekretariat Baitul Mal	11.737.871.700	20.589.729.436,00	66	6.410.873.072,00	31	S	SR

Faktor-faktor penyebab kurang maksimal capaian target semester II Tahun 2022 adalah,

1. Dengan keterbatasan anggaran dan peningkatan beban, maka program yang diprioritaskan adalah pemantapan pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih pada tahun 2021 pasca pandemi *covid-19*. Maka program dan kegiatan yang dianggap berdampak pada pendongkrakan pertumbuhan ekonomi mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan program dan kegiatan lainnya.
2. Berkurangnya Dana Transfer Nasional pada tahun 2022, menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah dari sumber DOKA. Hal ini berdampak kepada program-program yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat ditampung karena keterbatasan anggaran.
3. Program RPJMD tahun 2022 yang ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2022 sebanyak 206 program, ini berarti ada 51 program RPJMD tahun 2022 yang tidak tertampung dalam Perubahan APBD tahun 2022. Sehingga kemampuan tampung dokumen Perubahan APBD tahun 2022 mampu menampung program dalam dokumen RPJMD sebesar 80,2 persen.
4. Masih belum lengkapnya informasi dalam evaluasi hasil renja SKPK, terutama yang belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan ataupun realisasi target kinerja.
5. Evaluasi hasil Renja SKPK yang terlambat dilaporkan ke Bappeda sehingga dapat memperlambat pelaporan baik skala Kabupaten maupun Provinsi.

2.2.1.1 Capaian Indikator Makro

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan, dari 6 indikator makro ada 4 indikator yang berhasil dicapai bahkan melebihi dari target yang telah di tentukan. Hal ini ditandai dengan persentase capaian yang melebihi dari 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Indikator yang sudah menunjukkan hasil baik adalah Indeks Pembangunan Manusia, persentase penduduk miskin, PDRB perkapita serta ketimpangan pendapatan. Sedangkan Indikator makro yang tidak berhasil dicapai ada 2 indikator, hal ini ditandai dengan persentase capaian yang tidak mencapai 100 persen dari target yang telah ditentukan. Indikator yang di maksud adalah Pertumbuhan PDRB dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.132.

Tabel 2.132
Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Capaian
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,35	4,31	99,08	<
2	Indeks Pembangunan	Indeks	72,35	73,16	101,12	>

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Capaian
	Manusia					
3	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,95	4,2	93,67	<
4	Persentase penduduk miskin	Persen	12,98	12,51	103,62	>
5	PDRB per kapita (ADHB)	Rp.(juta)	32,96	34,73	105,37	>
6	Indeks Gini	Indeks	0,287	0,275	104,18	>

Sumber : Data Badan Pusat Statistik 2023 (data diolah)

2.2.1.2 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana kita ketahui, capaian dari tujuan adalah untuk mengukur berfungsinya capaian sasaran. Berikut adalah capaian tujuan dan capaian sasaran yang mendukungnya dapat dilihat pada keterangan berikut.

Tabel 2.133

Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJM Kabupaten Bireuen 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Nilai Capaian	Interpretasi
			Target	Realisasi		
1	Indeks Penerapan Syariat	Indeks	0,95	0,74	77,89	<
1.1	Cakupan pembinaan Syariat Islam	Persen	100	100	100	=
1.2	Persentase dayah terakreditasi	Persen	95	44,3	46,63	<
1.3	Jumlah kasus konflik antar dan intra umat	Kasus	0	1	0	<
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,31	73,16	101,19	>
2.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,3	9,31	100,11	>
2.2	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,38	71,48	100,14	>
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persen	3,3	4,31	130,6	>
3.1	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,95	4,2	93,67	<
3.2	Persentase penduduk miskin	Persen	12,06	12,51	96,27	<
3.3	Nilai PDRB sektor pertanian , kehutanan, dan Perikanan	Milyar (Rp)	4.670,8	5219,5	111,75	>
3.4	Jumlah UMKM dan Koperasi yang diberdayakan	UMKM dan Koperasi	260	115	59,6	<
3.5	Tingkat inflasi	Persen	2,7	5,37	1,11	<
3.6	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Milyar (Rp)	248,89	235,35	94,56	<
3.7	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	8,29	9,44	113,9	>
3.8	Jumlah produk hukum daerah yang mengatur tentang perlindungan konsumen	Perbup	1	1	100	=
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,1	64,39	95,96	<
4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	95	100	105,3	>
4.2	Jumlah urusan pemerintahan yang menggunakan kearifan lokal	Urusan	5	7	140	>

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Nilai Capaian	Interpretasi
			Target	Realisasi		
4.3	Jumlah destinasi wisata	Destinasi	65	63	96,92	<
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	100	=
5.1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	=
5.2	Indeks Perencanaan	Indeks	82,25	91,67	111,5	>
5.3	Persentase Raqan yang disahkan menjadi Qanun	Persen	21	58,33	277,8	>
5.6	Persentase kebijakan inovasi yg dikembangkan dalam pembangunan	Persen	50	50	100	=
5.7	Tingkat akuntabilitas kinerja	Skor	B	CC	75	<
5.8	Persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	Persen	75	66,67	88,89	<
6.1	Indeks infrastruktur	Indeks	70	92,05	131,5	>
6.2	Luas kawasan lindung	Ha	40.647,38	40.647,38	100	=
6.3	Luas daerah aliran irigasi	Ha	2.878,22	2.878,22	100	=
6.4	Persentase pelayanan pertanahan yang tertangani	Persen	90	100	111,1	>
6.5	Indeks kualitas lingkungan hidup (Air, udara, dan tanah)	Indeks	81	69,84	86,22	<
7	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	1,1	0,78	129,09	>
7.1	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	Persen	80,05	77,9	97,31	<
7.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	0,9	1,73	192,2	>
7.3	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,92	95,01	100,1	>

1) Tujuan Memperkuat Aqidah dan Akhlak serta pelaksanaan syariah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat

Tujuan ini diukur pencapaiannya dengan indikator Indeks Penerapan Syariat, memiliki target 0,95 pada tahun 2022. Indikator Indeks penerapan syariat islam ditargetkan 0,95 pada tahun 2022, namun capaian hanya mencapai 0,74. Dari tiga indikator sasaran yang mendukung tujuan tersebut, hanya satu indikator yang memenuhi target yaitu indikator cakupan pembinaan syariat islam, sedangkan indikator persentase dayah terakreditasi ditargetkan mencapai 95 persen, namun realisasi hanya 44,3 persen dan indikator jumlah kasus konflik antar dan intra umat ditargetkan tidak terjadi kasus konflik, namun pada tahun 2022 terjadi satu kasus konflik intra umat beragama.

2) Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia 72,3 pada tahun 2022. Realisasi indikator Indeks Pembangunan Manusia Indeks pada tahun 2022 mencapai 73,16 melampaui target yang ditetapkan pada Perubahan RPJM untuk tahun tersebut, Begitu juga indikator sasaran yang mendukung tujuan tersebut, capaian indikator rata-rata lama sekolah

yaitu 9,31 melewati target yang ditetapkan, yaitu tahun 9,3 tahun. Indikator pendukung angka harapan hidup dengan realisasi mencapai 71,48 persen lebih tinggi dibandingkan target 71,38 tahun.

3) Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) ditargetkan sebesar 3,3 persen pada tahun 2022. Realisasi indikator Laju pertumbuhan ekonomi mencapai angka 4,31 persen di atas target yang ditetapkan yaitu 3,3 persen. Dari delapan indikator sasaran, terdapat dua indikator yang melampaui target yaitu nilai PDRB sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta persentase PAD terhadap pendapatan daerah, satu indikator sesuai target, yaitu jumlah produk hukum daerah yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan lima indikator yang tidak memenuhi target, yaitu persentase tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, jumlah UMKM dan koperasi yang di berdayakan, tingkat inflasi dan nilai PDRB sektor industri pengolahan.

4) Tujuan Memanfaatkan bonus demografi untuk pembangunan daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan memanfaatkan bonus demografi untuk pembangunan daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang ditargetkan mencapai 67,1 persen pada tahun 2022. Realisasi indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai angka 64,39 persen, lebih rendah dari target yang ditetapkan 67,1 persen. Capaian indikator sasaran pendukung tujuan tersebut terdiri dua indikator sasaran yang melampaui target yaitu persentase organisasi pemuda yang aktif dan jumlah urusan pemerintahan yang menggunakan kearifan lokal. Sedangkan indikator sasaran jumlah destinasi wisata tidak mencapai target dengan realisasi 63 destinasi dari target 65 destinasi.

5) Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel diukur dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan CC pada tahun 2022. Realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi sesuai dengan target yaitu CC. Terdapat empat indikator sasaran pendukung yang mencapai/melampaui target yang ditetapkan, yaitu : opini BPK, indeks perencanaan, persentase ragan yang disahkan menjadi qanun dan persentase kebijakan inovasi yg dikembangkan dalam pembangunan, sedangkan indikator tingkat akuntabilitas realisasi CC dibawah target kinerja yang ditetapkan yaitu B.

6) Tujuan Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan

Tujuan ini menggunakan indikator persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan yang ditargetkan mencapai 75 persen pada tahun 2022. Capaian indikator persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan hanya 66,67 persen dibawah target tahun 2022. Hal serupa juga terjadi pada indikator sasaran pendukung tujuan tersebut. Indikator indeks infrastruktur dan IKLH tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Sedangkan target luas kawasan lindung dan luas daerah aliran irigasi sesuai dengan target yang ditetapkan dan indikator sasaran persentase pelayanan pertanahan yang tertangani melampaui target.

7) Tujuan Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tujuan ini memiliki indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban yang ditargetkan 1,1 pada tahun 2022. Capaian indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban sebesar 1,72 diatas target yang ditetapkan. Seiring dengan capaian tersebut, capaian indikator sasaran Indeks pembangunan gender dan persentase PMKS yang tertangani melampaui target yang ditetapkan, sedangkan indikator sasaran persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih belum mencapai target disebabkan tahapan pemilu tidak dilaksanakan pada tahun 2022.

2.2.1.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMK dapat dicapai. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Tabel 2.134
Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kab. Bireuen terhadap
Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMK Bireuen 2017-2022

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Interpretasi	SKPK
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Daerah	Persen	95	100	95	>	Semua SKPK
2	Program Pendidikan Dayah	Jumlah Dayah naik kelas	Dayah	135	78	135	<	Disdik Dayah
3	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase sekolah/Dayah yang menerapkan pendidikan berkarakter	Persen	55	100	55	>	MPA
4	Program Pengelolaan Pendidikan	APM pendidikan dasar 9 tahun	Nilai	99,43	95,1	99,43	<	PK
5	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Guru yang Berkompetensi	Persen	86	54,82	86	<	PK
6	Program Pengembangan Kebudayaan	Peningkatan jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan diinventarisir	Persen	60	17,46	60	<	PK
7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kelompok Kesenian yang dibina	Kelompok	25	150	45	>	PK
8	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya yang tertangani	Persen	80	12,5	80	<	PK
9	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum yang dikelola	Persen	100	100	100	=	PK
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	B	B	B	=	Dinkes
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah PKM yang memiliki SDM dengan Kompetensi dan Kualifikasi Sesuai Standar	PKM	20	18	20	<	Dinkes
12	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Jumlah Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang Diawasi	Sarana	196	275	196	>	Dinkes
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah UKBM yang aktif	UKBM	1.749	1.972	1749	>	Dinkes

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Interpretasi	SKPK
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemerataan SDM dan Kompetensi serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	85	119,5	85	>	RSUD dr. Fauziah
15	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	B	B	B	=	RSUD dr. Fauziah
16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian	Persen	75	91	75	>	PUPR
17	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Akses Air Minum	Persen	80	87,19	80	>	PUPR
18	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase KK yang memiliki sanitasi layak	Persen	3,2	4,25	3,2	>	PUPR
19	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Kawasan Perkotaan Dan Lingkungan yang tertangani Banjir	Persen	70	42	70	<	PUPR
20	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah yang terbangun	Persen	45	31,66	45	<	PUPR
21	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Gedung Pemerintah dan Lingkungannya yang Terpelihara	Persen	80	10	80	<	PUPR
22	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	Persen	63	55,17	63	<	PUPR
23	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan dengan Perencanaan penataan Ruang	Persen	70	100	70	>	PUPR
24	Program Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Kawasan permukiman	Dokumen	1	1	1	=	PERKIM
25	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan pemukiman kumuh	Persen	50	11,82	50	<	PERKIM
26	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Upaya Pengurangan Kerentanan/ Darurat Bencana dan Penanganan Bencana	Persen	100	100	100	=	BPBD

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Interpretasi	SKPK
27	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran.	Persen	100	100	100	=	BPBD
28	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah kasus pelanggaran Qanun yang diselesaikan	Persen	92	100	92	>	Satpol PP
29	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase kemampuan potensi sumber kesejahteraan dalam pemberdayaan sosial masyarakat	Persen	85	85,71	85	>	Dinsos
30	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyediaan dan pemberian bagi penyandang rehabilitasi sosial	Persen	85	76,64	85	<	Dinsos
31	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Terpenuhinya kebutuhan anak terlantar dan tersedianya data fakir miskin	Persen	85	65,07	85	<	Dinsos
32	Program Penanganan Bencana	Tertanganinya sandang dan pangan korban bencana	Persen	95	100	95	>	Dinsos
33	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	160	348	224	>	Disnakertrans
34	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan	Orang	200	72	200	<	Disnakertrans
35	Program Hubungan Industrial	Jumlah karyawan dan pelaku usaha yang mengikuti Bimtek Penyelesaian Hubungan Industrial dan Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Orang	70	30	70	<	Disnakertrans
36	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi	Persen	39,35	14,29	39,35	<	Disnakertrans
37	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase UPT mandiri	Persen	50	28,57	50	<	Disnakertrans
38	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan pangan utama	Persen	34,55	103	34,55	>	DPKP

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Interpretasi	SKPK
39	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	84,6	79,4	84,6	<	DPKP
40	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	85	88	85	>	DPKP
41	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	13.800	13.253	62.600	>	DPKP
42	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	13.800	13.599,92	64.500	<	DPKP
43	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Olahan	Ton	1.500	1.400	6.500	<	DPKP
44	Program Pedistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Tanah Terlantar dan Absentee yang Didistribusi	Persen	66	100	66	>	Dinas Pertanahan
45	Program Pengurusan Hak Atas Tanah	Persentase Tanah yang Bersertifikat	Persen	66	9	66	<	Dinas Pertanahan
46	Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	Persentase Kasus Konflik dan Sengketa yang Ditangani	Persen	85	100	85	>	Dinas Pertanahan
47	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks kualitas air	Indeks	0<1	0<1	0<1	=	DLHK
48	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rasio RTH yang Tertangani	Persen	40	2,71	40	<	DLHK
49	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Orang	60	30	90	<	DLHK
50	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	90	36	90	<	DLHK
51	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	98	103,9	98	>	Disdukcapil
52	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Persen	98	91,2	98	<	Disdukcapil

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Interpretasi	SKPK
53	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persen	98	94,44	98	<	Disudkcapil
54	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Wanita yang aktif	Persentase	80	69,23	80	<	DPMGPKB
55	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang tertangani	Persen	95	100	95	>	DPMGPKB
56	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Persen	95	100	95	>	DPMGPKB
57	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Gampong Layak Anak	Persen	45	49,26	45	>	DPMGPKB
58	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang tertangani	Persen	90	100	90	>	DPMGPKB
59	Program Penataan Desa	Adanya fasilitasi permasalahan gampong dan pendataan gampong	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	=	DPMGPKB
60	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki Administrasi Pemerintah dan Sistem Pengelolaan Keuangan yang baik	Persen	87	85,4	87	<	DPMGPKB
61	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Lembaga	4	4	4	=	DPMGPKB
62	Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Adanya Ketersediaan sistem Informasi keluarga penyuluhan, advokasi keluarga berencana dan ketahanan keluarga	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	=	DPMGPKB
63	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peningkatan Aseptor KB Aktif	Persen	55	48,1	55	<	DPMGPKB
64	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase desa yang memiliki kelompok Tribina	Persen	27,9	75,9	27,9	>	DPMGPKB

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Interpretasi	SKPK
65	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Lalu Lintas	Persen	70	49,38	70	<	Dishub
66	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Peringkat Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	97	78	97	<	Diskominsan
67	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Nilai	2,6	2,1	2,6	<	Diskominsan
68	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Ketersediaan Data Statistik sektoral	Persen	100	100	100	=	Diskominsan
69	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	Indeks	2	1	2	<	Diskominsan
70	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin	Pelaku Usaha	30	2.297	60	>	DPMPTSP
71	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan yang diterbitkan	Persen	90	100	90	>	DPMPTSP
72	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi	Perusahaan /Pelaku Usaha	700	3.381	700	>	DPMPTSP
73	Program Pengelolaan Data Dan Modal Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Partisipan/Masyarakat yang mengurus izin berbasis elektronik	Persen	75	100	75	>	DPMPTSP
74	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	Organisasi	95	26	95	>	Disporapar
75	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang mendapat medali di even Provinsi	Persen	25	74	25	>	Disporapar
76	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kepramukaan Aktif	Persen	100	100	100	=	Disporapar
77	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisata	Persen	75	81,62	75	>	Disporapar
78	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Promosi Wisata	Persen	90	66,67	90	<	Disporapar

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Interpretasi	SKPK
79	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Pembinaan	Persen	55	83	55	>	Disporapar
80	Program Sekretariat Majelis Adat Aceh Aceh	Jumlah Pembinaan adat dan adat istiadat	Pembinaan	4	7	4	=	MAA
81	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	7.280	3.593	14.318	<	Dinas Kearsipan
82	Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Persen	70	71	70	>	Dinas Kearsipan
83	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (kelapa, Karet dan Kakao)	Persen	5	0,22	5	<	Distanbun
84	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah PDRB Sektor Pertanian	Triliun rupiah	4,8	3,1	4,8	<	Distanbun
85	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanggulangan Luas Serangan OPT dan DPI	Persen	80	100	80	>	Distanbun
86	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas	Kelompok	9	15	9	>	Distanbun
87	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi ternak	Persen	3	0,0025	3	<	Dinas Peternakan
88	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan PAD Sektor Peternakan	Persen	2	-17,09	2	<	Dinas Peternakan
89	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kasus Penyakit yang Hewan yang Tertangani	Persen	75	100	70	>	Dinas Peternakan
90	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pelatihan	Persen	21	19,23	21	<	DPPKUKM
91	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang aktif	Persen	78,51	73,46	78,51	<	DPPKUKM
92	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	75	105	125	>	DPPKUKM

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Interpretasi	SKPK
93	Program Pengembangan Umkm	Jumlah UMKM yang naik Kelas	UMKM	3	-	6	<	DPPKUKM
94	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Terkendalnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	Ya/Tidak	Ya	Ya	ya	=	DPPKUKM
95	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen di Kecamatan	Persen	100	74	100	<	DPPKUKM
96	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Perusahaan yang memiliki Perizinan dan pendaftaran	Persen	50	84	50	>	DPPKUKM
97	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pengelolaan Sarana Perdagangan yang berfungsi	Persen	30	85	30	>	DPPKUKM
98	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah produk unggulan daerah	Produk	2	2	4	<	DPPKUKM
99	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Pelaku Usaha Industri	Pelaku Usaha	1.600	3.075	1.600	>	DPPKUKM
100	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya data industri dalam Sistem Industri Nasional (SINAS)	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	=	DPPKUKM
101	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Rekomendasi /Naskah Dinas yang terselesaikan	Persen	100	103,6	100	>	Setdakab
102	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan Layanan Administrasi Umum, Organisasi, Protokoler, Perencanaan dan Keuangan	Persen	100	100	100	=	Setdakab
103	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Raperda yang di tetapkan menjadi Perda	Persen	65	78	65	>	DPRK
104	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Penganggaran Antara APBD dengan RPJM	Persen	95	97,39	95	>	BAPPEDA

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Interpretasi	SKPK
105	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program Antara RPJM dengan APBK	Persen	100	80,16	100	<	BAPPEDA
106	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase SKPK yang melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	Persen	90	91,67	90	>	BAPPEDA
107	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah	Persen	98	99,75	98	>	BPKD
108	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Persen	100	100	100	=	BPKD
109	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	Persen	100	106,84	100	<	BPKD
110	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Tata kelola kepegawaian sesuai Manajemen ASN	Persen	80	99,3	80	>	BKPSDM
111	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM yang dilatih	Persen	85	61	85	<	BKPSDM
112	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat kepatuhan dalam pelaporan keuangan dan kinerja	persen	80	100	80	>	INSPEKTORAT
113	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman terhadap penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	93	79	93	<	Kesbangpol
114	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Peserta Partai politik yang memahami mekanisme pengelolaan partai	Persen	92	38	92	<	Kesbangpol
115	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persen	92	100	92	>	Kesbangpol
116	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase tingkat ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Persen	70	66,7		<	Kesbangpol

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Interpretasi	SKPK
117	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase deteksi dini konflik yang tertangani	Persen	75	87,5	75	<	Kesbangpol
118	Program Syariat Islam Aceh	Jumlah Gampong yang mengadakan pengajian rutin	Gampong	609	609	609	=	DSI
119	Program Majelis Permusyawaratan Ulama	Persentase sidang yang menghasilkan keputusan	Persen	90	60	90	<	MPU
120	Program Baitul Mal	Jumlah Mustahik	Orang	32.000	6.276	62.975	<	Baitul Mal
121	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	45	28,02	45	<	Kecamatan
122	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	Persen	80	100	80	>	Kecamatan
123	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	75	100	75	>	Kecamatan

Ket. > Melampaui target
= Sesuai target
< Kurang dari target

2.2.2 Evaluasi Terhadap Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui realisasi pendapatan dan belanja daerah terhadap target yang telah ditetapkan, dapat melihat tabel berikut.

Tabel 2.135
Realisasi Keuangan Semester II Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persen (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.919.903.373.202,00	1.915.401.151.145,35	99,77
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	169.212.472.628,00	180.778.532.735,26	106,84
1.1.1	Pajak Daerah	29.950.000.000,00	28.858.915.213,25	96,36
1.1.2	Retribusi Daerah	13.246.666.000,00	12.322.078.501,00	93,02
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.415.771.469,00	5.415.771.469,00	100
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	120.600.035.159,00	134.181.767.552,01	111,26
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.703.362.569.971,00	1.689.315.159.294,09	99,18
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.549.772.695.927,00	1.535.349.460.784,00	99,07
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.589.874.044,00	153.965.698.510,09	100,24
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	47.328.330.603,00	45.307.459.116,00	95,73
1.3.1	Pendapatan Hibah	23.169.224.341,00	22.289.012.085,00	96,20
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.159.106.262,00	23.018.447.031,00	95,28
2	BELANJA DAERAH	2.001.710.922.925,00	1.915.401.151.145,35	99,77
2.1	BELANJA OPERASI	1.204.816.136.206,00	1.126.400.213.627,36	93,49
2.2	BELANJA MODAL	260.127.387.998,00	255.894.115.459,00	98,37
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.079.100.546,00	1.853.006.159,00	36,48
2.4	BELANJA TRANSFER	531.688.298.175,00	531.446.944.726,00	99,95
	SURPLUS/(DEFISIT)	(81.807.549.723,00)	(193.128.826,01)	0,24
3	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.807.549.723,00	81.807.611.668,79	100
3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.807.549.723,00	81.807.549.723,70	100
4	PEMBIAYAAN NETTO	81.807.549.723,00	81.807.549.723,70	100

Sumber : BPKD Kabupaten Bireuen, 2023

Dari keterangan Tabel 2.135 diatas, realisasi pendapatan daerah belum mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 99,77 persen. Realisasi yang tertinggi pada Pendapatan Daerah dicapai oleh Lain-Lain PAD yang sah mencapai realisasi sehingga 106,84 persen. Sedangkan untuk realisasi belanja daerah juga belum mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 99,77 persen. Sedangkan total Silpa Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 yang berasal belanja daerah yang tidak terealisasi dan sisa anggaran sebelumnya berjumlah Rp.81.807.549.723,70.

Tabel 2.136

Lebih Detail terkait hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun 2022 dan Realisasi RPJMK 2017-2022 dilihat pada tabel 2.136 terlampir.

2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun dalam rangka melaporkan perkembangan penyelenggaraan Standar pelayanan minimal dengan 6 (enam) urusan wajib pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Keberhasilan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bireuen harus memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, sehingga diharapkan target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan pada masing-masing kementerian. Dalam upaya tersebut telah dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bireuen serta dokumen Rencana Strategis perangkat daerah pengampu SPM. Permasalahan yang muncul dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal. Hal ini berimbas pada tidak sepenuhnya program dan kegiatan dalam rangkai pencapaian SPM dapat termuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah;
2. Penerapan SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dari sisi kebijakan (regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran terutama untuk koordinasi dan pelaporan (penyediaan data);
3. Ketersediaan data belum optimal yang dipengaruhi oleh kesulitan mendapatkan data/laporan SPM dari perangkat daerah terkait. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam analisis data dan pelaporan tidak tepat waktu sesuai yang diharapkan.

1. Standar Pelayanan Minimal untuk bidang pendidikan

Standar Pelayanan Minimal untuk bidang pendidikan, peraturan yang dijadikan pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Penetapan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu dalam merencanakan percepatan penerapan pelayanan

minimal pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen selalu berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut. Baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan program pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen.

Dalam melakukan pengukuran pencapaian SPM tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen menggunakan aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar untuk penentuan SPM. Berbagai data dasar yang terdapat ditingkat satuan pendidikan diinput ke dalam aplikasi ini. Setelah data-data yang terkait indikator SPM tersebut diinput, diolah serta diinterpretasikan (ditafsirkan), maka akan dapat diperoleh hasil tingkat pencapaian SPM, khususnya yang terkait dengan 14 indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan 13 indikator yang menjadi tanggung jawab tingkat satuan pendidikan.

Tabel 2.137
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
I	Indikator SPM Bidang Pendidikan							
1	Pendidikan Dasar							
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	NA	NA	NA	85,00	81,23	NA
2	Pendidikan Kesetaraan							
	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	NA	NA	NA	6,30	47,10	NA
3	Pendidikan Anak Usia Dini							
	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	NA	NA	NA	50,28	79,30	NA

Capaian SPM Pendidikan Dasar Usia Dini tahun 2022 sebesar 79,30 persen dengan jumlah yang terlayani sebanyak 12.629 orang dari jumlah usia anak sekolah sebanyak 16.928 orang, SPM bidang pendidikan dasar sebesar 81,23 persen dengan jumlah terlayani 53.888 orang dari jumlah usia anak sekolah 77.764 dan pendidikan kesetaraan sebesar 47,10 persen dengan jumlah terlayani 4.496 orang dari jumlah usia sekolah 44.496 orang.

2. Capaian SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berhak di terima setiap warga masyarakat di Kabupaten Bireuen secara minimal. SPM merupakan hal minimal yang harus di laksanakan oleh Pemda untuk warganya serta merupakan tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan di Kabupaten Bireuen. SPM bidang kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial dapat dipenuhi, maka target SPM adalah 100 persen setiap tahunnya.

Jenis layanan kesehatan yang termasuk ke dalam SPM bidang kesehatan yaitu

1. Pelayanan Kesehatan ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan kesehatan orang orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan Kesehatan orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Kabupaten Bireuen tahun 2022 memiliki 20 unit Puskesmas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya di wilayah Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.138
Capaian SPM Dinas Kesehatan Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
II	Indikator SPM Bidang Kesehatan							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	83	83,6	84	93	91	2,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	74,9	89,3	89	100	98	5,78
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	83,5	51,6	87	96	97	3,38
4	Pelayanan kesehatan balita							
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	15,1	43,8	64	77	87	17,98
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar							
	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	85,4	82,6	67	89	89	0,90
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif							
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	30,7	33,9	61	39	53	5,58
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut							
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	0	97,7	64	86	99	24,75
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi							
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	33,4	27,3	66	23	44	2,65
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus							
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,1	99,7	81	86	96	-1,03
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat							
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	64,3	97,6	95	80	100	8,93
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis							
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	29,5	55	43	36	57	6,88

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)							
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	58,3	50,4	28	67	70	2,93

Capaian tertinggi pada Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yaitu sebesar 100 persen dengan jumlah terlayani sebanyak 1.075 orang sama dengan jumlah orang yang harus dilayani. Kemudian diikuti oleh Pelayanan kesehatan pada usia lanjut yaitu sebesar 99 persen dengan jumlah terlayani sebesar 49.145 orang dari jumlah total Jumlah yang harus dilayani yaitu sebesar 49.394 orang. Capaian SPM terendah adalah Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu sebesar 44 persen dengan jumlah terlayani sebesar 42.587 orang dari 97.430 orang yang harus dilayani.

3. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap target nasional dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi OPD penanggung jawab SPM.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/ 2018. Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Pasal 4 ayat (2) huruf a pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas: Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Tabel 2.139
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018 s.d 2022
Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
III	Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum							
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	NA	75,00	70,00	86,7	87,19	4,06
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	NA	83,00	0	87,13	88,06	1,69

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Jenis Pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan Indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pengelolaan air Limbah Domestik, realisasi SPM nya adalah 88,06 persen artinya dari jumlah rumah tangga sebesar 100.590 baru terlayani 88.579 rumah tangga, sedangkan jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari, SPMnya mencapai 87,19 persen atau 87.704 jiwa yang terlayani.

4. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.140
Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Bireuen

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
IV	Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota							
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	0	14	0	0,00
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota							
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	0	0	0,00

5. Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar layanan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Tabel 2.141
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keamanan,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018 S.D 2022
Kabupaten Bireuen

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
V	Indikator SPM Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	%	NA	NA	NA	0,00	0,00	
2	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	NA	NA	NA	86,43	95	
3	Pelayanan informasi rawan bencana							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	NA	65	65	100	100	
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	NA	84	71	100	100	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	NA	100	80	45	100	
6	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	NA	NA	NA	95	100	

Realiasi SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) mencapai 100 persen pada tahun 2022, pelayanan informasi rawan bencana (kebencanaan), pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (kebencanaan) mencapai 100 persen, sedangkan spm pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (damkar) mencapai 100 persen. Capaian terendah adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara yaitu sebesar 95 persen.

6. Capaian SPM Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Tabel 2.142
Capaian SPM bidang Urusan Sosial Tahun 2022
Kabupaten Bireuen

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
VI	Indikator SPM Bidang Sosial							
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	NA	NA		55,93	29	11,27
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti							
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	NA	NA	0,27	0,1	100	49,87
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti							
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	NA	NA	0,79	0,71	100	49,61
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti							
4	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	NA	NA	16	36,36	100	42,00
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota							

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	NA	NA	100	100	100	0,00

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Tahun 2023

Capaian SPM bidang sosial Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebesar 85.74 persen dengan kategori “Tuntas Madya”. Layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota mencapai 100 persen, sedangkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan capaian terendah sebesar 39,37 persen.

Persentase pencapaian penerima layanan dasar pada layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti hanya mampu melayani 29 persen (184 orang dari kebutuhan 630 orang).

2.2.2 Evaluasi Hasil Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan

SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Kemiskinan masih menjadi Indikator makro yang perlu difokuskan dalam capaian Target SDGs tahun 2030. Beberapa SKPK yang memiliki peranan besar terhadap pencapaian penurunan angka kemiskinan diantaranya : Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Pertanahan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Baitul Mal, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Syariat Islam, Badan Pemberdayaan Masyarakat Gampong perberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas kelautan dan Perikanan,

Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas peternakan, Dinas Tenaga Kerja dan BPBD. Capaian indikator tujuan 1 pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Indikator proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan/ besaran pekerjaan/ buruh yang menjadi peserta program jamsostek realisasi sebesar 41.118 jiwa dari target 153.582 jiwa;
2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40 persen terbawah) terealisasi 89 persen dari target 100 persen;
3. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan Nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur sebesar 12,56 persen;
4. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas/ persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (proxy) sebesar 80 persen dari target 100 persen. Terdiri dari lansia DTKS 20.783 jiwa dan disabilitas DTKS sebanyak 4.577 jiwa;
5. Persentase anak umur 0-11 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40 persen terbawah) sebanyak 15, 4 persen dari target 65 persen;
6. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (kelompok penduduk 40 persen terbawah) sebanyak 27.804 jiwa dari target 33.736 jiwa;
7. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (kelompok umur 40 persen terbawah) sebanyak 94,55 persen;
8. Indeks resiko bencana pada pusat - pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi realisasi 164 dari target 168.

❖ **Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan**

Tujuan 2 SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Menitik beratkan pada pemenuhan pangan masyarakat serta menjamin asupan gizi yang cukup pada balita. Keduanya sangat erat karena intervensi kecukupan gizi harus diikuti dengan berkelanjutan produksi pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dinas kesehatan dan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah dua SKPK pengampu dalam pencapaian. Capaian indikator tujuan ini adalah :

1. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita prevalensi gizi buruk dan gizi kurang (proxy) senilai 25,5 persen di atas target 24 persen;
2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan/ penanganan daerah rawan pangan (prioritas 1,2,3) realisasi status sedang;
3. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita sebesar 23,4 persen;
4. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasi oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 79,4 persen di atas target tahun 2022 73,4 persen;

5. Tingkat konsumsi ikan perkapita sebesar 61,05 persen.

❖ Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 SDGs adalah Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Merupakan implementasi dari pemenuhan kesejahteraan masyarakat oleh beberapa dinas pengampu diantaranya : Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Rumah Sakit Dr. Fauziah. Capaian indikator tujuan ini adalah :

1. Prevalensi HIV pada populasi dewasa sebesar 0,17 persen dibawah target tahun 2022 (0,19 persen);
2. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk /persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Aceh (proxy) sebanyak 160.462 jiwa melebihi target tahun 2022 (155.565 jiwa);
3. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 132/100.000 KH diatas target tahun 2022 (130/100.000 KH);
4. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup sebanyak 15/1.000 KH diatas target tahun 2022 (14/100.000 KH);
5. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran Hidup sebesar 14/1.000 KH diatas target tahun 2022 (13/1.000 KH);
6. Insiden Tuberculosis sebanyak 231 kasus/100.000 penduduk;
7. Kejadian Malaria sebanyak 656 kasus per 1.000 penduduk;
8. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan/Rasio dokter persatuan penduduk (proxy) hanya sebesar 0,16 per 1.000 penduduk, lebih kecil dari target tahun 2022 (1 orang per 1.000 penduduk).

❖ Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua dengan SKPK pengampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Arsip dan Perpustakaan. Capaian indikator tujuan ini adalah :

1. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B sebanyak 100 persen;
2. Persentase SMP/MTS / sederajat berakreditasi minimal B sebanyak 100 persen;
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sederajat sebesar 10,5,79 persen diatas target tahun 2022 (100 persen);
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/ sederajat sebesar 91,98 persen dibawah target tahun 2022 (108,52 persen);
5. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 Tahun sebesar 9,31 persen, melampaui target tahun 2022 (9,30 persen);
6. Persentase Angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 Tahun sebesar 99,23 persen, melampaui target tahun 2022 (99 persen).

❖ **Tujuan 5 : Kesetaraan Gender**

Tujuan 5 SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dengan melihat gender sebagai pengarusutamaan pembangunan mengartikan bahwa proses pembanguna tidak melihat kelompok marjinal dan golongan tertentu sebagai aktor pembangunan. Capaian indikator tujuan ini adalah :

1. Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif/ Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (proxy) sebesar 45 jiwa dan anak sebanyak 37 jiwa;
2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan diparlemen tingkat pusat parlemen daerah dan pemerintah daerah / Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD sebanyak 10 persen, di atas target tahun 2022 (3 persen).

❖ **Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Tujuan 6 SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuannya untuk menjamin bahwa seluruh penduduk Aceh dapat menjangkau air bersih baik untuk minum maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta mengelola sanitasi agar tidak mencemari lingkungan. Capaian indikator tujuan ini adalah :

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebanyak 87,19 persen, belum mencapai target SDGs tahun 2022 (100 persen);
2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak/ persentase rumah tinggal bersanitasi (proxy) sebanyak 88,06 persen, masih belum mencapai target SDGs tahun 2022 (100 persen);
3. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebesar 24 persen, dibawah target tahun 2022 (60 persen).

❖ **Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau**

Tujuan 7 SDGs adalah menjamin akses energi yang terjangkau , andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Pemenuhan energi listrik bagi masyarakat dan industri yang berasal dari energi bersih terbarukan. Capaian indikator tujuan ini adalah :

1. Jumlah pelanggan PLN 52.980 dan tarif rumah tangga : 43.904 pelanggan;
2. Rasio ketersediaan daya listrik : beban puncak 14.373 megawatt.

❖ **Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Tujuan 8 SDGs adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Bertujuan untuk menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Terdapat beberapa SKPK pengampu, dinas

perdagangan industri koperasi dan UKM, Dinas pertanian dan perkebunan, Dinas Pangan, perikanan dan kelautan, Dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Capaian indikator tujuan ini adalah :

1. PDRB per kapita sebesar 34,73 juta rupiah;
2. Laju pertumbuhan PDB Perkapita/Pertumbuhan PDRB sebesar 4,31 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur sebesar 4,20 persen;
4. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3/ keselamatan kerja dan perlindungan (proxy) sebanyak 60 perusahaan;
5. Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara / kunjungan wisata/Proxy sebanyak 167.437 jiwa.

❖ **Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Tujuan 9 SDGs adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Capaian indikator tujuan ini pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kondisi mantap jalan Kabupaten/persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 58,37 persen;
2. Panjang jalan kewenang kabupaten sebesar 1.207,67 km.

❖ **Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan**

Tujuan 10 SDGs adalah mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Semakin kecil nilai ketimpangan, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan dengan harapan pemerataan pembangunan dapat dilakukan disemua wilayah termasuk daerah terisolir dan tertinggal. Capaian indikator tujuan ini adalah :

1. Koefisien gini sebesar 0,275, lebih baik dari target tahun 2022 (0,287);
2. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 193;
3. Jumlah desa mandiri sebanyak 4 desa;
4. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan/ Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (proxy);
5. Perempuan sebanyak 45 jiwa dan anak sebanyak 37 jiwa;
6. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial sebanyak 13.618 jiwa;
7. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok sebanyak 12,51 persen.

❖ **Tujuan 11 : Kota dan Komunitas Berkelanjutan**

Tujuan 11 SDGs adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Pemerintah berupaya optimal dalam pemenuhan standar terkait aksesibilitas

masyarakat terhadap pemukiman serta sanitasi yang layak. Capaian indikator tujuan ini adalah Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 164.

❖ **Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab**

Tujuan 12 SDGs Menjamin Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Merupakan hal yang harus di perhatikan, salah satunya dengan pengelolaan persampahan. Adapun SKPK yang bertanggung jawab dengan terhadap pencapaian indikator tersebut yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Timbulan sampah yang tertangani pada tahun 2022 sebanyak 36 persen.

❖ **Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim**

Tujuan 13 SDGs mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan Dampaknya. Perubahan iklim berkaitan erat dengan implikasi terjadinya bencana alam. Upaya untuk mengatasi bencana tersebut dapat dilakukan melalui penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dapat mengganggu kualitas lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertanggung jawab dalam pencapaian indikator. Capaian indikator tujuan ini adalah jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per100.000 orang/ Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama bantuan tanggap darurat (proxy) sebesar 100 persen.

❖ **Tujuan 14 : Ekosistem Laut**

Tujuan 14 SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Upaya pelestarian ekosistem laut menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh semua pelaku pembangunan termasuk pemerintah SKPK pengampu yakni Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan. Capaian indikator tujuan ini adalah :

1. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman sebanyak 124,05 ton dibawah target tahun 2022 (124,18 ton);
2. Jumlah kecamatan dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan sebanyak 7 kecamatan dibawah target (11 kecamatan).

❖ **Tujuan 15 : Ekosistem Daratan**

Tujuan 15 SDGs adalah melindungi merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Ekosistem daratan dalam kerangka SDGs menitik beratkan pada pengelolaan hutan dengan upaya untuk merestorasi dan memulihkan fungsi hutan menjadi lebih lestari. SKPK pengampu dalam hal ini ada di Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan, namun hingga tahun 2022 belum tersedia data.

❖ **Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

Tujuan 16 SDGs adalah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua bidang. Perwujudan dari misi tersebut tentunya juga harus dibarengidengan pelayanan publik yang baik dari pemerintah yang artinya bahwa pemerintah harus bersih dan berwibawaa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan. Capaian indikator tujuan ini adalah :

1. Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan konfrehensif/ cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan sebanyak 45 kasus (perempuan dan 37 kasus (anak);
2. Persentase peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten /Kota) dengan capaian kinerja WTP.

❖ **Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai TujuanTujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Tujuan 17 SDGs adalah menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, yang mencakup tentang pembiayaan pembangunan pemerintah, baik melalui alokasi pendapatan daerah sektor pajak maupun kerjasama dengan lembaga non pemerintah. Capaian indikator ini adalah ;

1. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/ Kontribusi pajak terhadap PAD (proxy) sebesar 1,51 persen;
2. Proporsi individu yang menggunakan internet/ proporsi rumah tangga dengan akses internet (proxy) sebesar 53,33 persen.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan kondisi Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diuraikan, maka masih terdapat persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan. Permasalahan pembangunan daerah tersebut tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Tiap aspek di dalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis.

Respon yang efektif terhadap dinamika perubahan terutama untuk menghadapi tantangan potensial dan menangkap peluang sangat penting agar cita-cita dan harapan bersama untuk mewujudkan masa depan lebih baik bagi Kabupaten Bireuen kedepannya. Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Sedangkan Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Bireuen merupakan kawasan rawan bencana alam yang meliputi kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor, kawasan rawan gempa dan kawasan banjir, namun sistem mitigasi bencana Kabupaten Bireuen masih lemah.

Kabupaten Bireuen memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,84 persen di tahun 2022 dan penyebaran penduduk masih bertumpu pada kecamatan yang dekat dengan ibu kota Kabupaten, sehingga menyulitkan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang memadai.

Masyarakat Kabupaten Bireuen memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

- 1) Pertumbuhan ekonomi Bireuen di tahun 2018 sebesar 4,23 persen meningkat menjadi 4,31 persen pada tahun 2022, meskipun meningkat, laju pertumbuhan ekonomi Bireuen pada tahun 2022 masih dibawah capaian tahun 2019 (5 persen)
- 2) Inflasi di Kabupaten Bireuen merujuk pada Kota Lhokseumawe sebesar 5,37 pada tahun 2022, meningkat dibandingkan tahun 2018 (2,05) dengan rata-rata pertumbuhan 0,83 persen per tahun
- 3) Rata-rata pertumbuhan indeks gini Kabupaten Bireuen selama lima tahun terakhir (2018 s.d 2022) sebesar minus 2,49, Kedepan diharapkan agar ketimpangan pendapatan semakin rendah.
- 4) Persentase penduduk miskin Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 12,51 persen, lebih baik dari Aceh yang mencapai angka 14,64. Namun masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional (9,54 persen).
- 5) Pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan Bireuen mencapai angka 2,08, `lebih baik dari capaian indeks kedalaman kemiskinan Aceh (2,49) namun masih belum mencapai angka indeks kedalaman kemiskinan nasional (1,59).

- 6) Capaian P2 Kabupaten Bireuen sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Capaian P2 Provinsi Aceh yang berada di angka 0,61 persen namun lebih tinggi dibandingkan P2 nasional sebesar 0,39 persen
- 7) Persentase penduduk miskin ekstrem tahun 2022 di Kabupaten Bireuen mencapai 2,47 persen, meningkat dibandingkan tahun 2021 (1,72 persen), Target kemiskinan ekstrem tahun 2024 sebesar 0 persen.
- 8) Estimasi jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebesar 11,89 ribu jiwa meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 8,2 ribu jiwa
- 9) Rata-rata pertumbuhan TPT Bireuen dari tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,17 persen masih lebih tinggi dibandingkan Aceh (-0,05) dan nasional (0,14)

b. Kesejahteraan Sosial

- 1) Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan, namun rata-rata pertumbuhan masih rendah sebesar 0,38 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah Aceh (0,95 persen) dan nasional (1,56 persen)
- 2) Walaupun menunjukkan angka positif, namun pertumbuhan angka harapan sekolah masih lebih rendah dibandingkan Aceh yang tumbuh sebesar 0,175 persen per tahun dan nasional yang tumbuh 0,366 persen per tahun
- 3) Angka harapan hidup di Kabupaten Bireuen sebesar 71,48, lebih rendah dari nasional sebesar 71,85
- 4) IPM Bireuen tahun 2022 sebesar 73,16 lebih baik dari IPM aceh (72,8) dan IPM nasional (72,91), namun diharapkan terus meningkat pada tahun 2024

c. Seni, Budaya dan Olahraga

- 1) Jumlah sanggar yang dibina meningkat dari 15 sanggar pada tahun 2018 menjadi 40 sanggar pada tahun 2022, namun masih terdapat 10 sanggar dibawah naungan DKA yang belum dibina.
- 2) Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Bireuen juga masih sangat rendah, pada tahun 2022 hanya terdapat satu kali even seni dan budaya, turun dibandingkan tahun 2018 (4 kali).
- 3) Rasio sarana olahraga dibandingkan jumlah penduduk menurun dari 1:740 menjadi 1:690.
- 4) Cagar budaya yang dilestarika sejumlah 65 situs lebih rendah dari tahun sebelumnya sebanyak 75 situs

2.3.1.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Layanan Urusan Wajib

- 1) Pendidikan
 - Kondisi APS jenjang pendidikan 7-12 tahun pada tahun 2022 sebesar 99,25 lebih rendah dari APS Aceh sebesar 99,25 dan lebih tinggi dari APS nasional sebesar 99,10

- APS untuk jenjang pendidikan 13-15 tahun sebesar 96,71 lebih rendah dari APS Aceh di tahun yang sama 97,96 dan lebih tinggi dari APS nasional 95,92
 - APM SD/MI Kabupaten Bireuen Tahun 2022 sebesar 98,63 lebih rendah dari APM Aceh yang bernilai 99,07
 - Rata-rata pertumbuhan APK tingkat SD/MI Kabupaten Bireuen tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren negatif sebesar 2,420 persen per tahun
 - Jumlah guru lulus sertifikasi sebanyak 262 orang, lebih rendah dari tahun 2018 (275 orang) dengan rata-rata pertumbuhan turun 0,61 persen
- 2) Kesehatan
- Angka kematian ibu per 100.000 KH pada tahun 2022 sebanyak 135 orang, angka ini turun dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 152 orang per 100.000 KH. Namun jika dibandingkan tahun 2021 terjadi peningkatan dari jumlah 129 orang
 - Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bireuen dari tahun 2018 sampai tahun 2022 bersifat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 3,59 persen per tahun
 - Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 8,19 persen per tahun
 - Tahun 2022, prevalensi stunting turun menjadi 23,4 persen, belum mencapai target nasional yang menargetkan prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen pada tahun 2024.
 - Rasio dokter umum pada tahun 2022 adalah 1: 10.826 jiwa, belum mencapai tahap ideal satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk
- 3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Bireuen meningkat dari 29 kawasan pada tahun 2013 mencapai 38 kawasan pada tahun 2022 dengan seluas 588,9 hektar. Luas kawasan kumuh Kabupaten Bireuen menduduki peringkat kedua terluas di Aceh, dibawah Aceh Barat Daya (832,51 hektar);
 - Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni, jumlah rumah tidak layak huni Kabupaten Bireuen berdasarkan data BDT tahun 2017 sebanyak 10.361 unit dan telah dibangun sebanyak 2.102 unit hingga tahun 2022.
- 4) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Jalan kondisi mantap pada tahun 2022 mencapai 58,37 persen, masih rendah dibandingkan kondisi jalan mantap Aceh yang mencapai 84,41 Persen
 - Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 menjadi 88,06 persen, belum mencapai target SDGs ke 6 yaitu : mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 serta target SPM Tahun 2022 sebesar 100 persen.

- Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Bireuen mencapai 87,19 persen pada tahun 2022. Angka ini belum mencapai target SDGs ke 6 yaitu : mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 serta target SPM tahun 2022 sebesar 100 persen.
- Saluran drainase di perkotaan pada tahun 2022 sepanjang 28,24 persen (18.564 meter) dalam kondisi rusak.
- Persentase tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi 2,51 persen dibawah target RPK tahun 2024 sebesar 5,55 Persen.
- Kesesuaian usulan dan rekomendasi untuk pembangunan yang dikeluarkan semakin meningkat. Pada tahun 2019 hanya sebesar 37,5 persen kemudian meningkat pada tahun 2022 mencapai 97,14 persen, diharapkan kesesuaian usulan dan rekomendasi tetap 100 persen
- Masih belum selesainya revisi Qanun RTRW Kab. Bireuen 2012-2032 dan penyusunan RDTR.

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Rasio satpol PP sebanyak 3,9 per 10.000 penduduk berkurang menjadi 3,13 orang personil per 10.000 penduduk. Jumlah personil wilayah hisbah sebanyak 89 orang (rasio 1,9 per 10.000 penduduk) menjadi 53 orang (rasio 1,19 per 10.000 penduduk)
- Tingkat partisipasi pemilu pada tahun 2017 mencapai 73,25 persen. Angka ini lebih rendah dari tingkat partisipasi pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2012 yang mencapai 80 persen.

6) Sosial

- Capaian Penyandang rehabilitasi sosial yang ditangani tahun 2022 hanya 233 orang dari 7.198 orang penyandang rehabilitasi sosial di Kabupaten Bireuen

b. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

- Penempatan tenaga kerja oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja meningkat pada tahun 2022 menempatkan 106 tenaga kerja, namun masih terdapat tenaga kerja belum ditempatkan 4.502 orang
- Persentase perusahaan yang difasilitasi mencapai 9,6 persen dari target 2024 sebesar 12 persen

2) Pangan

- Jumlah desa rentan pangan tahun 2022 terdapat sejumlah 32 desa rentan pangan dengan rincian empat desa sangat rentan pangan dan 28 desa rentan pangan
- Persentase KWT aktif turun dari 46,55 persen pada tahun 2018 menjadi 17,19 persen pada tahun 2022.
- Pada tahun 2022 skor PPH sebesar 79,4 meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 72,8. Angka ini masih lebih rendah dari skor PPH nasional sebesar 92,9

- Cadangan pangan tahun 2022 sebesar 335,65 ton, turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan rata-rata pertumbuhan minus 0,607 persen per tahun
- 3) Pertanian
- Tanah terlantar yang belum didistribusi sebanyak 692 hektar (63,16 persen).
 - Masih terdapat sekitar 975 bidang tanah milik pemkab yang belum bersertifikat.
- 4) Kepemudaan dan Olahraga
- Jumlah pemuda berprestasi pada tahun 2022 masih sangat rendah, hanya 0,28 persen lebih rendah dibandingkan Aceh sebesar 1,96 persen;
 - Indeks pembangunan olahraga Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 masih dalam kategori rendah dengan nilai 0,621.
 - Jumlah organisasi pemuda yang dibina sebanyak 4 organisasi dari 26 organisasi yang ada
- 5) Lingkungan Hidup
- Volume sampah yang paling banyak dihasilkan terjadi pada tahun 2018 sebanyak 234 m³ meningkat menjadi 394,8 m³ pada tahun 2022
 - Jumlah mobil pengangkut sampah yang dimiliki oleh Kabupaten Bireuen hingga tahun 2022 sebanyak 23 unit belum mampu memberikan dampak yang efektif terhadap permasalahan persampahan secara menyeluruh di Kabupaten Bireuen.
 - Rasio RTH yang tertangani hanya 2,71 persen dari target 40 persen
 - Jumlah MHA yang dibina masih belum meningkat, sebanyak 4 unit
 - Jumlah Kampung Iklim sebanyak 2 kampung, masih belum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
 - Nilai IKLH Kabupaten Bireuen tahun 2022 masuk dalam kategori sedang, turun dibandingkan tahun sebelumnya dengan kategori baik.
 - Nilai IKA turun dari 70,00 (2018) menjadi 60,00 (2022),
 - Kabupaten Bireuen termasuk daerah dengan tingkat kapasitas penanganan bencana rendah dengan trend Indeks Resiko Bencana (IRB) sebesar tahun 2022 mencapai nilai 165,83 dibawah Aceh yang memiliki kapasitas IRB tinggi dengan nilai 149,99.
 - jumlah kejadian bencana terus meningkat, kasus kebakaran mengalami peningkatan dari 101 kejadian bencana menjadi 116 kejadian kebakaran pada tahun 2022, dengan rata-rata setiap tahun meningkat 54,75 persen. Bencana banjir dan longsor juga meningkat dengan rata-rata 66,59 persen per tahun, bencana angin kencang meningkat dengan rata-rata 87,08 persen per tahun
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Cakupan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen baru mencapai 91 persen dari target 2024 sebesar 100 persen
 - Database dan profil kependudukan tersedia pada tahun 2022 dan diharapkan tetap tersedia pada tahun 2024

- Cakupan pelayanan dokumen kependudukan diharapkan 100 persen pada tahun 2024
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
- IDM Kabupaten Bireuen tahun 2022 termasuk dalam kategori berkembang dengan nilai IDM 0,6237. Nilai IDM ini masih lebih rendah dibandingkan nilai IDM Aceh (0,6483)
 - Persentase Jumlah Kelompok Binaan PKK mencapai 100 persen, diharapkan akan tetap pada tahun selanjutnya
 - Persentase desa yang memiliki administrasi pemerintahan yang baik mencapai 85 persen pada tahun 2022 dan diharapkan mencapai 87 persen pada tahun 2024
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Persentase akseptor KB meningkat, namun jumlah peserta KB aktif turun dari 70.981 akseptor pada tahun 2018 menjadi 27.961 akseptor pada tahun 2022
- 9) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- IPG Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 95,01 lebih tinggi dibandingkan IPG Aceh (92,24) dan nasional (91,63), namun diharapkan terus meningkat pada tahun berikutnya
 - IDG Kabupaten Bireuen sebesar 58,16 meningkat dari capaian tahun 2018 (53,07), lebih rendah dari capaian Aceh dan nasional
 - jumlah pekerja perempuan di lembaga Pemerintahan Kabupaten Bireuen, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 5.488 orang turun menjadi 5.054 orang pada tahun 2022
 - Masih terdapat kasus KDRT sebesar 0,03 persen dari jumlah KK
 - Status kabupaten layak anak Kabupaten Bireuen masih termasuk klasifikasi peringkat pratama dengan skor 560.
 - Persentase desa yang memiliki kelompok tribina mencapai 75,86 persen dari 609 desa
 - Persentase desa yang dibina BKMT masih sebanyak 2,79 persen
- 10) Perhubungan
- Indeks kelancaran lalu lintas Kabupaten Bireuen mencapai angka 0,49 pada tahun 2022, angka ini turun dari capaian tahun 2021 dengan indeks 0,59.
- 11) Komunikasi dan Informatika
- Indeks SPBE Kabupaten Bireuen mendapatkan predikat cukup dengan nilai 2,1
- 12) Persandian
- Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah tahun 2022 sebanyak 2 SKPK dari 52 SKPK
- 13) Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Kecil Menengah
- Jumlah koperasi aktif turun menjadi 191 koperasi pada tahun 2022 dibandingkan jumlah koperasi aktif pada tahun 2018 (206 koperasi)
 - Jumlah koperasi yang dinilai sedikit turun dari 25 unit pada tahun 2018 menjadi 24 unit pada tahun 2022

- UMKM yang diberdayakan pada tahun 2022 mencapai 105 unit dari 18.688 unit UMKM
- Tidak ada UMKM Naik Kelas pada tahun 2022

14) Penanaman Modal

- Realisasi investasi tahun 2019-2022 terus meningkat, pada tahun 2022 realisasi investasi mencapai 559 milyar rupiah. Kedepannya diharapkan investasi di Kabupaten Bireuen terus meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.

15) Kepemudaan dan Olahraga

- Jumlah organisasi pemuda yang dibina sebanyak 4 organisasi dari 26 organisasi yang ada
- Rasio sarana olahraga dibandingkan jumlah penduduk menurun dari 1:740 menjadi 1:690.
- Pada tahun 2022 mendapat 113 medali dari 26 cabang olahraga pada PORA Provinsi meningkat dari capaian tahun 2018 yang hanya mendapat 29 medali, namun posisi kab Bireuen masih pada posisi 6
- Indeks Pembangunan Olahraga mencapai 0,261, masuk kategori rendah, diharapkan mencapai 0,5 pada tahun 2026

16) Kebudayaan

- Jumlah grup kesenian masih sama dengan capaian tahun 2021 sebanyak 152 grup

17) Perpustakaan

- Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebanyak 3.470 orang, turun dibandingkan jumlah pengunjung pada tahun 2018 (7.067 orang) dengan rata-rata penurunan 11,72 persen per tahun

18) Kearsipan

- Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku turun dari capaian 8 perangkat daerah d tahun 2018 menjadi 6 perangkat daerah pada tahun 2022.

1. Layanan Urusan Pilihan

1) Pariwisata

- Masih minimnya sarana dan prasarana pariwisata, destinasi wisata yang memiliki fasilitas yang memadai dan kondisi baik sebesar 9,5 persen dari 63 destinasi wisata.

2) Pertanian

- Produksi padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Bireuen mengalami penurunan sebesar 12,2 persen per tahun
- Tanaman pinang mengalami penurunan produksi dari 9,3 ribu ton pada tahun 2018 menjadi 5,86 ribu ton pada tahun 2022
- produktivitas tanaman perkebunan umumnya mengalami penurunan. Penurunan tertinggi pada tanaman pinang yang mencapai angka 9,6 persen per tahun
- Jumlah kasus penyakit hewan meningkat tajam pada tahun 2022 mencapai 27.824 dan yang tertangani sebanyak 21.024 kasus

- Perkembangan populasi ternak besar terutama sapi mengalami penurunan disebabkan wabah PMK dengan rata-rata penurunan per tahun mencapai 0,018 persen
 - Jumlah produksi daging pada tahun 2022 mencapai 2,04 ribu ton dengan rata-rata pertumbuhan turun mencapai 0,084 persen per tahun, produksi ayam potong mencapai 1,71 ribu ton dengan rata-rata pertumbuhan turun mencapai 0,159 persen per tahun
 - Cakupan pembinaan kelompok tani yang dibina tahun 2022 sebanyak 100 persen kelompok tani di Kabupaten Bireuen yang dibina, namun pertumbuhan jumlah kelompok tani turun 1,91 persen per tahun.
- 3) Kelautan Perikanan
- Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 sebesar 13,59 ribu ton, diharapkan pada tahun 2024 mencapai 14,5 ribu ton
 - Jumlah perahu pada tahun 2018 sebanyak 2.351 unit menurun hingga 1.554 unit pada tahun 2022 dengan penurunan rata-rata 8,86 persen per tahun
- 4) Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
- pada tahun 2022, jumlah pasar tidak aktif sebanyak 3 unit dan belum beroperasi 2 unit
 - Jumlah potensi UTTP turun dari 433 unit menjadi 222 unit.
 - Jumlah unit usaha IKM formal mengalami penurunan dari 403 unit pada tahun 2018 menjadi 290 unit pada tahun 2022
 - Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2022 mencapai 1,53 persen lebih rendah dari capaian tahun 2018 (1,68 persen)
 - Persentase Jumlah KSP/USP Pola Syariah 3,17 persen diharapkan tahun 2024 mencapai 52,83 Persen.
 - Perusahaan memiliki perizinan dan pendaftaran mencapai 2.297 persen, namun diharapkan tahun 2024 tetap meningkat sebesar 5,26 persen.
 - Jumlah produk unggulan yang dipromosikan sebanyak 2 produk (22,22 persen) dari 9 produk unggulan di Kabupaten Bireuen
- 5) Transmigrasi
- Belum semua satuan permukiman transmigrasi aktif, dari 7 SP sebanyak 3 SP (42,85 persen) dalam kondisi aktif.
 - Persentase KK Mandiri mencapai 42,38 persen, dibawah target tahun 2024 sebesar 47,76 Persen.
 - Persentase tahapan pencadangan tanah kawasan transmigrasi masih nihil

2. Penunjang Urusan

1) Keuangan

- Persentase PAD terhadap pendapatan menunjukkan angka yang menurun. Capaian pada tahun 2022 mencapai 8,81 persen lebih rendah dari capaian tahun 2018 (11,25 persen)

- Persentase realisasi kinerja keuangan daerah mencapai 95,70 persen masih dibawah target 2024 sebesar 96 Persen.
 - Persentase peningkatan manajemen aset daerah sebesar 95,72 persen belum mencapai target 100 Persen pada tahun 2024.
- 2) Perencanaan
- Tahun 2024 diharapkan tersedia rancangan awal RPJM dan Rancangan RPJPD, Perkada RKPD dan Perkada RKPD Perubahan
 - Persentase konsistensi program antara RPJM dengan APBK mencapai 80,16 persen dan diharapkan mencapai 100 persen
- 3) Sekretariat Daerah
- Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi masih kategori CC pada tahun 2022 dan baru diterapkan di 16 SKPK dari 52 SKPK di Kabupaten Bireuen dan diharapkan dapat mencapai katagori B sesuai dengan target pada RPJPD;
 - Tingkat Akuntabilitas Kinerja masih kategori CC pada tahun 2022 diharapkan dapat mencapai kategori BB sesuai dengan target pada RPJPD.
- 4) Pengawasan
- Masih rendahnya level maturitas SPIP (level 2) masih di bawah target nasional level SPIP tahun 2019 (level3).

3. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Persentase peningkatan pemahaman terhadap penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan sebesar 78,78 persen dibawah target tahun 2022 sebesar 92 persen
- Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan sebesar 92 persen masih dibawah target 2024 sebesar 95 persen
- Persentase Ancamaan/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani mencapai 75 Persen dibawah target tahun 2024 sebesar 82 Persen

c. Fokus Layanan Keistimewaan dan Kekhususan

1) Syariat Islam

- Kasus pelanggaran syariat islam cenderung turun dari tahun 2018 sebanyak 298 kasus menjadi 238 kasus pada tahun 2022. Namun rata-rata pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 60,02 persen per tahun

2) Pendidikan Dayah

- Jumlah dayah naik kelas 45 dayah pada tahun 2022, lebih rendah dari capaian pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah 117 dayah.

3) Peningkatan Peran Ulama

- Jumlah sidang yang menghasilkan keputusan pada tahun 2022 sebanyak 6 dari 10 kali sidang lebih rendah dari capaian tahun 2021 sebanyak 8 sidang

4) Pendidikan Aceh

- Pembinaan penerapan pendidikan berkarakter islami hingga tahun 2022 mencapai 265 sekolah, namun masih terdapat 46,47 persen sekolah/madrasah yang belum dilaksanakan pemberdayaan pendidikan berkarakter islami

5) Baitul Mal

- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) untuk peningkatan kesejahteraan. penerimaan zakat turun menjadi 4,97 milyar rupiah pada tahun 2022, lebih rendah dari penerimaan zakat tahun 2018 (6,94 milyar rupiah)

6) Pelestarian Adat Aceh

- Jumlah urusan pemerintah yang menggunakan kearifan lokal sebanyak 7 urusan dibawah target tahun 2024 (18 adat)

2.3.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

a Indeks Daya Saing Daerah

Kabupaten Bireuen memperoleh skor IDSD tahun 2022 sebesar 2,90 lebih rendah dari pencapaian IDSD Aceh sebesar 3,15

b Investasi

- 1) Realisasi investasi tahun 2019-2022 terus meningkat, pada tahun 2022 realisasi investasi mencapai 559 milyar rupiah. Kedepannya diharapkan investasi di Kabupaten Bireuen terus meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.
- 2) Pengurusan perizinan masih membutuhkan waktu yang lama. Dari keseluruhan izin yang dikeluarkan, izin mendirikan bangunan, izin reklame, izin usaha sarang burung walet, izin lokasi, izin penimbunan BBM dan izin pengelolaan air merupakan jenis perizinan yang membutuhkan waktu paling lama yaitu 13 (empat belas) sampai 14 (lima belas) hari kerja.

c. Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan tahun 2022 sebesar 49,23 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kabupaten Bireuen yakni “Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen”. Masalah utama tersebut dirumuskan menjadi 11 (sebelas) isu strategis pembangunan Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

A. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Terjaminnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan setiap warga merupakan tanggung jawab pemerintah. Penyelenggaraan upaya kesehatan baik secara promotif, preventif, dan kuratif demi mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berhak di terima setiap warga masyarakat di Kabupaten Bireuen.

Kabupaten Bireuen tahun 2022 memiliki 20 unit Puskesmas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya di wilayah Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2022 hanya satu layanan dari 12 layanan SPM bidang kesehatan yang mencapai 100 persen dan terdapat beberapa layanan SPM yang capaiannya masih jauh dibawah target..

Percepatan penurunan stunting masih menjadi isu prioritas bidang kesehatan di Kabupaten Bireuen. Dimana percepatan penurunan stunting merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi untuk dapat memenuhi target pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024. Selanjutnya target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030, permasalahan di bidang kesehatan terkait dengan kesehatan ibu dan anak, ini ditunjukkan dengan masih cukup tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dan terus berfluktuatif selama beberapa dekade terakhir.

B. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bireun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun hingga tahun 2021 mencapai angka 13,25 persen, namun pada tahun 2022 turun menjadi 12,51 persen. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin baru di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan data BPS tahun 2022 tercatat 62 ribu jumlah penduduk miskin yang disebabkan dari jumlah penduduk yang masuk kategori rentan miskin semakin meningkat. Penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan masuk ke dalam kategori rentan dan sewaktu-waktu dapat kembali jatuh miskin saat terjadi guncangan, selain itu jumlah penduduk yang tidak miskin dan masuk ke dalam kategori rentan semakin meningkat dikarenakan beberapa faktor seperti ekonomi dan sosial.

Percepatan penanganan kemiskinan harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi semua pihak. Pada dasarnya upaya penanggulangan angka kemiskinan dapat difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat. Diharapkan pemerintah daerah dapat memastikan intervensi di berbagai sektor terus dilaksanakan terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan air bersih serta ekonomi produktif masyarakat dengan mempertajam basis data untuk ketepatan target dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat.

C. Peningkatan ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang menjadi permasalahan penting bagi Kabupaten Bireuen. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan.

Disamping itu meningkatnya angka kemiskinan kehidupan sebagai akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat dihadapkan dengan semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan dirasakan sebagai tekanan ekonomi yang berat. Ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan diri karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, mengakibatkan tersingkirnya mereka dari sektor-sektor ketenagakerjaan formal maupun informal ke kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diterima secara sosial. Tindak kriminal yang semakin meningkat seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan meningkat. Begitu juga dengan kasus ketentraman dan ketertiban umum lainnya, seperti kasus pelanggaran syariat islam.

Untuk menangani permasalahan diatas, perlu dipersiapkan secara bersama kesiagaan dan kemampuan berbagai pihak terutama Satpol PP dan WH, karena dari berbagai permasalahan ketentraman dan ketertiban umum umumnya adalah pelanggaran perda dan qanun syariat islam, kondisi tahun 2022 jumlah personel Satpol PP dan WH berkurang (139 orang) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan deteksi dini konflik juga diharapkan dapat mengurangi kasus konflik yang mungkin terjadi.

Pemerintah Kabupaten Bireuen harus mulai menjalankan penyusunan tahapan-tahapan bagi terselenggaranya Pemilu 2024. Pemilu 2024 menjadi hal yang bersifat mendasar agar persoalan yang timbul dari kompleksitas penyelenggaraannya di lapangan dapat dikendalikan dan diatasi. Antisipasi terhadap konsekuensi dari setiap persoalan di lapangan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pemilu 2024 yang dapat dianggap sebagai momentum bagi transisi generasi kepemimpinan nasional. Pentingnya posisi strategis pelaksanaan Pemilu 2024 harus menyadarkan semua pihak terkait dukungan agar pemetaan persoalan di setiap tahapan bukan hanya berfokus pada prosedur teknis, tetapi juga mampu menjangkau semua unsur.

D. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Pendidikan memegang salah satu kunci penting untuk meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa serta menguasai pengetahuan dan teknologi. Pendidikan yang baik dan layak akan memacu minat peserta didik melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yang berdampak semakin tinggi pula kualitas SDM dan tingkat keterampilan dari hasil pendidikan tersebut dan memperbesar peluang kesempatan kerja. Mengacu pada indikator yang telah disajikan pada bab sebelumnya, bahwa harapan lama sekolah sudah sangat baik namun rata-rata lama sekolah masih berada di angka 9,31 tahun masih rendah dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh sebesar 9,44 tahun. Angka ini menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk Kabupaten Bireuen usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) sebesar 9,31 tahun yang artinya jenjang pendidikan yang pernah/ sedang diduduki oleh penduduk Kabupaten Bireuen usia 15 tahun ke atas hanya tamat SMP.

Selain itu fokus bidang Pendidikan adalah uji kompetensi guru masih rendah pbenahan mutu pendidikan berupa akreditasi sekolah disegala jenjang pendidikan, peningkatan mutu tenaga administrasi sekolah. Belum meratanya penyebaran tenaga pengajar/pendidik (**guru**) mata pelajaran atau **bidang studi** pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bireuen menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

Dalam hal kepemimpinan di setiap sekolah juga menjadi perhatian utama, dimana harus diterapkannya kompetisi dan kompetensi kepala sekolah agar kualitas sekolah semakin meningkat. Di samping itu diperlukan sekolah inklusi untuk anak yang berkebutuhan khusus, sekolah berasrama, sekolah kejuruan perlu mendapat perhatian lebih.

E. Pemulihan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dalam lima tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan kinerja yang meningkat, namun gejolak perekonomian global mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi Aceh termasuk juga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen di tahun 2020. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Sinergi dalam pemulihan ekonomi daerah harus mampu diupayakan melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi daerah secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bireuen. Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik, hal ini di karenakan pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan

efektivitas pemulihan ekonominya. Pemerintah Kabupaten Bireuen harus memahami struktur ekonomi yang ada, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBK dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Bireuen.

Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Bireuen. Sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan, bahkan ada kecenderungan luasan lahan pertanian mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Bireuen, jika dikelola dengan baik akan dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian di Kabupaten Bireuen menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Mulai dari turunnya kualitas kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, perubahan iklim yang tidak menentu, hingga sulitnya memenuhi kebutuhan pupuk saat musim tanam. Selain itu, para petani belum mampu mengolah hasilnya untuk mendapatkan nilai tambah. Sektor industri yang berkaitan dengan pertanian masih belum berkembang secara optimal sebagian besar, produk pertanian dijual dalam bentuk bahan mentah. Produk-produk pertanian belum dimanfaatkan secara lebih baik menjadi produk-produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi.

Sektor yang juga memberikan kontribusi besar setelah pertanian adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,58 persen pada tahun 2022. Dengan kontribusi yang cukup tinggi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga dapat menjadi sektor potensial memperkuat perekonomian Kabupaten Bireuen. Terlebih jika terdapat upaya yang sistematis dalam mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal.

Selain itu investasi merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan iklim investasi yang baik, pemenuhan adanya ketersediaan informasi tentang peta potensi investasi, pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah dan transparan. Selanjutnya mendorong iklim persaingan usaha yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha kecil, pemberian insentif, ketenteraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja yang terampil, dan pengembangan dan pembinaan industri kecil dan menengah.

Sektor lain yang perlu untuk dikembangkan adalah pariwisata. Hal ini dimungkinkan karena ada kecenderungan kontribusi pariwisata yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pengelolaan pariwisata secara benar dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkembangkan minat masyarakat Kabupaten Bireuen bidang pariwisata sangat penting dilakukan.

F. Perluasan Kesempatan Kerja

Rendahnya angka pengangguran sering dianggap menjadi suatu prestasi dalam suatu daerah demikian juga sebaliknya. Namun pada kenyataannya belum mencerminkan masalah ketenagakerjaan yang sebenarnya. Konsep pengangguran disini diartikan sebagai penduduk yang memasuki usia kerja (15–65 tahun) yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha, putus asa dan sudah punya pekerjaan tapi belum memulai bekerja. Secara umum upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang terjadi di Kabupaten Bireuen cukup berhasil, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja meskipun tidak semua mampu terserap. Karena dalam perjalanannya ada beberapa permasalahan yang menyebabkan masih belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2022 sebesar 4,2 persen, mulai turun setelah meningkat pada tahun-tahun sebelumnya sebesar 3,88 pada tahun 2019, 4,12 pada tahun 2020 dan 4,32 persen pada tahun 2021. Angka TPT ini menunjukkan kondisi yang belum membaik, dan perlu ada upaya dari pemerintah untuk peningkatan kompetensi keahlian lulusan melalui magang industri dan pelatihan/*training* pada lembaga asosiasi profesi yang sesuai dengan pasar kerja. Pemerintah dan pengusaha diharapkan dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja/usaha baru, peningkatan serta mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebelumnya kurang berfungsi, termasuk mengirimkan tenaga kerja untuk mendapatkan bimbingan teknis, mengundang investor untuk berinvestasi, mengusahakan keamanan yang kondusif dan melaksanakan kerja sama investasi baik dengan investor lokal maupun investor asing. Mengaktifkan dan mengoptimalkan sentra-sentra industri yang telah ada dan mempromosikan kawasan industri khusus.

G. Peningkatan kualitas Infrastruktur Strategis

Infrastruktur merupakan sebuah keniscayaan dalam pembangunan suatu daerah, karena dengan infrastruktur yang baik perekonomian akan semakin maju dan berkembang, hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur senantiasa berkorelasi positif dengan pembangunan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Di bidang pembangunan infrastruktur, permasalahan yang paling menonjol adalah kondisi jalan yang masih kurang bagus, terutama yang menghubungkan daerah-daerah sentra produksi dan kawasan pedalaman. Menurut Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, Kabupaten Bireuen akan dilintasi jaringan jalan bebas hambatan Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Lhokseumawe – Sigli, dengan exit tol yang berada di Kabupaten Bireuen.

Aksesibilitas yang mudah dapat mempengaruhi keadaan perekonomian yang ada. Terbangunnya infrastruktur jalan yang berkualitas akan membuka keterisolasian daerah dari ketertinggalan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, mendorong percepatan

perputaran barang dan jasa, dan sekaligus berdampak signifikan terhadap percepatan perekonomian. Selain itu, Kabupaten Bireuen yang memiliki lokasi berdekatan dengan pantai, berpotensi menjadi kawasan rawan bencana tsunami. Salah satu lokasi yang pernah terjadi bencana tsunami yaitu Gampong Kuala Raja. Dalam mengantisipasi bencana tsunami yang ada, diperlukan pembangunan jaringan jalan, dan jembatan di daerah Lancok untuk dijadikan jalur evakuasi, dimana jalur evakuasi tersebut harus mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen. Dalam sektor transportasi semakin berkurangnya jumlah angkutan umum, hal ini dikarenakan di Kabupaten Bireuen serta semakin mudahnya orang membeli kendaraan bermotor sehingga perlu peningkatan kinerja angkutan serta terobosan terhadap mode angkutan.

Selain itu ketaatan terhadap tata ruang perlu lebih diperhatikan, pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang akan menyebabkan menurunnya persentase ketaatan terhadap tata ruang. Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW.

Infrastruktur dasar menjadi isu prioritas Pemerintah Kabupaten Bireuen hal ini sebagai langkah pemerintah untuk melakukan pemerataan desa-desa tertinggal dan terpencil. Infrastruktur tersebut terbagi dua, yakni pelayanan dasar seperti air minum dan sanitasi serta konektivitas. Untuk cakupan penggunaan air minum dan sanitasi pada tahun 2022 masih belum memenuhi target SDGs. Cakupan sanitasi mencapai 88,06 Persen dan air minum sebesar 87,19 Persen.

Pemenuhan kebutuhan akan rumah di dalam kawasan permukiman menjadi isu yang terus mencuat saat ini. Pengembangan permukiman di perkotaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (*livible*), aman (*safe*), nyaman (*comfortable*), damai (*peaceful*) dan sejahtera (*prosperous*) serta berkelanjutan (*sustainable*).

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan.

Permasalahan yang terjadi di kawasan perkotaan sebagai akibat dari adanya urbanisasi salah satunya adalah munculnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh ialah suatu kawasan hunian yang mempunyai mutu yang sangat tidak layak untuk dihuni, yang disertai tanda-tanda diantaranya terletak pada lahan yang tidak selaras dengan peruntukan/tata ruang, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam lingkup luasan yang terbatas, rentan akan penyakit sosial dan lingkungan, serta rendahnya mutu bangunan yang dimiliki, tidak memadainya prasarana lingkungan yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.

H. Penataan Lingkungan hidup dan Kebencanaan

Saat ini masalah persampahan adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, dimana pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah perkotaan, tetapi umumnya peningkatan jumlah tersebut tidak diikuti oleh prasarana dan sarana persampahan yang memadai sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi sumber pencemaran. Sampah yang membusuk menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Air yang dikeluarkan (lindi) juga dapat menimbulkan pencemaran sumur, sungai maupun air tanah. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyumbat saluran drainase sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir. Pengumpulan sampah dalam jumlah besar memerlukan tempat yang luas, tertutup dan jauh dari pemukiman.

Penanganan pengelolaan sampah di Kabupaten Bireuen yang dilakukan sekarang hanya sekedar memindahkan sampah dari area pusat kota ke luar kota dengan cara yang tidak memenuhi standar. Untuk kondisi pengelolaan sekarang, terminologi tempat pengolahan akhir belum sesuai digunakan, yang sesuai adalah tempat pembuangan akhir sampah.

Kabupaten Bireuen juga merupakan salah satu kawasan rawan bencana. Tingkat kapasitas Kabupaten Bireuen dalam penanggulangan bencana masih rendah. Selama 5 tahun terakhir tidak ada penurunan indeks resiko bencana dengan skor indeks 168. Potensi bencana yang dihadapi Kabupaten Bireuen adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor dan tsunami. Peningkatan peran pemerintah kabupaten diperlukan dengan berbagai upaya, diantaranya : perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Selain itu untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya dengan melihat kualitas lingkungan yaitu kualitas air, udara, dan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten Bireuen sudah termasuk dalam kategori baik akan tetapi masih lebih rendah dari provinsi Aceh.

I. Penguatan nilai-nilai Syariat Islam, adat dan budaya Islami

Dalam pelaksanaan syariat islam di Kabupaten Bireuen, jika dibandingkan dengan daerah lain di Aceh, maka Kabupaten Bireuen memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Dalam konsiderans UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menempatkan ulama

pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, dimana para ulama di Kabupaten Bireuen telah mendapatkan tempat istimewa dalam hal memberikan pandangan- pandangan, saran-saran, dan masukan-masukan untuk menetapkan suatu kebijakan pada kepemimpinan Bupati Bireuen saat ini.

Pada saat ini pelaksanaan pemerintahan juga telah dapat menerima dan bahkan mendorong kehadiran perempuan dalam ranah kegiatan publik dan disamping dalam penyesuaian pelaksanaan syariat islam sudah relatif sangat lentur dengan budaya lokal dan dapat menjadi tempat untuk pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah. Namun masih ditemukan permasalahan penguatan nilai-nilai Syariat Islam, sosial, adat dan budaya dimana kurangnya pemahaman terhadap Al-Qur'an yang akan membawa dampak kepada pola penalaran yang tidak memiliki semangat universalitas, fleksibilitas, kering akan nuansa sosiologis dan bahkan akan menyulitkan penerapan syariat islam dalam kehidupan manusia.

Kemudian timbul beberapa persoalan lain menyangkut bagaimana penerapannya dikarenakan belum adanya daerah-daerah di Aceh yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan syari'at Islam. Pemahaman dan implementasi syari'at yang kaku dalam realitas masyarakat, sosio-kultural yang berbeda dan lainnya.

Isu strategis lain dalam penerapan syariat islam terutama yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran di kalangan anak anak, orang dewasa dan lanjut usia serta peningkatan minat pemuda dalam pemahaman syariat islam. Untuk hal tersebut perlu pembinaan dan peran pemuda dalam pelaksanaan syariat islam terutama dengan peningkatan pemberdayaan karang taruna yang ada dan adanya sosialisasi dan pembinaan pemuda tentang bahaya aliran sesat. Juga menjadi perhatian yang berkaitan dengan regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan instrument hukum/pembinaan tentang penguatan syariat Islam (narkoba, hari besar Islam, waktu shalat, waktu adzan, pakaian, olahraga, pertunjukan kesenian dan rekreasi), untuk itu perlu penyusunan regulasi dalam penguatan syariat Islam.

J. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan

berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

K. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan

Pembangunan bidang pemuda dan olahraga berkontribusi menyiapkan kualitas sumber daya manusia untuk meraih keunggulan dalam persaingan pasar, termasuk perkembangan inovasi daerah dan juga peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja terutama pemuda yang memiliki minat untuk berwirausaha. Pembinaan kepemudaan agar terhindar dari kasus NAPZA juga menjadi hal penting di bidang kepemudaan.

Selain itu Aceh akan menjadi tuan rumah PON tahun 2024 dan Kabupaten Bireuen dapat berpartisipasi aktif dalam even tersebut, sehingga memerlukan persiapan untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan kesejahteraan atlet agar atlet Aceh terutama Kabupaten Bireuen memiliki daya saing tinggi dan siap menghadapi PON 2024.

Keterkaitan, prioritas, isu strategis dan permasalahan pembangunan Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.143

Tabel 2.143

Keterkaitan Prioritas, Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
1	Peningkatan Nilai-nilai Syariat Islam dan Keistimewaan Aceh	Penguatan Nilai-Nilai Syariat Islam, Adat dan Budaya Islami	Indeks Penerapan Syariat hanya mencapai 0,74 dari target 0,95	Kasus pelanggaran syariat islam cenderung turun dari tahun 2018 sebanyak 298 kasus menjadi 238 kasus pada tahun 2022. Namun rata-rata pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 60,02 persen per tahun
			Jumlah kasus konflik antar dan intra umat 1 kali, tidak mencapai target tahun 2022 sebanyak 0 kali	
			Persentase sidang yang menghasilkan keputusan hanya mencapai 60 Persen dibawah target tahun 2022 sebesar 90 Persen	Jumlah sidang yang menghasilkan keputusan pada tahun 2022 sebanyak 6 dari 10 kali sidang lebih rendah dari capaian tahun 2021 sebanyak 8 sidang
			Persentase dayah terakreditasi 44,3 dari target 95 persen	Jumlah dayah naik kelas 45 dayah pada tahun 2022, lebih rendah dari capaian pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah 117 dayah
			Jumlah Dayah naik kelas sebanyak 78 dayah dari target tahun 2022 sebanyak 135 dayah	Jumlah sanggar yang dibina meningkat dari 15 sanggar pada tahun 2018 menjadi 40 sanggar pada tahun 2022, namun masih terdapat 10 sanggar dibawah naungan DKA yang belum dibina
			Peningkatan jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan diinventarisir hanya 17,46 persen dibawah target tahun 2022 sebanyak 60 persen	Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Bireuen juga masih sangat rendah, pada tahun 2022 hanya terdapat satu kali even seni dan budaya, turun dibandingkan tahun 2018 (4 kali).
			Persentase Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya yang tertangani hanya 12,5 persen dari target tahun 2022 sebanyak 80 persen	Jumlah grup kesenian masih sama dengan capaian tahun 2021 sebanyak 152 grup

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
				Jumlah Urusan Pemerintah yang Menggunakan Kearifan Lokal sebanyak 5 urusan dibawah target tahun 2024 (8 urusan)
2	Percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengendalian inflasi	Pemulihan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB tahun 2022 sebesar 4,31 dibawah target sebesar 4,35	Pertumbuhan ekonomi Bireuen di tahun 2018 sebesar 4,23 persen meningkat menjadi 4,31 persen pada tahun 2022, meskipun meningkat, laju pertumbuhan ekonomi Bireuen pada tahun 2022 masih dibawah capaian tahun 2019 (5 persen)
			Tingkat inflasi 5,37 lebih tinggi dari target tahun 2022 sebesar 2,7 persen	Inflasi di Kabupaten Bireuen merujuk pada Kota Lhokseumawe sebesar 5,37 pada tahun 2022, meningkat dibandingkan tahun 2018 (2,05) dengan rata-rata pertumbuhan 0,83 persen per tahun
				IDM Kabupaten Bireuen tahun 2022 termasuk dalam kategori berkembang dengan nilai IDM 0,6237. Nilai IDM ini masih lebih rendah dibandingkan nilai IDM Aceh (0,6483)
				Persentase Jumlah Kelompok Binaan PKK mencapai 100 persen, diharapkan akan tetap pada tahun selanjutnya
			Persentase Koperasi yang aktif hanya mencapai 73,46 Persen dibawah target tahun 2022 sebesar 78,51 Persen	Jumlah koperasi aktif turun menjadi 191 koperasi pada tahun 2022 dibandingkan jumlah koperasi aktif pada tahun 2018 (206 koperasi)
				Jumlah koperasi yang dinilai sedikit turun dari 25 unit pada tahun 2018 menjadi 24 unit pada tahun 2022
			Jumlah UMKM dan Koperasi yang diberdayakan hanya 105 unit dari target tahun 2022 sebanyak 260 UMKM	UMKM yang diberdayakan pada tahun 2022 mencapai 105 unit dari 18.688 unit UMKM
Jumlah UMKM yang naik Kelas nihil dibawah target tahun 2022 sebanyak 3 UMKM	Tidak ada UMKM Naik Kelas pada tahun 2022			

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
				Realisasi investasi tahun 2019-2022 terus meningkat, pada tahun 2022 realisasi investasi mencapai 559 milyar rupiah. Kedepannya diharapkan investasi di Kabupaten Bireuen terus meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (kelapa, Karet dan Kakao) hanya mencapai 0,22 Persen dibawah target tahun 2022 5 Persen	Produksi padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Bireuen mengalami penurunan sebesar 12,2 persen per tahun
			Jumlah PDRB Sektor Pertanian hanya mencapai 3,1 Triliun rupiah dibawah target tahun 2022 4,8 Triliun rupiah	Tanaman pinang mengalami penurunan produksi dari 9,3 ribu ton pada tahun 2018 menjadi 5,86 ribu ton pada tahun 2022
				Produktivitas tanaman perkebunan umumnya mengalami penurunan. Penurunan tertinggi pada tanaman pinang yang mencapai angka 9,6 persen per tahun
				Jumlah kasus penyakit hewan meningkat tajam pada tahun 2022 mencapai 27.824 dan yang tertangani sebanyak 21.024 kasus
			Persentase Peningkatan Populasi ternak hanya mencapai 0,018 Persen dibawah target tahun 2022 3 Persen	Perkembangan populasi ternak besar terutama sapi mengalami penurunan disebabkan wabah PMK dengan rata-rata penurunan per tahun mencapai 0,018 persen
			Persentase Peningkatan PAD Sektor Peternakan hanya turun 17,09 Persen dibawah target tahun 2022 2 Persen	Jumlah produksi daging pada tahun 2022 mencapai 2,04 ribu ton dengan rata-rata pertumbuhan turun mencapai 0,084 persen per tahun, produksi ayam potong mencapai 1,71 ribu ton dengan rata-rata pertumbuhan turun mencapai 0,159 persen per tahun

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
				Cakupan pembinaan kelompok tani yang dibina tahun 2022 sebanyak 100 persen kelompok tani di Kabupaten Bireuen yang dibina, namun pertumbuhan jumlah kelompok tani turun 1,91 persen per tahun.
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya hanya mencapai 13.599,92 Ton dibawah target tahun 2022 13.800 Ton	Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 sebesar 13,59 ribu ton, diharapkan pada tahun 2024 mencapai 14,5 ribu ton
			Jumlah Produksi Ikan Olahan hanya mencapai 1.400 Ton dibawah target tahun 2022 (1.500 Ton)	Jumlah perahu pada tahun 2018 sebanyak 2.351 unit menurun hingga 1.554 unit pada tahun 2022 dengan penurunan rata-rata 8,86 persen per tahun
				Pada tahun 2022, jumlah pasar tidak aktif sebanyak 3 unit dan belum beroperasi 2 unit
			Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen di Kecamatan hanya mencapai 74 Persen dibawah target tahun 2022 sebanyak 100 Persen	Namun jumlah potensi UTTP turun dari 433 unit menjadi 222 unit. Jumlah unit usaha IKM formal mengalami penurunan dari 403 unit pada tahun 2018 menjadi 290 unit pada tahun 2022
			Nilai PDRB sektor industri pengolahan 235,35 milyar rupiah lebih rendah dar target 248,89 milyar rupiah	Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2022 mencapai 1,53 persen lebih rendah dari capaian tahun 2018 (1,68 persen) Persentase PAD terhadap pendapatan menunjukkan angka yang menurun. Capaian pada tahun 2022 mencapai 8,81 persen lebih rendah dari capaian tahun 2018 (11,25 persen)
			Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pelatihan hanya mencapai 19,23 Persen dibawah target tahun 2022 sebesar 21 Persen	Persentase Jumlah KSP/USP Pola Syariah 3,17 persen diharapkan tahun 2024 mencapai 52,83 Persen

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
				Perusahaan Memiliki Perizinan dan Pendaftaran mencapai 2.297 persen, namun diharapkan tahun 2024 tetap meningkat sebesar 5,26 persen
				Jumlah produk unggulan yang dipromosikan sebanyak 2 produk (22,22 persen) dari 9 produk unggulan di Kabupaten Bireuen
			Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan hanya mencapai 33,3 Persen dibawah target tahun 2022 45 Persen	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Pemerintahan yang Baik mencapai 85 persen pada tahun 2022 dan diharapkan mencapai 87 persen pada tahun 2024
				Meskipun telah dilaksanakan pada tahun 2022, pada tahun 2024 diharapkan tetap terlaksana fasilitasi permasalahan gampong dan pendataan gampong
				Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik sebanyak 25,02 Persen dibawah target 2024 sebesar 27,76 persen
			Jumlah destinasi wisata pada tahun 2022 sebanyak 63 unit dibawah target 65 unit	Cagar budaya yang dilestarikan sejumlah 65 situs lebih rendah dari tahun sebelumnya sebanyak 75 situs
			Cakupan Peningkatan Promosi Wisata hanya mencapai 66,67 Persen dibawah target tahun 2022 sebesar 90 Persen	
		Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,2 persen, dibawah target tahun 2022 (3,95 persen)	Rata-rata pertumbuhan TPT Bireuen dari tahun 2018 hingga 2022 sebesar 0,17 persen masih lebih tinggi dibandingkan Aceh (-0,05) dan nasional (0,14)
			Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan hanya 72 orang dibawah target tahun 2022 sebanyak 150 orang	Penempatan tenaga kerja oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja meningkat pada tahun 2022 menempatkan 106 tenaga kerja, namun masih terdapat tenaga kerja belum ditempatkan 4.502 orang
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2022 hanya 64,9 persen dibawah target sebesar 67,1 persen	Persentase Perusahaan yang Difasilitasi mencapai 9,6 persen dari target 2024 sebesar 12 persen

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
			Jumlah karyawan dan pelaku usaha yang mengikuti Bimtek Penyelesaian Hubungan Industrial dan Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) hanya 30 orang dibawah target tahun 2022 (70 orang)	
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan daya saing daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan	<p>APM pendidikan dasar 9 tahun sebesar 95,1 persen dibawah target 2022 sebesar 99,41 persen</p>	<p>IPM Bireuen tahun 2022 sebesar 73,16 lebih baik dari IPM aceh (72,8) dan IPM nasional (72,91), namun diharapkan terus meningkat pada tahun 2024</p> <p>Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan, namun rata-rata pertumbuhan masih rendah sebesar 0,38 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah Aceh (0,95 persen) dan nasional (1,56 persen)</p> <p>Walaupun menunjukkan angka positif, namun pertumbuhan angka harapan sekolah ini masih lebih rendah dibandingkan Aceh yang tumbuh sebesar 0,175 persen per tahun dan nasional yang tumbuh 0,366 persen per tahun</p> <p>Kondisi APS jenjang pendidikan 7-12 tahun pada tahun 2022 sebesar 99,25 lebih rendah dari APS Aceh sebesar 99,25 dan lebih tinggi dari APS nasional sebesar 99,10</p> <p>APS untuk jenjang pendidikan 13-15 tahun sebesar 96,71 lebih rendah dari APS Aceh di tahun yang sama 97,96 dan lebih tinggi dari APS nasional 95,92</p> <p>APM SD/MI Kabupaten Bireuen Tahun 2022 sebesar 95,1 persen lebih rendah dari APM Aceh yang bernilai 99,07 persen</p> <p>Rata-rata pertumbuhan APK tingkat SD/MI Kabupaten Bireuen tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tren negatif sebesar 2,420 persen per tahun</p>

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
			Persentase Jumlah Guru yang Berkompetensi sebanyak 54,82 persen dibawah target tahun 2022 (86 persen)	Jumlah guru lulus sertifikasi sebanyak 262 orang, lebih rendah dari tahun 2018 (275 orang) dengan rata-rata pertumbuhan turun 0,61 persen
				Pembinaan penerapan pendidikan berkarakter islami hingga tahun 2022 mencapai 265 sekolah, namun masih terdapat 46,47 persen sekolah/madrasah yang belum dilaksanakan pemberdayaan pendidikan berkarakter islami
			Jumlah Pengunjung Perpustakaan hanya mencapai 3.470 Orang dibawah target tahun 2022 7.280 Orang	Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebanyak 3.470 orang, turun dibandingkan jumlah pengunjung pada tahun 2018 (7.067 orang) dengan rata-rata penurunan 11,72 persen per tahun
		Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Jumlah PKM yang memiliki SDM dengan Kompetensi dan Kualifikasi Sesuai Standar hanya 18 puskesmas dari target 2022 sebanyak 20 puskesmas	Angka harapan hidup di Kabupaten Bireuen sebesar 71,48, lebih rendah dari nasional sebesar 71,85
				Angka kematian ibu per 100.000 KH pada tahun 2022 sebanyak 135 orang, angka ini turun dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 152 orang per 100.000 KH. Namun jika dibandingkan tahun 2021 terjadi peningkatan dari jumlah 129 orang
				Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bireuen dari tahun 2018 sampai tahun 2022 bersifat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 3,59 persen per tahun
				Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 8,19 persen per tahun
				Tahun 2022, prevalensi stunting turun menjadi 23,4 persen, belum mencapai target nasional yang menargetkan prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen pada tahun 2024.

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
				Rasio dokter umum pada tahun 2022 adalah 1: 10.826 jiwa, belum mencapai tahap ideal satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan		Rasio sarana olahraga dibandingkan jumlah penduduk menurun dari 1:740 menjadi 1:690.
				Pada tahun 2022 mendapat 113 medali dari 26 cabang olahraga pada PORA Provinsi meningkat dari capaian tahun 2018 yang hanya mendapat 29 medali, namun posisi kab Bireuen masih pada posisi 6
				Indeks pembangunan olahraga Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 masih dalam kategori rendah dengan nilai 0,621
				Kabupaten Bireuen memperoleh skor IDSD tahun 2022 sebesar 2,90 lebih rendah dari capaian IDSD Aceh sebesar 3,15
				IPG Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 95,01 lebih tinggi dibandingkan IPG Aceh (92,24) dan nasional (91,63), namun diharapkan terus meningkat pada tahun berikutnya
				IDG Kabupaten Bireuen sebesar 58,16 meningkat dari capaian tahun 2018 (53,07), lebih rendah dari capaian Aceh dan nasional
			Persentase Organisasi Wanita yang aktif hanya mencapai 69,23 Persen dibawah target tahun 2022 sebanyak 80 Persen	Jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bireuen, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 5.488 orang turun menjadi 5.054 orang pada tahun 2022
				Masih terdapat Kasus KDRT sebesar 0,03 persen dari jumlah KK
				Status Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bireuen masih termasuk klasifikasi peringkat pratama dengan skor 560
			Persentase Peningkatan Aseptor KB Aktif hanya mencapai 48,1 Persen dibawah target tahun 2022 sebesar 55 Persen	Persentase akseptor KB meningkat, namun jumlah peserta KB aktif turun dari 70.981 akseptor pada tahun 2018 menjadi 27.961 akseptor pada tahun 2022

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
				Sistem Informasi Keluarga Penyuluhan, advokasi keluarga telah tersedia pada tahun 2022, dan ditargetkan tetap berjalan pada tahun 2024
			Persentase desa yang memiliki Administrasi Pemerintah dan Sistem Pengelolaan Keuangan yang baik hanya mencapai 85,4 Persen dibawah target tahun 2022 (87 Persen)	Persentase Desa yang Memiliki Kelompok Tribina mencapai 75,86 persen dari 609 desa
				Persentase Desa yang Dibina BKMT sebanyak 31 persen dibawah target tahun 2024 sebesar 35 persen
				Jumlah organisasi pemuda yang dibina sebanyak 4 organisasi dari 26 organisasi yang ada
4	Memperkuat infrastruktur strategis dan Penanganan Pasca Bencana	Peningkatan kualitas Infrastruktur Strategis	Persentase Jalan dalam kondisi baik hanya 54,39 dibawah target 2022 sebesar 63 persen	Jalan kondisi mantap pada tahun 2022 mencapai 58,37 persen, masih rendah dibandingkan kondisi jalan mantap Aceh yang mencapai 84,41 Persen
				Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 menjadi 88,06 persen, belum mencapai target SDGs ke 6 yaitu : mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi” yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.
				Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Bireuen mencapai 87,19 persen pada tahun 2022. Angka ini belum mencapai target SDGs ke 6 yaitu : mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi” yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030
			Persentase Kawasan Perkotaan Dan Lingkungan yang tertangani Banjir hanya 42 persen dari target 70 persen pada tahun 2022	Saluran drainase di perkotaan pada tahun 2022 sepanjang 28,24 persen (18.564 meter) dalam kondisi rusak

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
				Tanah terlantar yang belum didistribusi sebanyak 692 hektar (63,16 persen).
			Persentase Tanah yang Bersertifikat hanya mencapai 17 Persen dibawah target tahun 2022 (66 Persen)	Masih terdapat sekitar 975 bidang tanah milik Pemkab yang belum bersertifikat
			Persentase Pelayanan Lalu Lintas hanya mencapai 49,38 Persen dibawah target tahun 2022 70 Persen	Indeks kelancaran lalu lintas Kabupaten Bireuen mencapai angka 0,49 pada tahun 2022, angka ini turun dari capaian tahun 2021 dengan indeks 0,59
			Persentase Gedung Pemerintah yang terbangun sebanyak 31,66 lebih rendah dari target tahun 2022 sebanyak 45 persen	Persentase Bangunan yang Terbangun mencapai 31,66 Persen dibawah target RPK tahun 2024 sebesar 33,33 Persen
			Persentase Gedung Pemerintah dan Lingkungannya yang Terpelihara hanya 15 persen dibawah target tahun 2022 sebesar 80 persen	Persentase Gedung dan Lingkungannya yang Terpelihara 15 Persen dibawah target RPK tahun 2024 18 Persen
			Indeks infrastruktur mencapai 69,04 persen dibawah target tahun 2022 sebesar 70 persen	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi 2,51 persen dibawah target RPK tahun 2024 5,55 Persen
				Jumlah Rumah Korban Bencana yang Ditangani 2 Unit dibawah target RPK tahun 2024 sebesar 24 Unit
			Persentase kawasan pemukiman kumuh hanya 11,82 dibawah target tahun 2022 sebesar 50 persen	Masih terdapat kawasan Kumuh seluas 8,63 persen
			Persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan 66,67 persen dibawah target 75 persen	Kesesuaian usulan dan rekomendasi untuk pembangunan yang dikeluarkan semakin meningkat. Pada tahun 2019 hanya sebesar 37,5 persen kemudian meningkat pada tahun 2022 mencapai 100 persen, diharapkan kesesuaian usulan dan rekomendasi tetap 100 persen

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
				<p>Persentase Kasus Konflik dan Sengketa yang Ditangani 100 persen dan diharapkan pada tahun 2024 semua kasus dapat ditangani</p> <p>Pada tahun 2022 sudah tersedia sistem informasi pertanahan dan diharapkan dapat berfungsi secara optimal</p> <p>Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni, jumlah rumah tidak layak huni Kabupaten Bireuen berdasarkan data BDT tahun 2017 sebanyak 10.361 unit dan telah dibangun sebanyak 2.102 unit hingga tahun 2022</p>
		Penataan Lingkungan hidup dan kebencanaan		<p>Volume sampah yang paling banyak dihasilkan terjadi pada tahun 2018 sebanyak 234 m3 meningkat menjadi 394,8 m3 pada tahun 2024</p> <p>Jumlah mobil pengangkut sampah yang dimiliki oleh Kabupaten Bireuen hingga tahun 2022 sebanyak 23 unit belum mampu memberikan dampak yang efektif terhadap permasalahan persampahan secara menyeluruh di Kabupaten Bireuen</p>
			Rasio RTH yang Tertangani hanya mencapai 2,71 Persen dibawah target tahun 2022 (40 Persen)	Rasio RTH yang Tertangani hanya 2,71 persen dari target 40 persen
				Jumlah MHA yang dibina masih belum meningkat, sebanyak 4 unit
			Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup hanya mencapai 30 Orang dibawah target tahun 2022 (60 Orang)	Jumlah Kampung Iklim sebanyak 2 kampung, masih belum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
			Indeks kualitas lingkungan hidup (Air, udara, dan tanah) mencapai 69,84 dibawah target tahun 2022 sebesar 81 persen	Nilai IKLH Kabupaten Bireuen tahun 2022 masuk dalam kategori sedang, turun dibandingkan tahun sebelumnya dengan kategori baik

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
			Persentase timbunan sampah yang tertangani hanya mencapai 36 Persen dibawah target tahun 2022 (90 Persen)	<p>Nilai IKA turun dari 70,00 (2018) menjadi 60,00 (2022), Kabupaten Bireuen termasuk daerah dengan tingkat kapasitas penanganan bencana rendah dengan trend Indeks Resiko Bencana (IRB) sebesar tahun 2021 mencapai nilai 168 dibawah indeks resiko bencana Aceh yang memiliki kapasitas IRB tinggi dengan nilai 149,99.</p> <p>Jumlah kejadian bencana terus meningkat, kasus kebakaran mengalami peningkatan dari 101 kejadian bencana menjadi 116 kejadian kebakaran pada tahun 2022, dengan rata-rata setiap tahun meningkat 54,75 persen. Bencana banjir dan longsor juga meningkat dengan rata-rata 66,59 persen per tahun, bencana angin kencang meningkat dengan rata-rata 87,08 persen per tahun</p>
5	Percepatan Penurunan kemiskinan	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 12,51 persen, tidak mencapai target 12,06 persen	<p>Rata-rata pertumbuhan indeks gini Kabupaten Bireuen selama lima tahun terakhir (2018 s.d 2022) sebesar minus 2,49, Kedepan diharapkan agar ketimpangan pendapatan semakin rendah.</p> <p>Persentase penduduk miskin Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 12,51 persen, lebih baik dari Aceh yang mencapai angka 14,64. Namun masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional (9,54 persen)</p> <p>Pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan Bireuen mencapai angka 2,08, lebih baik dari capaian indeks kedalaman kemiskinan Aceh (2,49) namun masih belum mencapai angka indeks kedalaman kemiskinan nasional (1,59).</p> <p>Capaian P2 Kabupaten Bireuen sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Capaian P2 Provinsi Aceh yang berada di angka 0,61 persen namun lebih tinggi dibandingkan P2 nasional sebesar 0,39 persen</p> <p>Persentase penduduk miskin ekstrem tahun 2022 di Kabupaten Bireuen mencapai 2,47 persen, meningkat dibandingkan tahun 2021 (1,72 persen), Target kemiskinan ekstrem tahun 2024 sebesar 0 persen.</p>

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
			Persentase Terpenuhinya kebutuhan anak terlantar dan tersedianya data fakir miskin hanya 65,07 dari target tahun 2022 sebanyak 85 persen	Estimasi jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebesar 11,89 ribu jiwa meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 8,2 ribu jiwa
			Persentase Penyediaan dan pemberian bagi penyandang rehabilitasi sosial hanya 76,64 dibawah target tahun 2022 sebesar 85 persen	Capaian Penyandang rehabilitasi sosial yang ditangani hanya 233 orang dari 7.198 orang penyandang rehabilitasi sosial di Kabupaten Bireuen
				Jumlah desa rentan pangan tahun 2022 terdapat sejumlah 32 desa rentan pangan dengan rincian empat desa sangat rentan pangan dan 28 desa rentan pangan
				Persentase KWT aktif turun dari 46,55 persen pada tahun 2018 menjadi 17,19 persen pada tahun 2022.
			Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) hanya mencapai 79,4 Skor dibawah target tahun 2022 84,6 Skor	Pada tahun 2022 skor PPH sebesar 79,4 meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 72,8. Angka ini masih lebih rendah dari skor PPH nasional sebesar 92,9
				Cadangan pangan tahun 2022 sebesar 335,65 ton, turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan rata-rata pertumbuhan minus 0,607 persen per tahun
			Persentase UPT mandiri hanya mencapai 28,57 persen dibawah target tahun 2022 sebanyak 50 persen	Belum semua Satuan Permukiman transmigrasi aktif, dari 7 SP sebanyak 3 SP (42,85 persen) dalam kondisi aktif
			Jumlah Mustahik hanya mencapai 6.276 Orang dibawah target tahun 2022 (30.975 Orang)	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) untuk peningkatan kesejahteraan
				Persentase Tahapan Pencadangan Tanah Kawasan Transmigrasi masih nihil

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
			Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi 14 persen dibawah target tahun 2022 sebanyak 50 persen	Persentase KK Mandiri mencapai 42,38 persen, dibawah target tahun 2024 sebesar 47,76 Persen
6	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak	Reformasi Birokrasi		Indeks SPBE Kabupaten Bireuen mendapatkan predikat cukup dengan nilai 2,1
				Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku turun dari capaian 8 perangkat daerah d tahun 2018 menjadi 6 perangkat daerah pada tahun 2022
				Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi masih kategori CC pada tahun 2022 dan baru diterapkan di 16 SKPK dari 52 SKPK di Kabupaten Bireuen dan diharapkan dapat mencapai katagori B sesuai dengan target pada RPJPD
			Tingkat akuntabilitas kinerja CC dibawah target tahun 2022 (B)	Tingkat Akuntabilitas Kinerja masih kategori CC pada tahun 2022 diharapkan dapat mencapai katagori BB sesuai dengan target pada RPJPD.
				Masih rendahnya level maturitas SPIP (level 2) masih di bawah target nasional level SPIP tahun 2019 (level3).
			Peringkat Nilai Keterbukaan Informasi Publik hanya mencapai 78 dibawah target tahun 2022 (97)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 sebesar 78, ditargetkan tahun 2024 sebesar 87
			Indeks SPBE hanya mencapai 2,1 dibawah target tahun 2022 (2,6)	Jumlah Aplikasi e-government yang digunakan SKPK sebanyak 75 aplikasi, masih dibawah target tahun 2024 sebanyak 80 aplikasi
	Data Statistik Sektoral tahun 2022 tersedia, dan diharapkan tahun 2024 tetap tersedia data statistik sektoral			
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI). hanya mencapai 1 dibawah target tahun 2022 (2)	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah tahun 2022 sebanyak 2 SKPK dari 52 SKPK		

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
				Tahun 2024 diharapkan tersedia rancangan awal RPJM dan Rancangan RPJPD, perda RKPD dan Perda RKPD Perubahan
			Persentase Konsistensi Program Antara RPJM dengan APBK hanya mencapai 80,16 Persen dibawah target tahun 2022 sebesar 100 Persen	Persentase Konsistensi Program Antara RPJM dengan APBK mencapai 80,16 persen dan diharapkan mencapai 100 persen Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah mencapai 95,70 persen masih dibawah target 2024 sebesar 96 Persen
			Persentase Realisasi PAD hanya mencapai 99,76 Persen dibawah target tahun 2022 sebesar 100 Persen	Persentase Peningkatan Manajemen Aset Daerah sebesar 95,72 persen belum mencapai target 100 Persen pada tahun 2024 Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran diharapkan terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD pada tahun 2024
			Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen hanya mencapai 91,2 Persen dibawah target tahun 2022 (98 Persen)	Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen baru mencapai 91 persen dari target 2024 sebesar 100 persen
			Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan hanya mencapai 94,44 Persen dibawah target tahun 2022 (98 Persen)	Database dan profil kependudukan tersedia pada tahun 2022 dan diharapkan tetap tersedia pada tahun 2024 Cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan diharapkan 100 persen pada tahun 2024 Belum semua Desa yang Menerapkan Perencanaan dan Pelaporan yang Berbasis Elektronik
			Persentase Peningkatan Kapasitas SDM yang dilatih hanya mencapai 61 Persen dibawah target tahun 2022 (85 Persen)	

No	Prioritas	Isu Strategis	Hasil Evaluasi RKPK Tahun 2022	Permasalahan
1	2	3	5	4
		Peningkatan ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Rasio satpol PP sebanyak 3,9 per 10.000 penduduk berkurang menjadi 3,13 orang personil per 10.000 penduduk. Jumlah personil wilayahul hisbah sebanyak 89 orang (rasio 1,9 per 10.000 penduduk) menjadi 53 orang (rasio 1,19 per 10.000 penduduk)
			Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih sebesar 77,9 persen dibawah target 2022 sebesar 80,05 persen	Tingkat partisipasi pemilu pada tahun 2017 mencapai 73,25 persen. Angka ini lebih rendah dari tingkat partisipasi pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun 2012 yang mencapai 80 persen
			Persentase peningkatan pemahaman terhadap penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan hanya mencapai 79 Persen dibawah target tahun 2022 sebesar 93 Persen	Persentase Peningkatan Pemahaman Terhadap Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar 78,78 persen dibawah target tahun 2022 sebesar 92 persen
			Persentase Peserta Partai politik yang memahami mekanisme pengelolaan partai hanya mencapai 41,23 Persen dibawah target tahun 2022 sebesar 92 Persen	Persentase Ormas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan sebesar 92 persen masih dibawah target 2024 sebesar 95 persen
			Persentase deteksi dini konflik yang tertangani hanya mencapai 87,5 Persen dibawah target tahun 2022 sebesar 75 Persen	Persentase Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani mencapai 75 Persen dibawah target tahun 2024 sebesar 82 Persen
			Persentase tingkat ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah hanya mencapai 40 Persen dibawah target tahun 2022 sebesar 65 Persen	